

NU PENJAGA NKRI



Kata Pengantar
Mgr. Ignatius Suharyo (Ketua KWI)

Kata Penutup
K.H. Said Aqil Siroj (Ketua Umum PBNU)



Editor
Iip D. Yahya

NU PENJAGA NKRI

Kata Pengantar
Mgr. Ignatius Suharyo (Ketua KWI)

Kata Penutup
K.H. Said Aqil Siroj (Ketua Umum PBNU)

Editor
Iip D. Yahya



PENERBIT PT KANISIUS

NU PENJAGA NKRI

Oleh:
K. Ng. H. Agus Sunyoto, M. Jadul Maula, Zuly Qodir, Franz Magnis-Suseno,
KH. Husein Muhammad, KH. Luqman Harits Dimyathi, KH. Abdul Gofh arrozin, Susi Ivvaty,
M. Nova Burhanuddin, Ahmad Khoirul Umam, Ali Amin, Zacky Khairul-Umam,
Trisno S. Sutanto, Neng Dara A ffi ah, Alissa Wahid, M. Imam Azis, Amin Mudzzakir,
H. Yaqut Cholil Qoumas, Hairus Salim H.S., Aloys Budi Purnomo,
Benny Susetyo, Mohamad Syafiq Alielha

1018004034

PENERBIT PT KANISIUS
Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia)
Jl. Cempaka 9, Deresan, Caturtunggal, Depok, Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, INDONESIA
Telepon (0274) 588783, 565996; Fax (0274) 563349
E-mail: office@kanisiusmedia.co.id
Website: www.kanisiusmedia.co.id

Editor: Iip D. Yahya, Ganjar Sudibyo
Desain sampul: Hermanus Yudi
Tata letak: Amelia
Foto sampul: Ahmad Amin Yusuf

Edisi elektronik diproduksi oleh Divisi Digital Kanisius tahun 2018.

EISBN 978-979-21-5524-2

ISBN 978-979-21-5523-5

Berjalan Bersama Warga Nahdliyin



"Saya tidak peduli, mau popularitas saya hancur, difitnah, dicaci-maki atau dituduh apa pun, tapi bangsa dan negara ini harus diselamatkan dari perpecahan."
GUS DUR

www.newspkbjombang.com

Meme Gus Dur ini sungguh mendalam. Kami berterima kasih kepada pembuatnya. Inspiratif. Kata-kata Gus Dur sangat patriotik, sungguh keluar dari seseorang yang mencintai Negara Kesatuan ini. Roh, semangat, spiritualitas Nahdlatul Ulama, yang menjadikan sikap Bela Negara sebagai sebentuk jihad, mengakar kuat dalam sanubari seluruh warga Nahdliyin. Dalam segala kegaduhan yang terjadi, Nahdlatul Ulama bersinergi dengan berbagai pihak berupaya untuk meredamnya. Saat ragam kepentingan dalam konteks politik begitu gaduh, gagasan menerbitkan buku *Nahdlatul Ulama Penjaga NKRI* ini muncul. Kelompok-isme bertumbuh semakin kuat sehingga menciptakan jurang yang mendalam antara aku-kamu, kelompokku-kelompokmu. Kesadaran KITA sebagai satu bangsa

kian tergerus. Hal ini mewujud dalam konflik-konflik horizontal dalam skalanya masing-masing. Isu SARA seolah menjadi api dalam sekam yang kapan saja mudah untuk disulut dan dikobar-liarkan. Jika isu itu terus diembuskan, digunakan untuk menciptakan konflik, dan menjadi banal, bukan tidak mungkin negara ini akan selesai. Indonesia sebagai negara didirikan atas kesepakatan untuk menyatukan beragam suku, agama/kepercayaan, ras sehingga kelompok-isme tidak pernah boleh menjadi fanatisme sempit destruktif yang disuburkan.

Semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* usulan Pak Yamin yang digali dari *Kekawin Purusadasanta* tulisan Mpu Tantular diterima dan disepakati. Penggalan dalam Kekawin yang ditulis sekitar tujuh abad lampau tersebut ada dalam konteks menyatukan perbedaan dari agama Buddha dan Hindu. Buddha dan Siwa tentulah berbeda, namun bisa dikenali karena kebenaran di antara keduanya adalah tunggal. Beragamlah, tetapi satu jualah mereka. Dalam konteks Indonesia, kebinekaan tidak melulu soal keragaman Buddha-Siwa pun ketunggalan kebenaran, namun mencakup banyak hal. Keragaman yang beraneka itu terajut dalam bentuk negara kesatuan. Keragaman pembentuk Indonesia ini menjadi sebuah rahmat sehingga segala usaha untuk mematikan keragaman adalah awal dari kemusnahan Indonesia.

Di satu sisi, keragaman adalah kekayaan, namun di sisi lain keragaman memuat potensi konflik yang besar. Keragaman di Indonesia menjadi keniscayaan yang perlu untuk selalu dirawat. Tidak diingkari bahwa konflik-konflik horizontal yang terjadi berawal dari keragaman yang menciut pada perbedaan dan termanifestasi dalam kelompok-isme. Ormas terbesar di Indonesia yang setia untuk merawat keragaman adalah Nahdlatul Ulama. Ormas Islam yang digagas mendiang K.H. Hasyim Asy'ari pada 31 Januari 1926 jauh sebelum NKRI lahir terus-menerus menempatkan diri sebagai penjaga keragaman yang kemudian dirajut dalam negara kesatuan. Paham *Ahlussunah Waljama'ah*, yang memazhab pada pola pikir jalan tengah antara ekstrem rasional dan kaum ekstrem skriptural

menjadi pilihan yang terus-menerus dihidupi. Kemampuan nalar dan telaah terhadap realitas empiris melengkapi Alquran dan Sunnah sebagai sumber hukum.

Dalam perjalanan sejarah, Nahdlatul Ulama selalu memberikan energi lebih untuk ikut ambil bagian dalam meredam beragam upaya yang berusaha merusak rajut kebinekaan. Maka, menyongsong satu abad Penerbit PT Kanisius dan satu abad Nahdlatul Ulama, buku *Nahdlatul Ulama Penjaga NKRI* diterbitkan. Gagasan-gagasan, cara pandang, persepsi, kisah, tidak melulu hanya ditulis oleh warga Nahdliyin saja. Pengalaman perjumpaan dengan warga Nahdliyin menjadi kesan tersendiri yang sungguh menguatkan dan memperdalam rasa akan keragaman yang disatukan. Semoga kehadiran buku ini sungguh mampu menginspirasi dan menguatkan rajutan kebinekaan yang satu. Kepada seluruh warga Nahdliyin, Mgr. I. Suharyo, Romo Franz Magnis-Suseno, Romo Aloys Budi Purnomo, Romo Benny Susetyo, Pak Trisno S. Susanto, Pak Zuly Qodir, dan semua pihak berkehendak baik yang bermurah hati turut menuangkan gagasan, kisah—bersama dan tentang—Nahdlatul Ulama, kami haturkan beribu terima kasih. Secara khusus kami juga menghaturkan terima kasih kepada Bapak Iip Dzulkipli Yahya yang berkenan menjadi penyusun dan teman diskusi untuk melahirkan buku ini. Semoga persabahatan indah ini menjadi benteng kuat dalam merajut kebinekaan *(amicitia praesedium firmissum).*

31 Januari 2018

(Buku ini dipersembahkan sebagai kado
Hari Lahir Nahdlatul Ulama ke-92)

Penerbit PT Kanisius

NU yang Mengalir Sampai Jauh

Ketika Penerbit PT Kanisius meminta saya membantu penerbitan buku NU Penjaga NKRI ini, tanpa pikir panjang saya menyatakan kesanggupan. Ada penerbit mau mengapresiasi kerja-kerja kebangsaan NU, tentu harus didukung. Setelah masuk dalam tahap perencanaan, barulah saya berpikir keras, apa yang akan jadi fokus dan siapa yang akan diajak menulis untuk buku ini. Tetapi, seperti ditegaskan Yaqut Cholil Qoumas, aktif dalam organisasi NU adalah untuk mengabdi kepada ulama, mencari berkah. Begitulah kira-kira awal mula saya menjadi penyusun buku ini.

Buku ini diniatkan untuk melihat kembali perjalanan NU secara lebih santai, melihat berbagai capaian intelektual para aktivisnya, dan menengok juga perkembangan NU secara global. Buku ini diharapkan menjadi bahan *refreshing* sejenak, menyengarkan kembali pemahaman pembaca tentang NU. Sudah cukup lama rasanya belum terbit lagi kompilasi tulisan tentang NU. Saat muncul pertanyaan dari saudara-saudara non-Muslim, "Mengapa NU begitu spartan mempertahankan NKRI?" belum tersedia bacaan yang dapat menjawabnya secara utuh.

Karena sifatnya sebagai penyegar, tentu saja pada banyak bagian terdapat penjelasan yang sudah umum tentang NU, ada sejumlah artikel yang ditulis sudah cukup lama tetapi belum sempat diterbitkan dalam sebuah buku. Dan untuk memberikan informasi aktual seperti penjelasan mengenai Banser yang merupakan

bagian dari Gerakan Pemuda Ansor, perkembangan media *online* NU, perkembangan pesantren NU setelah adanya gerakan Ayo Mondok, saya melakukan wawancara dengan tokoh terkait.

Pada dasarnya kumpulan tulisan dalam buku ini ingin menjelaskan bahwa sikap tegas NU dalam mempertahankan NKRI tidaklah muncul tiba-tiba, melainkan sudah sejak dari asal mula kelahirannya. Ajaran Islam yang kemudian melahirkan NU adalah ajaran yang mampu beradaptasi dengan lokalitas seperti dipaparkan Ki Agus Sunyoto, yaitu ajarannya para wali yang diimplementasikan dalam budaya setempat seperti wayang yang dijelaskan sangat mendalam oleh Pengasuh Pesantren Kaliopak Yogyakarta M Jadul Maula.

Konsep Islam Nusantara boleh jadi masih menjadi dilema sebagaimana dituturkan oleh Zuly Qodir, cendekiawan Muhammadiyah yang produktif. Tetapi ia telah melahirkan tradisi intelektual yang baik di tengah anak muda NU seperti dijelaskan Romo Magnis Suseno, tradisi intelektual yang dinamis tidak hanya di pinggiran, melainkan bergerak ke tengah dengan Gus Dur sebagai lokomotifnya seperti paparan Kiai Husein Muhammad. Tradisi ilmiah yang panjang dan terus menyesuaikan dengan perkembangan yang datang kemudian itulah yang menjadikan Islam di Indonesia bersifat moderat, berkat kehadiran NU.

Kekuatan NU untuk bertahan dalam percaturan sosial politik Indonesia pascaproklamasi 17-08-1945, itu ditunjang oleh masih bertahannya pesantren. Pesantren juga berubah dan berkembang sebagaimana dijelaskan oleh Koordinator Nasional Gerakan Ayo Mondok K.H. Luqman Hakim Harits Dimyathi, tetapi tetap sebagai pewaris dakwah walisanga. Dalam kerangka itulah Ning Susy Ivvaty, jurnalis alumni pesantren, memotret perkembangan pesantren dalam menyikapi modernitas. Dan pesantren juga dihadapkan pada tantangan perkembangan ekonomi global yang seperti dituturkan Ketua PP RMI K.H. Abdul Ghofarrozin, mengharuskan pesantren untuk dapat mandiri secara ekonomi.

Setelah menyuguhi pembaca dengan informasi dasar tentang NU dan pesantren, perkembangan yang tengah berlangsung, buku ini ingin membawa pembaca keliling lima benua. Menyambangi aktivitas NU di Mesir (Afrika), Jerman (Eropa), Jepang (Asia), dan Brisbane (Australia). M Nova Burhanuddin dari Mesir mengabarkan kegelisahan anak-anak muda NU dalam studinya di negeri para Firaun itu. Di satu sisi, mereka dapat menjejaki akar keilmuan Islam di Universitas Al-Azhar sekaligus berhadapan dengan pemikiran-ideologi Islam kanan yang juga muncul di Mesir dan pengaruhnya mengalir deras ke Indonesia.

Dari Jerman, Zacky Chairul Umam, cendekiawan yang menguasai sejumlah bahasa asing, mengajak para intelektual NU untuk tidak berhenti memahami pemikiran Barat, tetapi juga berdialog dan bahkan memengaruhi mereka. Kehadiran anak-anak muda NU yang rela menyisihkan waktu, tenaga dan biaya untuk mendirikan Pengurus Cabang Internasional NU di lima benua, harus dimanfaatkan secara maksimal sebagai—setidaknya—*public relation* NU di dunia internasional. Untuk kepentingan itulah Ali Amin menawarkan sejumlah langkah praktis agar NU semakin mendunia dengan berangkat dari Asia karena kedekatan budaya dan sejumlah alasan lain. Bagaimana dengan Benua Kanguru? Ahmad Khoirul Umam mewartakan di tengah bangsa Australia yang plural, berasal dari ratusan suku bangsa dan etnik di dunia, Islam model NU sangat mungkin untuk diterima oleh masyarakat Australia karena sifatnya yang moderat *(tawassuth)*, berimbang *(tawazun)*, netral *(taádul)*, dan toleran *(tasamuh)*. Kesimpulannya, ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamáh An-Nahdliyyah sudah saatnya melebarkan sayap ke dunia yang lebih luas, tidak lagi berkutat di seputar Nusantara, tetapi mengalir jauh hingga ke ujung-ujung dunia.

NU yang memiliki kepercayaan diri sedemikian itu tak lepas dari peran K.H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Cendekiawan Kristen Trisno S. Sutanto menjadi saksi bagaimana Gus Dur teguh pendirian dalam kampanye pribumisasi Islam dan mempertahankan

Pancasila sebagai ideologi negara. Gus Dur juga membuka ruang bagi anak muda untuk bersuara dan berkiprah, termasuk mendorong isu-isu tentang perempuan dibahas di tengah ulama NU dan pesantren. Pada bagian ini aktivis gerakan perempuan Neng Dara Affiah menuturkannya secara mengharukan.

Setelah Gus Dur wafat pada 2009, terbentuklah Gusdurian yang disambut hangat hingga di 85 kota (per 2017) di seluruh Indonesia. Alissa Wahid sebagai anak sulung didaulat menjadi pelindung sekaligus ujung tombak gerakan para pengagum Gus Dur ini. Dari Gusdurian inilah lahir jargon, Gus Dur sudah meneladankan, saatnya kita yang melanjutkan. Pemikiran Gus Dur yang terus dikampanyekan oleh para Gusdurian ini, menurut Ketua PBNU M Imam Aziz, bermuara pada upaya memanusiakan manusia. Tidak boleh ada yang lebih dari kepentingan kemanusiaan, termasuk politik.

Bagaimana NU mengimplementasikan sikapnya dalam menjaga NKRI agar tetap utuh? NU, menurut cendekiawan yang popular di media sosial, Amin Mudzakir tetap menjadi pelindung bagi minoritas di Indonesia dengan segala dinamikanya. Di lapangan, NU memiliki Banser sebagai bagian dari GP Ansor yang siap mengamankan perintah kiai mempertahankan NKRI. Seperti dituturkan Yaqut Cholil Qoumas, Banser hanya ingin mencari berkah ulama. Pendapat Yaqut itu diperkuat oleh riset Hairus Salim yang pernah menulis tesis tentang Banser. Salim juga mengabarkan perkembangan positif dari Banser ketika para pengawal ulama ini mulai memperluas cakupan pengabdiannya ke wilayah-wilayah yang terkena bencana alam, sebagai bagian dari relawan kemanusiaan.

Pengakuan NU sebagai penjaga NKRI itu semakin kokoh dengan paparan Romo Aloys Budi Purnomo. Perjumpaannya dengan Gus Mus dan Habib Lutfi semakin menumbuhkan kepercayaan Romo Budi bahwa sikap NU melindungi minoritas akan terus mengakar melihat ketulusan para tokoh panutannya. Dan Romo Benny

Susetyo mengaskan bahwa NU dengan semua sepak terjangnya sampai hari ini, memang terbukti sebagai penjaga NKRI yang sejati.

Ala kulli hal, semua tuturan tentang NU, pesantren, dan tokoh-tokohnya itu tidaklah bermakna tanpa media yang terus-menerus menginformasikannya kepada khalayak. NU Online *(nu.or.id)* yang digawangi Savic Alieha mencatatkan prestasi yang cukup signifikan jika NU Online disandingkan dengan web/portal organisasi massa keagamaan, baik Islam maupun non-Islam. Tetapi jika dibandingkan dengan web berhaluan Islam kanan, harus diakui NU Online masih kalah pada hasil riset di penghujung 2017. Savic sampai pada kesimpulan bahwa pada akhirnya pertarungan media adalah pada konten, dan ia mengingatkan menyangkut soal ini, NU dengan ribuan pesantren dan para ulamanya, sangat berpeluang besar memenangi pertarungan media ini sehingga NU sebagai Penjaga NKRI akan terus lestari dan berkahnya akan mengalir sampai jauh.

Iip D. Yahya

Editor

Kata Pengantar

Pada hari Minggu tanggal 3 September 2017 saya menerimakan Sakramen Penguatan di Gereja Santa Odilia, Paroki Citra Raya, Tangerang. Menurut agenda, Perayaan Ekaristi baru mulai pukul 8 pagi, tetapi Rama Felix Supranto, SS.CC, Pastor Paroki meminta saya untuk datang pukul 7 pagi, tanpa memberitahu alasannya. Saya terkesima, ketika saya tiba di paroki, sudah ada barisan anak-anak yang melambaikan bendera merah putih. Sementara di depan gereja sudah berkumpul anggota Wanita Katolik Republik Indonesia, Pemuda Katolik, Seksi Hubungan Antar Agama dan Kemasyarakatan, Orang Muda Katolik, sejumlah anggota GP Ansor dan Banser, siap untuk melaksanakan apel bendera.

Baru pertama kali ini saya mengalami sebelum Perayaan Ekaristi diajak untuk apel bendera. Bertindak sebagai komandan upacara adalah Bapak Anwari, Komandan Banser Kabupaten Tangerang. Sementara Pastor Paroki bertindak sebagai Inspektur Upacara. Sementara anak-anak sekolah mengiringi lagu-lagu kebangsaan dengan musik kolintang.

Selama Perayaan Ekaristi dilaksanakan, para anggota GP Ansor dan Banser tidak pulang, tetapi mengadakan dialog bersama dengan orang muda katolik di paroki itu dengan tema kebangsaan. Sesudah misa masih diadakan pertemuan yang sangat bernuansa merah – putih, artinya pertemuan diadakan untuk membangkitkan semangat cinta tanah air.

Di dalam pertemuan ini diperkenalkan dan kemudian dinyanyikan – dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia - lagu yang disebut Mars NU yang berjudul *Syubbanul Wathon,* yang berarti Cinta Tanah Air. Syairnya dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

Pusaka Hati Wahai Tanah Airku
Cintamu dalam Imanku
Jangan Halangkan Nasibmu
Bangkitlah Hai Bangsaku
Pusaka Hati Wahai Tanah airku
Cintamu dalam Imanku
Jangan Halangkan Nasibmu
Bangkitlah Hai Bangsaku
Indonesia Negriku
Engkau Panji Martabatku
Siapa Datang Mengancammu
Kan binasa di bawah dulimu.

Acara ini adalah bagian dari usaha seluruh paroki di Keuskupan Agung Jakarta untuk mengamalkan Pancasila, sebagaimana ditegaskan dalam Arah Dasar Keuskupan Agung Jakarta 2016 – 2020. Umat Paroki Citra Raya adalah salah satu yang paling gencar mencari jalan untuk mewujudkan cita-cita itu. Kisah-kisah sejenis ini bisa dibaca dalam buku yang ditulis oleh Rama Felix Supranto SS.CC dengan judul "Inspirasi Kebangsaan : KISAH MENENUN KEBHINEKAAN", Penerbit OBOR, Jakarta, 2017.

Pengalaman ini mengingatkan saya akan satu acara di salah satu televisi swasta yang disebut "Melawan Lupa". Salah satu sosok yang ditampilkan dalam acara itu adalah Bapak Uskup Albertus Soegijapranata, SJ. Ada dua adegan yang saya ingat ditunjukkan dalam acara itu. Yang *pertama* adalah ketika beliau menulis. Dijelaskan bahwa yang sedang beliau tulis adalah surat kepada Paus, meminta agar Vatikan secepatnya mengakui kemerdekaan Indonesia. Itulah sebabnya Vatikan adalah salah satu negara di antara negara-negara lain yang pertama mengakui kemerdekaan

Indonesia. Yang *kedua* adalah adegan beliau turun dari delman di depan gereja Bintaran, Yogyakarta. Ini adalah saat ketika beliau meninggalkan Semarang—yang merupakan tempat tinggalnya sebagai Vikaris Apostolik pada waktu itu—dan pindah ke Yogya agar dekat dengan pusat pemerintahan Indonesia yang pada tahun 1946 pindah dari Jakarta ke Yogyakarta.

Bagi saya pribadi, semangat yang ada di balik peristiwa-peristiwa yang ditampilkan dalam acara itu perlu diterima sebagai warisan, bahkan wasiat yang ditinggalkan oleh Bapak Uskup Soegijapranata kepada umat Katolik di Indonesia pada khususnya, yaitu untuk mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan segala usaha dan pengorbanan yang diperlukan; untuk melawan lupa dan merawat ingatan bersama serta memikul tanggung jawab sejarah.

Yang saya maksud dengan ingatan bersama adalah sejarah bangsa Indonesia, khususnya tonggak-tonggak terpenting yang mencapai puncaknya pada Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

Sejarah bangsa Indonesia, menurut keyakinan iman Katolik adalah medan karya penyelamatan Allah. Keyakinan ini terungkap dalam Doa Prefasi Tanah Air : "Berkat jasa begitu banyak tokoh pahlawan Engkau menumbuhkan kesadaran kami sebagai bangsa, ... kami bersyukur atas bahasa yang mempersatukan, ... dan atas Pancasila dasar kemerdekaan kami". Dalam Doa Prefasi Tanah Air ini ditegaskan tiga tonggak penting sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Kebangktian Nasional (1908), Sumpah Pemuda (1928) dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia (1945) sebagai buah perjuangan para pendahulu kita sekaligus karya Allah. Semangat yang ada di balik peristiwa-peristiwa itu perlu terus-menerus diingat, dirawat, dan dikobarkan.

Sementara itu yang saya maksud dengan memikul tanggung jawab sejarah antara lain adalah dengan mengamalkan Pancasila yang adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam

Pancasila terkandung berbagai macam gagasan atau nilai. Berbagai macam gagasan atau nilai itu harus diterjemahkan menjadi berbagai gerakan yang membarui kehidupan. Kalau gerakan-gerakan ini dilakukan secara terus-menerus dan konsisten, akan terbentuklah habitus baru, yaitu cara merasa, cara berpikir, cara bertindak dan berperilaku baru, baik dalam tataran pribadi maupun bersama, dalam keluarga, komunitas dan masyarakat yang lebih luas. Habitus baru inilah yang akan menjadi daya transformatif dalam kehihidupan. Kalau manusia semakin berbakti kepada Tuhan, berperilaku adil dan beradab, serta semakin bersaudara satu dengan yang lain, mengedepankan musyawarah dan mufakat, memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh bangsa, cita-cita kemerdekaan pelan-pelan akan menjadi kenyataan. Dalam bahasa iman, itu berarti Kerajaan Allah—artinya, kerajaan kebenaran, keadilan dan damai sejahtera— menjadi semakin nyata.

Semoga tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku ini membuka wawasan dan memberikan dorongan serta semangat yang tak pernah boleh luntur kepada kita semua untuk merawat ingatan bersama dan memikul tanggung jawab sejarah sebagai warga negara Indonesia.

† I. Suharyo

Uskup Keuskupan Agung Jakarta

Ketua Konferensi Waligereja Indonesia

Daftar Isi

Bagian 1
“NU: Sanad Keilmuan yang Terus Bersambung”

Eksistensi Islam Nusantara

Sekilas Mengungkap Paham Keberagamaan NU

K. Ng. H. Agus Sunyoto

Latar Belakang

Penyebaran Islam merupakan salah satu proses yang sangat penting dalam sejarah Indonesia, tapi juga yang paling tidak jelas (Ricklef, 2008). Padahal saudagar-saudagar Islam sudah masuk ke Nusantara sejak perempat akhir abad ke-8 Masehi, yakni saat Ratu Simha berkuasa di Kalingga—bertepatan dengan masa kekuasaan khalifah Mu'awiyah—sebagaimana diberitakan sumber-sumber Cina dari Dinasti Tang (Groeneveldt, 1960). Yang paling awal membawa seruan Islam ke Nusantara mestinya para saudagar Arab, yang sudah membangun jalur perhubungan dagang dengan Nusantara jauh sebelum zaman Islam (Wheatley, 1961). Namun selama ratusan tahun sebelum masa Walisanga pada perempat akhir abad ke-15 dan paruh pertama abad ke-16, tidak ada bukti bahwa Islam pernah dianut pribumi Nusantara secara massal.

S.Q.Fatimy (1963) mencatat bahwa pada abad ke-9 Masehi, terdapat migrasi suku-suku dari Persia ke Nusantara yaitu suku Lor, Yawana, dan Sabankara. Orang-orang Lor mendirikan pemukiman-pemukiman di Jawa yang disebut Loram atau Leran sedang orang-orang Yawana dan Sabankara tinggal di Sumatera di wilayah Sriwijaya. Terdapatnya Prasasti Loram di Desa Ngloram Kabupaten Blora dan makam Fatimah binti Maimun bin Hibatallah di Leran, Gresik, yang menunjuk kronogram abad ke-11 Masehi diperkirakan sebagai bukti kebenaran berita tersebut, di mana Aji Wurawari yang disebut dalam Prasasti Loram menunjuk kepada

Raja dari Bangsa berkulit merah bukan pribumi dan Fatimah binti Maimun bin Hibattallah yang adalah salah seorang Muslimah keturunan Lor (Kern, 1913; Moquette, 1921).

Akhir abad ke-13, Marcopolo yang kembali dari Cina lewat lautan ke Teluk Persia, mencatat bahwa di negeri Perlak saat itu sudah ada *Saracen Merchants* (pedagang-pedagang Muslim), yang mendakwahkan Islam kepada penduduk setempat. Penduduk setempat yang masuk Islam hanya sedikit saja di antara warga kota. Di pedalaman, penduduk masih hidup seperti hewan. Mereka kabarnya masih memakan daging manusia (Hambis, 1955).

Resistensi terhadap Islam yang terentang selama lebih dari delapan abad, sedikitnya terungkap dari catatan historiografi lokal. Dalam *Kitab Musarar Babon Saka ing Rum* yang dikutip dalam *Primbon Ramal Djajabaja* susunan R. Tanoyo (1956), diungkapkan bahwa dalam usaha mengisi Pulau Jawa yang masih dihuni jin, siluman, brekasakan, dan berjenis-jenis makhluk halus, Sultan Al-Gabah, penguasa negeri Rum mengirim 20.000 keluarga Muslim Rum ke Pulau Jawa di bawah pimpinan Patih Amirul Syamsu dan Jaka Sengkala. Mereka tinggal di Gunung Kendheng di pantai utara Jawa (Desa Ngloram terletak di Pegunungan Kendeng utara—pen.). Dikisahkan bahwa ke-20.000 keluarga Muslim itu diserang makhluk-makhluk halus, banyak yang mati dan tersisa hanya 200 keluarga. Mendengar laporan itu Sultan Al-Gabah marah dan mengutus ulama karomah dan orang-orang sakti ke Jawa untuk memasang "tumbal". Salah seorang di antara ulama sakti yang menumbali Tanah Jawa adalah Syekh Subakir. Dalam cerita tradisi dikisahkan setelah menumbali Tanah Jawa, Syekh Subakir kembali ke negeri Parsi.

Tahun 1405 Cheng Ho yang datang ke Jawa mencatat bahwa di Tuban, Gresik dan Surabaya terdapat masing-masing 1000 orang keluarga Cina Muslim. Dalam tujuh kali muhibahnya ke selatan, belum ada catatan yang menunjuk bahwa Islam secara luas dianut oleh penduduk pribumi. Ma Huan yang ikut muhibah Cheng

Ho ketujuh pada 1433, justru mencatat bahwa warga pribumi Jawa umumnya masih kafir, memuja roh dan hidup sangat kotor (Groeneveldt, 1960; Hirth, 1966). Tujuh tahun setelah kunjungan Cheng Ho yang terakhir—kira-kira tahun 1440 Masehi—Sunan Ampel dikisahkan datang dari negeri Campa ke Jawa. Sejarah mencatat, migrasi penduduk Muslim Campa terbesar terjadi antara 1446 – 1471, yaitu ketika negeri Campa terlibat perang dan dikalahkan Vietnam. Penduduk Muslim Campa lari ke selatan dan menghuni pantai timur Sumatera dan pantai utara Jawa (Cabaton, 1981; Arnold, 1977).

Kurang disambutnya usaha-usaha penyebaran Islam—yang disebarkan kalangan pedagang—di sebagian besar wilayah Nusantara, dapat diasumsikan berhubungan erat dengan sejumlah faktor yang menjadi kendala, baik yang bersifat struktural, sosio-kultural maupun religi masyarakat. Kendala yang pertama-tama menghadang usaha-usaha penyebaran Islam, terletak pada belum ditemukannya metode dakwah yang tepat dari para *Saracen Merchants* (pedagang-pedagang Muslim) asal Arab dan Persia untuk menembus kuatnya ajaran agama-agama yang dianut masyarakat Nusantara, yaitu agama Kapitayan, Hindu, Buddha, Tantrayana. *Kedua*, masyarakat Nusantara sebelum kehadiran *Saracen Merchants* adalah masyarakat yang sudah maju dalam ilmu pengetahuan dan teknologi melebihi seumumnya *Saracen Merchants*. *Ketiga*, struktur masyarakat yang terstratifikasi dan menempatkan kedudukan pribumi sebagai Orang Agung *(Wwang Yukti)* di satu pihak dan kedudukan Orang Asing sebagai pelayan berderajat rendah *(Wwang Kilalan, Mleccha)* di pihak lain.

Pengaruh Ajaran Kapitayan

Jauh sebelum Islam masuk, di Nusantara terdapat agama kuno yang disebut Kapitayan—yang secara keliru dipandang sejarawan Belanda sebagai Animisme dan Dinamisme—yaitu agama yang memuja sesembahan utama yang disebut Sanghyang Taya, yang

bermakna Hampa atau Kosong atau Suwung atau Awang-uwung. Sesuatu Yang Absolut yang tidak bisa dipikir dan dibayang-bayangkan. Tidak bisa didekati dengan pancaindra. Orang Jawa mendefinisikan Sanghyang Taya dalam satu kalimat: *tan kena kinaya ngapa* alias tidak bisa diapa-apakan keberadaan-Nya. Untuk itu, supaya bisa disembah Sanghyang Taya mempribadi dalam nama dan sifat yang disebut Tu atau To, yang bermakna "daya gaib" yang bersifat adikodrati.

Tu atau To adalah tunggal dalam Zat. Satu Pribadi. Tu lazim disebut dengan nama Sanghyang Tu-nggal yang memiliki dua sifat, yaitu Terang atau Kebaikan dan Gelap atau Kejahatan. Tu yang bersifat Terang atau Kebaikan disebut Tu-han disebut dengan nama Sanghyang Wenang. Tu yang bersifat Gelap atau Kejahatan disebut dengan nama Sang Manikmaya. Demikianlah, Sanghyang Wenang dan Sang Manikmaya pada hakikatnya adalah sifat saja dari Sanghyang Tu-nggal. Oleh karena itu baik Sanghyang Tu-nggal, Sanghyang Wenang dan Sang Manikmaya bersifat gaib tidak dapat didekati dengan pancaindra dan akal pikiran. Hanya diketahui sifat-Nya saja.

Oleh karena Sanghyang Tu-nggal dengan dua sifat itu bersifat gaib, maka untuk memuja-Nya dibutuhkan sarana-sarana yang bisa didekati pancaindra dan alam pikiran manusia. Itu sebabnya, di dalam ajaran Kapitayan dikenal keyakinan yang menyatakan bahwa Kekuatan Gaib dari Pribadi Tunggal Sanghyang Taya yang disebut Tu atau To itu "tersembunyi" di dalam segala sesuatu yang memiliki nama berkait dengan kata Tu atau To seperti *wa-Tu, Tu-gu, Tu-ngkub* (Kuburan), *Tu-lang, Tu-nda* (Punden Berundak), *Tu-nggul, Tu-k* (Mata Air), *Tu-ban* (Air Terjun), *Tu-mbak, Tu-nggak, Tu-lup, Tu-rumbukan* (Pohon Beringin), *un-Tu, pin-Tu, Tu-tud* (Hati, Manah), *Tu-tuk* (Gua, Mulut), *To-peng, To-san, To-pong, To-parem, To-wok, To-ya*. Dalam rangka melakukan puja bhakti kepada Sanghyang Taya, penganut Kapitayan menyediakan sesaji berupa *Tu-mpeng, Tu-mpi* (kue bulat terbuat dari tepung beras), *Tu-mbu* (keranjang persegi dari anyaman bambu), *Tu-ak, Tu-kung* (jenis ayam) untuk

dipersembahkan kepada Sanghyang Tu-nggal yang daya gaib-Nya tersembunyi pada segala sesuatu yang diyakini memiliki kekuatan gaib tersebut. Orang-orang yang punya maksud melakukan *Tu-ju* (tenung) memuja Sanghyang Tu-nggal Sang Manikmaya dengan persembahan khusus yang disebut *Tu-mbal*. Sementara untuk beribadah menyembah Sanghyang Taya langsung dilakukan di tempat bernama *Sanggar*, yaitu bangunan persegi empat beratap tumpang dengan *Tu-tuk* (lubang ceruk di dinding sebagai lambang kehampaan Ilahi).

Dalam bersembahyang menyembah Sanghyang Taya di sanggar, penganut Kapitayan mula-mula melakukan *Tu-lajeg* (berdiri tegak) menghadap *TuTu-k* dengan kedua tangan diangkat ke atas menghadirkan Sanghyang Taya di dalam *Tutu-d* (hati). Setelah merasa Sanghyang Taya bersemayam di hati, kedua tangan diturunkan dan didekapkan di dada tepat pada hati. Posisi ini disebut *swa-dikep* (memegang ke-aku-an diri pribadi). Proses *Tu-lajeg* ini dilakukan dalam tempo relatif lama. Setelah *Tu-lajeg* selesai, dilakukan posisi *Tu-ngkul* (membungkuk memandang ke bawah) dengan memegang lutut yang dilakukan dalam tempo relatif lama. Lalu dilanjutkan posisi *To-ndhem* (bersujud seperti bayi dalam perut ibunya). Yang terakhir, dilakukan posisi *Tu-lumpak* (bersimpuh dengan kedua tumit diduduki). Selama melakukan *Tu-lajeg, Tu-ngkul, To-ndhem, Tu-lumpak* dalam waktu yang lama itu penganut Kapitayan dengan segenap perasaan berusaha menjaga keberlangsungan Keberadaan Sanghyang Taya (Yang Hampa) yang sudah disemayamkan di dalam *Tu-tud* (hati).

Seorang hamba pemuja Sanghyang Taya yang dianggap saleh akan dikaruniai kekuatan gaib yang bersifat positif *(Tu-ah)* sekaligus bersifat negatif *(Tu-lah)*. Mereka yang sudah dikaruniai Tu-ah dan Tu-lah itulah yang dianggap berhak untuk menjadi pemimpin masyarakat. Mereka itulah yang disebut *ra-Tu* atau *dha-Tu*. Mereka yang sudah dikaruniai Tu-ah dan Tu-lah, gerak-gerik Kehidupannya akan ditandai oleh Pi, yakni "Kekuatan Rahasia Ilahiah" Sanghyang Taya yang tersembunyi. Itu sebabnya, ra-Tu atau dha-Tu, menyebut

diri dengan kata ganti diri: Pi-nakahulun. Jika berbicara disebut Pi-dato. Jika mendengar disebut Pi-harsa. Jika mengajar pengetahuan disebut Pi-wulang. Jika memberi petuah disebut Pi-tutur. Jika memberi petunjuk disebut Pi-tuduh. Jika menghukum disebut Pi-dana. Jika memberi keteguhan disebut Pi-andel. Jika menyediakan sesaji untuk arwah leluhur disebut Pi-tapuja yang lazimnya berupa Pi-nda (kue dari tepung beras), Pi-nang, Pi-tik, Pi-ndodakakriya (nasi dan air), Pi-sang. Jika memancarkan kekuatan wibawa disebut Pi-deksa. Jika mereka meninggal dunia disebut Pi-tara. Seorang ra-Tu atau dha-Tu, adalah pengejawantahan kekuatan gaib Sanghyang Taya. Seorang ra-Tu adalah citra Pribadi Sanghyang Tunggal.

Dengan prasyarat-prasyarat sebagaimana terurai di muka, kedudukan ra-Tu dan dha-Tu tidak bersifat kepewarisan mutlak. Sebab seorang ra-Tu yang dituntut keharusan fundamental memiliki Tu-ah dan Tu-lah, tidak bisa mewariskan secara otomatis pada anak keturunannya. Seorang ra-Tu harus berjuang keras memperoleh Tu-ah dan Tu-lah, dengan tapa brata. Untuk membuktikan Tu-ah dan Tu-lah, seseorang mula-mula membuktikan diri mampu menjadi penguasa wilayah kecil yang disebut wisaya. Penguasa wisaya diberi sebutan Raka. Seorang Raka yang mampu menundukkan kekuasaan raka-raka yang lain, maka ia akan menduduki jabatan ra-Tu. Dengan demikian, ra-Tu adalah manusia yang benar-benar telah teruji kemampuannya, baik kemampuan memimpin dan mengatur strategi maupun kemampuan saktinya dalam memperoleh Tu-ah dan Tu-lah yang dimilikinya.

Para *Saracen Merchants* yang mendakwahkan Islam di Nusantara umumnya tidak memahami ajaran Kapitayan yang menjadi *mainstream* kepercayaan masyarakat di luar keraton. Namun seiring kedatangan migran Muslim asal Campa pada 1440-1471 yang ditandai kemunculan tokoh Syekh Hasanuddin di Karawang, Syekh Datuk Kahfi di Cirebon, murid Syekh Hasanuddin, dan Sunan Ampel di Surabaya, Raja Pandhita Ali Murtadho di Gresik, Sunan Bonang dan Sunan Drajat, keduanya putra Sunan Ampel, Sunan Giri murid sekaligus menantu Sunan Ampel, dan ulama

asal Pasai, Gujarat, Malaka, Mesir, Maroko, Uzbekistan, dan Asia Tengah seperti Syekh Dara Putih, Syekh Siti Jenar, Sunan Gunung Jati, Syekh Maulana Maghribi, yang melanjutkan dakwah ulama pendahulu mereka seperti Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jumadil Kubro, Syekh Ibrahim Asmarakandi, Syekh Dada Pethak, dan Nyampo, terjadi asimilasi dan sinkretisasi antara ajaran Kapitayan dengan ajaran Islam (Atjeh, 1985; Atja, 1972; Lombard, 2005; Sunyoto, 2004; Saksono, 1995; Rinkes, 1996; Sofwan, 2000; Sunyoto, 2012).

Dengan kearifan para guru sufi yang disucikan—yang disebut *Susuhunan* dalam konteks ajaran Hindu-buddha—Islam "dipribumikan" lewat ajaran Kapitayan yang dianut masyarakat di luar keraton. Para penyebar Islam yang dikenal sebagai Walisanga menilai penganut Kapitayan sebagai Muslim yang belum membaca dua kalimah syahadat, belum khitan dan belum mengenal Alquran, sehingga dipilih dakwah dengan pensyahadatan massal melalui perayaan Sekaten (syahadatain). Itu sebabnya, Islam hasil dakwah ulama yang datang ke Nusantara pada pertengahan abad ke-15 itu, sarat ditandai istilah-istilah lokal keagamaan Kapitayan. Istilah-istilah ini antara lain seperti: sebutan *Susuhunan* untuk menggantikan Syekh; sebutan kiai gelar kebangsawanan lokal kaum brahmana yang setara dengan gelar Sayyid, Habib, Syarif dalam Islam; sebutan Guru menggantikan Ustaz; Sembahyang menggantikan Salat; Upawasa atau Pasa Brata menggantikan Shoum; Selam sebutan untuk Khitan; Swarga menggantikan Jannah; Neraka menggantikan Jahannam; Bidadari menggantikan Hurin; Langgar yang diambil dari Sanggar tanpa mengubah sedikit pun bentuk fisik bangunan termasuk perangkat bedhug. Selain itu, tradisi-tradisi keagamaan Kapitayan seperti sesaji Tumpeng, Tumbal, Tukung, Tungkub, meyakini daya sakti benda-benda bertuah, aneka khurafat, dan takhayul yang disebut *gugon-tuhon* seperti kupu-kupu masuk rumah tanda akan ada tamu, musibah akibat mencelakai kucing, pantang tinggal di rumah batu, percaya pada aneka makhluk halus yang hidup di sekeliling hunian manusia.

Menurut Soekmono (1959) yang menjadi dasar dan pokok kebudayaan Indonesia zaman madya adalah kebudayaan purba (Indonesia asli), tetapi telah diislamkan. Yang dimaksud kebudayaan purba dalam konteks itu adalah kebudayaan Malaio-Polinesia pra-Hindu yang oleh Prof. Dr. C.C. Berg (1938) dan Pof. Dr. G.J. Held (1950) disebut animisme dan dinamisme, yaitu kebudayaan yang lahir dari kepercayaan terhadap benda-benda yang dianggap memiliki "daya sakti" dan kepercayaan terhadap arwah. Proses Islamisasi kebudayaan purba sebagaimana ditengarai Soekmono, adalah bukti asimilasi yang dilakukan para penyebar Islam pada pertengahan abad ke-15 yang sebagian besar berasal dari Campa yang belakangan dikenal dengan sebutan Walisanga. Namun yang disebut Berg dan Held sebagai animisme dan dinamisme itu sejatinya adalah Kapitayan, di mana sisa-sisa pemujaan Kapitayan terhadap wa-Tu, Tu-gu, Tu-ngkub, dan Tu-nda yang oleh kalangan arkeolog disebut Menhir, Dolmen, Sarcopagus, Punden Berundak adalah peninggalan zaman Megalithikum (Hoop, 1932; Sunyoto, 2004).

Pengaruh dominan dari para migran Campa ke Nusantara selain berupa asimilasi dan sinkretisasi ajaran Islam dengan Kapitayan, juga berupa asimilasi budaya Campa yang terpengaruh Syiah Zaidiyyah ke dalam tradisi keagamaan Islam di Nusantara. Sejumlah tradisi keagamaan Muslim Campa yang dianut di Nusantara adalah dianutnya kebiasaan untuk memperingati kematian seseorang pada hari ke-3, ke-7, ke-40, ke-100, ke-1000, mentalqin mayat, peringatan haul, pemuliaan terhadap ahlul bait, kenduri, peringatan maulid, rabu terakhir bulan Safar (Rebo Wekasan), tabarrukan di makam keramat wali, peringatan Asyuro di bulan Muharram dengan membuat bubur, cara mengaji menggunakan bahasa Persia, dan berbagai tradisi keagamaan yang dijalankan masyarakat Muslim Nusantara sejak perempat akhir abad ke-15 (Sunyoto, 2004; Ja'far Subhani,1989; Cabaton, 1981; Simuh, 1988; Saksono, 1995).

Pengaruh Ajaran Guru Bhakti dan Yamabrata

Salah satu proses Islamisasi yang dilakukan para penyebar Islam asal Campa dan keturunannya melalui pengambilalihan ajaran Kapitayan, juga pengambilalihan lembaga pendidikan Syiwa-buddha yang disebut Asrama dan Dukuh menjadi Pondok Pesantren, yang menunjukkan hasil menakjubkan. Karena para guru penyebar Islam yang adalah guru tasawuf itu mampu memformulasikan nilai-nilai sosio-kultural religius yang dianut masyarakat Syiwa-buddha dengan nilai-nilai Islam, terutama memformulasi nilai-nilai Tauhid Syiwa-buddha *(adwayasashtra)* dengan ajaran Tauhid Islam yang dianut para guru sufi.

Dengan kewaskitaan seorang arif yang sudah tercerahkan, para guru sufi Walisanga mengambil alih sistem pendidikan Syiwa-buddha yang disebut Dukuh, yaitu pertapaan untuk mendidik calon pendeta yang disebut wiku. Naskah-naskah Jawa Kuno berjudul *Silakrama, Tingkahing Wiku* dan *Wratisasana* yang berasal dari era Majapahit, memuat tata krama siswa di Dukuh dalam menuntut pengetahuan, yang disebut *Gurubhakti* yang berisi tata tertib, sikap hormat dan sujud bakti yang wajib dilakukan para siswa kepada guru rohaninya. Para siswa, dalam tata krama itu, tidak boleh duduk berhadapan dengan guru, tidak boleh memotong pembicaraan guru, menuruti apa yang diucapkan guru, mengindahkan nasihat guru meski dalam keadaan marah, berkata-kata yang menyenangkan guru, jika guru datang harus turun dari tempat duduknya, jika guru berjalan mengikuti dari belakang, dan sebagainya. Ketundukan siswa kepada guru adalah mutlak.

Gagasan gurubhakti dalam Silakrama mencakup tiga *(triguru)*, yaitu orang tua yang melahirkan *(gururupaka)*, guru yang mengajarkan pengetahuan rohani *(gurupangajyan)* dan raja *(guruwisesa)*. Gagasan ini sampai sekarang masih kita temukan dalam masyarakat Muslim di Madura yang mengenal konsep *bapa-babu-guru-ratu* – pen). Yang paling beroleh penghormatan dari ketiga guru itu adalah *gurupangajyan*, karena *gurupangajyan* telah

membukakan kesadaran kedua untuk mengenal kehidupan di dunia dan akhirat hingga mencapai *moksha*. Khusus untuk *gurupangajyan* di Dukuh-dukuh yang mengajarkan laku spiritual dan berhak melakukan *diksha* (bai'at) disebut dengan gelar Susuhunan (Guru Suci). Demikianlah, guru-guru sufi di masa silam mendapat gelar susuhunan; Dukuh disebut Pesantren – tempat para santri belajar – di mana kata santri adalah adaptasi dari istilah *sashtri* yang bermakna orang-orang yang mempelajari kitab suci *(sashtra)* sebagaimana dikemukakan C.C. Berg (dalam Gibb, 1932:257) yang digabungkan dengan kata Cantrik, siswa Padhepokan; sementara tata krama dalam menuntut pengetahuan *(gurubhakti)* diwujudkan dalam aturan-aturan Silakrama yang dipadukan dengan kitab *Ta'limul Muta'alim* karya Syaikh Ibrahim Ibnu Ismail.

Selain gurubhakti, seorang siswa dalam menuntut pengetahuan diwajibkan menjalankan ajaran *Yamabrata*, yakni ajaran yang mengatur tata cara pengendalian diri, yang meliputi prinsip hidup yang disebut *ahimsa* (tidak menyakiti, tidak menyiksa, tidak membunuh), menjauhi sifat *krodha* (marah), *moha* (gelap pikiran), *mana* (angkara murka), *mada* (takkabur), *matsarya* (iri dan dengki), dan *raga* (mengumbar nafsu). Di dalam naskah *Wratisasana* disebutkan lima macam *yamabrata* yang mencakup *ahimsa, brahmacari, satya, aharalaghawa*, dan *asteya*. Meski prinsip *ahimsa* dimaknai tidak menyakiti dan tidak membunuh dan seorang wiku harus memiliki sifat kasih sayang terhadap semua makhluk, namun ditegaskan bahwa seorang wiku (siswa rohani), boleh melakukan *himsakarma (qishash)*, yaitu membunuh atau menyakiti orang jahat yang berlaku kejam terhadap dirinya dalam usaha bela diri. Tetapi *himsakarma* tidak boleh dilakukan terhadap penjahat yang sudah tertangkap dan tidak berdaya. Wiku yang disiksa, ditindas, dianiaya, dipukuli, dicaci-maki, harus membalasnya secara setimpal.

Seorang wiku diharuskan bersifat *satya* yaitu jujur, tidak bicara kotor *(wakparusya)*, ucapannya tidak menyakitkan hati, tidak memaki, tidak menggerutu dan menyumpahi, tidak berdusta

(ujarmadwa). Satya juga bermakna taat dan setia melakukan brata yang terkait dengan makanan, minuman, tata cara berpakaian, tempat tinggal, hingga perhiasan yang disebut sebagai *satyabrata*. Di antara isi *satyabrata* yang sangat mirip syariat Islam adalah yang menyangkut halal dan haramnya makanan *(tan bhaksanan)* dan minuman *(apeya-peya)*, di mana seorang wiku diharamkan memakan: daging babi peliharaan *(celengwanwa)*, anjing *(swana)*, landak, biawak, kura-kura *(kurma)*, badak *(warak)*, kucing (*kuwuk*), tikus, ular, macan, kukur *(ruti)*, kalajengking *(teledu)*, kera *(wre)*, rase, tupai *(wut)*, katak *(wiyung)*, kadal *(dingdang kadal)*, hewan melata, burung buas *(krurapaksi)*, burung gagak *(nilapaksi)*, lalat *(laler)*, kepinding *(tinggi)*, kutu *(tuma)*, ulat atau cacing tanah *(bhuhkrimi)*, dan sebagainya. Seorang wiku tidak boleh memakan makanan yang tidak suci *(camah)* atau menjijikkan dan diragukan kesuciannya. Selain makanan, seorang wiku juga wajib menghindari minuman keras yang memabukkan seperti arak, nira, anggur, brem, ciu. Demikianlah, ajaran Yamabrata ini sampai sekarang dapat kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari para santri di pesantren.

Ajaran *Niyamabrata* tak jauh beda dengan Yamabrata, yaitu pengendalian diri. Tetapi niyamabrata memiliki makna tingkat lebih lanjut. Silakrama menyebut, *Niyamabrata* bukan saja melarang wiku marah tetapi sudah pada tingkat tidak suka marah *(akrodha)*. Secara rohani, siswa selalu ingin berhubungan dengan guru *(gurususrusa)*, memohon kebersihan batin *(sausarcara)*, mandi tiap hari mensucikan diri *(madyus acuddha sarira)*, bersembahyang memuja Syiwaditya, melatih menyemayamkan Tuhan di dalam hati *(maglar sanghyang anusthana)*, berdoa *(majapa)*, dan mahoma. Di dalam ajaran tasauf, *Yamabrata* dan *Niyamabrata* dapat dibandingkan dengan *takhalli* (usaha membersihkan diri dari nafsu-nafsu rendah -pen) dan *tahalli* (menghiasi diri dengan sifat-sifat Ilahi-pen) sehingga seorang penempuh jalan rohani tercapai *tajalli* (penyingkapan diri-pen), yakni beroleh pencerahan mengetahui Kebenaran Sejati. Demikianlah, ajaran tasauf dapat diterima

masyarakat karena ada anggapan umum bahwa pengetahuan rohani Islam tidak berbeda dengan ajaran Syiwa-buddha.

Ajaran Aharalaghawa adalah bagian dari niyamabrata yang bermakna tidak berlebihan. Ini dalam konsep Jawa disebut Madya—*ora ngoyo lan orang ngongso*—tidak berlebihan dan tidak melampaui batas (di dalam Islam disebut *wasathan*–pen). Aharalaghawa, lebih dimaknai makan tidak berlebihan (tidak makan jika tidak lapar dan makan pun tidak boleh kenyang), memakan makanan suci, membatasi makan daging *(bhogasarwamangsa)*, bersyukur dengan makanan yang dimakan *(santosa)*, tidak rakus *(wubhuksah)*, tidak malas dalam menjalankan kewajiban *(apramada)*.

Bagian akhir sesudah aharalaghawa adalah asteya, yaitu tidak mengikuti hasrat hati untuk memiliki hak milik orang lain bahkan terhadap hak binatang sekalipun. Silakrama menyebut, jika seorang wiku mengambil milik orang lain tanpa izin *(panolong-nolongan)*, mencuri *(malinga)*, mengutil *(angutil)*, menadahi hasil kejahatan *(anumpu)*, merampok *(ambegal)*, melakukan tindak kriminal *(corah)*, merampas *(angalap)*, berkawan pencuri *(amitra maling)*, meminjam tidak mengembalikan *(anelang drewyaning sanak tan pangulihaken)*, utang-piutang dengan bunga *(rna-rni)*, berjudi *(ajudi)*, dan perbuatan nista lain, maka ia akan jatuh martabat dan kehormatannya *(panten)*. Wiku yang panten akan dikucilkan, tidak boleh dilihat *(tan wenang tinghalana)* dan tidak boleh diajak bicara *(sabhasanen)*.

Berdasar uraian di muka, jelaslah bahwa dalam pendidikan seorang wiku (calon pendeta Syiwa-buddha) di tempat yang disebut Dukuh, menunjukkan kemiripan dengan pendidikan di pesantren-pesantren tradisional Islam, di mana aspek pendidikan lebih dititikberatkan kepada pembentukan watak dan budi pekerti siswa-siswa yang ditandai oleh lulusan-lulusan berwatak mulia, cerdas, berbudi pekerti luhur, jujur, tidak membenci, suka menolong, menjalankan "syariat" dengan baik, selalu bersyukur dan berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan.

Bertolak dari kemiripan-kemiripan nilai-nilai dan ajaran Syiwa-buddha dengan Islam, para ulama sufi di era Walisanga dapat dengan baik membumikan Islam di Jawa melalui asimilasi, di mana salah satu usaha yang dilakukan oleh ulama-ulama era Walisanga tersebut adalah mengembangkan jumlah dukuh ke berbagai Thani (sebutan desa di era Majapahit – pen). Yang paling jelas menyisakan legenda dan mitos pembangunan dukuh-dukuh ini adalah tokoh Syaikh Lemab Abang atau Syaikh Siti Jenar, yang diketahui membangun puluhan dukuh bercitra *caturbhasa mandala* yang dinamai Lemah Abang (tanah merah), Lemah Putih (tanah putih), Lemah Ireng (tanah hitam), dan Siti Jenar (tanah kuning). Di Ampel Denta pun, letak dukuh berada di selatan masjid yang sampai sekarang dikenal dengan toponim Kampung Dukuh (Sunyoto, 2005).

Asimilasi Tradisi Keagamaan

Tampaknya, melalui pengembangan dukuh-dukuh yang semula merupakan tempat bermukimnya para siswa dan wiku, ajaran Islam dapat berkembang di tengah masyarakat. Sebab semakin banyak dukuh dan semakin banyak orang menjalani kehidupan sebagaimana seorang wiku, ajaran Islam yang mirip tatanan Syiwa-buddha bagi wiku itu semakin berkembang luas di tengah masyarakat. Itu sebabnya, kelahiran Islam tradisional yang khas dari lembaga pendidikan tradisional yang kemudian dikenal dengan nama Pesantren sangat akrab dengan istilah-istilah lokal keagamaan Syiwa-buddha yang "membumikan" istilah-istilah yang berasal dari bahasa Arab seperti Gusti Allah (Allah), Kangjeng Nabi (Nabi Muhammad Saw), Susuhunan (Hadrathus Syaikh), Kiai ('Alim, Syaikh), Guru (ustaz), Santri (murid), Pesantren (halaqah/ ma'had/ madrasah), Sembahyang (salat), Upawasa atau Pasa Brata (Shoum), Selam (Khitan), Tajug atau Langgar (Mushola), Swarga (Jannah), Neraka (Naar), Bidadari (Hurin), dan mengenalkan istilah baru dari bahasa Arab seperti Sabar *(Shabar)*, Adil *('Adil)*, Lila *(Ridha)*, Andap-asor *(Tawadlu')*, Ngalah *(Tawakkal)*, dan

tradisi-tradisi keagamaan Kapitayan maupun Syiwa-buddha yang tidak terdapat dalam ajaran Islam seperti Bedhug (tambur tengara sembahyang di sanggar Kapitayan), Ziarah (Siddhayatra), Nyadran (dari upacara Sraddha, yaitu berkirim doa kepada arwah leluhur), dan sebagainya.

Proses asimilasi kepercayaan lama Nusantara yang berjalin-berkelindan dengan kepercayaan Muslim Campa, terlihat pula pada kepercayaan takhayul tentang keberadaan makhluk-makhluk halus yang diyakini hidup di sekitar manusia. Menurut Sedyawati (1994) kepercayaan orang-orang Majapahit terhadap makhluk halus terbatas pada makhluk-makhluk yang dianggap setengah dewa seperti *"yaksha, raksasa, pisaca, pretasura, gandharwa, bhuta, khinnara, widhyadara, mahakala, nandiswara, caturasra, rahyangta rumuhun, sirangbasa ring wanua, sang mangdyan kahyangan, sang magawai kedhaton"*, sementara kepercayaan orang Campa Muslim meliputi berbagai jenis makhluk halus seperti gandharwa, kelong wewe, kuntilanak, pocong, tuyul, kalap, siluman, jin Muslim, hantu penunggu pohon, arwah penasaran, dan sebagainya. Di dalam proses asimilasi kepercayaan itu, orang-orang Muslim Nusantara selain terpengaruh oleh kepercayaan terhadap makhluk halus Campa juga terpengaruh khurafat khas Campa seperti percaya terhadap hitungan suara tokek, tabu mengambil padi di lumbung pada malam hari, menyebut harimau dengan sebutan "eyang" (Cabaton, 1981).

Berdasar uraian tersebut, jelaslah bahwa Islam yang datang di Nusantara berasal dari berbagai negara di penjuru dunia seperti Cina, India, Persia, Arab, Mesir, Maroko, Asia Tengah, dan terutama Campa pada masa Walisanga di mana setiap penyebar Islam yang tergabung dalam Walisanga tersebut membawa pengaruh kebudayaannya yang diasimilasikan dengan kebudayaan yang sudah ada di Nusantara, terutama asimilasi kebudayaan yang berlatar kepercayaan lama Kapitayan dan Syiwa-buddha dengan kepercayaan Islam Campa yang sedikit terpengaruh Syiah Zaidiyyah. Proses asimilasi dan bahkan sinkretisasi ajaran agama

sebagaimana terjadi di Nusantara ini, hanya mungkin terjadi ketika Islam disiarkan oleh kalangan ulama tasawuf yang sangat longgar dalam menyampaikan pemahaman agama kepada masyarakat dibanding ulama fikih yang cenderung skripturalis, di mana para ulama yang tergabung dalam Walisanga dikenal sebagai wali-wali keramat pengamal ajaran tasawuf. Itu sebabnya, James L. Peacock (1978) menyatakan bahwa Islam yang datang di Nusantara adalah Islam sufi yang dengan mudah diterima serta diserap ke dalam sinkretisme Jawa.

Dengan mengetahui latar historis perkembangan Islam di Nusantara—yang sebagian terpapar pada artikel ini—dapatlah dipahami kenapa Islam di Nusantara memiliki corak yang berbeda dengan Islam yang ada di negara-negara lain terutama di Timur Tengah. Itu berarti, Islam Nusantara yang dicirikan oleh tradisi keagamaan yang khas, merupakan Islam yang dibangun di atas pluralitas dan multikulturalitas agama-agama dan budaya antara bangsa yang berbeda satu sama lain, yang di masa silam dikembangkan oleh Walisanga. Kebinekaan amaliah peribadatan yang diterima sebagai keniscayaan tradisi keagamaan—dengan mengacu pada prinsip *ushuliyah* mempertahankan nilai lama yang baik dan mengambil nilai baru yang lebih baik—Islam Nusantara tumbuh dan berkembang dalam eksistensinya di tengah arus sejarah peradaban manusia sejak abad ke-15 hingga abad milenium ini.

Dalam pasang dan surut perkembangan Islam di Indonesia telah terjadi pelbagai peristiwa yang terkait dengan kekurang-pahaman terhadap eksistensi Islam Nusantara yang dianggap sebagai Islam penuh bid'ah, takhayul dan khurafat serta praktik-praktik syirik dari agama pagan. Untuk itu Islam Nusantara yang pluralis dan multikulturalis yang terbentuk oleh proses sejarah penyebaran Islam di Nusantara, oleh kalangan terpelajar berlatar pendidikan Barat sering disalah-pahami dan dipandang rendah sebagai Islam Tradisional yang dianut masyarakat pedesaan yang terbelakang dan tidak mampu memahami ajaran Islam secara benar. Usaha

keras menggugat eksistensi Islam Nusantara, dilakukan secara sistematis oleh kalangan Muslim yang berlatar pendidikan Barat dan sebagian lagi oleh Muslim berpaham Wahabi melalui kritik-kritik dan isu pemberantasan penyakit TBC (Tachayul-Bid'ah-Churafat) yang dianggap merusak akidah umat Islam. Reaksi para ulama yang berusaha mempertahankan eksistensi Islam Nusantara dari serangan sistematis itulah yang pada tahun 1926 mewujud dalam organisasi sosial keagamaan Nahdlatoel Oelama' alias NO (Gibb, 1932; Alfian, 1969; Noer, 1973; Maulana, 2007; Huda, 2007).

Islam Nusantara yang secara formal diwadahi dalam organisasi keagamaan NO (kemudian ditulis NU karena perubahan ejaan yang distandarkan pemerintah–pen) dipandang sebagai Islam adat *(costumary Islam)*, sedang Islam yang menggugat Islam adat disebut Islam revivalis *(revivalist Islam)* yang sering disebut dengan "Islam fundamentalis" atau "Wahabisme" (Kurzman, 1988), yaitu Islam bercitra Arabian. Seiring perjalanan sejarah, Islam Nusantara yang disebut Islam Adat tetap menjadi aliran *mainstream* yang dianut oleh mayoritas Bangsa Indonesia sampai abad ke-21 ini. Dan secara representatif, citra Islam Nusantara yang memiliki latar belakang ke-bhineka-an itu tercermin dari pandangan-pandangan, ucapan-ucapan dan tindakan-tindakan konkret yang dilakukan mendiang K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan seumumnya kiai NU yang sangat menghargai keberbedaan dengan kesadaran yang penuh toleransi, di mana citra itu melekat secara inheren kepada komunitas jama'ah maupun jam'iyyah dari komunitas keagamaan yang disebut Nahdlatul Ulama hingga saat ini.

Referensi

Alfian, *Islamic modernism in Indonesian politics: the Muhammadijah movement during the Dutch colonial period (1912-1942),* Madison (disertasi Ph.D di Wisconsin University).

Cabaton, Antoine, "Orang-orang Cam Islam di Indocina Perancis", dalam *Keraja Campa*, EFEO, Jakarta: Balai Pustaka, 1981.

De Graaf, H.J., *Cina Muslim di Jawa abad XV dan XVI antara Historisitas dan Mitos.,* Yogya: Tiara Wacana, 1998.

De Graaf, H.J. dan Th. G. Th. Pigeaud, *Kerajaan-kerajaan Islam di Jawa: Peralihan dari Majapahit ke Mataram*, Jakarta: Grafiti Pers, 1989.

Fatimy, S.Q., *Islam Comes to Malaysia*, Singapore: Malaysian Sociological Research Institute, 1963.

Gambar, I Made., *Tingkahing Wiku* (transkrip naskah Aksara Bali berbahasa Kawi), Denpasar, tt.

Gibb, H.A.R. (ed.)., *Whiter Islam: A Survey of Modern Movement in the Moslem*, London: Victor Gollancs, 1932.

Groeneveldt, W.F., *Historical Notes on Indonesia and Malaya, Compiled from Chinese Sources*, Djakarta: Bhratara, 1960.

Hambis, Louis (ed.), *Marco Polo, La Description du Monde,* Paris: Klincksieck, 1955).

Hirth, F. And Rockhill, W.W., *Chau-Ju-Kua: His Work on the Chinese and Arab Trade in the Twelfth and thirteenth Centuries, entitle Chu-fan-chi*, Amsterdam, 1966.

Hoop, A.N. van der, *Megalithic Remains in South-Sumatra*, Zutphen: Thieme, 1932.

Kasdi, Aminuddin., *Babad Gresik: Tinjauan Historiografi dalam Rangka Studi Sejarah,* Surabaya: University Press IKIP Surabaya, 1997.

Kern, H., (1913), *Een Oud-Javaansche steeninscriptie van Koning Er-Langga*, Gravenhage: Martinus Nijhoff, 13 h.

Kurzman, Charles (ed.), *Liberal Islam: A Sourcebook,* Oxford: Oxford University Press, 1988.

Maulana, Wari, *Pembaruan Islam Tajdid: Ungkapan Cinta Sejati atau Mutilasi Ajaran Islam*, Bandung: Incres, 2007.

Moquette, J.P., "De oudste Mochammadaansche inscriptie op Java n.m. de grafsteen te Leran)", dalam *Handelingen ven het eerste Congres voor taal-, land- en volkenkunde van Java gehouden te Solo*, 25-26 Desember 1919, Weltevreden 1921, p.391-399.

___________, “De Eerste Vorsten van Samoedra Pase,” hlm.1-12, *Rapportenv/h Oudheidkundige Dienst,* uitgegevens door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Batavia,1913.

___________, “De datum op den grafsteen van Malik Ibrahim te Grissee”, *TBG 54,*1912: p. 208-214.

Noer, Deliar, *The modernist Muslim movement in Indonesia 1900-1942*, Singapore: Oxford University Press, 1973.

Peacock, James L., *Purifying the Faith.* California, 1978.

Pigeaud, Th. G. Th., *Java in Fourteenth Century : A Study in Cultural History*, The Hague: Martinus-Nijhoff, 1962.

Ricklesfs, M.C., *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008* (terj.), Jakarta: Serambi, 2008

Saksono, W., *Mengislamkan Tanah Jawa*, Bandung: Mizan, 1995.

Sedyawati, Edi, *Pengarcaan Ganesa masa Kediri dan Singhasari*, Jakarta-Leiden: EFEO-LIPI-Rijk Universiteit te Leiden, 1994.

Simuh, *Mistik Islam Kejawen Raden Ngabehi Ranggawarsita: Suatu Studi Terhadap Serat Wirid Hidayat Jati*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988.

Soekmono, R., *Candi, Fungsi dan Pengertiannya* (Disertasi tidak dipublikasi), Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1974.

Sofwan, Ridin, dkk, *Islamisasi di Jawa: Walisanga Penyebar Islam di Jawa. Menurut Penuturan Babad*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Subhani, Ja'far, *Tawassul, Tabarruk, Ziarah Kubur, Karamah Wali Termasuk Ajaran Islam: Kritik Atas Paham Wahabi,* (terjemahan) , Jakarta: Pustaka Hidayah, 1989.

Sunyoto, Agus. *Sunan Ampel Raja Surabaya*, Surabaya, 2004.

____________., Atlas Walisanga: Buku Pertama Yang Mengungkap Walisanga Sebagai Fakta Sejarah, (Cet.VI), Depok: Pustaka Iiman-Lesbumi PBNU, 2016.

Tanojo, R., *Primbon Ramal Djajabaja*, Surakarta, 1956.

Wheatley, P., *The Golden Kersonese: Studies in The Historical Geography of The Malay Peninsula before A.D. 1500,* Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 1961.

Wayang Purwa Warisan Walisanga: Sketsa Jalan Kesempurnaan Manusia Nusantara[1]

M. Jadul Maula

Tradisi pesantren sebetulnya terkait erat dengan wayang. Sejak adanya tradisi pesantren di Nusantara, wayang mulai menjadi bagian dari kehidupan santri. Di dalam Serat Walisana ada disebutkan para wali bermusyawarah di Pesantren Giri untuk merumuskan berbagai hal terkait dakwah Islam sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan masyarakat, termasuk bagaimana menggunakan wayang sebagai pemersatu masyarakat dari berbagai latar sosial dan keyakinan. Meski sebelumnya, kemungkinan wayang digunakan sebagai alat pemanggil arwah, pada masa Walisanga fungsi wayang dikembangkan, dari semata ritual menjadi media edukasi masyarakat untuk menemukan jati diri kemanusiaannya. Walisanga memodifikasi berbagai aspek-aspeknya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, menjadi sistem pagelaran yang mengajak penontonnya bercermin untuk mengenal hakikat diri dan kenyataan hidupnya. Di dalam pagelaran wayang kulit purwa, yang digelar adalah *wewayanganipun ngagesang* (bayang-bayang dari totalitas kehidupan). Memahami bagaimana pagelaran wayang bekerja sebagai "universitas kehidupan" yang menghibur dan membebaskan, berarti memahami salah satu aspek

1 (Artikel ini diolah dari wawancara, beberapa artikel dalam *nu.or.id*, dan artikel dalam katalog *Matja, Seni Wali-Wali Nusantara,* Katalog *Pameran Senirupa Muktamar Nahdlatul Ulama ke-33, 2015*).

penting dari metode dakwah di dalam sejarah Islam di Nusantara. Dengan demikian, memahami wayang juga akan memperkokoh basis Islam Nusantara yang saat ini tengah menjadi isu penting bagi Nahdlatul Ulama.

Saat ini, para kiai dan santri milenial perlu mengenali kembali tradisi wayang. Kendala bahasa tidak dapat dijadikan alasan dalam memahami makna pagelaran wayang. Meski wayang menggunakan bahasa Jawa yang sulit dipahami remaja, ungkapan-ungkapan wayang masih dapat dipahami melalui ekspresi lakon, alur cerita, dan teks pembanding seperti komik wayang.Wayang bisa menjadi alat introspeksi diri. Tokoh-tokoh dari lakon wayang merupakan refleksi atas pergulatan unsur-unsur di dalam diri manusia. Menonton wayang itu menjadi alat memahami jalan kerohanian diri sendiri, karena tiap manusia memiliki seribu satu cara dan jalan menuju Tuhan. Anak-anak muda tidak boleh terlena dengan tradisi di luar dirinya. Sebab perilaku itu bisa membuat kita tidak adil terhadap tradisi sendiri, menjadi sebuah pengingkaran. Itulah yang mengakibatkan krisis jati diri. Maka para kiai dan kalangan pesantren perlu kembali mengakrabkan diri dengan wayang yang menjadi bagian penting dalam sejarah dan proses dakwah Islam di Indonesia. Kehadiran kiai dan pesantren diharapkan dapat mengembalikan pertunjukan wayang sebagai media dakwah, tidak hanya sebagai tontonan yang penuh gebyar namun membuat lengah secara rohani.

Wayang merupakan khazanah pengetahuan pesantren. Di dalamnya terdapat struktur ajaran dan kerohanian Islam yang total: syariat, tarekat, hakikat dan makrifat. Dan melalui wayang inilah Walisanga membangun dan menanamkan dasar-dasar ajaran Islam yang membuat kalangan pribumi alih-alih alergi dan phobia terhadap agama ini, melainkan bisa langsung merasakan manisnya substansi ajarannya di dalam *nguwongke wong*, memanusiakan manusia.

Para wali melakukan reformasi dan transformasi wayang menjadi lebih dinamis dan edukatif. Fungsi pertunjukkannya yang bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain, menjadi media yang tepat untuk menyebarkan Islam ke berbagai pelosok. Melalui wayang, ajaran Islam yang dibawa langsung dari Arab maupun melalui para pendakwah yang berasal dari Persia, India, Cina dan sebagainya, dipadukan dengan berbagai unsur lokal maupun *singular* dari kenusantaraan kita, dipribumisasikan sedemikian rupa sehingga melahirkan komunitas Islam dari kalangan pribumi secara masif.

Memperkenalkan kembali wayang bisa dimulai oleh kiai dan santri yang ikut duduk menyimak pagelaran wayang semalam suntuk, meskipun belum sepenuhnya paham. Setidaknya menjadi simbol dan pesan pengayoman kepada masyarakat bahwa wayang adalah bagian dari tradisi Islam Nusantara. Kalau para kiai ikut menonton, tentu secara langsung maupun tidak langung akan terjadi interaksi yang dinamis antar berbagai komponen pagelaran wayang, dalang, wiyaga, pesinden dan penonton. Sinden mungkin akan menjadi lebih sopan dalam berpenampilan dan dalang juga mungkin di dalam membawakan lakon akan terdorong untuk belajar kembali lebih intens tentang makna lakon kaitannya dengan spiritualitas Islam. Sebaliknya, para kiai mungkin juga akan belajar tentang aspirasi kehidupan yang lebih luas dari berbagai kalangan yang lebih terbuka. Saya sangat mengapresiasi beberapa pesantren yang mulai mengajak kembali para santri untuk mempelajari hakikat pagelaran wayang ini.

Tiga Faktor

Ada tiga faktor yang membuat pesantren terkesan selama ini seolah-olah menjauh dari warisan budaya para wali ini. *Pertama,* keterputusan. Sebelum penjajah Eropa datang, antara kraton dan pesantren itu satu kesatuan. Kraton didirikan untuk menyebarkan agama yang berbasis budaya. Para pangeran belajar kepada

para kiai di berbagai pesantren. Namun, ketika kolonial masuk menginterveni kraton-kraton nusantara, melalui proses *devide et impera* dengan strategi antara lain memisahkan budaya Jawa dengan keislaman, antara kraton dan pesantren mulai menjauh, hingga kemudian kraton dikendalikan oleh kolonial sehingga keduanya tidak menjadi satu kesatuan lagi dan terciptalah semacam dualisme: santri - abangan. Dalam hal ini, wayang dianggap sebagai budaya abangan yang tidak pantas ditonton oleh kaum santri di pesantren. Keterasingan antara kiai dan pesantren dengan wayang, dimulai dari keterputusan dan keterbelahan jiwa di dalam sejarah Islam ini. Hal ini semakin mendalam terutama sejak merosotnya kesultanan Mataram sebagai pusat penyebaran budaya Islam, dan kemudian terbukanya terusan Suez pada tahun 1869 M, menjadikan arus pembelajaran keislaman yang datang dari Tanah Arab berlangsung semakin masif. Para santri mulai mempelajari Islam langsung dari khazanah dunia Arab dan melupakan berbagai media dakwah dan budaya pembelajaran dari para penyebar Islam masa awal, abad XV-an.

Kedua, dan ini merupakan kelanjutan dari yang pertama, adalah terjadinya secara umum proses pembelokan orientasi para dalang. Banyak dalang yang terputus pengetahuannya dari sistem pengetahuan keislaman dan intensitas perkembangan spiritualnya pun memudar karena tercerabut dari akar. Dalang pada gilirannya menempatkan diri semata-mata sebagai artis hiburan dan menjalani kehidupan yang bebas. Pagelaran wayang pun mengalami "demoralisasi" ketika lakon dan gaya yang ditampilkan lebih menonjolkan aspek hiburan yang sensasional, pada saat yang bersamaan dengan memudarnya pula tingkat apresiasi terhadapnya sebagai acuan pengetahuan spiritual yang berbasis pada ilmu keagamaan.

Ketiga, puncak dari kedua faktor di atas adalah kelahiran sistem politik liberal pada era paska kemerdekaan di dalam negara kita, Republik Indonesia. Sistem politik ini ditandai dengan lahir dan berkembangnya beragam partai politik berdasarkan aliran,

yang saling bersaing melalui pemilu untuk memperebutkan posisi sebagai pemimpin pemerintahan. Pembelahan jiwa bangsa di atas semakin parah ketika menemukan wadah (: perangkap) institusionalnya di dalam partai-partai politik aliran ini, yang garis besarnya terpresentasikan dalam 4 partai pemenang pemilu tahun 1955, yaitu PNI, Masyumi, NU dan PKI. Masyumi dan NU merepresentasikan pembelahan lebih lanjut kaum santri menjadi modernis-tradisionalis, sementara PNI dan PKI merepresentasikan pembelahan lebih lanjut kaum abangan menjadi nasionalis-komunis. Wayang dan banyak kesenian tradisional lain yang sudah terlanjur dikonotasikan sebagai kesenian abangan, bukan santri, semakin terperangkap di dalam keterasingannya ketika dijadikan alat kampanye sarana mobilisasi massa oleh partai-partai abangan seperti PNI dan PKI. Sebaliknya partai-partai santri seperti Masyumi dan NU untuk mengimbanginya banyak mengeksploitasi simbol-simbol keislaman yang cenderung berbahasa Arab atau bahkan merujuk langsung kepada Alquran dan Hadis, sebagai sarana penambang suara massa. Klimaks dari persaingan politik ini, sebagaimana telah diketahui bersama, adalah tragedi kemanusiaan bangsa kita dengan meletusnya peristiwa 1965 yang sangat traumatik itu.

Demikianlah, trauma peritiwa 1965 sebagai klimaks dari persaingan politik dalam sistem demokrasi liberal ini, sepertinya menjadi semacam kunci yang menutup rapat kesadaran kaum santri terhadap wayang kulit dan juga kesenian tradisi lokal lainnya, dan bahkan cenderung mengeluarkannya dari tradisi Islam. Tragis, produk kesenian karya para wali ini dianggap bukan bagian dari Islam, dan pada titik tertentu diharamkan. Maka kemudian seni di lingkungan pesantren mengalami masa kegersangannya, hingga kini seolah hanya mengenal *hadrah* dan *kasidah* sebagai seni yang bisa disebut sebagai "islami". Dan pada saat yang sama, dimensi "*unthinkable*" dari wayang semakin lebar menganga.

Banyak pihak turut memprihatinkan hal ini. Diperlukan upaya-upaya lintas disiplin dan sektoral yang berkesinambungan untuk

mendekatkan kembali kesenian wayang kulit ini dari akar sejarah, tradisi dan keilmuannya. Secara tidak langsung upaya-upaya ini juga akan menyumbang bagi ikhtiar mengutuhkan kembali keterbelahan jiwa bangsa ini. Tentu saja hal ini mesti dilakukan dengan terlebih dahulu menyadari, mengurai dan mengatasi halangan-halangan yang ditimbulkan oleh ketiga faktor tersebut. Kalau efek dari ketiga faktor tersebut tidak dihilangkan, maka hubungan antara budaya lokal dan khazanah Islam yang menjadi akar tradisi dan keilmuannya, akan benar-benar terputus. Akibatnya telah dan akan terus muncul generasi yang a-historis, kehilangan jati diri, lebih berakar ke luar dibandingkan kepada sejarah, tradisi dan budaya sendiri. Dalam era globalisasi dewasa ini yang semakin masif dan mengasingkan, jiwa-jiwa terbelah dari generasi bangsa yang tercerabut dari akar tradisinya sendiri ini akan menimbulkan fenomena-fenomena perilaku yang tidak mendukung bagi cita-cita kita menjadi bangsa yang berkepribadian, maju dan berdaulat.

11 Malam 11 Lakon 11 Dalang

Pada 2011, saya bersama teman-teman Lesbumi dan berbagai komunitas budaya di Yogyakarta, menginiasiasi Pagelaran Wayang Kulit menampilkan Lakon-lakon Ajaran Sunan Kalijaga selama 11 malam dengan 11 Lakon dan 11 Dalang sebagai bagian dari rangkaian agenda Peringatan 500 tahun Sunan Kalijaga (Memetri Luhuring Laku Sunan Kali) yang berlangsung pada tanggal 15 – 30 Juli. Kegiatan tersebut mengambil tema: *Meneguhkan Jati diri Bangsa dan Hikmah Bhineka Tunggal Ika*. Pagelaran ini adalah bagian dari upaya untuk menghayati fungsi pagelaran wayang sebagai media edukasi, mengenali, merekonstruksi dan menyelami ajaran-ajaran mulia para leluhur. Pagelaran juga dimaksudkan menjadi ruang publik masyarakat lintas agama, suku, kelas dan golongan, di mana mereka tidak hanya hadir sebagai penonton, tetapi juga berinteraksi satu sama lain sambil berintrospeksi, serta kembali belajar tentang sejarah, tradisi, dan filosofi peninggalan para leluhur sendiri.

Pagelaran wayang dibuka dengan lakon "Lahire Bathara Kala" oleh dalang Ki Cermo Suteja. Disambung "Jumenengan Yudhistira" oleh Ki Mas Lurah Simun Cermo Joyo. Lalu lakon "Kumbayana" oleh Ki Mas Lurah Cermo Subronto. Lakon "Kartapiyoga Maling (Semar mBarang Jantur)" oleh Ki Hadi Sutikno. "Mustakaweni" oleh Ki Suwondo Timbul Hadiprayitno. "Dewa Ruci" oleh Ki Mas Lurah Cermo Radyo Harsono. "Wahyu Makutarama" oleh Ki Edi Suwondo Gito Gati. "Gandawardaya" oleh Ki Sudiyono. "Semar Minto Bagus" oleh Ki Gunawan. "Pandu Swarga" oleh Ki Sutarko Hadiwacono. Dan ditutup dengan lakon "Pandawa Moksa" oleh dalang Ki Seno Nugroho.

Kalau kita cermati, deretan kisah wayang yang digelar selama 11 malam di atas, membentuk semacam serial yang menggambarkan siklus kehidupan, perjalanan manusia semenjak dari lahir, tumbuh berkembang, dewasa hingga meninggal dunia. Di dalam masing-masing fase itu, kita diingatkan kepada tantangan-tantangan dan hambatan-hambatan yang bersifat jasmani dan rohani, yang mengiringi dan mengintai pertumbuhan kesadaran dan spiritual jiwa kita di dalam menggapai kesempurnaan, menumbuhkan kedewasaan, mematangkan integritas dan mengukuhkan jati dirinya.

Lakon "Lahire Bathara Kala" mengingatkan kita bahwa pada setiap kelahiran bayi yang sudah sewajarnya disambut dengan kegembiraan, namun mestilah dibarengi dengan kewaspadaan akan bahaya yang selalu mengintai dari Sang Kala. Lakon "Jumenengan Yudhistira" memberikan kita kunci penting bagi pertumbuhan orientasi dan kesempurnaan kemanusiaan kita, yaitu tentang potensi dari kejernihan yang dihirup oleh napas kita yang mesti terus dilatih, dipupuk dan dikuatkan dengan laku syukur dan ingat kepada sang pencipta. Lakon "Kumbayana" atau "Durna Kajarwa" mengingatkan kita tentang bahaya dari hawa nafsu di dalam diri kita yang selalu berupaya menggagalkan dan menjerumuskan orientasi kemanusiaan kita ke dalam perilaku yang hina. Lakon "Semar mBarang Jantur" mengingatkan akan bahaya kesombongan dari pengetahuan dan pentingnya menggunakan rasa yang halus

di dalam melihat fakta-fakta kehidupan. Demikian seterusnya hingga lakon "Dewa Ruci" yang merupakan puncak kedewasaan dan kematangan kesadaran seseorang, setelah melalui perjuangan berat menaklukan angkara, kemanjaan dan kecengengan pribadi yang berakar dari hawa nafsu, menemukan pengetahuan sejati yang bersumber dari kedalaman diri yang murni. "Wahyu Makutarama" mengajarkan kepada kita tentang kebijaksanaan untuk menyatukan diri dengan unsur-unsur alam semesta, hingga akhirnya dalam lakon "Pandawa Mokswa" kita diajarkan tentang bagaimana meniti akhir kehidupan kita, memperoleh kematian yang baik *(husnul khatimah)*.

Lalu dua tahun kemudian, 30 September–10 Oktober 2013 kami menggelar acara serupa, menampilkan lakon-lakon yang menggambarkan pengetahuan tentang hakikat dan proses terbentuknya suatu tatanan kehidupan, dan bagaimana kita mesti menempatkan diri dan berpartisipasi di dalam menjaga dan mengarahkannya agar terbentuk relasi-relasi yang berkeseimbangan dan mensejahterakan. Baik itu relasi-relasi di dalam lingkungan geografis, ekologis, tata diri dan sosial hingga terbentuknya tatanan pemerintahan (ketatanegaraan) yang mampu untuk melindungi, menyeimbangkan dan mengarahkan. Pagelaran dibuka oleh Dalang Ki Suhar Cermo Djiwandono dengan kisah *Makukuhan (Dumadine Gunung-gunung)*. Malam kedua hingga malam keempat, menampilkan dalang Ki Suwaji, Ki Sumono, dan Ki Suharno dengan lakon *Watu Gunung (Dumadine Wuku, Dina)*, Romo Tundung, dan Senggono Duto. Malam kelima hingga malam ketujuh, menampilkan Ki Utoro Wijoyanto, Ki Sugeng Cermo Handoko, dan Ki Bambang Wiji Nugraha dengan kisah *Lahire Sekutrem (Dumadine Gaman)*, *Abiyoso Lahir*, dan *Sentanu Banjut*. Malam kedelapan hingga malam kesepuluh, menampilkan Ki Sri Mulyono, Ki Wisnu Gito Saputra, dan Ki Danang Purbo Wibowo dengan lakon *Gondomono Luweng*, *Lenga Tala*, dan *Bedahe Dworowati*. Dan pada malam terakhir, menampilkan dengan Ki Udreka dengan kisah *Jumenengan Parikesit*.

Sebelum lakon-lakon wayang itu digelar, kami melakoni *Lampah Ratri Merti Luhuring Laku Sunan Kali*, yakni perjalanan malam demi menjaga dan memaknai tindakan luhur Sunan Kalijaga. Laku ini semacam napak tilas perjalanan Sunan Kalijaga dari Demak menuju ke arah Selatan, untuk mencari dan menentukan lokasi pendirian kerajaan Mataram Islam, demi mempertahankan dan mengembangkan budaya bangsa sebagai pusat peradaban, yang waktu itu secara internal sedang rapuh karena proses disintegrasi pasca runtuhnya imperium Majapahit akibat perang saudara yang berkepanjangan dan semakin terancam dengan kedatangan bangsa Portugis yang menandai awal era kolonial. Perjalanan tersebut mengandung tiga makna, yakni *tafa'ul* (napak tilas), *tafakkur* (berpikir), dan *tadzakkur* (berdzikir). Kami mengambil air dari situs Sendang Banyu Urip, tempat Sunan Kalijaga pernah membersihkan, menginisiasi dan menempa wali-wali muda sebagai generasi yang melanjutkan tugas Walisanga. Selama berjalan peserta dituntut untuk diam, sambil membawa air sendang dalam kendi yang secara simbolik menggambarkan pengetahuan sejati yang bersumber dari kedalaman diri serta kemanunggalan dengan empat unsur alam yang terdapat di dalam tubuh manusia, yaitu tanah, air, api dan udara.

Hidup manusia ditunjang empat unsur itu, tapi sering kali lupa. *Lampah Ratri* bertujuan untuk mengingat dan memikirkan hal itu, sembari berdzikir kepada Allah. Karena kebahagiaan dan kesejahteraan hidup manusia juga ada dalam kesatuan dan keseimbangan empat unsur tersebut. Selama dalam perjalanan, peserta belajar dan menghayati lagi tentang *hablun minallah* (hubungan dengan Allah), *hablun minannas* (hubungan sesama manusia), dan *hablun minal alam* (hubungan dengan alam).

Perjalanan napak tilas tersebut sekaligus untuk mengingat kembali peran Sunan Kalijaga dalam proses pendirian Kerajaan Mataram Islam. Dalam *Babad Matawis* dipaparkan bagaimana Sunan Kalijaga membekali Sutawijaya (Panembahan Senapati) dengan sejumlah nasihat yang kelak menjadi dasar kepemimpinannya.

Sunan Kalijaga adalah sosok yang menjaga proses krusial transisi kerajaan-kerajaan Nusantara seperti Majapahit, Demak, Pajang, dan Mataram (Islam) sehingga tidak berlangsung secara destruktif. Beliau adalah tokoh lintas generasi dan arsitek budaya Islam Jawa, guru rohani para raja sekaligus pelindung dan pembimbing keberagamaan *kawulo cilik*, di hampir semua aspek kehidupan, dan penanda puncak dari semuanya itu tergambar dalam kolaborasi harmonis beragam seni dan kisah di dalam pagelaran wayang kulit. Maka sudah sepatutnya sebagai bangsa yang kaya akan budaya lokal, tidak melupakan hubungan dinamis antara agama dan budaya seperti yang dicontohkan Sunan Kalijaga dalam menyampaikan syiar Islam.

Nasihat Kepemimpinan Sunan Kalijaga

Sebelum mendirikan Kerajaan Mataram, Sutawijaya mendapatkan nasihat dari Sunan Kalijaga. Sebagaimana dipaparkan oleh peneliti sastra Jawa dari UGM Ratna Sakti Mulya, nasihat itu terdapat dalam *Babad Matawis*. Nasihat atau *piwulang* Sunan Kalijaga itu meliputi tiga hal.

Pertama, bekal hidup agar selamat lahir batinnya, yang dimetaforakan dengan pertumbuhan pohon Wijayamulya yang apabila ditanam dengan rasa kasih, diperlakukan sesuai tatanan yang berlaku, disiram dengan air supaya segar, maka pohon Wijayamulya akan tumbuh subur, berdaun, dan berbunga yang segar dan indah.

Dalam proses pembelajaran, ketika sedang melaksanakan pembelajaran tidak boleh keras kepala dan tidak membuat tatanan sendiri, melainkan harus dipenuhi dengan kasih sayang, kemauan, mantap hati, dan bersungguh-sungguh. Selain itu, perlu juga menyadari bahwa segala pengetahuan bermuara pada Allah, Tuhan Sang Mahabijaksana.

Kedua, watak utama sebagai petinggi. Sunan Kalijaga memberikan nasihat bahwa watak utama seorang pemimpin

adalah mengayomi dan menciptakan suasana nyaman bagi warganya. Selain itu, hendaknya para petinggi membangun langgar asri dengan persediaan air yang melimpah, menyantuni fakir miskin dan orang terlantar, para yatim piatu serta pendeta. Jujur dan malu kepada Tuhan dan sesama juga merupakan watak yang harus dimiliki para petinggi. Hal tersebut disampaikan Sunan Kalijaga kepada Sutawijaya, dengan harapan agar nasihat itu kelak disampaikan kepada para petinggi Mataram.

Ketiga, mewujudkan kerajaan yang ideal. Nasihat kali ini dibingkai dalam sebuah cerita seorang Wiku di Gunung Rasa Mulya, kepada Raden Sujanadi dan kedua adiknya yang akan segera menjadi raja.

Wiku menyampaikan, bahwa jika kelak menjadi raja, maka pekerjakanlah orang yang baik, seperti yang dimetaforakan dengan empat hal, yakni wanita, keris, intan, dan burung. Wanita melambangkan bahwa ia harus bertutur halus, sareh, dan tertib dalam bersikap. Keris, harus tajam pikirannya dan ahli berperang. Intan, ia harus memiliki hati dan pikiran yang bening. Sedangkan burung, memiliki makna mengetahui hal yang tersamar, yang baik dan yang buruk.

Namun selain menjalankan empat hal tersebut, seorang raja juga harus hati-hati karena ada empat pantangan yang harus dihindari. *Pertama*, bersenang-senang, berjudi hingga menghabiskan harta benda. *Kedua*, gemar bercinta atau main perempuan sehingga lalai pada tugas dan kewajibannya. *Ketiga*, suka berotak kosong, yakni sering menghabiskan waktu hanya untuk makan dan minum, tidak mau belajar atau membaca. *Keempat*, melupakan asal mula dan menganggap kedudukannya sebagai raja adalah berkat kehebatan dirinya sendiri.

Nasihat atau *piwulang* itulah yang dilaksanakan dan dipegang teguh oleh Sutawijaya selama memimpin kerajaan Mataram, sekaligus diwariskannya kepada para pemimpin setelahnya. Oleh karenanya, tidak mengherankan jika Kerjaan Mataram dapat bertahan sampai 500 tahun, berkat ajaran dari Sunan Kalijaga.

Mengenal (Kembali) Wayang

Sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf-paragraf awal. Pakeliran wayang kulit purwa diciptakan melalui kreatifitas para Wali. Tidak dari ruang kosong, melainkan ditransformasikan dari berbagai bentuk yang pernah ada sebelumnya, diiringi dengan berbagai gending gamelan, dihidupkan dengan kisah-kisah yang dirangkai, diadaptasi dan direka-ulang dari berbagai sumber yang sudah dikenal maupun misterius, sehingga membentuk "sejarah" yang dihayati bersama dan menjadi konteks bagi proses pembentukan subjek-subjek kemanusiaan yang sedang diupayakan.

Banyak diskusi tentang kesejarahan wayang ini. Di kalangan akademisi Barat terdapat perbedaan pendapat tentang asal-usul Wayang. Prof. Poensen, menyatakan teori bahwa pertunjukan wayang mula-mula lahir di Jawa dengan bantuan dan bimbingan orang Hindu. Teori Poensen ini didukung pula oleh pendapat Prof. Vert yang menganggap bahwa Wayang dan Gamelan sangat dipengaruhi oleh peradaban yang lebih tinggi, yaitu Hindu. Namun teori ini disanggah oleh Prof. Niemann yang mengatakan tidak mungkin wayang berasal dari Hindu. Hal ini dikuatkan oleh Dr. Brandes yang mengemukakan beberapa kenyataan bahwa orang Hindu mempunyai teater yang sama sekali berbeda dengan teater Jawa dan hampir seluruh istilah teknis yang terdapat dalam wayang adalah khas Jawa, bukan Sansekerta. Berdasarkan kenyataan-kenyataan di atas, Brandes dan diperkuat oleh telaah Hazeu, berpendapat bahwa pertunjukan wayang tidak mungkin diambil dari Hindu.

Lebih jauh, seorang Indonesianis asal Belanda, Th.G. Pigeaud dalam *Javaansche volkvertoningen. Bijdrage tot de beschrijving van land en volk* (1938) menegaskan bahwa dugaan pertunjukan boneka wayang sebagai permainan yang terpisah sudah ada sejak dulu dan kemudian diisi dengan mistik Islam adalah tidak benar, karena semua orang tahu bahwa berita-berita mengenai wali-wali

penyebar Islam, mereka itulah yang memberi peranan penting pada tujuan pertunjukan wayang dalam bentuknya yang sekarang. Itu berarti, pertunjukan wayang purwa adalah benar-benar hasil kreasi para walisanga terutama Sunan Kalijaga dalam mereformasi secara menyeluruh seni pertunjukan wayang.

Namun, banyak yang meragukan hal-ikhwal tersebut, walaupun mereka juga tidak bisa menjawab ketika ditanya balik, "Kalau bukan oleh para Wali, lalu oleh siapa wayang diciptakan?". Mereka umumnya menyadari bahwa Pakeliran Wayang Kulit dengan segala unsur pertunjukannya sebagaimana dikenal sekarang ini belum ada pada zaman Majapahit. Jadi, tidak mungkin muncul diciptakan dalam zaman Hindu-Buddha, apalagi melihat boneka-boneka wayangnya yang terbuat dari kulit kerbau/sapi yang terlarang untuk disembelih kultur Hindu. Namun di sisi lain, mereka menganggap kisah Ramayana-Mahabharata diambil dari kitab suci agama Hindu, sehingga mereka tidak habis pikir bertanya-tanya, "Bagaimana mungkin Dakwah Islam dengan menggunakan Kitab Suci Hindu?" dan "Bagaimana pula para pendeta Hindu rela melihat Kitab Sucinya dijadikan bahan untuk Dakwah Islam?".

Ngaji Wayang

Orang-orang tua dahulu menyebut pagelaran wayang kulit antara lain dengan sebutan pasugatan, yang berasal dari kata sugata, artinya guru. Jadi, mendatangi pasugatan wayang kulit berarti menghadiri suatu perguruan, yang tidak hanya menunjuk kepada tempat melainkan juga proses dan peristiwa berguru. Dalam hal ini, siapakah yang menjadi guru, di mana dan nilai-nilai apa yang diajarkannya? Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa dalanglah yang menjadi guru, dan yang diajarkannya adalah lakon (cerita, kisah) yang dimainkan di dalam kelir (layar, tirai). Oleh karena itu, dalang sering disebut sebagai orang yang ngudal piwulang (menyampaikan dan menguraikan ajaran).

Menarik diperhatikan bahwa di dalam pakeliran, ajaran diuraikan dan sekaligus tersembunyi di dalam *gelaring cariyos* (rangkaian cerita). Oleh karena itu, seorang dalang dituntut kemampuannya untuk menemukan dan memahami inti ajaran di dalam suatu lakon dan dengan pemahamannya itu dia mengembangkan sanggit (kreativitas pertunjukan) sehingga dapat diterima oleh penanggap dan para penontonnya dengan memuaskan. Di awal dan akhir pagelaran wayang, sering kali seorang dalang memainkan golek (boneka) di dalam kelir, sebuah ungkapan simbolik golekana (carilah), yang merupakan pesan kepada para penonton untuk mencari dan terus menggali makna-makna yang tersembunyi di dalam lakon yang sedang dan telah dimainkan.

Demikianlah, oleh para dalang yang piawai, cerita-cerita di dalam lakon dan wayang-wayangnya begitu hidup dan kuat membawa para penontonnya hanyut di dalam kisah yang dimainkan. Di dalam kelir, antara dalang, wayang dan lakon, dengan iringan gending yang menghanyutkan, telah terjalin satu kesatuan yang tak terpisahkan, menjadi sebuah "gambar hidup" dan pada gilirannya secara lebih mendalam dan sayup-sayup menghadirkan ke dalam kesadaran penonton yang jeli, suatu "gambaran kehidupan". Para bijak telah menyampaikan, bahwa keseluruhan unsur di dalam pagelaran wayang kulit itu adalah sasmita (lambang) yang menunjuk kepada keberadaan Tuhan. Lebih jelas lagi, bagaimana Tuhan bertindak, mencipta dan mengatur alam semesta ini di belakang layar kehidupan.

Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi di dalam Kitab Futuhat Makkiyah telah menyampaikan, "Barang siapa ingin tahu arti sejati, bahwa Tuhanlah yang berkarya di belakang layar alam ciptaan, hendaknya ia memandang pertunjukan bayangan (khayal) dan bayangan-bayangan (suwar) yang ditampilkan pada layar, lalu memperhatikan siapakah yang berbicara dalam bayangan-bayangan itu, menurut hemat anak-anak yang duduk agak jauh dari layar yang dibentangkan antara mereka dan para boneka.

Demikian juga bentuk-bentuk dunia ini; kebanyakan orang masih seperti anak-anak. Di sini kita dapat belajar, dari mana asalnya peristiwa-peristiwa yang dibeberkan (di layar). Anak-anak kecil tertawa dan merasa gembira, orang-orang dungu memandang hal-hal itu sebagai banyolan dan senda gurau, tetapi orang-orang bijak berpikir dan mengetahui, bahwa itu semua oleh Tuhan hanya diatur sebagai suatu perumpamaan, agar manusia tahu, bahwa hubungan antara dunia ini dan Tuhannya seperti antara boneka dan dalangnya. Lagi pula bahwa layar itu merupakan tirai al-kadar (takdir) yang tak dapat disingkirkan oleh siapa pun." Sebelum Syekh Ibnu Arabi, Imam Junaid (al-Baghdadi) sudah mengatakan, "Supaya hamba di hadapan Tuhan bersikap sebagai sebuah boneka (sabah)."

Demikianlah, dapat kita pahami, kelir adalah sasmita dari jagad yang kelihatan, wayang-wayang yang ditancapkan di kiri dan kanan menggambarkan golongan makhluk-makhluk Tuhan. Batang pisang ialah bumi. Blencong adalah lampu kehidupan. Gamelan ialah keserasian antara peristiwa-peristiwa. Siapakah dalang? Dalang adalah roh yang "ditanggap" Tuhan untuk menggerakkan sebuah lakon kehidupan. Wayang-wayang adalah unsur-unsur di dalam tubuh (diri) kita. Dan lakon itu sendiri adalah peristiwa-peristiwa yang di alami oleh diri kita, sebagai sebuah ketentuan Tuhan Yang Mahamisteri. Sehingga, di dalam totalitas tontonan itu, kita sebetulnya sedang menyaksikan "lakon" kita sendiri sebagai instropeksi, dan di atas semua itu, Tuhan sedang menyaksikan tindakan kita, karena DIA-lah hakikatnya yang sedang "menanggap" lakon-lakon kehidupan ini.

Pada titik inilah, pagelaran wayang menjadi suatu peristiwa "ngaji" yang sangat bermartabat, berbudaya dan bernilai seni tinggi. Oleh para guru di dalam masyarakat Jawa, ngaji dijabarkan sebagai sebuah ungkapan dari "ngangsu kaweruh marang Kang Sawiji" (menggali pengetahuan menuju ke Yang Satu).

Moco Wayang

Lihatlah kepada kelir, cermin kehidupan ini. Bayang-bayang siapakah yang terpantul di dalamnya? Apakah kita asing terhadapnya? Lihatlah dan perhatikan tindakan dan ucapan kita. Mari kita kenali. Kewajiban manusia yang pertama dan utama adalah meyakini dan mengenal Tuhan dengan sepenuh hati, jiwa, pikiran dan tenaganya. Betapa krusial masalah pengenalan akan Tuhan ini, namun banyak manusia yang tidak tahu, lupa, abai maupun ingkar. Tanpa keyakinan dan pengenalan, maka bagaimana manusia akan mencapai kesejatian dirinya?

Tergerak oleh kasih sayang terhadap manusia yang terhijab ini, para Walisanga, terutama Sunan Kali Jaga menciptakan suatu seni pertunjukan wayang purwa yang menghibur, namun sangat intens dalam mengajak dan mendidik masyarakat mengenali asal-usulnya dan memperoleh jati dirinya.

"Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu" (siapa yang mengenal dirinya, maka dia sungguh mengenal Tuhannya). Wayang adalah bayang-bayang diri dalam kehidupan, sekaligus spektrum perjalanan spiritual manusia menuju Tuhan. Oleh karena itu, kalau orang menonton pagelaran wayang, sebetulnya bukan melihat semata gerak-gerik gambar wayang, melainkan bayangan dirinya sendiri.

Sebagai cermin, pagelaran wayang menggambarkan suatu pergulatan keras di dalam diri setiap manusia untuk mencari dan mencapai kesempurnaannya. Medan *kuruksetra*, tempat pertarungan para ksatria melawan semua kecenderungan jahatnya, tidak bertempat di mana-mana, melainkan di dalam diri manusia. Bharatayudha bukanlah perang antarsaudara di luar sana, melainkan peperangan melawan nafsu angkara murka di dalam diri, karena kerinduan rohani kepada Tuhan (Brantayudha). Wayang adalah medium pengenalan sekaligus otokritik diri. Menggelar wayang adalah perjalanan ziarah di dalam diri, untuk introspeksi, menggali nilai-nilai diri sekaligus mencari jalan pelepasan rohani

dari belenggu dan tipu daya hawa nafsu, baik hewani maupun syaitani.

Mari kita cari dan kenali. Sembilan tokoh utama dalam lakon-lakon wayang menggambarkan 9 (sembilan) unsur/organ utama di dalam diri. Sebagaimana 9 tokoh ini merupakan pelaku utama di dalam pagelaran wayang, maka 9 unsur diri ini pula yang menentukan kepribadian kita. Apakah kita mengenalinya? Kalau kita perhatikan karakteristik Pandawa Lima pemeran utama dalam sebagian besar lakon-lakon wayang Brantayudha, maka akan berkelibatlah bayangan/simbol dari lima indera, organ luar dari diri kita, yang merupakan tampilan utama dalam pembentukan dan perwujudan dari kepribadian kita. Yudistira, yang pantang berbuat salah dan jalannya melayang di atas tanah adalah gambaran dari Pernapasan (hidung) kita, yang tidak sudi mencium bau busuk dan senantiasa menghidupi diri kita dengan menghirup udara yang melayang di atas tanah. Bima, yang cenderung langsung bertindak begitu mendengar suatu berita, adalah Pendengaran (telinga) kita yang cenderung terpengaruh oleh informasi yang masuk tanpa mau repot-repot membuktikan kebenarannya terlebih dahulu. Arjuna yang tampan dan banyak mengawini perawan cantik putri begawan yang ditemuinya, adalah lambang Penglihatan (mata) kita, yang tatapannya sering menjadi acuan ketampanan/ kecantikan kita dan membuat kita kokoh menyatu (kawin) dengan lingkungan sekitar tempat kita berada. Kembar Nakula, sang penjaga istal kuda dan utusan untuk menyampaikan pesan-pesan penting kerajaan, adalah gambaran indera Perasa dan Bicara (lidah) kita. Dan kembar Sadewa yang sering tinggal untuk menjaga rumah adalah pralambang indera Perasa/Peraba/Pelaksana (kulit) kita yang setia menjaga diri kita dari panas-dingin cuaca dan melaksanakan tindakan-tindakan segala rupa.

Sementara itu, para Pandawa, tidak akan menjadi satu kesatuan utuh yang tangguh di dalam menghadapi musuh-musuh, kalau tidak ditunjang secara langsung atau tidak langsung, tampak atau tersembunyi, oleh peran rumit dan kompleks dari 4 (empat) tokoh utama lainnya. Dia adalah Karna, saudara sulung Pandawa

yang dibuang dan hidup di lingkungan para Kurawa. Kompleksitas situasi yang dihadapi dan bagaimana menempatkan diri di tengah silang sengkarut percaturan posisi yang diperankan oleh Karna, melambangkan Keseimbangan diri kita. Karna menyadari keterbuangan diri tetapi tidak kehilangan kasih sayangnya terhadap para saudara di satu sisi, dan di sisi lain menjalani keharusan hidup di lingkungan Kurawa yang serba jahat dengan tanpa kehilangan orientasi diri kepada kebenaran sejati. Itulah peran kompleks dan tersembunyi dari Keseimbangan, organ diri kita yang paling sering diabaikan, yang terletak di dalam dan di antara dua telinga (karno) kita.

Kemudian Sembadra, adalah seorang putri yang cantik, berkulit kuning langsat dan berperangai sangat halus. Terkenal dalam kisah Sembadra Larung, cerita tentang Sembadra yang dihanyutkan mengikuti aliran sungai agar terbebas dari nasib buruk. Putri cantik yang halus ini adalah Perasaan atau Rasa Hati kita, yang sangat sensitif yang mudah tersinggung, mudah marah, sehingga perlu dilarung agar lebih tahan uji terhadap godaan yang kita dengar maupun yang kita lihat. Selanjutnya, Kresna tak diragukan lagi adalah tokoh yang menentukan. Ia menjadi sumber rujukan dan kekuatan Pandawa di dalam memahami situasi, mengatur siasat dan strategi, juga menjadi senjata pamungkas dalam situasi tak terkendali. Tak pelak, Kresna melambangkan Pikiran (akal) kita, organ dalam yang pintar, cerdik, bijak namun terkadang licik. Tokoh kesembilan adalah Baladewa, berbentuk putih bersih, memiliki senjata Nenggala, adalah tokoh yang tidak ada bandingannya. Andai saja di dalam Baratayudha, Baladewa sampai berpihak pada Kurawa, tak mungkin Pandawa akan mampu memenangkan perang itu. Putih bersih yang tak tertandingi inilah yang harus kita upayakan bagi Batiniah kita.

Itulah kesembilan tokoh dalam kisah wayang, pralambang dari kesembilan unsur utama diri kita. Pertanyaannya, siapakah yang membuat dan menyebabkan mereka bergerak, berkelebat, menyatu berkomunikasi saling menunjang, saling terkait maupun tercerai-berai oleh perang dan tipu daya? Di belakang kelir, tidak terlihat

di dalam bayang-bayang, namun menentukan semua hal di atas, adalah Dalang. Dia yang tidak terlihat di dalam kelir, tetapi ada dan menghidupkan, adalah Roh yang hadir sebagai unsur kesepuluh, menggerakkan diri kita untuk mengarungi jagat kehidupan.

Apakah kita selama ini menyadari kehadiran dan gerak-gerik 10 tokoh/unsur itu di dalam diri kita? Bagaimana mereka saling menunjang harmonis atau saling mengabaikan, bertentangan dan konflik? Kesatuan harmonis di antara mereka tentu akan membuahkan perilaku kita yang mengarah kepada kebenaran, dan sebaliknya pertentangan di antara mereka cenderung akan menghasilkan tindakan kita yang mengarah kepada kesalahan/kesesatan, yaitu kepada kemenangan para Kurawa yang merupakan simbol dari kecenderungan jahat di dalam diri kita yang berjumlah 100 ini.

Melalui Pagelaran Wayang, para wali memberikan kepada kita kunci-kunci untuk mengharmoniskan kesatuan unsur-unsur utama diri, dan bagaimana memenangkan pertarungan terhadap para Kurawa yang penuh dengki. Dalam hal ini, Jamus Kalimasada adalah pusaka utama Pandawa, yang mesti melekat pada Yudistira, yang membuat mereka tak terkalahkan. Jamus Kalimasada adalah simbol dzikir, eling atau ingat kepada keagungan Tuhan, sementara Yudistira adalah pernapasan kita. Hal ini mengandung ajaran bahwa kunci utama kesatuan unsur di dalam diri kita adalah apabila dalam setiap tarikan napas kita mesti dibarengi upaya dzikir atau ingat kepada Tuhan, sebagai ungkapan syukur yang melekat dalam diri.

Dzikir atau ingat kepada Tuhan bukanlah ucapan Lidah, tetapi mesti menggema di dalam Batin. Oleh karena itu, di dalam wayang, batin kita yang dilambangkan oleh tokoh Baladewa, ia berkulit putih, dan selama berlangsungnya Bharatayudha dia mesti diikat di dalam goa "Gerojogan Sewu" (seribu air tejun). Sebuah ajaran kunci, bahwa untuk mengalahkan angkara murka yang berjumlah

100 itu, batin kita mesti putih/suci oleh guyuran "air terjun dzikir" yang kekuatannya 1000 atau 10 kali lipatnya.

Kesatuan harmonis antara Yudistira dan Baladewa, atau Pernapasan dan Batin di dalam diri kita ini pada gilirannya akan menerangi dan mendorong unsur-unsur lain di dalam diri supaya menyatu harmonis. Karna atau Keseimbangan kita akan bekerja keras untuk menyatukan hubungan-hubungan kompleks antara Penglihatan, Pendengaran, Perasaan, dan Pikiran. Buah dari keseimbangan itu semua adalah keputusan-keputusan yang mengarahkan kepada ucapan dan tindakan diri kita yang seimbang dan berorientasi kebenaran.

Demikianlah, kalau misalnya kita menghayati lakon wayang "Petruk Jadi Ratu", sambil terhibur kita sebetulnya secara ironis sedang diajak untuk melakukan otokritik bagi diri kita sendiri. Sindiran yang jenaka, menyangkut perilaku kita semua yang (mungkin) sering berwatak seperti Prabu Whelgeduwelbeh. "Whelgeduwelbeh" adalah lambang dari perilaku heboh, menang-menangan, tidak peduli nasihat orang, namun pada saat bersamaan hampa makna, nihil nilai-nilai. Atau, perilaku yang nonsens. Itu semua lahir dari diri kita sebagai akibat dari hilangnya Jamus Kalimasadha, yang tercuri persis pada saat para Pandawa dengan dibantu Kresna dan Baladewa sedang sibuk membangun candi, yang melambangkan bahwa orientasi dari diri kita sedang terarah pada ambisi kemegahan duniawi. Pada saat itu, kita lupa kepada Tuhan, dan tercerai berailah kesatuan unsur kita, karena kehilangan orientasi. Pada gilirannya, para pelindung rohani kita pun pada menjauh, dan jadilah kita "Whelgeduwelbeh". *Na'udzu billah min dzalik.*

Dari Wayang Ke "Ma Hyang": Siapakah Punakawan Itu?

Mereka adalah Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Seperti dapat kita pahami dari sebutan dan peran mereka sebagai

punakawan (panakawan) di dalam pagelaran wayang, maka mereka adalah pamomong, teman sekaligus pembimbing, yang setia mendampingi dan mengarahkan para ksatria kepada kebenaran dan kemenangan. Berbeda dengan Togog yang mendampingi para ksatria jahat, maka punakawan (Semar dan anak-anaknya) ini diceritakan selalu mendampingi para ksatria yang baik, yang selalu melakukan tapabrata dan berjuang menegakkan kebenaran.

Para punakawan digambarkan sebagai abdi atau penjaga, namun di lain sisi para dewa selalu bersikap hati-hati terhadap mereka. Siapakah sesungguhnya mereka? Punakawan itu bukanlah bayang-bayang kita, mereka tidak berada di dalam diri kita, tetapi berada di luar diri dan memang berperan sebagai penjaga perilaku kita. Di dalam hal ini, wayang tidak dimaknai sebagai bayang-bayang, melainkan mesti ditempatkan dalam makna aslinya sebagai "Ma Hyang" yang berarti: menuju pada roh spiritual. Dalam penghayatan spiritual, punakawan adalah pralambang dari malaikat penjaga laku, yang menitis sebagai karang yang kokoh (Karang Tumaritis) menjaga ke-kesatria-an laku (perilaku yang baik). Secara singkat, dapat dikatakan bahwa inilah pralambang yang menggambarkan perwujudan dari janji Tuhan di dalam Alquran: "wa man jahada fina lanahdiyannahum subulana" (barang siapa bersungguh-sungguh di dalam mencari(kebenaran)Ku, maka aku sungguh akan membimbing mereka kepada jalan-jalan yang mendekatkan kepada-Ku).

Semar, bermata redup dengan mulut berhias senyuman, adalah lambang dari penjaga lidah dan keseimbangan kita. Redup karena terbiasa menerima kedukaan dengan kesabaran, dan selalu tersenyum karena ungkapan kesederhanaan syukur saat menerima kenikmatan. Semar selalu berujar lembut, bijak, menuntun arah tata karma, membimbing laku rendah hati dan bersikap tak akan surut menghadapi ujian yang dihadapkan pada kita. Bentuk wayang Semar yang memiliki perut dan pantat yang besar merupakan bulatan, sebagai simbol kemampuan semar nguntal jagat (menelan dunia). Lambang ini mesti dibaca terbalik, sebagai peringatan agar

lidah kita selalu bijak untuk tidak berlebihan melahap makanan yang disukai, yang justru bisa berakibat sakit yang panjang.

Petruk, yang berperawakan tinggi dan berhidung mancung, berjuluk "kantong bolong". Ia melambangkan panjangnya jangka yang bisa kita tangkap dan cepat mencium gelagat, yang maksudnya kemampuan menyaring mana yang manfaat untuk dipikirkan dan mana yang tak perlu ditanggapi (bukan karena keputusan akal). Iya, Petruk adalah pralambang dari Penjaga telinga dan akal kita. Gareng, yang bertubuh pendek, bermata juling, berhidung besar, bertangan ceko, berkaki pincang dan bicaranya tak jelas, melambangkan Penjaga mata kita, supaya selalu instrospeksi. Ia selalu menyarankan kepada kita untuk hanya melihat yang pantas dan berorientasi pada kekurangan diri sendiri, tidak melihat segala kejelekan hanya ada pada orang lain. Bagong, diceritakan sebagai bayang-bayang dari Semar, tapi bertubuh lebih kokoh, figur wayangnya dilukiskan mirip Semar yang kelelahan, seperti terlalu banyak beban sehingga suaranya sangat berat. Bagong adalah pralambang kulit kita, tubuh kita. Ia terlihat kelelahan, adalah sebuah saran agar kita selalu ingat terhadap beban yang dipikul oleh kulit/tubuh kita sendiri, dan agar kita selalu berusaha menghadirkan keseimbangan (Semar) untuk meringankan beban kulit (Bagong) kita.

Demikianlah, orang Jawa meringkas kehadiran empat Punakawan yang mendampingi perjalanan kita di dalam mengarungi kehidupan ini dengan nama "Sedulur Papat Limo Pancer" (Empat Saudara, Kelima Pusat), yang menjadi pusatnya adalah sosok/pribadi yang berorientasi kepada kebenaran dan kebaikan, seorang ksatria. Selama seseorang berupaya keras mengharmoniskan ke-10 unsur dirinya, sehingga dia sungguh-sungguh di jalan kebenaran, maka ke 4 punakawan itu datang mendekat. Akan tetapi jika seseorang keluar atau mengabaikan jalan kebenaran itu, maka ke-4 punakawan pun akan menjauh.

Dari Wayang Ke "Ma Hyang": Siapakah Para Dewa Itu?

Mari kita cari, *golekana.* Banyak orang dari berbagai kalangan menganggap pagelaran wayang bersifat hinduistik, karena di samping mengambil *setting* cerita Ramayana dan Mahabharata, di dalamnya juga banyak dimainkan tokoh-tokoh dewa, seperti Wisnu, Brahma, Indra dan lain-lain. Dan kemudian tanpa berpikir jernih dan mendalam segera mereka menganggapnya sebagai Hindu. Benarkah pendapat demikian?

Kalau kita cermati dan ikuti keseluruhan cerita/lakon wayang, maka akan kita dapati bahwa nama-nama "para dewa" disebutkan, namun tidak ada kultur pemujaan sebagaimana dalam konteks Hindu. "Para dewa" terus tampil dalam pertunjukan wayang, sedemikian rupa sehingga sejak berabad-abad lalu, orang-orang Jawa yang mengikuti dan menikmati pagelaran wayang tidak ada yang menjadi Hindu karenanya. Kenapa? Karena memang di dalam pagelaran wayang tidak ada pesan atau praktik kultus/pemujaan terhadap dewa. Bahkan, di dalam lakon-lakon wayang digambarkan Bathara Guru dan dewa-dewa lainnya berada di bawah supremasi dari Semar (yang sering dianggap sebagai representasi dari kepercayaan lokal).

Mereka tahu itu, karena di dalam cerita wayang "para dewa" itu digambarkan sebagai titah (makhluk), yang hubungan antarsatu dengan lainnya itu berada dalam suatu genealogi (silsilah) turun-temurun yang berpangkal pada Nabi Adam. Jadi, misalnya Bathara Wisnu dan Brahma itu merupakan anak-anak dari Bathara Guru. Bathara Guru (Sanghyang Manikmaya), bersaudara dengan Sanghyang Ismaya (Semar) dan Sanghyang Antaga (Togog), mereka adalah anak-anak dari Sanghyang Tunggal. Sanghyang Tunggal anak dari Sanghyang Wenang, anak dari Sanghyang Nurrasa, anak dari Sanghyang Nurcahya, anak dari Sayid Anwar, anak dari Nabi Sis, anak dari Nabi Adam AS. Silsilah semacam ini sama sekali tidak terdapat indikasinya di dalam kultur India maupun Hindu. Dan membingungkan para orientalis, namun tidak bagi orang (Islam) Jawa.

Di samping itu, para dewa sering digambarkan berperilaku "sangat manusiawi", bisa salah dan lupa, atau bahkan tidak berdaya/ berkuasa. Seperti misalnya, Bathara Narada salah memberikan senjata Konta kepada Adipati Karna padahal maksudnya kepada Arjuna. Atau, "para dewa" di Kahyangan mereka tidak berdaya melawan Prabu Niwatakawaca yang menyerang dan bermaksud memperistri Dewi Supraba, dan mereka mesti minta bantuan kepada Arjuna untuk mengalahkannya. Atau, Bathara Guru tidak kuasa menahan hasrat seksual kepada istrinya Dewi Uma, dan memaksanya berhubungan intim di atas lembu Andini, kendaraan mereka yang sedang terbang di angkasa. Dewi Uma tentu saja menolak, dan akhirnya sperma Bathara Guru tumpah jatuh di samudera yang kemudian berubah menjadi Bathara Kala. Demikian seterusnya, sehingga di dalam kesadaran dan keyakinan orang-orang Jawa, tidak terdapat kultus dan sistem kepercayaan terhadap dewa seperti halnya di dalam keyakinan Hindu di India.

Oleh karena itu, hal-hal di atas mengarahkan kita untuk melihat kelebat bayang-bayang "para dewa" tersebut sebagai sebuah simbol atau pralambang yang acuannya bukan kepada sistem keyakinan Hindu di India, melainkan kepada konteks cerita di dalam lakon-lakon wayang itu sendiri. Maka akan kita dapati, di dalam lakon "Wahyu Makutharama" terdapat wejangan Begawan Kesawawidhi kepada Arjuna mengenai Hastabrata, yang merupakan ajaran untuk mendekat dan berterima kasih kepada 8 (delapan) unsur-unsur alam, yaitu angin atau maruta (Bathara Bayu), tanah atau bantala (Bathara Wisnu), samudra atau tirta (Bathara Baruna), api atau agni (Bathara Brahma), matahari atau surya (Bathara Surya), awan/langit atau akasa (Bathara Indra), rembulan atau candra (Bathari Ratih), bintang atau kartika (Bathara Ismaya).

Digambarkan pula di dalam pagelaran wayang bahwa kesatuan harmonis ke 8 unsur-unsur alam itu sebagai Cupu Manik Astagina, yang di dalamnya orang bisa melihat gambaran masa depan maupun masa lalu, kebahagiaan maupun kemalangan, di dalam kehidupan manusia. Ini mengandung pesan bahwa Kesucian, Transendensi

dan Kasih Sayang Tuhan telah menganugerahkan kepada manusia unsur-unsur alam tersebut sebagai penunjang kehidupan, yang mana di dalam sejarahnya yang panjang, kesejahteraan maupun kebinasaan manusia tergantung bagaimana hubungannya dengan ke 8 unsur alam itu. Bahagia atau celaka, tergantung dari apakah ia berbuat baik dan semestinya terhadap alam atau sebaliknya. Secara singkat dapat dikatakan, bahwa surga dan neraka dunia ini adalah unsur-unsur alam tersebut. Kalau manusia berbuat baik, maka alam akan membuat manusia bahagia. Sementara kalau manusia berbuat jahat dan merusak, maka alam akan mengingatkan dan menghukum manusia dengan bencana.

Menikmati Wayang: Sketsa Jalan Kesempurnaan Manusia Nusantara

Kesimpulan Th. G. Pigeaud pada awal tulisan, bahwa pertunjukan wayang purwa adalah benar-benar hasil kreasi para Walisanga terutama Sunan Kali-jaga dalam mereformasi secara menyeluruh seni pertunjukan wayang, adalah sebuah konfirmasi akademis terhadap apa yang menjadi keyakinan sebagian besar muslim Jawa. Walaupun tentunya tidak berangkat dari ruang kosong atau a-historis, pagelaran wayang kulit sebagai mana format, anatomi dan lakon-lakonnya yang kita kenal sekarang, benar-benar dirancang dan diletakkan dasar-dasarnya oleh Walisanga. Antara bentuk dan isinya merupakan kesatuan utuh yang tidak terpisahkan, yang merupakan jejak dari kearifan para wali, baik di dalam mengembangkan metode maupun menetapkan tujuan dari dakwah mereka, di dalam membangun peradaban Islam Nusantara, yaitu *hablun minallah, hablun minannas, hablun minal alam* (kesatuan Tuhan, manusia dan alam).

Melalui pagelaran wayang, para wali mengajarkan sketsa dari perjalanan manusia di dalam mencapai kesempurnaannya, kesejatiannya. Dimulai dari upaya yang sungguh-sungguh di dalam menyatukan keselarasan dan kerjasama yang solid antara

10 (sepuluh) unsur diri, yang akan menghadirkan bimbingan (punakawan). Kemudian dengan mengarungi persahabatan dengan 8 (delapan) unsur alam, manusia akan ditunjang perjalanan rohaninya untuk mendekat dan mencapai kebenaran Ilahi.

Wallahu A'lam bis Showab

Islam Nusantara: Dilema Lokalitas dan Formalitas

Zuly Qodir

Pendahuluan

Tulisan berikut ini hendak mengelaborasi gagasan tentang Islam Nusantara yang dialamatkan kepada Muhammadiyah dan NU. Hal ini disebabkan di Indonesia, Muhammadiyah dan NU merupakan dua arus Islam yang utama di Indonesia dengan latar belakang Suni. Muhammadiyah mengklaim memiliki jamaah tidak kurang dari 45 juta jiwa. Sementara itu, NU mengklaim memiliki jamaah tidak kurang dari 75 juta bahkan lebih dari 100 juta jiwa. Sungguh jumlah fantastik dari total penduduk Indonesia yang beragama Islam. Namun demikian, Saiful Mujani dan Suaidy Asyari menyatakan Muhammadiyah dan NU di Indonesia diperkirakan mencapai 25% dari total penduduk Muslim.[2]

Terlepas dari jumlah total pengikut Muhammadiyah dan NU yang tidak pernah dapat dipastikan. Salah seorang Ketua PBNU, KH. Slamet Effendy Yusuf -Allahu yarham-, menyatakan bahwa Muhammadiyah dan NU merupakan kekuatan riil Islam Indonesia yang sangat besar. NU jamaah bisa mencapai 107 juta umat Islam Indonesia. Hal ini, dikatakan Slamet Effendy Yusuf, sambil berseloroh, setiap umat Islam yang terus dikirimi tahlil sekalipun telah wafat adalah jamaah NU.[3]

---

2 Saiful Mujani, *Islam Moderat*,Gramedia Utama, Jakarta, 2007; Suady Asyarie, *Ijtihad Politik Muhammadiyah dan NU di Luar Jawa*, LKiS, Yogyakarta, 2010.

3 Effendy Yusuf, *Peran Umat Islam dalam Politik Bangsa*, Seminar Pra Munas MUI-VIII di UMY, Februari, 2015.

Selain itu, Muhammadiyah dan NU berkarakter dan berkultur moderat, bukan ekstremisme. Muhammadiyah dan NU, terbuka dengan perubahan dan perkembangan zaman sehingga keduanya hadir di Indonesia sebagai jenis Islam yang mampu menyesuaikan dengan kondisi Indonesia. Muhammadiyah yang sering dikatakan lebih dekat dengan Wahabisme, ternyata tetap berkultur moderat dan inklusif. Bukti otentik dari Muhammadiyah yang moderat dan inklusif adalah penerimaannya yang bulat Pancasila dan NKRI sebagai sesuatu yang final. Tidak perlu lagi bentuk negara yang lain di Indonesia. Tidak perlu pula dasar negara yang lain selain Pancasila.

Rumusan Pancasila sebagai *Ahlul Ahdy wa Syahadah* adalah bukti autentik sekaligus mutakhtir dari Muhammadiyah yang telah menerima dasar filosofis Pancasila dan bentuk negara NKRI secara final. Dalam pandangan Muhammadiyah, Pancasila merupakan kesepakatan politik umat Islam Indonesia untuk menerima sebagai dasar negara, karena kebersamaan dan keinginan dari elit bangsa ini untuk merdeka dan menjamin adanya keberlangsungan hidup sebuah bangsa bernama Indonesia. Sementara itu, Umat Islam sebagai mayoritas di Indonesia, termasuk Muhammadiyah dan NU harus menjadi saksi hidup di negeri ini. Bentuk-bentuk saksi atas keindonesiaan adalah dengan memperbanyak kebajikan, pencerdasan bangsa, mensejahterakan masyarakat dan menjaga ketertiban, taat peraturan dan undang-undang yang berlaku.[4]

Sementara itu, NU lewat rumusan KH. Ahmad Sidiq, bahwa umat Islam harus mengembangkan tradisi ukhuwah dalam empat hal. Pertama, ukhuwah bashariyah (ukhuwah antarmanusia); kedua ukhuwah insaniyah (bersaudara secara individual); ukhuwah Islamiyah (bersaudara sesama umat Islam); dan keempat ukhuwah

---

4 PP Muhammadiyah, *Negara Pancasila sebagai Dar Al-Ahdi wa Syahadah*, PPM, 2015.

wathoniyah (bersaudara sebagai sesama warga bangsa negara). [5]

Dari perspektif yang dikembangkan dari K.H. Ahmad Sidiq tersebut, NU bersma-sama Muhammadiyah telah menetapkan bahwa Pancasila dan NKRI adalah final. Bangsa ini tinggal mengisi negeranya dengan perbuatan yang baik, santun, menyejahterakan, melindungi serta menentramkan seluruh warganya. Tidak boleh diskriminatif serta bertindak kekerasan.

Selain itu, Muhammadiyah dan NU didirikan bukan sebagai partai politik. Sekalipun keduanya "pernah terpeleset" dalam dunia politik praktis, ikut partai dan Pemilu yakni tahun 1955 saat Pemilu Pertama di Indonesia diselenggarakan setelah kemerdekaan tahun 1945. Muhammadiyah bergabung dengan Masyumi. Sementara NU berdiri sendiri sebagai partai politik bersama Partai Syarekat Islam, PNI, PKI, Parkindo dan Partai Sosialis Indonesia (PSI).

Namun setelah Pemilu 1955, Muhammadiyah keluar dari anggota istimewa Masyumi, untuk kemudian tidak menjadi partai politik sampai sekarang. Sementara NU masih sempat bergabung dengan PPP bersama Parmusi dan Muslimin Indonesia. Sekarang ini Muhammadiyah sudah "siuman" dari politik praktis. Sementara itu, NU masih sedikit kurang siuman sehingga "geger dunia santri karena partai politik" terus bergejolak sampai sekarang ini. Bahkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang didirikan oleh para kiai pun akhirnya terpecah menjadi dua kubu; kubu Muhaimin Iskandar (ponakan Abdurrahman Wahid) dengan PKB Yeni Wahid, putri KH. Abdurrahman Wahid, yang kemudian dikalahkan di Pengadilan PTUN Jakarta oleh PKB pihak Muhaimin Iskandar, dari sinilah PKB Yeny Wahid kemudian harus membubarkan diri, sebab PKB yang diakui adalah PKB Muhaimin Iskandar.

Namun demikian, hal yang sangat menarik adalah keduanya mengusung dakwah *Islam rahmatan lil alamin*. Muhammadiyah

---

5 M. Ali Haedar, *Fikih Politik NU*, Gramedia Utama, Jakarta, 2000.

mengusung Islam berkemajuan. NU mengusung Islam Nusantara di mana kedua-duanya sepakat bahwa Pancasila sebagai final dasar fisalafat negara NKRI. Di sinilah letak pentingnya Muhammadiyah dan NU di kancah pergulatan Islam Indonesia. Sekalipun Muhammadiyah dan NU berbeda, namun visi keislamannya tetap menemukan titik temu yakni Islam Moderat-Inklusif.

Satu Islam, Sebuah Dilema

Islam di Indonesia tidaklah tunggal, hal ini harus disadari dan diakui sejak awal sehingga hendak menciptakan Islam yang Tunggal di Indonesia merupakan hal yang mustahil. Hal yang mungkin adalah memelihara keragaman Islam tersebut dalam kerangka Islam universal. Terdapat banyak ekspresi keislaman yang berkembang di Indonesia seperti mazhab sufisme yang juga sangat beragam di samping mazhab fiqih yang sekurang-kurangnya berkembang dalam lima mazhab dari Maliki sampai Jakfari (Syiah) sekalipun tidak *mainstream* di Indonesia. Tetapi Syiah di Indonesia bukan tidak ada, dia nyata adanya memang kalah dengan *mainstream* Muhammadiyah dan NU yang lebih suni (Maliki sampai Ahmad ibnu Hanbal).

Oleh sebab itu, gagasan terkait Islam Nusantara sebagaimana dikemukakan para cendekiawan Muslim Indonesia seperti M. Dawam Rahardjo, Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid, Ahmad Syafii Maarif sebenarnya dapat dikatakan sebagai gagasan yang mencoba memberikan aksentuasi pada apa yang oleh Abdurrahman Wahid dulu dikatakan sebagai "pribumisasi Islam". Islam Indonesia adalah Islam yang menjadi bagian dari kehidupan real orang Indonesia, bukan Islam "yang terasing" dari bumi Indonesia. Terdapat beberapa hal yang dapat membawa pada proses "pribumisasi Islam", sebab Islam tidak hanya berhubungan dengan ritual yang bersifat substansial, tetapi juga terdapat hal-hal yang bersifat simbolik, seperti halnya pemakaian jilbab atau kerudung bahkan pakaian (asesori) kemusliman lainnya. Jilbab di Timur

Tengah tentu akan bisa berbeda dengan jilbab di Indonesia. Jika di Arab Saudi Jilbab menutup seluruh wajah kecuali mata maka di Indonesia seperti yang kita saksikan sekarang. Jilbab adalah simbolisme Islam, sementara substansinya adalah menutup aurat. Sedangkan menutup aurat terdapat banyak pendapat (terutama) aurat perempuan. Ada yang bilang seluruh tubuh perempuan, kecuali telapak tangan, ada yang bilang wajah, telapak tangan dan bagian kepala bukanlah aurat.[6]

Di situlah Islam yang satu memiliki banyak tafsir. Terdapat tafsir Islam versi Maliki. Terdapat tafsir Islam versi Syafii. Terdapat tafsir Islam versi hanafi. Terdapat tafsir Islam versi Hanbali bahkan versi Ja'far Shadiq dalam Syiah Imamiah. Semua ini dalam versi fikih yang sering dipersempit menjadi hukum Islam. Sementara masih terdapat pula Islam versi teologis asyariah, muktazilah, dan qadiriyah, di mana semuanya menempati posisi penting dalam perdebatan tafsir Islam di dunia sampai sekarang ini. Di Indonesia pun berkembang semua versi yang terjadi di dunia Islam lainnya, termasuk yang berkembang di Timur Tengah dan Afrika.

Di Indonesia, terdapat Muhammadiyah, Al Irsyad, Persis, dan Sarekat Islam yang dianggap sebagai "aliran pembaruan" pemikiran Islam, terutama dalam dunia pendidikan dan fikih. Sementara terdapat NU yang dianggap tetap "menjaga tradisi lama fikih" dengan kaidahnya yang paling populer dipegangnya : "menjaga

---

6 Ulil Abshar Abdalla, Zuhari Misrawi, Imdadun Rahmat dalam *Jurnal Tafwirul Afkar, edisi 2005*, Lakpesdam NU Jakarta-The Asia Foundation, Jakarta 2006. Abdurrahman Wahid merupakan salah satu cendekiawan NU yang sangat dihormati bukan saja karena cucu pendiri Jamiah NU, KH. Hadratus Syaikh Hasyim Asyarie, tetapi sekaligus anaknya KH. Wachid Hasyim, salah seorang konseptor dalam perdebatan tentang dasar filosofis Indonesia dengan Pancasila atau Islam di samping Abdurrahman Wahid dikenal sebagai kiai yang bergelar seperti wali dengan kemampuan diatas rata-rata ulama NU di Indonesia pasca meninggalnya para pendiri NU itu sendiri di Indonesia. Kehebatan Abdurrahman Wahid dalam memahami Islam sudah dikenal luas di lingkungan pesantren, ulama dan pengamat asing.

yang lama yang baik, dan menggunakan yang baru yang lebih baik". Inilah klausul usul fikih yang sering dialamatkan pada NU dan beberapa ormas Islam yang setia menjaga tradisi lama yang tetap dianggap "saleh" dan bermanfaat. Di situ Islam yang datang dari Tuhan melalui Muhammad dan para Nabi yang menyebarkan ajaran tentang keEsaan Tuhan dan kebenaran mutlak hanya ada pada sang khalik akhirnya berbuah pada adanya beragam tafsir tentang Islam. Tafsir tentang Islam dengan demikian bisa dikatakan sebagai rajutan pemikiran umat Islam atas agama yang hanya Tuhan, yang MahaTahu apa maksud dari firman dan teks kitab suci yang agung. Di situ pula klaim bahwa hanya satu tafsir yang benar dari kelompok tertentu merupakan hal yang tidak bisa dibenarkan secara metodologis sekaligus secara proses ber-Islam.

Jika mengatakan Muhammadiyah, NU, SI, dan Persis di Indonesia tentu ini adalah kelompok *mainstream* Islam. Sementara jika kita katakan Front Pembela Islam, Majlis Tafsir Al Quran (MTA), Majlis Mujahidin, Anshoru Tauhid, bahkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), maka ini merupakan Islam yang lain lagi di Indonesia. Selain masih banyaknya kelompok dalam Islam. Oleh sebab itu, jika mengikuti diktum bahwa perbedaan dalam hal tafsir, pengamalan, dan tata cara karena ada dasar-dasarnya maka dikatakan berkah, di sinilah pentingnya menggalakkan pemikiran bahwa yang beragam tafsir itu selama terdapat dasar-dasarnya dapat dikakatan sebagai berkah sekaligus kekayaan Islam itu sendiri. Lebih khusus lagi kekayaan Islam di Indonesia yang jelas berbeda dengan kultur Islam di negara-negara Timur Tengah, dan gurun sahara lainnya.

Abdullahi Ahmed An Naim, seorang cendekiawan asal Sudan, yang sudah beberapa kali mengunjungi Indonesia dan meneliti (serta menulis) tentang Islam Indonesia, memberikan catatan yang sangat apresiatif tentang perkembangan Islam Indonesia kontemporer dengan mengatakan bahwa mada depan Islam dunia salah satunya tergantung Islam dari Indonesia. Hal ini dikarenakan Islam Indonesia dapat dikatakan sebagai Islam yang memiliki

kultur moderat, toleran, bahkan progresif, sehingga mampu beradaptasi, akomodatif dan dialektik atas persoalan-persoalan yang berkembang, tanpa menghilangkan dimensi substansi dan sufisme dalam tradisi Islam yang telah berkembang ratusan tahun di belahan negara lain. Bahkan Islam di Indonesia merupakan salah satu bentuk Islam yang sangat mengenal tradisi sufisme dan liberalism dengan melihat banyaknya aliran tariqat dan keagamaan seperti Muhammadiyah, NU, SI, Persis dan sebagainya.[7]

Memperhatikan apa yang telah dikemukakan An Naim, menjadi jelas bahwa Islam yang satu, pada akhirnya menghasilkan berbagai macam aktualisasi dan ekspresi Islam Indonesia. Bukan hanya dalam hal keorganisasian (sosial keagamaan) tetapi sekaligus dalam hal ekspresi politik islam Indonesia. Sejak tahun-tahun 1950-an terdapat banyak varian ekspresi Islam politik di Indonesia, sampai dengan tahun 2009 yang lalu bahkan sampai periode berikutnya pun diyakini akan terus hadir ekspkresi Islam politik yang beragam. Sekalipun pada akhir-akhir ini ekspresi Islam politik (partai) mengalami penuruan tajam jika tidak bersedia dikatakan mengalami kebangkrutan dan menuju "kematian Islam politik Indonesia". Hal itu terbukti dalam setiap Pemilu di Indonesia sekurang-kurangnya sepanjang Pemilu berlangsung sejak Orde Lama (tahun 1955) sejak zaman Masyumi, Parmusi, NU, Partai Syarikat Islam, kemudian zaman Orde Baru menjelma dalam Partai Persatuan Pembangunan, kemudian pasca-1998 dalam berbagai bentuk partai Islam seperti Partai Bulan bintang (PBB) Masyumi baru, Partai Kebangkitan Umat (PKU) Partai Syarikat Islam, termasuk Partai Keadilan (PK) dan kemudian berubah menjadi

---

7 Abdulahi Ahmed An Naim, periksa, buku An Naim, *Islam dan Negara Sekular*, LKiS dan Mizan, Yogyakarta, 2010. Untuk keterangan lebih lanjut bisa dibaca pada bagian tentang Masa depan Islam dan Perkembangannya di Indonesia. Di mana dalam bagian ini An Naim menjelaskan tentang karakteristik islam Indonesia yang diamati pasca Indonesia mengalami reformasi dan tahun sebelum reformasi sekitar tahun 1990-an sebagai sebuah fenomena Islam yang sangat khas tidak seperti di Timur Tengah.

Partai keadilan Sejahtera (PKS) dan beberapa lainnya. Sekalipun tidak mendapatkan suara yang signifikan (kalah) bersaing dengan partai-partai nonkeagamaan (asas Islam), menunjukkan adanya varian-varian dalam ekspresi Islam politik di Indonesia.[8]

Dengan memberikan penjelasan ringkas seperti itu dapat dikatakan secara tegas bahwa Islam sebagai agama memang satu, tetapi tidak demikian dalam hal "tafsir atas Islam". Tafsir atas Islam menghasilkan beragam wajah. Di mana setiap wajah memiliki karakteristik masing-masing. Terdapat karakteristik yang sering disebut radikal fundamentalis, revivalisme, modernis, neo-modernis, sampai progresif dan liberal. Semuanya memiliki karakteristiknya masing-masing sekalipun ada kalanya di antara mereka memiliki kesamaan-kesamaan dalam beberapa hal yang sangat fundamental seperti pemikiran.[9]

Gagasan Islam Nusantara

Setelah kita telusuri "jejak Islam" yang disiarkan ke Indonesia, sebagaimana dijelaskan di bagian lain karangan ini. Dalam bagian ini saya hendak mengemukakan gagasan tentang Islam Indonesia, atau sering juga disebut dengan Islam Nusantara yang sedang kita bicarakan. Apa itu Islam Nusantara dan bagaimana hal tersebut

---

8 Zainal Abidin, penjelasan tentang peta pemikiran politik Islam Indonesia sepanjang reformasi dan tahun menjelang reformasi, dalam Zainal Abidin, *Peta Islam Politik Pasca Reformasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, Imdadun Rahmat, *Ideologi Politik PKS*, LKiS, Yogyakarta, 2007, Zuly Qodir, *Sosiologi Politik Islam*, Pustaka Pelajar, 2012. Dalam tiga buku ini dijelaskan bahwa pada masa perkembangannya, Islam politik yang bergerak pada level ideologis mempergunakan Islam sebagai dasarnya mengalami kebangkrutan, sementara Islam yang bergerak dalam level kultural terus berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa Islam di Indonesia sebenarnya lebih bersifat kultural ketimbang bersifat politik kepartaian.

9 William Seapart, mengenai perdebatan pemikiran tentang Islam dalam konteks global maupun regional, secara detail dapat diperiksa dalam artikel William Seapart, dalam dalam Taji Suhail, ed, *Contemporary Islamic Thought , 21 Century, IB Turbis, London, 2007*

dapat berkembang di Indonesia sekarang dan mendatang, baiklah kita gambarkan sebagai berikut ini.

Ahmad Syafii Maarif (Buya Syafii), salah seorang cendekiawan Muslim Indonesia, murid Fazlur Rahman memberikan gambaran yang relatif jelas tentang sosok Islam Nusantara, demikian kata Buya Syafii:

> "Di Indonesia, antara Islam, keindonesiaan dan kemanusiaan tidak saja bisa berjalan bersama dan seiring, tetapi ketiganya dapat menyatu dan saling mengisi untuk membangun sebuah taman sari yang khas Indonesia. Ketiga kekuatan nilai itu mestilah saling melengkapi. Di taman sari ini, watak universal Islam tampil dalam wujud "kemanusiaan yang adil dan beradab". Sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia (nusantara), semua gerakan bercorak Islam harus senantiasa mempertimbangkan dengan cermat dan cerdas realitas sosio-historis Indonesia, demi keamanan, kedamaian dan kejayaan agama ini dalam mencapai tujuan mulia yang harus pula ditempuh dengan cara-cara mulia dan beradab. Di luar koridor itu, Islam hanya akan berhenti pada tataran ritual yang kehilangan roh, sedangkan misi utamanya tercecer di tengah jalan. Yang tersisa hanyalah kerangkanya dalam bentuk formal, jika bukan monster, tetapi sepi dari nilai-nilai kemanusiaan yang tulus, elok, dan sejuk; ia bukan lagi Islam yang hidup dan menghidupkan; bukan pula Islam kenabian atau Qur'ani yang selalu memberi inspirasi untuk berbuat yang terbaik bagi semua makhluk. Bukankah Allah "menciptakan mati dan hidup untuk menguji siapa di antara kita yang paling bagus amal perbuatannya".[9]

Pernyataan Buya Syafii dengan tegas dapat dibaca bahwa salah satu bentuk paling nyata dari Islam Indonesia adalah "sesuai kondisi sosio-historis Indonesia". Kondisi historis Indonesia salah satunya adalah pluralis dan multikulturalis sehingga tidak perlu lagi umat Islam alergi dengan kedua kata tersebut, sebab Islam sendiri sebenarnya demikian afirmatif terhadap pluralisme

---

10 Ahmad Syafii Maarif, Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan, Mizan, 2010.hlm. : 301-302).

dan multikulturalisme yang sering disalahpahami oleh sebagian umat Islam. Di sinilah umat Islam tidak boleh lagi terjebak dalam ketakutan bahasa dan istilah yang masih dianggap aneh kedengarannya sehingga membuat merah telinga dan menciptakan cara berislam yang "pendek akal", bukan panjang akal.

Kondisi Islam Nusantara yang sesuai dengan kondisi real sosio-historis dapat dikatakan sebagai "Islam yang pribumi", bukan Islam yang asing dan terasing dari bumi nusantara. Oleh sebab itu, menempatkan Islam nusantara dalam konteks nasional atau Indonesia sesungguhnya merupakan gagasan Islam yang paling sesuai untuk tidak mengatakan paling otoritatif, ditengah maraknya gagasan Islam transnasional yang mengusung tema kekhalifahan dunia dan Islam model Timur Tengah bahkan Sahara Afrika. Islam Nusantara jelasnya merupakan gambaran Islam yang "membumi" dengan kerangka keindonesiaan, bukan Islam dalam kerangka ke-Arab-an apalagi kerangka Islam yang penuh dengan keganasan, fanatisme publik, kekerasan dan terorisme yang menjadi penyakit dair sebagian umat Islam di dunia karena kekalahannya terhadap bangsa lain yang lebih maju dan sejahtera.

Kita perhatikan kembali pernyataan Buya Syafii terkait Islam Indonesia yang kontekstual atau "membumi". Demikian dikatakannya:

> "...Khusus untuk Islam, sekiranya gerakan-gerakan seperti DI/TII, dan seterusnya mewakili arus besar Islam Indonesia, maka sudah bisa dibayangkan nasib Islam di Indonesia. Mungkin Islam hanya tinggal kenangan. Islam tinggal puing-puing belaka. Untunglah arus besarnya Islam di nusantara masih mengedepankan akal sehat dan hati nurani, sekalipun gangguannya juga tidak kecil. Tarikan politik kekuasaan sering melemahkan misi utama dari arus utama (arus besar ini). Pada saat politik menjadi mata pencarian, memang tidak banyak pemimpin yang bisa bertahan di ranah idealisme. Di kawasan budaya kumuh sungguh sulit bagi kita untuk mempertahankan keyakinan yang benar, tetapi bukan sesuatu yang mustahil".[11]

---

11 Ibid, Ahmad Syafii Maarif, 2010: 301-302.

Gagasan Buya Syafii dengan jelas mengatakan bahwa Islam Indonesia haruslah yang "santun", ramah dan berjalan dalam ideologi kemanusiaan dan keadilan, selain keadaban. Bukan Islam yang dibangun dalam idoelogi kekerasan, kebencian dan antikemanusiaan. Islam model seperti itu hanya akan terlindas oleh hempasan politik kekuasaan yang jauh lebih bengis dan menghilangkan idealisme para pemeluknya. Islam dengan demikian haruslah dibangun untuk mempertahankan adanya keragaman, kedamaian dan menebarkan keselamatan untuk semua makhluk hidup di muka bumi Indonesia. Islam tidak pernah anti terhadap realitas heterogen dan benci atas adanya perbedaan-perbedaan. Perbedaan dan keragaman adalah sunatullah dan harus syukuri bersama. Islam harus memahami keragaman dan memahami adanya perbedaan. Keramahan Islam Indonesia diuji dengan hadirnya berbagai macam persoalan sosial yang mendera bangsa ini. Mungkinkah Islam Indonesia ramah dan menyapa semuanya? Inilah yang juga merupakan kondisi Islam Indonesia yang harus diciptakan.

Segala macam jenis kemungkaran harus dilawan dengan kebaikan. Ketidakmanusiawian harus dilawan dengan kemanusiaan, kebencian dilawan dengan kecintaan, dan seterusnya. Perhatikan kembali pernyataan Buya Syafii dalam konteks tersebut:

> "Melawan kemungkaran harus didahuli dengan perbuatan makruf. Artinya kita kitaharus mampu menyediakan alternatif yang lebih baik jika sebuah sistem kita nilai sudah tidak adil dan tidak Islami. Semua itu hanya bisa terjadi dan mungkin dilakukan oleh otak-otak besar yang tulus, sabar, dan cerdas. Ini bukan pekerjaan hura-hura dan demonstrasi dengan pekik "*Allahu Akbar*", tetapi pekerjaan mulai yang sangat serius dan terarah. Kelemahan peradaban Islam di abad ini adalah karena umat Islam masih gagal menyuguhkan sebuah sistem kehidupan yang lebih baik sebagai perwujudan diktum "rahmat bagi seluruh semesta".[12]

---

12 Ibid, Ahmad Syafii Maarif, 2010: 304).

Pihak *mainstream* Islam Indonesia adalah Muhammadiyah dan NU, bukan yang lainnya. Dengan segala kekurangannya telah dapat dikatakan tidak diragukan lagi, semacam hak paten menjadi gerakan Islam moderat, modern, terbuka, inklusif dan konstruktif. Ini tidak berarti bahwa tidak ada oknum-oknum radikal dalam arus besar ini, tetapi mereka tidak menentukan, dan biasanya tersingkir dari kepengurusan inti, karena kimia pemikirannya terasa asing untuk dapat menyatu dengan arus utama yang bercorak keindonesiaan dan dalam bingkai Islam yang ramah. Indonesia kontemporer beruntung karena dua arus besar ini tidak semakin jauh, tetapi malah semakin mendekat untuk saling mengisi dan menutupi kekurangan dan kelemahan masing-masing. Sekalipun kekuatan NU hampir terkonsentrasi di Jawa dan Kalimantan Selatan, pengaruhnya secara nasional selalu diperhitungkan. Memang naluri politik kekuasaan sebagian tokoh-tokohnya sering mengganggu gerak laju NU sebagai gerakan kultural dan intelektual. Ini masalah tersendiri yang harus mereka pikirkan dan pikir ulang dalam kerangka Islam Indonesia masa depan. Bagi saya gerakan kultural harus ditopang oleh kualitas intelektual yang tangguh dan berani, tetapi juga harus diikuti oleh sikap yang penuh kesabaran dan kesantunan. Tidak boleh mudah sesak napas. Dari sisi perkembangan intelektual ini, NU mencatat kemajuan yang luar biasa, berkat pendidikan modern yang telah merambah jauh ke dunia pesantren.[13]

Dari penjelasan Ahmad Syafii Maarif tersebut dapat dikatakan bahwa salah satu faktor mengapa NU dan Muhammadiyah mampu bertahan lama dan diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia, karena faktor Islam yang ramah, bukan Islam Radikal sebagaimana dibawa oleh sebagian umat Islam di luar *mainstream* besar Indonesia. Dengan demikian dapat dikatakan pula bahwa perkembangan

---

13 Ahmad Syafii Maarif, 2010: 304).

Islam di Indonesia, kemudian menjadi *mainstream* karena Islam di Indonesia merupakan Islam yang sesuai dengan kultur Indonesia, yakni ramah, bukan radikal. Radikalisme dan terorisme bukanlah watak asli Islam Indonesia yang ramah dan menyantuni semua makhluk hidup terutama sesama umat manusia yang beriman kepada Tuhan dengan berbeda-beda agama (keyakinan) sekalipun. Oleh karena itu, masa depan Islam Indonesia dapat dikatakan tergantung pada dua arus besar Islam di Indonesia yakni kondisi Muhammadiyah dan NU, lebih khusus lagi adalah pada kaum atau generasi mudanya. Jika dua arus besar Islam Indonesia terbawa arus radikalisme dan terorisme maka Islam Indonesia akan turut pula terpuruk di sana, bahkan Islam Indonesia akan semakin terjerembab dalam kubangan dan terseok-seok dalam jalan terjal yang terus menganga di hadapan kita. Arus islam Indonesia dengan demikian akan tergantung pada Muhammadiyah dan NU sebagai dua gerbong Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk Muslim Indonesia yang berada nusantara. [14]

Jika kita sepakat bahwa Islam Indonesia merupakan Islam yang Ramah dan bukan radikal, maka sekarang tinggal bagaimana gagasan seperti itu dibangun secara menyeluruh sehingga menjadi bangunan yang kokoh. Saya akan kutipkan pendapat Buya Syafii untuk menegaskan kembali soal Islam yang ramah pada Kemanusiaan. Demikian kata mantan Ketua PP Muhammadiyah seperti berikut ini.

"Gagasan untuk membangun Islam Nusantara atau Islam Indonesia merupakan gagasan Islam dalam bingkai kemanusiaan dan keindonesiaan yang berada dalam satu tarikan napas sebagai bagian dari dakwah dan kebudayaan ketimbang kerja politik. Melalui pendekatan dakwah dan kebudayaan, nilai-nilai dasar Islam, keindonesiaan dan kemanusiaan dapat dirancang lebih rinci dan teliti, sabar dan berdaya jangkau jauh. Jika nilai-nilai dasar ini

---

14 Ahmad Syafii Maarif, 2010: 309.

sudah kuat, maka pengaruhnya di ranah politik juga akan terasa, yaitu tampilnya politik yang berkeadaban, bukan politik kekuasaan yang kerjanya menyikut kiri-kanan, tidak peduli orang lain tersingkir dan tersungkur. Politik yang dibimbing oleh nilai-nilai profetik pastilah akan bermuara pada kedamaian dan keadilan, sekalipun para pelakunya berbeda ideologi". [15]

Sementara itu, Nurcholish Madjid (dikenal dengan Cak Nur), cendekiawan Muslim yang satu ini dikenal memiliki pemikiran Islam yang luas, bagaikan "kamus berjalan" atau ensiklopedia Islam, sehingga tak khayal jika menempatkannya dalam salah satu cendekiawan Muslim yang pantas dikemukakan pendapatnya terkait Islam Nusantara atau Islam Indonesia. Kita akan perhatikan beberapa gagasannya terkait Islam Nusantara sehingga makin mempertegas posisi Islam Indonesia di kancah dunia Islam Internasional.

Gagasan yang paling termasyhur dari Cak Nur hingga kini adalah *Islam Yes, Partai Islam No* yang dikeluarkan pada tahun 1970-an, ketika saat itu kondisi politik Indonesia sedang bersemangat dengan pelbagai labelisasi dan formalisasi politik Islam. Umat Islam sangat keras gagasannya untuk membentuk partai-partai berlabel Islam, bahkan merombak dasar Negara Pancasila menjadi dasar negara Islam. Di tengah pertarungan ideologis semacam itu, Cak Nur menggagas tidak perlunya formalisasi Islam dalam politik, yang dibutuhkan adalah substansi Islam untuk Indonesia, sehingga Indonesia lebih sejahtera, lebih maju dan perjuangan meraih keadilan akan dapat dilakukan dengan baik dan maksimal. Sebenarnya gagasan Cak Nur dapat dikatakan sebagai gagasan yang sangat modern untuk konteks saat itu sebab pada masa itu tidak banyak tokoh Muslim atau cendekiawan Muslim yang mengintrodusir karena sebagian besar mendukung gagasan Negara Islam.

---

15 Ahmad Syafii Maarif, 2010: 315-316.

Selain gagasan tentang *Islam Yes, Partai Islam No* yang terus mendapatkan respons sampai sekarang, dan tampaknya saat ini mendapatkan relevansinya, gagasan tentang menata ulang pemikiran islam Indonesia, antara yang budaya dan substansi merupakan gagasan yang sangat patut dicermati bersama. Bagi Cak Nur, ada banyak gagasan pemikiran dan praktik keislaman yang sebenarnya berupa budaya, tetapi kemudian dibakukan. Umat Islam Indonesia seakan-akan tidak bisa membedakan mana yang berupa kultur dan mana yang berupa substansi Islam. Padahal yang kultur merupakan sesuatu yang terdapat di beberapa Negara atau tempat, bisa berbeda dan berubah-rubah, sementara yang substansi merupakan hal yang tidak berubah dari Islam, sejak Muhammad SAW meninggalkan kita semua. Ada banyak masalah di sana tentang budaya dan substansi Islam yang tidak jarang mengakibatkan adanya pertengakaran sengit sesama umat Islam di Indonesia, bahkan di dunia Islam.

Perhatikan pendapat Cak Nur tentang Islam dan Budaya, yang sering kali mengacaukan pandangan umat Islam Indonesia, sehingga tidak mengakui dan mengesahkan keberadaan umat islam atau umat lain yang ada di dalam sebuah Negara. Demikian Cak Nur berkata:

> "Bagi kalangan Muslim Indonesia sendiri, pandangan mengenai budaya dan agama itu kebanyakan belum jelas benar. Ketidakjelasan itu dengan sendirinya berpengaruh langsung pada bagaimana penilaian tentang absah atau tidaknya sesuatu ekspresi kultural yang khas Indonesia, bahkan mungkin khas daerah tertentu di Indonesia. Banyak ahli menyatakan antara budaya dan agama itu tidak bisa dipisahkan, tetapi bisa dibedakan. Agama *an sich* bernilai mutlak, tidak berubah menurut perubahan waktu dan tempat. Sementara kebanyakan budaya berdasarkan agama, namun tidak terjadi sebaliknya, agama berdasarkan budaya. Sekurang-kurangnya seperti itulah keyakinan kita berdasarkan informasi dari quran dan para Rasul Allah. Oleh karena itu agama adalah primer, sementara budaya adalah sekunder. Budaya dapat merupakan ekspresi hidup keagamaan, karena itu subordinat terhadap agama, dan tidak pernah sebaliknya. Sementara agama

adalah absolut, berlaku untuk setiap ruang dan waktu, sementara budaya terbatasi oleh ruang dan waktu, dan karena itu relatif".[16]

Meneliti pendapat Cak Nur tersebut, kita dapat mengatakan bahwa Islam di Indonesia, bukanlah Islam yang berkultur Arab, tetapi berkultur Indonesia. Islam Indonesia bukanlah Islam yang bersifat Timur Tengah, tetapi lebih Asia Tenggara. Banyak budaya di Indonesia terpengaruh oleh Islam, tetapi mungkin juga Islam melakukan akomodasi atas berbagai budaya yang tidak bertentangan dengan Islam sebagai agama yang tidak berubah-rubah sesuai zaman dan tempat. Terdapat budaya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam tidak harus menjadi bagian dari agama, tetapi ada banyak budaya yang sesuai dan berdasarkan Islam, karena itu dapat menjadi bagian dari hal-hal yang dapat dikerjakan oleh umat Islam Indonesia.

Contoh hal yang sederhana terkait budaya dan agama adalah masalah bedug dan kentong di masjid. Sebelum orang Indonesia mampu membuat menara yang tinggi dan mempergunakan pelantang suara, sehingga suara azan dapat terdengar jauh dan keras, maka mempergunakan bedug dan kentongan untuk memanggil orang salat dilakukan. Mempergunakan hal tersebut meminjam budaya Hindu-Buddha. Dan harus diingat di daerah tropis yang banyak pepohonan seperti di Indonesia, suara azan akan terdengar tidak keras dan tersangkut di pohon-pohon, daripada di padang pasir yang jarang pohon. Maka setelah orang mampu membuat menara dan menggunakan *speaker* sekalipun *made in* Japan, maka mempergunakan bedug dan kentongan bisa dikatakan tidak relevan, harus dievaluasi, dan didesakralisasi (dicopot nilai kesakralannya) bahwa semua itu bukanlah agama, melainkan masalah budaya belaka). Demikian pula soal padusan

---

16 Nurcholish Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban, Kontekstualisasi Doktirin Islam, dalam *Kemodernan, Keindonesiaan dan Kosmopolitanisme*, Paramadina, Jakarta, 1995: 36.

pada saat jelang bulan suci ramadan yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Ketika makin banyak sungai yang tidak bersih lagi, bahkan tidak ada sungai yang bersih, dan makin banyaknya air ledeng, air sumur, maka padusan dirombak dari mandi di sungai menjadi mandi dengan air ledeng, air sumur yang tujuannya adalah membersihkan badan (tubuh manusia) dari kotoran ragawi. Oleh sebab itu, mandi padusan adalah bagian dari budaya belaka yang bisa dilakukan di mana saja dan dengan air apa saja yang tujuannya adalah membersihkan badan atau ragawi sebelum menjalankan ibadah puasa.

Perhatikan pernyataan Nurcholish tentang reformasi yang dikakukan Muhammadiyah, Persis dan al Irsyad yang umumnya dianut di Indonesia yang hendak memurnikan paham Islam dari budaya, adalah berada dalam level seperti itu, bukan pada level substansi agama. Paham seperti itu adalah paham yang berupaya memurnikan agama dari unsur bidah, khurafat dan takhayul-takhayul lainnya. Perhatikan pernyataan Cak Nur berikut.

"Gerakan reformasi Islam di negeri kita awal abad 19 adalah gerakan padangan dalam kerangka besar mereka untuk memurnikan agama dan memerangi "bidah", khurafat dan tahayul, namun kenyataannya, upaya pemurnian tersebut tidaklah bisa diterima secara mudah. Bagi kebanyakan orang di masyarakat kita, bedug merupakan bagian integral dari masjid, dan bedug bagi mereka merupakan hal yang harus ada dalam masjid, sehingga jika masjid tanpa bedug merupakan hal yang tidak masuk akal, bagaikan sayur tanpa garam. Demikian pula padusan jika dihilangkan bagaikan berpuasa tanpa kebersihan badan (ragawi). Hal seperti itu memberikan ilustrasi sederhana namun cukup *substantive* tentang bagaimana sulitnya orang umum menempatkan nilai-nilai hidup dalam susunan atas bawah, tinggi rendah, primer sekunder, universal partikular yang tepat dan benar, dan bagaimana kekacauan itu dapat berakibat pembelengguan mental, sampai pada sikap menghadapi hal yang amat sederhana seperti bedug,

kentongan dan padusan. Bagi sebagian masyarakat hal seperti itu sebagai simbol (merupakan) hal yang lebih penting daripada fungsi atau substansi dan makna telah tergantikan oleh kerangka".[17]

Hal apa yang dapat kita petik hikmah dari pernyataan Nurcholish Madjid, bahwa masalah substansi dan simbol dalam keislaman masih merupakan hal yang sulit dibedakan bahkan dijelaskan pada umum (awam). Padahal hal-hal yang berupa budaya dan agama merupakan hal yang biasa dan wajar saja adanya. Di Indonesia pemakaian budaya merupakan hal yang wajar saja. Membuang sedikit dari unsur budaya juga seharusnya merupakan hal yang biasa. Mengaitkan antara budaya dan agama selama tidak bertentangan dengan substansi juga hal yang biasa-wajar sebab agama tanpa simbol juga "kering". Tetapi agama yang terlalu dominan simbol juga menjadi kurang substansial. Oleh terkerangkeng simbol melupakan substansi, atau pun sebaliknya menganggungkan substansi menghilangkan simbol juga tidak meyakinkan. Dua-duanya merupakan hal yang boleh ada dalam agama dan Islam Indonesia.

Oleh sebab itu, Islam di Indonesia sebenarnya bisa dikatakan sebagai hasil dari dialog antara budaya dan substansi ajaran agama itu sendiri. Selama budaya yang dipakai dan dianut tidak bertentangan dengan substansi maka budaya dapat menjadi bagian dari praktik keislaman di Indonesia. Hasil dialog tersebut membuahkan pemahaman tentang keagamaan (keislaman) yang akomodatif, partikular universal, bukan saja merupakan sesuatu yang absah tetapi merupakan sesuatu yang sangat berharga sebagai sebuah kreativitas kultural orang beragama (berislam). Dengan

---

17 Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan*, Paramadina, Jakarta, 1995: 35, lihat pula Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peraban*, Paramadina, Jakarta, 1992: 454-455). Dalam dua bukunya ini, Nurcholish Madjid dengan luas menjelaskan posisi Islam yang sering berjalan beriringan antara kultur dan Islam serta antara Islam dan kemanusiaan serta kemodernan yang tidak ada tabarakan di sana.

kreativitas itulah suatu sistem ajaran universal seperti ajaran agama Islam menemukan relevansinya dengan tuntunan khusus dan nyata bagi para penganutnya, menurut ruang dan waktu, dan dengan begitu menemukan dinamkia dan vitalitasnya.

Menilik dari kondisi semacam itu, dalam masalah ibadah, Islam memang mengharuskan merujuk pada ada tidaknya dasar mengerjakan perintah ibadah tersebut, dari yang shahih-qoth'I (mashur dan kuat) sampai dengan yang dhoif (lemah) dan kurang mashur namun pernah dilakukan oleh para sahabat nabi, sebab para sahabat Nabi pun merupakan sumber dari praktik ibadah dalam Islam. Kita memang boleh merujuk pada adanya kaidah dalam ushul fiqih yakni: pada dasarnya ibadah adalah dilarang, kecuali jika ada petunjuk yang sebaliknya. Hal tersebut artinya dilarang membuat dan menciptakan cara ibadah sendiri. Kita hanya harus melihat dan mempelajari apakah ada bukti dalam sumber agama, yakni Kitab suci dan sunah nabi, bahwa suatu bentuk ibadah memang dibolehkan, dianjurkan atau malah diwajibkan. Masalah ibadah murni itu harus ditempuh dengan seketat mungkin dan sebersih mungkin, dipahami dari sumbernya (quran dan sunah) sehingga perlu dilakukan dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk mempelajarinya yaitu dengan ijtihad, tidak boleh ditambah dan dikurangi. Tetapi dalam masalah bukan ibadah, kita bukan hanya dibolehkan, bahkan dianjurkan, untuk berdaya cipta dan berkreativitas sebanyak banyaknya. Oleh karena itu hal yang merupakan perkara di luar ibadah, pada dasarnya diperkenankan atau halal dikerjakan, tidak sebagaimana dalam hal ibadah kepada Allah.

Di situlah Islam Indonesia yang telah "bersentuhan" dengan budaya lokal yang sifatnya partikular harus bisa bersifat akomodatif, bisa berdialog tidak "kaku" sehingga segala hal yang sifatnya budaya harus dilenyapkan dari dunia Islam Indonesia. Lokalitas Islam Indonesia adalah ciri khas Islam Indonesia yang sangat berharga dan harus dilestarikan, sebab tidak bertentangan

sama sekali dengan substansi agama. Simbol tidak saja boleh tetapi merupakan bagian penting dalam Islam Indonesia, sebaliknya substansi merupakan hal yang tidak boleh dikalahkan dengan sekadar hal hal yang sifatnya simbolik. Keduanya harus dapat berdialog, dapat berdialektika dan karena itu harus akomodatif dengan konteks lokalitas. Lokalitas Islam Indonesia adalah Islam yang tidak bertentangan dengan Islam di Saudi Arabia atau di kawasan Timur Tengah lainnya. Tidak semua yang berbau Timur Tengah adalah Islam dan harus diikuti oleh umat Islam Indonesia.

Umat Islam Indonesia, harus memiliki landasan yang kuat tentang Islam dan Budaya Lokal (Lokalitas Indonesia) sebab hal itu akan memunculkan pelbagai kreativitas dan perkembangan ilmu pengetahuan yang telah berkembang lama di Eropa dan Amerika bahkan Asia lainnya. Di Jepang misalnya, mereka memiliki nilai-nilai lokal dalam beragama selain keyakinannya pada ajaran Shinto dan Tokugawa Religi sebagaimana disampaikan Robert N. Bellah. Di Jawa (Kediri) tentang masyarakat Islam memiliki keyakinan-keyakinan terhadap Islam yang tidak lepas dari tradisi lokal (Hindu Buddha) serta semangat ekonomi calvinis reformis Kristiani, yang Weberian sehingga tumbuh semangat wirausaha *(enterpreunership)* bagi orang orang Muslim di Kediri (Jawa) dalam kajian Clifford Geertz. Di situlah pemahaman Islam dan budaya di Indonesia harus ditempatkan secara seimbang, tidak boleh pincang sehingga memperlakukan Islam seakan-akan imun dari budaya. Memperlakukan budaya seakan-akan murni dari Islam yang berkembang di nusantara (Indonesia) sejak zaman penyebar Islam awal mula sampai dengan para Wali di tanah Jawa dan guru-guru agama di belahan nusantara.

Berikut untuk lebih mendetailkan membaca tentang Islam Nusantara atau Islam Indonesia saya akan memberikan ilustrasi dari kutipan-kutipan pemikiran Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, seorang cendekiawan Muslim NU yang sangat berpengaruh dalam jagat pemikiran dan praktik Islam di Indonesia selama beberapa

kurun waktu lamanya. Sebagaimana dua temannya yang saya kutipkan pendapatnya Syafii Maarif dan Nurcholish Madjid, Gus Dur memiliki pandangan yang bisa dikatakan sangat fundamental dan penting terkait Islam Indonesia yang sering salah dipahami umum.

Terkait masalah Islam dan kosmopolitanisme misalnya, Abdurrahman Wahid dengan tegas menyatakan bahwa kosmopoltanisme Islam adalah bersumber pada Alquran dan sunah. Kosmopolitanimisme Islam bersumber pada sejumlah unsur dominan seperti batasan etnis, kuatnya pluralitas budaya, dan heteroginitas politik. Bahkan kosmopolitanisme Islam menampakkan dirinya dalam unsur dominan yang menakjubkan, yakni kehidupan agama yang eklektik (sebuah sikap untuk memilih atau selektif dari berbagai sumber dan bentuk pemikiran yang berkembang) selama berabad-abad lamanya.[18]

Lebih lanjut Abdurrahman Wahid berpendapat tentang kosmopolitanisme adalah sebagai berikut.

“Kosmopolitanisme peradaban Islam tercapai atau berada pada titik optimal, manakala tercapai keseimbangan antara kecenderungan normatif kaum Muslim dan kebebasan berpikir semua warga masyarakat (dalam hal bukan agama) tetapi budaya yang tidak bertentang dengan agama (Islam). Bahkan termasuk yang berkembang dalam masyarakat non-Muslim dapat diadopsi. Kosmopolitasnisme semacam itu adalah kosmopolitanisme yang

---

18 Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan*, Agus Maftuh Abigabriel (ed.), The Wahid Institute, Jakarta, 2007: hlm. Dalam buku yang ditulis oleh Mantan Ketua PBNU selama lima belas tahun ini menjelaskan dengan luas mengenai posisi Islam yang sangat mondial tanpa harus menjadi dasar negara di Indonesia sebab Islam sebenarnya sangat compatible dan *available* dengan demokrasi sebagai paham politik modern di dunia sekarang ini. Abdurrahman Wahid dengan baik menguraikan tentang Islam dan Negara Islam, Islam dan Keindonesiaan serta Islam dan dunia Pesantren sehingga jelaslah posisi Islam sekaligus NU di sana.

kreatif, karena di dalamnya warga masyarakat mengambil inisiatif untuk mencari wawasan terjauh dari keharusan berpegang pada kebenaran. Situasi kreatif yang memungkinkan pencarian sisi-sisi paling masuk akal dari kebenaran yang ingin dicari dan ditemukan, situasi cair yang memaksa universalisme ajaran Islam untuk terus-menerus mewujud diri dalam bentuk nyata. Namun demikian, proses tersebut bukannya nyata dalam postulat-postulat spekulatif belaka (tapi) ijtihad.[19]

Dalam konteks Islam Indonesia, jelaslah bahwa kosmopolitanisme merupakan hal yang universal, namun ada banyak hal yang sifatnya partikular dan dapat didiskusikan serta dikembangan dari masyarakat lokal (Indonesia) sendiri. Abdurrahman Wahid melihat antara budaya dan Islam di Indonesia sebagaimana Syafii Maarif dan Nurcholish Madjid adalah merupakan hal yang ambivalen. Dia ambevalen antara unsur teologis (yang murni) dan kemanusiaan (akal) yang bersifat bebas dan relatif-partikular. Ada banyak contoh dalam hal ini seperti simbol-simbol dalan masjid, bangunan keislaman, dan yang dipakai umat Islam seperti janggut, sorban dan seterusnya. Oleh sebab itu umat Islam harus mampu memahami mana yang susbtansi dan mana yang simbol. Oleh karena itu, Abdurrahman Wahid kemudian berpandangan demikian:

> "Jelas bahwa antara norma agama yang ingin diterapkan dan kondisi manusia yang mengembangkan kebudayaan terdapat ketidaksesuaian. Padahal, berkebudayaan artinya meninggalkan kebudayaan pada titik tertentu untuk sampai kepada titik tertentu yang lain. Mestinya, yang paling berkebudayaan adalah tidak berzina, sehingga yang paling beradab disitu. Namun manusia selalu sepotong-sepotong, tidak pernah utuh, dan kesepotongan manusia ini ditunjukkan dengan nyata dalam kasus perempuan yang berbuat zina. Konsekuensinya, karena seluruh manusia berdosa, maka kebudayaan yang dikembangkan juga kebudayaan yang terpotong, tidak utuh. Jadi di sini, terlihat suatu kesenjangan antara agama dan kebudayaan. Di situ pula akhirnya pola pikir umat Islam yang

19 Abdurrahman Wahid, ibid, 2007: 11

berkembang adalah selalu memperhadap-hadapkan antara kebudayaan dengan Islam. Dengan kata lain, pola pikir demikian menciptakan kesenjangan bahkan ketegangan antara islam dan kebudayaan. Hal ini terjadi karena, kebudayaan merupakan hasil perkembangan pemikiran manusia yang tidak pernah statis, selalu berkembang. Sementara ajaran substansial islam tidak pernah berubah-ubah bahkan perubahan ajaran substansial Islam merupakan hal yang dilarang".[19]

Oleh karena itu, islam di Indonesia, menurut Abdurrahman Wahid haruslah menghargai dan meninggikan martabat manusia, dan memposisikan manusia yang setinggi-tingginya. Demikian perkataan Abdurrahman Wahid:

"Menurut pendapat saya, rumusan Islam yang sederhana adalah menganggungkan dan meninggikan martabat manusia atau posisi kemanusiaan haruslah diutamakan. Manifestasinya adalah memelihara hak-hak asasi manusia dan mengembangkan struktur masyarakat yang adil di mana kaum Muslim hidup. Gugus pikiran ini karena *quasi* norma (bukan sekadar norma) tetapi sama dengan norma itu sendiri. Kalau perkembangan kebudayaan tidak sesuai dengan ukuran tersebut, maka harus dihentikan. Juga sebaliknya, jika ada ajaran agama yang bertentangan dengan *quasi* norma maka harus pula dihentikan dan kita mesti mengeremnya".[21]

Di Indonesia, pluralitas agama dan kebudayaan merupakan hal yang nyata adanya, dia tidak bisa ditolak karena itu pikiran kreatif untuk mendialogkan antara agama dan kebudayaan harus dilakukan sehingga Islam Indonesia benar-benar dapat akomodatif, berdialektika dan bersinergi dengan realitas keindonesiaan. Akhirnya, penting bagi kita umat Islam Indonesia untuk mencari jalan tengah ketika menghadapi ketegangan antara agama dan kebudayaan. Ketegangan yang selalu terjadi itu bukan sesuatu yang harus ditangisi dan disesali, karena justru dapat memberi peluang

---

20 Abdurrahman Wahid, ibid, 2007: 297.
21 Abdurrahman Wahid, 2007: 303.

bagi kita untuk selalu berusaha menjembataninya. Di situlah beberapa gagasan Abdurrahman Wahid tentang islam dan negara, islam dan kemodernan, Islam dan NU, Islam dan pesantren, serta Islam dan dasar-dasar kebangsaan akan menemukan relevansinya jika kita secara sungguh-sungguh bersedia mendiskusikannya dengan kepala dingin.

Penutup

Islam Nusantara yang disandarkan pada Muhammadiyah dan NU harus secara cerdas dan cepat mampu merespons masalah-masalah globalisasi budaya, teknologi dan informasi. Hal ini disebabkan perkembangan dunia semakin kompleks dan tidak mungkin bisa dicegah dengan apa adanya *(taken for granted)*. Muhammadiyah dan NU akan menjadi dua organisasi penyebar Islam Nusantara yang berkemajuan jika mampu merespons masalah-masalah aktual yang berkembang di masyarakat demikian cepat.

Muhammadiyah dan NU juga harus mampu merespons masalah kekerasan kelompok, individualis, egois dan pameran kekayaan yang sekarang menjadi "ritual keseharian" dalam kehidupan bermasyarakat. Jargon bahwa "uang adalah segala-galanya" hampir tidak bisa dibantah di masyarakat kita yang semakin permisif. Masyarakat semakin abai dengan masalah-masalah disekitarnya karena disibukkan dengan urusan mekanik dan pragmatis yang mampu menghipnotis seluruh aspek kehidupan manusia. Muhammadiyah dan NU benar-benar menghadapi tantangan serius untuk mampu menghadirkan "wajah Islam Nusantara yang berkemajuan" dengan memadai sehingga tidak ditinggalkan jamaahnya.

Oleh sebab itu, dalam gerakan dakwahnya, Muhammadiyah dan NU harus mampu menyampaikan Islam dengan memperhatikan konteks sosial historis dan kulturalnya. Tidak bisa Muhammadiyah yang selama ini dikenal dengan gerakan purifikasi dan tajdid

melakukan tindakan yang bertentangan dengan konteks sosio-historis. Dakwah Muhammadiyah tidak bisa lagi dilakukan dengan cara "hitam putih" dan sekadar mendasarkan pada fikih halal haram, bidah dan murni, serta menderifasi gagasan fikih yang bersifat formalisasi syariat. Konteks lokal harus diperhatikan sebab tidak semua lokalitas bertentangan dengan ajaran Islam. Muhammadiyah dengan demikian harus melakukan revitalisasi apa yang dinamakan dengan dakwah kulturan. Muhammadiyah perlu merumuskan secara tegas dan jelas tentang bagaimana dakwah kultural hendak dilakukan di masyarakat majemuk. Dakwah kultural yang sesuai dengan semangat Islam berkemajuan dan *tajdid Islamiyah*.

Oleh sebab itu, dalam hal islam nusantara berkemajuan, baik Muhammadiyah maupun NU harus bisa meneruskan nilai universal dari Islam khususnya, dan agama-agama yang sama-sama mencita-citakan tentang perdamaian, kesejahteraan, keadilan, kejujuran dan ketulusan dalam beriman. Inilah yang benar-benar menjadi tantangan Islam Nusantara Berkemajuan agar tidak anti realitas kehidupan. Untuk itulah, Islam nusantara berkemajuan perlu semakin memperbanyak teladan yang baik *(uswatun khasanah)* dalam masyarakat majemuk di Indonesia.

Dinamika Pemikiran Islam NU[21]

K.H. Husein Muhammad

Paling tidak dalam satu dasawarsa ini kita menyaksikan sebuah dinamika pemikiran Islam di kalangan intelektual muda NU yang sangat menarik. Hampir setiap hari di banyak sudut dan ruang komunitas anak-anak muda NU, terpelajar berlangsung perdebatan-perdebatan dan dialektika intelektual yang menarik dan menakjubkan: progresif, dan terkesan bebas. Meski demikian secara umum mereka tetap saja menunjukkan sikap-sikap etis ala Islam pesantren. Dialektika itu berlangsung dalam suasana penuh gairah, mencerahkan, tetapi juga membikin gerah sejumlah orang, baik di dalam maupun di luar mereka. Yakni di dalam organisasi NU sendiri, maupun di luar orgnisasi NU. Saya sungguh menikmati semangat intelektualisme yang disuguhkan mereka. Saya pikir jika demikian keadaannya, maka Islam dan lebih khusus lagi NU punya harapan lebih baik di masa depan. Meski saya tidak menampik jika ada pandangan sebaliknya. Ini karena saya percaya pada keniscayaan perubahan ke arah kehidupan dunia yang lebih terbuka.

Munculnya fenomena progresivitas dan sering menampilkan kesan liberal atau bahkan distigma liberal tersebut konon acap mengganggu dan mengusik ketenangan tradisionalisme dan kenyamanan konservatisme. Bahkan ada sebagian masyarakat Muslim yang sering disebut fundamentalis radikal, justru memandanganya sebagai gagasan dan pikiran yang sesat dan

---

22 *(Makalah disampaikan dalam "Muktamar Pemikiran Islam di Lingkungan NU" di PP Salafiyah Syafi'iyyah, Sukorejo Asembagus, Situbondo Jawa Timur, 3-5 Oktober 2004).*

menyesatkan umat. Istilah yang dipopulerkan mereka untuk kelompok Muslim progresif tersebut adalah JIL, Jaringan Islam Liberal. Mereka menganggap kelompok pemikir progresif itu atau JIL tersebut sedang berupaya menggerogoti dan merusak Islam dari dalam. JIL menurut kelompok radikal itu, membawa sekaligus mengusung ideologi Barat yang sekular dan anti-Islam. Kecurigaan mereka begitu kuat terhadap kelompok NU progresif tersebut. Bahkan mereka tak berhenti memengaruhi dan mengajak para ulama NU untuk mewaspadai gerakan mereka bahkan didesak untuk menghentikan gerakannya.

Akan tetapi saya percaya sepenuhnya bahwa gelombang intelektualisme itu sama sekali tidak menyimpan agenda ideologi mana pun, mereduksi, alih-alih merusak Islam dari dalam, melainkan justru dalam upaya menghidupkan kembali agama ini. Kaum muda melihat dengan sikap prihatin bahwa Islam telah cukup lama dalam keadaan stagnan, berhenti berpikir. Umat Islam juga dalam kurun waktu yang sangat panjang tidak memberikan sumbangan apa-apa dalam proses perkembangan zaman yang terus bergerak ke depan. Baik disadari ataupun tidak, realitas kebudayaan kaum Muslimin di seluruh belahan dunia sudah lama termarjinalisasi oleh proses-proses modernitas yang terus bergerak cepat ke depan, menggerus dan mencabik-cabik tradisi dan kebiasaan-kebiasaan. Sistem kehidupan modern, telah memengaruhi demikian dahsyat dan mendekonstruksi bangunan tradisi-tradisi dan kemapanan-kemapanan intelektual. Fenomena paling umum memperlihatkan bahwa kaum Muslimin di banyak (untuk tidak menyebut seluruhnya) negara Islam menjadi sasaran pembodohan dan pemiskinan bangsa-bangsa maju. Masyarakat Muslimin di mana pun menjadi konsumen dan objek dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dan diproduksi oleh bangsa-bangsa modern. Lebih dari itu hari ini atau bahkan jauh sebelumnya, dunia Arab yang membentang dari Saudi Arabia hingga Mesir, yang penduduknya mayoritas Muslim terpecah dan saling menghancurkan diri. Demokrasi dan sistem negara bangsa

yang mereka anut sejak sekitar satu abad, tengah menghadapi ancaman baru yang cukup serius. Mereka saling berperang, saling membunuh warga dan saudaranya sendiri.

Dalam waktu belakangan mereka mencoba mencari solusi atas keadaan buruk tersebut melalui ajakan kembali ke masa lampau. Mereka terus menuntut dan provokasi kaum Muslimin di seluruh dunia untuk menegakkan kembali sistem politik ala "Khilafah Islamiyah" abad pertengahan. Gerakan dan teriakan mereka terus menggema dan semakin masif. Bahkan dalam banyak kasus gerakan Khilafah Islamiyah sering menggunakan cara-cara pemaksaan, ancaman kekerasan, termasuk teror dan pembunuhan.

Begitulah, realitas-realitas kaum Muslimin tersebut ditatap dengan tajam dan dengan keprihatinan yang penuh oleh generasi muda NU yang progresif itu. Sesungguhnya sikap penuh prihatin ini telah lama dirasakan oleh sejumlah tokoh Islam dunia. Orang menyebutnya sebagai para pembaru Muslim. Beberapa di antaranya adalah Rifa'ah Rafi' al-Thahawi, Muhammad Abduh, Ali Abd al-Raziq, Qasim Amin.

Amir Syakib Arselan mempertanyakan keadaan kaum Muslimin tersebut. Dia menulis buku yang sangat terkenal: "Li Madza Taakhkhara al-Muslimun wa Taqaddama Ghairuhum" (Mengapa kaum Muslimin terbelakang dan Non Muslim Maju?). Buku ini memantik perdebatan panjang para pemikir Islam dan memunculkan reaksi dan apresiasi yang beragam. Di India muncul tokoh besar: Abu al-Hasan al-Nadwi. Dia menulis buku "Ma Dza Khasira al-'Alam bi Inhithath al-Muslimin" (Dunia menderita dengan kejatuhan kaum Muslimin).

Meski tak seperti di dunia Arab yang tercabik-cabik dan penuh darah, di Indonesia, negara yang dihuni oleh hampir dua ratus juga Muslim dan sebagian besar adalah warga NU, keadaan keterpurukan dan kemiskinan tersebut juga benar-benar dirasakan dan dialami warganya. Indonesia adalah negara berkembang dengan beban utang yang sangat besar dan dengan tingkat korupsi yang tinggi

di Asia. Indonesia juga menjadi salah satu negara dengan tingkat kematian ibu yang tinggi, (370 per 100.000 kelahiran), negara yang setiap hari terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Situasi relasi intoleran terhadap kelompok minoritas, berkembang. Kekerasan terhadap kelompok minoritas dan tindakan-tindakan lain dalam kategori melanggar hak-hak asasi manusia. Korupsi merasuki semua institusi negara dari pusat sampai yang paling bawah.

Realitas sosial di dunia Muslim tersebut pada akhirnya melahirkan pertanyaan-pertanyaan besar dan mendasar. Bagaimana kaum Muslimin menjawab klaim diri: "Al-Islam Ya'lu wa La Yu'la 'alaih" (Islam adalah unggul dan tak bisa diungguli)?. Bagaimana kaum Muslimin dapat membuktikan klaim "Al-Syari'ah Al-Islamiyah Shalihah li Kulli Zaman wa Makan" (Hukum Islam selaras dengan perkembangan zaman)? Bagaimana kaum Muslimin dapat menjawab klaim diri bahwa Islam adalah agama "damai", agama kasih sayang dan mencintai perdamaian? Bagaimana kaum Muslimin memandang visi Islam yang Rahmatan lil 'alamin (Kasih Sayang untuk Semesta) itu jika dihadapkan pada fakta-fakta sosial, budaya ekonomi dan politik masyarakat Muslim tersebut? Sejauh mana Islam dan kaum Muslimin memberikan apresiasi terhadap demokrasi dan hak-hak asasi manusia termasuk hak-hak perempuan dan anak-anak? Apa sajakah tindakan-tindakan yang dapat dilakukan oleh Islam dan masyarakat Muslim untuk menghapus kemiskinan dan kebodohan yang diderita umatnya?

Pertanyaan-pertanyaan mendasar dan kritikal inilah yang sesungguhnya menggangu dan sangat merisaukan pikiran para intelektual muda NU dewasa ini. Dalam pandangan mereka sikap mengabaikan dan menutup diri dari kenyataan-kenyataan ini tidak akan menguntungkan siapa pun bahkan bagi Islam. Apalagi bersikap apologetik dengan mengatakan kehebatan diri sendiri atau menunjuk dengan penuh kebanggaan masa-masa Islam gemilang yang telah lampau, tanpa bisa membuktikannya dalam realitas sekarang justru akan memperburuk citranya sendiri. Dewasa ini

di berbagai dunia Barat menyebar apa yang disebut sebagai "Pobia Islam".

Melihat kenyataan tersebut mereka gelisah. Di bawah semangat zamannya, generasi muda NU kemudian mencoba menelusuri kembali akar-akar pemikiran dalam Islam dan pergulatan kaum Muslimin yang pernah ada dalam sejarah mereka. Mereka tidak ingin menyalahkan orang lain. Barat, Amerika maupun negara-negara kuat lainnya di bagian bumi Barat maupun Timur. Keterpurukan harus dicari sebab musababnya dari dalam diri sendiri. Mereka memulai penelusuran dan penggalian terhadap akar-akar pemikiran kaum Muslimin sendiri. Penelusuran atas akar-akar kebudayaan Islam masa lampau itu akan menjadi dasar bagi upaya-upaya merekonstruksi (membangun kembali) pemikiran Islam guna memajukan dan menghidupkan Islam sejalan dengan konteks hari ini dan di sini. Pikiran-pikiran dasar yang mereka usung untuk merekonstruksi Islam tersebut pada akhirnya bermuara pada terma-terma besar: demokrasi (syuro), keadilan sosial (al-'Adalah al-Ijtima'iyah), dan martabat manusia (Karamah al-Insan). Selanjutnya mereka menemukan pilar-pilar Demokrasi. Ia adalah kebebasan (al-Hurriyah), kesetaraan (al-Musawah) dan menghargai orang lain (al-Tasamuh). Para pemikir progresif juga memperkenalkan, menyebarkan dan memaknai kembali pikiran-pikiran brilian para pendahulu mereka, semacam Imam Abu Hamid al-Ghazali, Filsuf Ibn Rusyd, Ibnu Arabi, Jalal al-Din Rumi dan lain-lain. Mereka juga gencar mengusung tema-tema al-Kulliyyat al-Khhams (lima prinsip dasar perlindungan). Ini sering disebut sebagai "Maqashid al-Syari'ah" (tujuan-tujuan agama). Maqashid pada intinya mengusung penegakan hak-hak asasi manusia dan kemaslahatan (kebaikan dan kesejahteraan) sosial. Paradigma ini bagi mereka menjadi niscaya untuk mendasari kebangkitan dan kemajuan peradaban Islam dan kaum Muslimin kini dan mendatang.

Pencarian di Luar Tradisi

Sampai hari ini saya melihat bahwa upaya-upaya rekonstruksionistik yang tengah dilakukan oleh generasi baru NU melibatkan pula otoritas-otoritas ilmiah di luar tradisi mereka. Mereka membaca sumber-sumber ilmiah di luar Kitab Kuning, berbahasa non-Arab.

Boleh jadi hal ini dilakukan karena mereka menghadapi kesulitan untuk menemukan pikiran-pikiran yang menyegarkan, mencerahkan dan mencerdaskan dari karya-karya klasik Islam yang selama itu dijadikan bacaan utama di pesantren dan komunitas NU. Dengan kata lain, kitab-kitab yang selama ini diajarkan di pesantren dan yang mu'tabar, sudah tidak mampu lagi menjawab permasalahan sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan baru.

Sebagian mereka kemudian membaca dan memercayai pikiran-pikiran asing seperti Martin Heidegger, Michel Foucault, Gadamer, Habermas, Paul Ricoer, Nietschze, Robert N Bellah, Hans Kung, Cliford Geertz, Karl Marx, dan lain-lain. Gagasan-gagasan intelektual dari para pemikir barat tersebut telah menarik perhatian mereka guna memberikan jalan bagi kemacetan lalu lintas intelektual mereka selama ini sekaligus memberikan gagasan yang mencerahkan dan menggairahkan. Saya acap terkejut saat bertemu dengan generasi muda NU dan pesantren di banyak tempat. Betapa banyak alumni pesantren yang melanjutkan pendidikannya di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi filsafat, semacam STF Driyarkara. Betapa banyak pula di antara mereka yang melanjutkan studi di negara-negara Barat dan mengambil jurusan politik, sosiologi, antropologi, filsafat dan sebagainya.

Pada sisi lain para intelektual muda NU juga membaca melalui terjemahan maupun teks asli, karya-karya intelektual Muslim kontemporer seperti Arkoun, Hasan Hanafi, Abed al-Jabiri, Nasr Hamid Abu Zaid, Ahmed Abdullahi al-Naim, Abdul Karim Souroush, Farid Essac, Ali Harb dan lain-lain. Para pemikir Muslim ini juga gelisah terhadap realitas kebudayaan Arab dan Muslim yang

dihadapinya, baik di negaranya sendiri, maupun di dunia Muslim pada umumnya. Berbeda dengan para pemikir barat di atas, para pemikir Muslim kontemporer tersebut sebagian besar sangat aktif mengeksplorasi kembali warisan kebudayaan (al-turats) yang mereka kuasai dan yang telah tertimbun di bawah puing-puing khazanah lama yang telah membeku dan yang selama beratus-ratus tahun atau berabad-abad dianggap seakan-akan merupakan daerah terlarang untuk digali, dikritisi dan dibongkar. Upaya eksplorasi dan kritisisme itu sengaja mereka lakukan untuk menemukan kemungkinan-kemungkinan jawaban untuk mengatasi problem-problem kontemporer sambil tetap ingin berpijak pada warisan tradisi Islam. Pertanyaan yang sering kali diajukan mereka adalah "Kaifa Nuhaqqiqu al-Taqaddum Duna an Natakhalla 'an al-Turats (bagimana kita dapat mewujudkan kemajuan tanpa meninggalkan warisan budaya kita). Al-Turats (warisan kebudayaan dan pemikiran) yang dimaksud tidak lain adalah pikiran-pikiran Islam klasik, terutama abad pertengahan.

Semua pemikiran di atas ditangkap oleh generasi baru NU dengan penuh minat dan rasa nikmat. Melalui bacaan-bacaan tersebut mereka melihat bahwa *kemandegan* dinamika pemikiran dan kebudayaan Islam tampaknya lebih disebabkan oleh proses pembakuan dan pembekuan dari dalam kaum Muslimin sendiri. Islam yang begitu luas dinamis dan sangat terbuka untuk segala zaman dan segala ruang dalam perjalanan sejarahnya mengalami proses ideologisasi, reduksionisasi, finalisasi dan tersekat-sekat dalam klaim kebenaran sendiri-sendiri. Saya kira alangkah indahnya jika para intelektual muda NU tersebut merujuk karya-karya klasik kaum Muslimin yang mahakaya dan sangat berharga itu dari sumber-sumber primernya, bukan sekunder, sebagaimana dilakukan para pemikir Islam kontemporer di atas.

Pengamatan dari Dalam

Pengamatan atas dinamika pemikiran Islam di NU dan pesantren dalam perspektif atau cara pandang saya, menunjukkan bahwa arus besar pikiran keagamaan yang ada di dalamnya masih berjalan dengan lambat. Meskipun terdapat nuansa-nuansa dinamis dan responsif terhadap perkembangan masyarakat dan kemajuan-kemajuan kontemporer, tetapi secara umum keadaannya masih sebatas untuk dan sesuai dengan kebutuhan, parsial dan belum menyentuh aspek-aspek besar paradigmatik dan metodologis.

Di samping itu, secara umum pula, pikiran-pikiran keagamaan dalam tubuh NU dan pesantren masih didominasi oleh pikiran-pikiran lama. Fenomena ini misalnya terlihat pada sumber-sumber pikiran keagamaan tersebut popular dengan sebutan Kitab Kuning, atau Kutub al-Turats, atau Kitab Klasik. Kitab-kitab produk zaman pertengahan tersebut sampai hari ini masih menjadi sumber otoritatif untuk melegitimasi pandangan dan perilaku keagamaan masyarakat NU dengan cara pandang, pembacaan dan pemahaman legal-formal atau literalistik. Ini berarti bahwa pandangan-pandangan keagamaan di NU masih sepenuhnya merujuk pada pandangan ulama-ulama dan para sarjana Islam masa lalu di Timur Tengah pada sekitar abad 13-18 dengan pembacaan sebagaimana apa adanya, yakni sebagaimana ketika pandangan-pandangan klasik tersebut ditulis untuk merespon dan menjawab problem-problem dan isu-isu masa lalu dengan segala aspek kesejarahannya. Dengan kata lain, cara itu sama dengan memindahkan peristiwa dalam ruang dan waktu masa lalu ke ruang dan waktu sekarang sebagaimana apa adanya masa lalu itu. Padahal pandangan masa lalu seperti itu sesungguhnya memiliki nuansa budaya dan politiknya sendiri yang sangat jauh berbeda dengan budaya masa kini yang semakin kompleks. Pada sisi lain ia dapat berarti menegasikan kritik, rasionalitas dan sekaligus menghilangkan kesadaran atas perubahan-perubahan dan dinamika sejarah yang terus berjalan ke depan dan dalam nuansa politik dan kebudayaan yang baru. Itulah pandangan

konservatisme yang masih melekat dalam tubuh masyarakat pesantren dan NU. Saya mengerti terlalu banyak orang dari kalangan NU dan pesantren yang tidak setuju dengan kritik ini.

Melalui pengamatan yang lebih serius atas tradisi pemikiran pesantren dan NU segera dapat ditemukan bahwa dinamika pemikiran Islam di NU menemukan titik sentralnya pada geanologi Fiqh Ahl al-Hadits atau tradisionalis. Pola aliran ini lebih melihat kepada siapa yang menyampaikan, bukan apa yang disampaikan. Ia juga berarti mereduksi atau mengalienasi pikiran-pikiran fikih yang mengapresiasi logika rasional dan empirikal (Fiqh Ahl al-Ra'yi). Kitab-kitab rujukan pesantren dan NU sepenuhnya mengambil pola pemikiran tradisional dan konservatif. Jargon pesantren dengan NU sebagai pesantren besarnya sesungguhnya sangat menarik.: "Al-Muhafazhah 'ala al-Qadim al-Shalih wa al-Akhdz bi al-Jadid al-Ashlah" (Menjaga Tradisi yang baik dan mengapresiasi kebaruan yang lebih baik/relevan). Meski demikian simpatik, dalam banyak kasus, pembaruan (tajdid) dan rasionalisme sering tidak mendapatkan apresiasi yang cukup, bahkan cenderung ditolak. Saya acap mengalami respons keras dari komunitas saya dengan cara pandang ini.

Gus Dur: Ikon Progresivitas

Dinamika pemikiran yang lambat dan cenderung stagnan itu tampaknya juga telah lama menggelisahkan pikiran tokoh besar NU, Abdurrahman Wahid atau yang popular dikenal Gus Dur. Sejak tampil sebagai pemimpin puncak NU melalui muktamarnya di Situbondo tahun 1984, Gus Dur secara terus-menerus membuka keran-keran pikiran yang mampat. Ia dengan tanpa beban kultural terus-menerus melancarkan pikiran-pikiran kontroversial dalam sejumlah masalah. Sebagian besar, kalau tidak seluruhnya, pikiran-pikiran Gus Dur tidak sejalan dengan pikiran *mainstream* masyarakat Muslim sendiri, termasuk juga di kalangan para ulama NU. Hampir semua orang tahu Gus Dur kemudian mendapat

serangan balik yang keras dari banyak kalangan terutama dari kalangan kaum puritan dan fundamentalis. Gus Dur juga pernah "diadili" oleh para ulama ketika hadir di Pondok Pesantren Dar al Tauhid Cirebon. Saya hadir dan menuntun beliau menuju mimbar diskusi dan klarifikasi Gus Dur atas pandangan-pandangannya. Menarik sekali bahwa Gus Dur ketika itu dapat menangkis semua kritik yang diajukan. Satu-persatu dari sekian banyak kritik kepadanya, seperti ucapan "Assalamu'alaikum" diganti dengan "Selamat Pagi", "kunjungannya ke Israel, keinginannya mencabut TAP MPR No. 25 Tahun 1966 dan sebagainya, dijawab dengan cerdas, tangkas, lugas dan penuh pesona, sedemikian rupa sehingga para hadirin tak dapat membantah. Mereka seperti terhipnotis, tak dapat berkata apa-apa lagi, meski sebelum kehadiran Gus Dur, mereka telah siap "menghujat" dan "menghakiminya".

Berbeda dengan generasi tua NU dan pesantren, pikiran-pikiran besar Gus Dur tersebut justru ditanggapi dengan penuh antusias oleh kalangan muda NU. Mereka begitu gembira pikiran-pikiran beliau, karena dengan begitu mereka menemukan dasar legitimasi yang kuat dari tokoh karismatik berikut pengaruhnya yang besar itu. Mereka kemudian banyak yang mengikuti "sunnah"nya; berpikir progresif. Gus Dur adalah ikon perubahan besar bagi kaum muda NU.

Satu hal paling mengesankan adalah ketika dalam sebuah halaqah (seminar) yang diselenggarakan oleh P3M dan RMI tahun 1988 di Pondok Pesantren Watucongol, Magelang, Jawa Tengah, Gus Dur mengemukakan gagasannya mengenai perlunya memekarkan wawasan kitab kuning melalui reaktualisasi kandungannya (Istiyaq al-Muhtawayat). Menurutnya untuk keperluan ini ada dua cara atau jalan yang harus ditempuh dan dilalui. Pertama adalah penggarapan melalui jalur pengembangan wawasan kesejarahan atas kandungan kitab kuning. Kedua penggarapan melalui jalur kontemporanisasi (ta'shir). Apa yang dimaksud Gus Dur dengan cara yang pertama adalah upaya menghidupkan kembali perhatian kepada latar belakang budaya dan peradaban. Sementara jalur yang

kedua meniscayakan upaya-upaya kontekstualisasi atas diktum-diktum pikiran lama sebagai cara untuk menjawab dan menyelesaikan isu-isu kontemporer secara lebih komperhensif (hulul mutanasiqah al jawanib). Inilah sumbangan besar Gus Dur yang lain dalam menggerakkan perubahan mendasar khususnya di bidang kajian-kajian Islam dan lebih spesifik lagi kajian fiqh.

Dinamika Progresivitas yang Sedang Melangkah

Pertemuan para ulama NU dan pesantren dalam halaqah tersebut bagi saya merupakan tonggak baru dalam perjalanan sejarah NU, khususnya berkaitan dengan proses dinamisasi pemikiran Islam, khususnya di Jam'iyah NU. Tidak lama sesudah itu para tokoh muda NU dan pemikir generasi baru segera melanjutkan gagasan besar ini melalui upaya-upaya transformasi metodologis dalam "bahtsul masail" secara lebih progresif lagi dan terkesan sangat provokatif. Kerangka dasarnya adalah menjadikan teks-teks keagamaan klasik khususnya dalam bidang fikih tidak hanya diambil dalam bentuknya yang tekstual (literal, qauli) tetapi juga didekati dengan analisis metodologis atau "Manhaji". Pendekatan metodologis ini pada gilirannya meniscayakan pemikiran logika rasional, penelusuran latar belakang sosio-historis (al-Siyaq al-Tarikhi) dan mempertemukan (al-Taufiq) dalil-dalil normatif (al-Adillah al-Naqliyah) dan realitas-realitas empiris (al adillah al-Aqliyah wa al-Waqi'iyyah).

Adalah sungguh menggembirakan bahwa proyek kontekstualisasi kitab kuning dan pembacaan atasnya melalui pendekatan Manhaji tersebut kemudian dijadikan keputusan Musyawarah Nasional NU di Lampung, tahun 1992, dan kemudian dikukuhkan dalam muktamar-muktamar NU berikutnya. Saya kira inilah lompatan besar yang telah dicapai oleh NU dalam pergulatannya dengan dinamika sosial yang terus berubah. Ini juga sekaligus menjadikannya sebagai dasar untuk menolak pandangan umum yang selalu dialamatkan kepada organisasi Islam terbesar di

dunia ini sebagai kumpulan orang-orang sarungan dan tradisionalis. Meskipun sampai hari ini proyek tersebut belum memperoleh apresiasi warga NU secara masif, namun dinamika kehidupan sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan yang terus bergulir akan menjadikan proyek ini sebagai pilihan yang tak terelakkan di masa depan.

Generasi Progresif NU Mengusung Banyak Gagasan Besar

Dinamika pemikiran Islam di kalangan NU terus mengalir, menyebar dan menemukan titik progresivitasnya secara lebih jauh pada sejumlah tokoh muda NU. Mereka—dengan perspektifnya masing-masing—mengusung isu-isu kontemporer sekaligus menggugat kemapanan-kemampanan intelektual dan kekakuan-kekakuan konservatisme. Kita dapat menyebut, misalnya Said Aqil Siraj, salah satu rois Syuriah PBNU. Sa'id, seorang kiyai muda, dengan kekayaan khazanah klasiknya, pernah, dengan vulgar mengriktik warisan doktrinal Aswaja yang menjadi ideologi NU. Doktrin-doktrin Aswaja yang selama ini dijunjung tinggi-tinggi menurutnya menyimpan sejumlah kelemahan dan bahkan memasung kreatifitas berpikir. Doktor ilmu Tasawuf Falsafi dari Universitas Islam Umm al-Qura, Saudi Arabia itu juga mengkritik keyakinan kalangan NU tentang tokoh sufisme ; Junaidi al-Baghdadi yang menjadi doktrin sufisme di NU selain Hujjah al-Islam al-Ghazali. Said berusaha membutikan bahwa pandangan al Junaidi sesungguhnya sama dengan pandangan tasawuf Ibnu Arabi yang dikenal dengan "Wahdah al-Wujud", itu. Ulama muda dari Cirebon ini juga berani mengkritik pandangan pendiri NU Hadratusyeikh Hasyim Asy'ari. Said pada akhirnya mencoba melontarkan gagasan : Aswaja seharusnya diposisikan sebagai Manhaj al-Fikr (metode berpikir) dan bukan sebagai paham doktrinal yang mapan.

Tokoh muda lain yang profresif adalah Masdar Farid Mas'udi. Dia adalah santri tamatan pesantren Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah dan pesantren Krapyak Yogyakarta. Di PBNU dia pernah

menjadi wakil katib dan sekarang salah satu Rois Syuriah PBNU. Masdar mengusung gagasan besar tentang keadilan social melalui penyatuan pajak dan zakat. Pajak sebagai tubuh dan zakat sebagai ruhnya. Gagasan ini dituangkannya dalam karya ilmiah monumentalnya, berjudul: "Agama Keadilan, Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam".

Gus Dur melalui kata pengantar untuk buku rekonstruktif ini memberi komentar menarik di bawah judul: "Kasus penafsiran ulang yang tuntas". Masdar mendasarkan pandangan-pandanganya pada paradigma kemaslahatan sebagimana pernah dikemukakan oleh Imam Thufi dengan kaidahnya: "Idza Shahhat al-Mashlahah fa Huwa Mazhabi" (jika ditemukan kemaslahatan, maka di sanalah pendapatku). Paradigma ini berhadapan dengan kaedah klasik yang dipedomani para ulama Sunni: "Idza Shahha al-Hadits fa huwa Mazhabi" (jika ditemukan hadits nabi yang sahih, maka di sanalah pendapatku). Meskipun karya Masdar ini belum mendapatkan respon yang cukup signifikan dari masyarakat NU, karena pandangan-pandangan Masdar yang liberal, namun Masdar tetap yakin bahwa gagasannya akan diterima di kemudian hari. Di luar gagasan keadilan sosial ini Masdar juga mengusung isu tentang hak-hak perempuan. Untuk ini dia menulis buku berjudul "Islam dan Hak-hak Reproduksi". Buku ini memberikan andil cukup berarti bagi gerakan feminisme dalam mengusung kesetaraan gender. Saya melihat dengan mata kepala bagaimana Masdar di hadapan para ulama NU yang tengah menyelenggarakan "bahtsul masail" dalam Munasnya di Bagu Lombok, mampu menjelaskan dan menjawab serangan-serangan para kiai dengan argumentasi yang mendalam mengenai pandangan Islam tentang perempuan. Hasilnya memang mengejutkan banyak pihak, terutama para pengamat dan peneliti NU. Perempuan berhak memainkan peran-peran publik/politik sebagaimana kaum laki-laki. Keputusan ini kemudian hari menjadi dasar dan rujukan para aktifis perempuan NU dalam menyuarakan persamaan harkat dan martabat laki-laki dan perempuan di semua wilayah kehidupan. NU melalui keputusan ini sudah mengabsahkan

perempuan menduduki jabatan presiden atau kepala negara. Bagi banyak kalangan, keputusan Munas ini menunjukkan dinamika pemikiran progresif dan modern dalam NU.

Tokoh muda NU lainnya yang belakangan sangat populer karena pikiran-pikirannnya yang progresif, atau menurut sebagian orang disebut "liberal" adalah Ulil Absar Abdallah. Ia adalah santri tamatan Kajen Pati. Dalam struktural NU dia menjabat sebagai ketua Lakpesdam (Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia). Tulisannya yang dimuat di koran Kompas: "Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam" sempat menggegerkan publik Muslim Indonesia. Dari tulisan ini, Ulil harus memetik hujatan banyak pihak. Kelompok Islam radikal atau fundamentalis bahkan telah menghukuminya sebagai seorang yang murtad (keluar dari Islam) dengan risiko "halal darahnya". Ulil mengusung gagasan besar bernama "Pluralisme". Dengan gagasannya itu Ulil mencoba menepis sekaligus menggugat sekat-sekat sekterianisme dan diskriminasi antara manusia, termasuk dalam soal agama. Dengan kata lain Ulil menegaskan tentang kesamaan agama-agama manusia. Dengan kata lain agama-agama yang ada di muka bumi harus mendapat penghormatan yang sama dan dilindungi. Hal menarik dari tokoh dan direktur Jaringan Islam Liberal (JIL) ini adalah bahwa dia masih rajin membaca karya-karya klasik warisan para ulama masa lalu baik dari sunni maupun nonsunni. Dalam suratnya kepada saya dia sering menyebut nama-nama pemikir besar Islam klasik semacam Abu Hayyan al Tauhidi dan karyanya "Al Imta' wa al Muanasah", Al-Jahizh dengan karyanya: "Al Bayan wa al Tabyin" dan "Al Hayawan", Abu al-'Ala al-Ma'arri dengan "Luzumiyyat"nya". Beberapa nama lain yang sering menjadi referensi piirannya adalah Al-Farabi, Ibnu Rusyd, Ibnu Khaldun Abu Bakar al-Razi dan lain-lain. Ulil tampaknya sangat mengagumi pemikiran tokoh-tokoh tersebut. Saya amat mengaguminya, lantaran bacaannya atas kitab-kitab klasik yang luas.

Menyusul mereka adalah Abdul Moqsith Ghazali. Ia adalah intelektual muda yang progresif. Moqsith adalah alumni Pesantren Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur yang kemudian melanjutkan studinya di UIN Jakarta sampai memeroleh gelar Doktor. Disertasinya: "Argumen Pluralisme", memperlihatkan pikiran-pikirannya yang berani. Pluralisme agama-agama adalah keniscayaan alamiah sekaligus keniscayaan Agama Tauhid. Keyakinannya didukung dengan segudang argumen keagamaan dari banyak sumber primer dan bermutu sekaligus dengan berbagai perspektif keilmuan Islam; Kalam (teologi), Fiqh (yurisprudensi) dan Sufisme (mistisisme) serta sumber-sumber sejarah. Moqstih juga semakin piawai menulis.

Pemikir muda NU yang lain, untuk menyebut beberapa saja adalah: DR. Musdah Mulia, Dr. Neng Dara Afiah, Dr. Nur Rofiah, Dr. Rumadi, Prof. Dr. Abdul A'la, Jadul Maula, Zuhairi Misrawi, Dr. Faqihuddin Abdul Kodir, Marzuki Wahid, dan lain-lain. Mereka menulis buku yang kritikal dan menggugat kemapanan intelektual. Pikiran-pikiran progresif mereka justru banyak didasarkan pada pembacaan atas Kitab-kitab Kuning. Mereka mampu membaca dan memahaminya dengan fasih dan baik.

Beberapa pikiran generasi muda NU tersebut dan masih banyak lagi orang muda NU yang lain, dalam banyak hal sesungguhnya telah "menyimpang", berbeda, atau "keluar" dari tradisi NU sendiri. Rujukan-rujukan pemikiran mereka telah tidak lagi menghiraukan batas-batas yang didoktrinkan oleh Jam'iyyah NU sendiri yakni Aswaja sebagaimana yang dipahami oleh masyarakat selama ini. Pemikiran mereka telah melintasi batas-batas kultural di mana mereka lahir tumbuh dan duduk di atas kursi-kursi struktural di NU. Sungguh pun demikian adalah sangat menarik bahwa mereka tetap saja anak-anak kandung NU. Meski mereka sering ditegur dan diperingatkan, tetapi saya tidak mendengar ada seorang ulama NU atau ulama Pesantren sendiri yang memurtadkan mereka dari NU apalagi keluar dari Islam. Betapa arifnya sikap mereka dan saya

sungguh merasakan keindahan ini. Sikap seperti ini tidak saya jumpai dari sejumlah organisasi Islam lain. Tokoh-tokoh Islam puritan justru dengan mudah mengkafirkan atau memurtadkan mereka. Saya mengagumi mereka sekali selalu berharap para pemikir muda tersebut tidak berhenti di tengah jalan gara-gara ada kepentingan-kepentingan politik kekuasaan. Jika ini terjadi, maka tentu sangat disayangkan. Semoga tidak. Amin.

Tradisi Keagamaan Nahdlatul Ulama: Berhadapan dengan Tantangan Baru

Franz Magnis-Suseno

Panitia LKTI dan Seminar Nasional Ikatan Sarjana Nahdhaltul Ulama Banyumas tahun 2015 mengajak saya untuk menyumbangkan tulisan. Saya melakukannya dengan senang hati.

88 Tahun Nahdlatul Ulama

Dalam pandangan saya, seorang Katolik, NU di Indonesia sejak semula memainkan peran ganda. Peran pertama berkaitan dengan pendiriannya. NU didirikan untuk memberi ekspresi, identitas dan dampak sosial pola Islam yang sudah lama berada di Indonesia, tetapi dari pelbagai sudut ditantang dan dipertanyakan. Dengan Hadratus Syaikh K.H. Hasyim Asy'ari mendirikan NU beliau menyatakan keyakinannya akan keaslian dan kesejatian Islam mereka yang merasa terwakili oleh NU. Beliau yakin bahwa Islam NU adalah Islam yang bagus. Dalam NU Islam Indonesia menunjukkan (bukan satu-satunya, tetapi) salah satu wajahnya yang penting.

Dan sebagai organisasi yang sangat luas dan beranggotakan banyak warga NU dengan sendirinya menjadi salah satu kekuatan sosial-politik di negara kita ini. Semula peran NU tidak begitu mencolok, meskipun sebagai partai politik, NU selalu diperhitungkan. Tetapi justru dengan NU kembali ke Khittah 1926 di bawah pimpinan Abdurrachman Wahid, NU menjadi anggota

masyarakat sipil di Indonesia yang semakin penting. Pentingnya NU kelihatan dalam beberapa segi. Saya mau menyebutkan hanya dua saja. Yang pertama, di tahun-tahun *geger* pada senja Orde Baru dan permulaan Reformasi 1996-2000, NU menjadi unsur penentram dalam bangsa Indonesia. NU mengambil sikap konstruktif, tak pernah obstruktif, selalu terbuka bagi pendamaian dan penyehatan masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah bahwa NU, seperti dirintis oleh Gus Dur, menunjukkan keterbukaan dan toleransi, bahkan lebih dari toleransi, kesediaan untuk saling menerima dan bekerja sama dengan umat beragama lain. Bahwa Banser NU sampai sekarang masih menjaga beberapa gereja di malam Natal dan Paskah, serta peran NU yang positif konstruktif dalam konflik-konflik berbau agama di Indonesia Timur 1999 - 2002 merupakan sumbangan besar NU terhadap rasa aman umat-umat non-Muslim serta bagi perdamaian dalam masyarakat Indonesia.

Bahwa NU dalam Muktamar bulan Juli 2015 lalu menegaskan Islam Nusantara, Islam di dalamnya nilai-nilai rakyat Indonesia terpelihara dan terangkat, melanjutkan tumbuhnya NU menjadi faktor stabilisasi dan penentraman utama di Indonesia.

Dua Tantangan

Akan tetapi sekarang Indonesia, dan dengan demikian juga NU, ditantang dari dua sudut. Dari sudut ekstremisme agama dan oleh kebusukan korupsi dalam kelas politik yang semakin merajalela. Ekstremisme agama merupakan distorsi terhadap keagamaan yang sejati, ekstremisme itu totaliter karena di luar pandangannya yang sempit dan penuh rasa benci segala keyakinan dan nilai ditolak. Ekstremisme agama tidak memberi ruang bagi rasa kebangsaan dan meremehkan segala pertimbangan kemanusiaan, serta tidak ragu-ragu bertindak kejam dan brutal terhadap siapa pun yang tidak mau tunduk terhadap ideologi mereka. Bagaimana mungkin ada orang merasa bisa berkenan pada Tuhan apabila ia membunuh diri sambil membunuh laki-laki, perempuan-perempuan dan anak-

anak yang tidak berdosa? Mereka mengganas bahkan terhadap saudara dan saudari seagama yang tidak mau tunduk total terhadap mereka. Penghancuran peninggalan-peninggalan sejarah mulia bangsa-bangsa yang bertahan sejak ribuan tahun atas nama kemurnian agama menelanjangi penguapan segala kesadaran akan martabat kemanusiaan dalam mereka itu.

Namun barangkali dampak korupsi malah lebih gawat lagi. Soalnya, korupsi membusukkan integritas bangsa, dan itu berarti juga: korupsi mengancam jati diri bangsa. Orang, kelompok orang dan bangsa yang tidak tahu lagi apa itu jujur mesti sudah busuk dalam inti sari kemanusiaannya. Kalau ekstremisme agamis sekurang-kurangnya masih mau menggantikan nilai-nilai kemanusiaan dengan cita-cita sebuah ideologi betapa pun sempitnya, maka korupsi malah merupakan pembusukan segala cita-cita. Korupsi lama kelamaan menggerogoti komitmen pada bangsa, membuat solidaritas dengan mereka yang ketinggalan menguap, menjadikan rasa keadilan tidak berarti apa-apa lagi. Makin korupsi menjadi kenyataan dalam kelas politik, makin kesadaran bahwa mereka sebenarnya dipilih serta dipanggil untuk mengabdikan diri pada kemajuan masyarakat sudah mati. Kalau seseorang yang oleh rakyat dianggap sebagai pemimpin atau wakilnya hanya memikirkan bagaimana ia dapat memanfaatkan kesempatan itu untuk memperkaya diri dan keluarganya maka sebenarnya sudah tepat kalau dia itu disebut pengkhianat. Bisa ditambah bahwa rasa muak dengan keadaan korup yang semakin menggurita dapat menjadi pendorong kuat orang muda yang masih idealis untuk mau bergabung dengan kelompok-kelompok ekstremis yang menjanjikan bagi mereka suatu hidup dengan makna baru.

Menghadapi tantangan-tantangan itu

Setiap warga bangsa merasa ditantang oleh ekstremisme dan korupsi. NU pun pasti merasa daya tarik dua tantangan

busuk itu. Padahal masyarakat, bukan hanya kaum Nahdliyin sendiri, bukan hanya Islam Indonesia, melainkan seluruh bangsa Indonesia mengharapkan banyak dari Nahdlatul Ulama. Bangsa mengharapkan bahwa NU tidak korup dan memelopori perang melawan korupsi. Dan mereka mengharapkan dari NU wajah Islam yang sebenarnya, Islam yang memancarkan sifat Allah yang paling pertama, yaitu belas kasihan, kebaikan hati dan tanggung jawab bagi kesejahteraan dan keamanan semua. Berhadapan dengan kekerasan atas nama agama yang setiap hari mengisi media, bangsa Indonesia mengharapkan dari NU suatu keagamaan yang penuh kedamaian dan keterbukaan. Dari NU kami yang non-Islam merindukan suatu Islam yang positif, Islam yang terasa sebagai *rahmatan lil alamin*, jadi yang dapat kami rasakan sebagai rahmat, rahmat bagi kami juga, rahmat karena dalam kehadiran kaum Muslim NU kami bisa merasa aman dan terdorong untuk sendiri menjadi unsur yang positif dalam masyarakat.

Mestinya semua agama setuju dalam menolak budaya kekerasan. Taqwa di satu pihak dan di lain pihak membenci, mengancam dan meperlakukan dengan kekerasan orang lain tidak bisa bersama. Yang taqwa itu dekat pada Tuhan dan dekat pada Tuhan berarti harus baik dan berbelas kasih. Keagamaan yang sejati tidak mengancam, melainkan menghormati keyakinan-keyakinan yang berbeda. Itu yang dimaksud dengan toleransi. Menghormati keyakinan orang lain tidak berarti menyetujuinya, melainkan menghormati bahwa dia itu hidup, beriman dan beribadat menurut apa yang diyakini benar di hadapan Tuhan. Tuhan yang tahu!

NU merupakan aset amat penting bagi kesejahteraan dan persaudaraan di Indonesia. Kami gembira dengan adanya NU. Semoga kita selalu membangun hubungan salah percaya dan selalu dalam lindungan Tuhan.

NU dan Kaum Minoritas Muslim

Amin Mudzakkir

Pendahuluan

Agama dan gerakan-gerakan agama sering dituduh sebagai biang masalah dalam berbagai konflik yang meledak di Indonesia pasca-Soeharto. Di Ambon dan Poso, cukup jelas agama memainkan peranan penting dalam memobilisasi kaum beriman untuk berperang. Belakangan hal yang lebih krusial terjadi dalam konflik internal Islam. Diskriminasi dan persekusi terhadap Ahmadiyah dan Syiah tidak bisa dibantah lagi dilandasi oleh argumen-argumen keagamaan. Tuduhan sesat-menyesatkan lahir dari pemahaman keagamaan yang digunakan oleh kelompok-kelompok anti-Ahmadiyah dan anti-Syiah sebagai justifikasi dalam melakukan aksinya.

Pandangan mengenai agama dan gerakan-gerakan keagaman sebagai biang masalah menduduki tempat yang kuat dalam literatur-literatur mengenai konflik. Berdasarkan cara pandang sekuler, masalahnya dimulai persis ketika agama dan politik bercampur-baur tanpa sekat pemisah yang jelas. Dalam pandangan ini, agama akan berbuah kebaikan jika ditempatkan di ruang privat individual. Sebaliknya, ketika agama mengemuka di ruang publik, perseteruan di antara kelompok-kelompok yang berbeda pandangan keagamaannya sulit terhindarkan.

Akan tetapi, kenyataannya dunia hari ini memasuki kondisi pos-sekuler. Batas antara agama dan politik tidak lagi dipisah oleh garis yang tegas. Saling penetrasi antara keduanya kerap kali terjadi. Khususnya di negara-negara Muslim, pemisahan antara

agama dan politik hanya ada dalam angan. Bahkan nasionalisme Indonesia, seperti dikatakan oleh Jeremy Menchik (2016), adalah nasionalisme yang beriman *(godly nationalism)*. Peranan gerakan-gerakan keagamaan dalam perkembangan politik telah diakui sejak awal.

Nahdlatul Ulama (NU) adalah salah satu gerakan keagamaan terbesar di Indonesia. Peranan dan pengaruhnya dalam politik Indonesia tidak perlu lagi diragukan. Namun yang menarik dari gerakan ini adalah kiprahnya dalam membantu mengatasi konflik internal Islam akhir-akhir ini. Ketika Ahmadiyah dan Syiah sebagai minoritas Muslim mengalami didiskriminasi dan dipersekusi oleh gerakan-gerakan Islam lainnya, NU dan organisasi di bawahnya bergerak sebaliknya. Mereka justru melakukan pembelaan dan membantu mencari jalan keluar. Dari yang dilakukan oleh NU ini terlihat bahwa agama bisa berperan dalam meredakan ketegangan dan menciptakan perdamaian.

Tulisan ini menceritakan aktivitas organisasi-organisasi di bawah NU dalam membela kaum minoritas Muslim di Indonesia. Fokusnya adalah Ahmadiyah dan Syiah di Tasikmalaya, Bangil, Mataram, dan Sampang. Bertolak dari observasi lapangan di empat kota itu, tulisan ini memaparkan kiprah Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) NU dan Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) NU dalam mengusahakan terwujudnya perdamaian dan rekonsiliasi.[23] Perlu dijelaskan sedikit di sini, Ansor adalah salah satu badan otonom, sedangkan Lakpesdam adalah lembaga yang kedua-keduanya merupakan organisasi di bawah NU. Pada bagian akhir tulisan ini akan merefleksikan kontribusi NU dan organisasi-organsiasi di bawahnya terhadap perkembangan agama dan politik, khususnya relasi antara mayoritas dan minoritas, di Indonesia saat ini.

---

23 Observasi lapangan dilakukan dalam rangka proyek penelitian LIPI pada tahun 2016 dan 2017.

Peranan Ansor NU di Tasikmalaya dan Bangil[24]

Tasikmalaya dan Bangil adalah dua daerah di mana Ahmadiyah dan Syiah telah eksis sekian lama. Ahmadiyah telah hadir di Tasikmalaya sejak tahun 1920-an dan Syiah telah berkembang di Bangil sejak tahun 1980-an. Namun baru pada tahun 2000-an keberadaan mereka dipersoalkan. Di tempat lain saya telah membahas alasan hal itu terjadi di Tasikmalaya (Mudzakkir, 2017). Konservatisme Islam yang menguat sejak periode akhir Orde Baru melahirkan intoleransi keagamaan. Dalam kondisi itu, kaum minoritas adalah pihak yang paling rentan.

Sejak awal abad ke-20 Tasikmalaya telah menjadi tempat persemaian gerakan-gerakan Islam. Seiring dengan munculnya para pengusaha pribumi, geliat gerakan-gerakan Islam berkembang dengan pesat. Khususnya di daerah perkotaan, Muhammadiyah dan Persis dengan segera mendapatkan dukungan. Selama dekade 1950-an, sementara Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) memenangkan pemilihan umum 1955 di tingkat lokal, Darul Islam (DI) gencar beroperasi merebut wilayah dari tangan TNI. Kedua organisasi ini mempunyai akar kuat di daerah ini. Penguatan Islamisme di tingkat lokal, yang salah satu bentuknya adalah antipati terhadap Ahmadiyah dan Syiah pada awal tahun 2000-an, tidak lain merupakan transformasi dari ahli waris dua organisasi tersebut.

Meski demikian, NU juga mempunyai kedudukan yang kuat, khususnya di daerah pedesaan. Hal ini tentu saja berkat posisi para kiai NU dalam kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Yang paling menonjol di antara mereka adalah K.H. Ilyas Ruhiyat. Pimpinan Pesantren Cipasung ini adalah Rais Aam PBNU 1992-1999.

---

24 Bagian ini diambil dari Amin Mudzakkir, "Ketika Mayoritas membela Minoritas: Peranan Nahdlatul Ulama dalam Proses Bina-Damai Ahmadiyah dan Syiah di Indonesia" dalam Cahyo Pamungkas dkk, *Ketahanan Sosial Kelompok Agama: Lesson Learned dari Komunitas Ahmadiyah Tasikmalaya dan Komunitas Syiah Pasuruan*, Laporan Penelitian LIPI, Jakarta, 2017.

Selain pengajian kitab kuning, di pesantrennya berdiri juga lembaga-lembaga pendidikan formal mulai dari SD hingga universitas. K.H. Ilyas Ruhiyat adalah sosok yang sangat moderat (Yahya, 2006). Dia mempersilakan pesantrennya digunakan berbagai kegiatan tidak hanya oleh para santri, tetapi juga para aktivis NU setempat. Dia mengizinkan pesantrennya dipakai seminar dan diskusi bertema toleransi dan semacamnya. Buku-buku pemikiran Abdurrahman Wahid diperbincangkan secara bebas. Cipasung menjadi perhatian nasional ketika pada 1994 digunakan sebagai tempat Muktamar NU ke-29 yang sangat kontroversial.

Akan tetapi, yang mau dikatakan di sini adalah peranan K.H. Ilyas Ruhiyat dalam menyediakan iklim yang kondusif bagi kaderisasi para aktivis NU di Tasikmalaya pada dekade 1990-an. Generasi ini tumbuh menjadi pengurus NU setempat, termasuk Ansor, pada masa kini. Spirit moderat yang ditanamkan oleh K.H. Ilyas Ruhiyat tertanam kuat. Mereka tidak menganggap Ahmadiyah dan Syiah ancaman terhadap iman. Hal ini ditunjukan secara simbolis dengan keberadaan Masjid Baitur Rahim yang berdiri persis di depan Pondok Pesantren Cipasung. Masjid Ahmadiyah pertama di kota ini, yang dibangun pada 1925 dan diresmikan langsung oleh Maulana Rahmat Ali itu, tidak pernah diganggu. Hubungan antara warga Ahmadiyah dan penduduk sekitar juga berlangsung dengan normal. Masjid ini baru dipersekusi pada 2012 oleh segerombolan anggota Front Pembela Islam (FPI) yang datang dari luar.

Ketua PCNU Tasikmalaya, K.H. Didi Hudaya, mengatakan bahwa pemahaman aqidah antara Ahmadiyah dan NU memang berbeda.[25] Namun sejauh tidak mengganggu, demikian pandangan alumnus Cipasung ini, tidak ada alasan untuk mempersoalkan mereka. Dalam kenyataanya mereka tidak mengganggu. Mereka tidak berusaha menambah anggota, apalagi merebut dari organisasi Islam lainnya. Oleh karena itu, dia terbuka dengan

25 Wawancara dengan K.H. Didi Hudaya, 2017.

tawaran Ahmadiyah untuk mengadakan pengobatan homeopati gratis di pesantrennya sewaktu acara reuni tahun 2013. Ratusan orang hadir dan sebagian besar ikut pengobatan homeopati itu. Ketika diberi tahu bahwa kegiatan itu adalah kegiatan Ahmadiyah, para peserta merasa tidak ada masalah. Keagamaan adalah satu hal, sedangkan pengobatan kesehatan adalah hal lain. "Kita biasa berobat kepada dokter orang Cina atau Kristen, mengapa kepada orang Ahmadiyah tidak boleh?", kata salah seorang dari mereka sebagaimana diceritakan oleh Didi Hudaya.

Sikap dan pandangan yang sama ditampilkan oleh pengurus GP Ansor Kota Tasikmalaya. Menurut H. Ricky Assegaf, ketuanya, Ansor mengikuti sepenuhnya petujuk dari para kiai NU mengenai prinsip-prinsip *tawassuth* (moderat), *tasammuh* (toleran), *tawazzun* (seimbang), dan *i'tidal* (tegak lurus/adil).[26] Mengenai Ahmadiyah, dia memandang mereka sebagai sesama warga negara yang berhak menjalankan keyakinannya secara bebas. Oleh karena itu, berdasarkan instruksi pimpinan pusat Ansor di Jakata, dia berjanji akan membantu Ahmadiyah jika mereka dipersekusi oleh kelompok-kelompok Islam lainnya. Mereka yang menyerang Ahmadiyah adalah kelompok yang juga suka mengolok-olok NU. Dengan demikian, NU dan Ahmadiyah sesungguhnya menghadapi lawan yang sama.

Di sisi lain, pengurus dan mubalig Ahmadiyah Tasikmalaya juga semakin menyadari pentingnya membangun interaksi dan komunikasi yang lebih intensif dengan kelompok lain, khususnya dari kalangan NU. Mereka mengaku hanya NU yang mau berdialog secara terbuka dengan mereka. Oleh karena itu, setiap kali JAI mengadakan kegiatan, wakil dari NU dan khususnya lagi Ansor pasti diundang. Dalam acara perkemahan pemuda (khudam) Ahmadiyah se-Jawa awal tahun 2017, misalnya, pengurus Ansor Tasikmalaya diajak ikut serta. Selain itu, mereka pun sekarang aktif

---

26 Wawancara dengan H. Ricky Assegaf, 2017.

dalam forum-forum bertema kebangsaan, seperti Forum *Bhineka Tunggal Ika* yang dibentuk oleh berbagai aktivis lintas-agama dan lintas-etnis dalam rangka menghadang intoleransi. Ketika Basuki Tjahaya Purnama masuk penjara karena tuduhan penistaan agama, forum ini mengadakan aksi lilin sebagai bentuk solidaritas sesama minoritas.

Dalam konteks doktrin keagamaan mengenai bina-damai, Ahmadiyah merasa mempunyai kesamaan visi dengan NU. *Love for all, hatred for none* adalah jargon Ahmadiyah yang dianggap oleh mereka sejalan dengan pandangan aswaja NU yang lebih menekankan substansi syariat daripada formalitasnya. Juga mengenai sikap terhadap pemerintahan. Bagi Ahmadiyah, haram hukumnya melawan pemerintah yang sah. "Jika kami harus berperang dengan saudara kami Ahmadiyah di Malaysia, misalnya, kami akan melakukannya!", demikian kata mubalig mereka. Kelompok anti-Ahmadiyah pada dasarnya adalah juga kelompok yang mau merongrong ideologi negara. Mereka adalah kaum Islamis garis keras yang bercita-cita mendirikan negara Islam atau NKRI syariah. Dalam hal komitmen kebangsaan, mereka mengaku belajar dari NU. Perdamaian hanya akan terbina jika dibingkai dalam komitmen kebangsaan yang melihat orang lain sebagai sesama warga negara.

Sementara itu, Bangil adalah daerah urban di Jawa Timur yang sejak awal terkenal sebagai kota dagang. Para pengusaha santri, khusunya yang berlatar belakang keturunan Arab, mempunyai kedudukan yang kuat secara sosial dan ekonomi. Dalam hal keagamaan, mereka cenderung berorientasi pada corak Islam modernis. Tidak heran di sini berdiri pesantren Persatuan Islam (Persis) yang cukup besar. Tokoh besar Persis, A. Hassan, mendirikannya pada tahun 1940. Kemudian pada tahun 1976, Habib Husein Al-Habsyi pindah dari Bondowoso ke kota ini. Bersama dengan para habib lainya, termasuk Habib Hasan Baharun, dia mendirikan Yayasan Pesantren Islam (YAPI). Hingga awal tahun 1980-an, pesantren ini dikenal pusat kegiatan aswaja.

Perubahan penting terjadi awal tahun 1980-an. Meski tidak tiba-tiba, pengumuman Habib Husein Al-Habsyi mengenai dirinya sebagai pengikut Syiah membuat geger masyarakat setempat. Sebagai bentuk ketidaksetujuan, Habib Hasan Baharun memutuskan keluar dari YAPI dan mendirikan sebuah pesantren baru, Darullughah Wadda'wah (Dalwa). Pesantren yang fokus pada pengajaran bahasa Arab ini mendeklarasikan diri sebagai pesantren Sunni, tetapi dengan orientasi Timur Tengah (Yaman) yang sangat kuat. YAPI sendiri hingga sekarang sebenarnya menyelenggarakan pengajaran dengan kurikulum yang beragam. Dalam bidang fikih misalnya, pesantren ini mengajarkan kitab-kitab mazhab Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hanbali. Sebagai tambahan, di sini memang diajarkan juga kitab-kitab mazhab Ja'fari sebagai perbandingan. Meski demikian, sejak awal tahun 1980-an itu YAPI dianggap sebagai pesantren Syiah. Belakangan memang didirikan juga *hawza* yang merupakan sekolah khusus calon ulama dalam tradisi Syiah. Banyak alumninya meneruskan studi di *hawza-hawza* terkemuka di Iran.

Akan tetapi, masalah Syiah di Bangil baru memanas pada tahun 2000-an. Setelah berkali-kali diteror, tanggal 15 Februari 2011 YAPI dilempari batu oleh segereombolan orang yang mengaku sebagai kelompok Aswaja. Empat orang santri terluka. Setelah itu pesantren ini masih terus diteror, tetapi tidak sampai terjadi serangan fisik yang lebih besar. Aksi persekusi terjadi lagi pada tanggal 1 April 2016, bukan di YAPI, tetapi sekitar rumah seorang pengikut Syiah yang sedang digunakan sebagai tempat peringatan maulid Sayyidah Fatimah. Aksi ini dipimpin oleh Ustaz Nadhir Basyaib yang juga anggota DPRD Kota Pasuruan dari Fraksi PKS. Belakangan Nadhir Basyaib diciduk polisi, tetapi bukan karena kasus aksi persekusi terhadap Syiah, melainkan karena dia terkait dengan jaringan teroris ISIS.

Dalam penilaian salah seorang pimpinan pesantren YAPI, Habib Ali Ridho, baik NU maupun Muhammadiyah sama-sama bersikap

netral dalam persoalan Syiah di Bangil. [27]Namun dia menganggap NU lebih aktif karena mungkin mereka menghadapi lawan yang sama, yaitu kaum Wahabi. Dia beberapa kali bertemu dengan pimpinan dan kiai NU membicarakan hal ini. Pada pokoknya kedua belah pihak sepakat menjaga kerukunan dan kedua belah pihak juga mengakui bahwa Sunni dan Syiah adalah dua mazhab yang sah dalam Islam. Sementara itu, Muhammadiyah dan organisasi Islam lainnya cenderung pasif. Habib Ali mengaku belum pernah berkomunikasi kepada mereka secara langsung mengenai masalah ini.

Menurut Ketua GP Ansor Bangil, H. Saad Muafi, kelompok aswaja yang suka melakukan tindakan persekusi terhadap Syiah adalah orang-orang yang berafiliasi kepada Ustaz Nurcholish.[28] Dia adalah seorang tokoh agama yang beberapa kali ikut bertarung dalam pemilihan pimpinan cabang NU Bangil, tetapi tidak pernah berhasil. Belakangan dia bersama beberapa habib setempat aktif membangun kelompok aswaja yang dalam hal gerakan lebih dekat dengan gaya Wahabi. Saad Muafi menjelaskan bahwa baik Syiah maupun kelompok anti-Syiah pada dasarnya adalah sama-sama orang Arab. Dalam pengamatannya, sponsor anti-Syiah adalah Wahabi yang juga sering mengolok-olok tradisi NU. Mereka adalah aswaja, tetapi paham aswaja mereka berbeda dengan aswaja-nya NU.

Lebih lanjut Saad Muafi menjelaskan bahwa bagi NU dan Ansor khususnya, Syiah bukan masalah. Mereka adalah mazhab yang sah dalam Islam, seperti juga Sunni. Memang ada sebagian orang Syiah yang berlebih-lebihan, yang suka menjelek-jelekkan sahabat, tetapi hal yang serupa ada juga di kubu Sunni. Bagi Muafi, posisi NU telah jelas. Berdasarkan prinsip-prinsip *tawassuth* (moderat), *tasammuh* (toleran), *tawazzun* (seimbang), dan *i'tidal* (tegak lurus/

27 Wawancara dengan Habib Ali Ridho, 2017.
28 Wawancara dengan H. Saaf Muafi, 2017.

adil), perbedaan paham keagamaan tidak bisa diselesaikan dengan kekerasan. Jangan sampai perbedaan pandangan keagamaan merusak persaudaraan kebangsaan *(ukhuwah wathaniyah)*. Oleh karena itu, jika dibutuhkan maka Ansor siap membantu kaum minoritas, termasuk Syiah, menghadapi kalangan yang mau merusak persaudaraan itu.

Peranan Lakpesdam NU di Mataram dan Sampang[29]

Sementara itu, menanggapi proses diskriminasi dan persekusi terhadap Ahmadiyah di Lombok, Lakpesdam NU Mataram memutuskan untuk tidak masuk ke dalam wilayah perbedaan paham keagamaan.[30] Mereka menilai antipati terhadap Ahmadiyah sulit diubah. Kalangan Muslim umumnya sudah terlanjur percaya bahwa kelompok minoritas ini adalah sesat. Oleh karena itu, tindakan pengusiran terhadap mereka seolah dibenarkan. Sejak 2006 sebagian dari mereka diusir dari kampung halamannya dan hingga kini masih tertahan di pengungsian di Mataram.

Selain tidak masuk ke wilayah perbedaan paham keagamaan, Lakpesdam NU Mataram juga tidak berbicara mengenai repatriasi. Penolakan terhadap Ahmadiyah sangat kuat dan aparat keamanan tidak mau memberikan menjamin jika mereka pulang ke kampung halaman. Lagi pula perumahan mereka di Ketapang, Lombok Barat, sudah hancur rata dengan tanah. Melihat konstelasi sosial-politik di Lombok, Lakpesdam NU berpendapat bahwa tempat yang paling cocok buat Ahmadiyah adalah di perkotaan di mana orang-orangnya cenderung acuh tak acuh, termasuk dalam urusan keagamaan. Lebih spesifik lagi, Lakpesdam NU bahkan menilai

---

29 Bagian ini diambil dari Amin Mudzakkir, "Rekonsiliasi sebagai Masalah Etika: Studi Kasus Pengungsi Ahmadiyah dan Syiah di Indonesia" dalam Cahyo Pamungkas dkk, *Ketahanan Sosial Kelompok Minoritas Agama: Studi tentang Pengungsi dan Relokasi Komunitas Ahmadiyah di Mataram dan Komunitas Syiah di Sidoarjo*, Laporan Penelitian LIPI, Jakarta, 2016.

30 Wawancara dengan Jayadi, Mataram, 31 Mei 2016.

tempat di sekitar pemukiman umat Hindu jauh lebih aman daripada di lingkungan Muslim. Orang Hindu tidak akan mengusik ekspresi keagamaan Ahmadiyah. Kebetulan, Kelurahan Majeluk dihuni juga oleh umat Hindu. Tidak jauh dari Asrama Transito terdapat pura.

Sebagai jalan keluarnya, Lakpesdam NU Mataram membuat kegiatan bersama di sekitar Asrama Transito untuk memecah kebuntuan komunikasi antara pihak pengungsi dan penduduk sekitar. Kegiatan bersama meliputi rapat-rapat RT atau lomba olahraga, selain acara-acara pelatihan yang lebih bercorak produktif untuk meningkatkan kesejahetraan, seperti pengolahan sampah agar bisa diolah menjadi barang-barang yang laku di pasaran. Implikasi ekonomisnya tidak besar, tetapi secara sosial kegiatan tersebut membuat ikatan antara pengungsi dan warga terbangun secara perlahan. Kepala Kelurahan Majeluk sangat mendukung kegiatan bersama tersebut karena secara tidak langsung dianggap membantu mengubah citra Majeluk yang sering dikesankan sebagai kelurahan yang kumuh dengan tingkat kriminalitas yang cukup tinggi. Kegiatan bersama yang difasilitasi oleh Lakpesdam NU dinilai menciptakan solidaritas warga untuk kepentingan warga Majeluk secara umum, tidak hanya pengungsi Ahmadiyah.[31]

Oleh karena itu, pihak kelurahan mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan bahwa pengungsi Ahmadiyah di Asrama Transito adalah warganya. Hal ini penting dalam pengurusan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan dokumen kewarganegaraan lainnya. Pada 2014 dan 2015, para pengungsi Ahmadiyah mendapatkan KTP dengan alamat Asrama Transito, Kelurahan Majeluk, Kota Mataram. Dengan adanya KTP, mereka bisa ikut dalam Pemilu 2014. Tidak hanya itu, dengan adanya KTP pula mereka bisa mengurus dokumen kewarganegaraan lainnya, seperti pembuatan akte kelahiran, KIP (Kartu Indonesi Pintar), dan KIS (Kartu Indonesia Sehat). Dengan biaya sendiri, beberapa

---

31 Wawancara dengan Lurah Majeluk , 2016.

dari mereka sekarang pindah keluar Asrama Transito membeli rumah di tempat lain tapi masih di sekitar Kota Mataram.

Di Sampang situasinya agak berbeda. Sejak pengusiran para pengikut Tajul Muluk pada 2012, kondisi di Desa Karanggayam dan Bluuran masih tetap terasa gawat. Tokoh agama dan politik setempat tidak mau menerima kembali Tajul Muluk dan keluarganya. Sementara itu para pengikutnya diizinkan untuk kembali sejauh mereka menyatakan secara terbuka untuk keluar dari Syiah. Tututan ini tentu saja hanya mencerminkan keinginan golongan mayoritas dan sama sekali tidak mengakomodasi suara minoritas. Para pegiat rekonsiliasi dari kalangan aktivis HAM menolaknya, demikian pula para korban. Oleh karena itu, hingga sekarang para pengungsi Syiah di Sidoarjo hanya bisa pulang secara sembunyi-sembunyi ke kampung halamannya. Jika ketahuan oleh kepala desa setempat yang dikenal sangat anti-Syiah, mereka bisa celaka.

Menghadapi kenyataan yang sulit tersebut, Lakpesdam NU Sampang mengerjakan program inklusi sosial secara sangat hati-hati.[32] Mereka berusaha sebisa mungkin agar tidak dituduh berpihak kepada Syiah. Mereka sadar pengaruh tokoh agama anti-Syiah seperti Kiai Karar di Sampang, khususnya di Desa Karanggayam dan Bluuran, sangat besar. Alumni pesantren Kiai Ali Karar di Pamekasan tersebar di kedua desa itu. Hingga sekarang belum ada kekuatan wacana penyeimbang yang mampu menetralisir pengaruh itu. Beberapa kiai yang lebih berpikiran moderat memilih diam karena tidak mau berkonfrontasi dengan arus besar anti-Syiah yang telah menguasi alam pikiran masyarakat dalam beberapa tahun terakhir ini.

Oleh karena itu, Lakpesdam NU Sampang berpendapat bahwa repatriasi pengungsi Syiah dari Sidoarjo adalah sulit, bahkan

32 Wawancara dengan Faisol, Sampang, 26 Juli 2016

tidak mungkin dalam waktu dekat ini. Meyakinkan masyarakat di kedua desa dari mana pengungsi berasal bahwa Syiah adalah aliran yang sah dalam Islam merupakan pekerjaan yang tidak bisa dikerjalan secara singkat. Alam pikiran masyarakat Madura secara umum masih dikuasai oleh prasangka mengenai Syiah. Prasangka ini terutama dialamatkan kepada Tajul Muluk. Tokoh agama setempat yakin bahwa Tajul Muluk melakukan penistaan agama dengan menghina para sahabat dan Siti Aisyah istri Nabi. Keyakinan ini menyebar melalui kegiatan-kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan. Mempertimbangkan kondisi sosio-kultural ini, Lakpesdam NU Sampang menilai pilihan untuk relokasi lebih tepat daripada repatriasi. Relokasi bisa di tempat pengungsian sekarang di Rumah Susun Puspoagro atau di lokasi lain, tetapi pokoknya bukan di Madura. Pemerintah tentu saja harus menanggung seluruh biaya relokasi itu, termasuk akses terhadap penghidupan mereka setelahnya.

Seperti sejawat mereka di Mataram, Lakpesdam NU Sampang memulai program inklusi sosial dengan cara memecah kebuntuan komunikasi di antara warga di Karanggayam dan Bluuran. Di kedua desa itu masih terdapat pengikut Syiah, tetapi mereka secara diam-diam menutupi identitas keagamaannya. Syiah mengenal tradisi *taqiyyah* yang dimanfaatkan oleh penganutnya demi keselamatan diri dan keluarganya. Usaha ini tidak terlalu sulit dilakoni karena dalam ritual ibadah hampir tidak ada perbedaan yang mendasar antara Syiah dan Sunni. Mereka bisa melakukan salat berjamaah di masjid yang sama, berbeda dengan Ahmadiyah yang hanya mau melakukannya di masjid mereka sendiri. Baik Syiah dan Sunni sama-sama merayakan peringatan keagamaan yang sama, seperti Asyuro pada bulan Muharram atau Maulid Nabi pada bulan Rabiul Awwal. Pokok perbedaan antara Syiah dan Sunni mengenai kepemimpinan pasca-Nabi Muhammad lebih bersifat politis daripada keagamaan.

Kegiatan bersama yang dilakukan oleh Lakpesdam NU Sampang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan warga setempat. Pilihan ini didasari oleh pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih tertinggal. Bahkan secara umum, di antara kabupaten di Madura lainnya, Sampang adalah yang paling miskin. Lokasi Desa Karanggayam dan Bluuran yang terletak di Kecamatan Omben sebenarnya tidak terlalu jauh dari pusat kota, tetapi jalan menuju sana kondisinya kurang bagus. Untuk masuk ke area pemukiman dari mana pengungsi Syiah berasal, kita harus jalan kaki atau menggunakan sepeda motor melewati jalan setapak. Jalan tidak beraspal, melainkan tanah yang becek jika hujan sehingga tidak bisa dilewati oleh kendaraan. Penduduk umumnya mengerjakan tanah tegalan yang ditanami tembakau. Karena tidak mempunyai akses penghidupan yang layak di kampung halamannya, banyak penduduk yang mengadu nasib sebagai tenaga kerja migran ke Malaysia. Status ekonomi penduduk dengan latar belakang Syiah dan Sunni tidak jauh berbeda.

Belakangan Lakpesdam NU Sampang juga mengadvokasi masalah dokumen kewarganegaraan. Hasilnya, Pemerintah Kabupaten Sampang mengirim petugasnya ke Sidoarjo untuk mengurus ulang KTP pengungsi Syiah. Secara administratif mereka tetap diakui sebagai peduduk Kabupaten Sampang.[33] Hal ini merupakan kemajuan, sebab sejak terusir pada 2012 lalu status kependudukan mereka dipertanyakan. Meski pada Pemilu 2014 lalu bisa ikut mencoblos, sebagai warga negara mereka tetap terisolasi di pengungsian. Mereka seperti warga negara kelas dua.

Penutup

Dari keterlibatan GP Ansor dan Lakpesdam sebagaimana yang telah terpapar kita bisa melihat posisi dan peranan NU dalam konstelasi agama dan politik saat ini. Alih-alih ikut serta dalam

---

33 Wawancara dengan Asep Sa'duddun Sabilurrasad, 13 Oktober 2016.

kecenderungan konservatif yang melanda arus utama gerakan Islam di Indonesia pasca-Orde Baru (van Brunessen, 2014), organisasi-organisasi di bawah NU justru tetap bertahan dengan corak keagamaan yang moderat. Lebih dari itu, mereka bahkan melangkah lebih jauh lagi dengan melakukan aksi pembelaan terhadap Ahmadiyah dan Syiah yang dianggap sesat oleh sesama Muslim lainnya. Tidak hanya melindungi kedua kelompok mayoritas tersebut dari persekusi kelompok mayoritas, mereka juga membantu mencari jalan rekonsiliasi di antara pihak-pihak yang berseteru. Di Tasikmalaya dan Bangil, juga di Mataram dan Sampang, para aktivis NU yang tergabung dalam GP Ansor dan Lakpesdam menunjukkan bahwa relasi mayoritas dan minoritas bisa dilakukan dalam suatu kondisi yang saling menghormati. Sebagai bagian dari mayoritas, mereka justru merasa harus melindungi minoritas.

Kiprah NU dalam menjaga dan melindungi sesama kaum minoritas Muslim adalah bentuk ideal dunia pos-sekuler. Keterlibatan gerakan keagamaan dalam politik tidak harus selalu dimaknai secara negatif. Keterlibatan mereka justru memperlihatkan kemampuan agama dalam memberi spirit positif di ruang publik. Meski demikian, idealitas ini tidak diperoleh secara alamiah, melainkan diperjuangkan secara sungguh oleh pelakunya di tengah arus zaman yang bergerak ke arah sebaliknya. Kita tentu saja berharap mereka akan tetap kukuh mempertahankan nilai-nilai keagamaan yang merahmati sekalian alam.

Referensi

Yahya, Iip D. 2006. *Ajengan Cipasung: Biografi K.H. Ilyas Ruhiyat*. Yogyakarta: LKiS.

Menchik, Jeremy. 2016. *Islam and Democracy in Indonesia: Tolerance without Liberalism*. New York: Cambridge University Press.

Mudzakkir, Amin. 2017. "Konservatisme Islam dan Intoleransi Keagamaan di Tasikmalaya", *Harmoni,* Vol. 16, No. 1.

Pamungkas, Cahyo dkk. 2016. *Ketahanan Sosial Kelompok Minoritas Agama: Studi tentang Pengungsi dan Relokasi Komunitas Ahmadiyah di Mataram dan Komunitas Syiah di Sidoarjo*, Laporan Penelitian LIPI: Jakarta.

Pamungkas, Cahyo dkk. 2017. *Ketahanan Sosial Kelompok Agama: Lesson Learned dari Komunitas Ahmadiyah Tasikmalaya dan Komunitas Syiah Pasuruan*, Laporan Penelitian LIPI: Jakarta.

van Bruinessen, Martin (ed.). 2014. *Conservative Turn: Islam Indonesia dalam Ancaman Fundamentalisme*. Bandung: Mizan.

Pesantren Menyikapi Modernitas Pendidikan

Susi Ivvaty

Prolog

Menjelang maghrib di Pesantren Ngalah Pasuruan Jawa Timur, 2016. Seorang santriwati tengah mengaji satu kitab kuning di teras pondoknya (yang saya lupa mencatat judulnya, karena sibuk memotret). Ia cukup mendengarkan suara ustaz lewat pengeras suara, mengartikan beberapa kata di kitab bertulisan *arab gundul* (tanpa harakat) itu. Ia juga memberi harakat sekadarnya, khususnya pada akhiran kata (a-i-u-nya). Di samping kitab yang tengah ia baca, tergeletak buku *Culture and Communications* karangan Deddy Mulyana. Kata santriwati itu, buku akan dibaca seusai mengaji.

Sedikit impresi yang spontan terbersit dalam benak saya adalah, santriwati ini sedang melaksanakan anjuran orang tuanya atau gurunya, bahwa kita hidup di dunia harus menyeimbangkan urusan dunia dan akhirat. Soalnya, orang tua saya juga beberapa kali menasihatkan hal itu. Bolehlah diibaratkan, buku tentang budaya dan komunikasi itu mewakili urusan dunia dan kitab kuning tentang pelajaran hikmah itu mewakili urusan akhirat. Ilmu dan akhlak ibarat dua mata uang yang menjadi bekal hidup di dunia. Begitulah.

Pesantren Ngalah memiliki santri dan santriwati yang sangat banyak, yang sebagian besar juga bersekolah di Ngalah, dari SMP hingga perguruan tinggi. Pagi hingga siang bersekolah, belajar bahasa Indonesia hingga ilmu komunikasi, sore hingga malam

mengaji *jurumiyah* hingga beberapa tafsir Alquran. Jika pusat perbelanjaan sering disebut *one stop shopping*, pesantren yang ada sekolahnya seperti di Ngalah ini, bolehlah disebut *one stop education*.

Bukankah sahih membayangkan satu bentuk pendidikan yang dinilai ideal, semacam ini? Kita belajar ilmu pasti atau ilmu ekonomi sebagai alat/bekal untuk "bersaing" di hidup keduniawian, yang mau tidak mau harus dijalani karena kita dihadapkan oleh orang-orang yang juga bersaing untuk mendapatkan kesejahteraan hidup. Namun kesadaran akan hidup di dunia yang fana itu, mendorong orang untuk membekali diri dengan spiritualitas berbasis keyakinan/agama yang dianut. Begitulah pesantren menyikapi perubahan zaman.

Saya jadi teringat pada satu rapat pleno di kantor Majelis Ulama Indonesia pada awal 2017. Muncul satu pemikiran bahawa kurang maksimalnya aspek transenden dalam lembaga pendidikan Islam formal (bukan pesantren) menimbulkan peradaban umat Islam berujung pada dimensi material dan rasional. Rapat yang diinisiasi Dewan Pertimbangan MUI itu menyoroti lembaga pendidikan Islam modern masa kini yang memiliki problem besar, yaitu diskoneksi aspek *zikir* dan *'ilm* (kognitif-material) serta diskoneksi antara aspek kognitif-material dan amal.

Pada kesempatan itu, Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Islam atau GUPPI melihat bahwa problematika paling utama adalah gagalnya pendidikan Islam dalam membina karakter. Pendidikan masih berorientasi kognitif dan belum mengarah kepada soal akhlakul karimah (akhlak terpuji). Lembaga juga menghasilkan lulusan yang kurang siap dalam persaingan antarperadaban global, benturan paradigma global, dan kekaburan identitas. Hal itu bisa jadi karena desain kurikulum meninggalkan khazanah budaya asli nusantara sehingga kehilangan sensibilitas pendidikan berkemajuan. "Contoh nyata adalah masih banyaknya kekerasan di mana-mana, antardesa hingga antarsekolah. Lalu banyaknya

korupsi, perkosaan, pelecehan, hingga narkoba yang melibatkan orang Islam mulai pelajar hingga pemimpin," kata Imam Tholkhah dari DPP GUPPI, dalam pertemuan itu.

Dalam pandangan Wakil Ketua Watim MUI Nasaruddin Umar, sistem pendidikan pada abad ke-19 ternyata kewalahan melayani pendidikan abad ke-20 dan ke-21. Ia melihat ada yang salah dengan pendidikan Islam yang terkesan mengalami kepribadian ganda. Bicara agama sepertinya menjadi sangat normatif dan kita kehilangan ilmu laduni yang sekarang disebut bid'ah. Kita menjadi konsumen peradaban dan pemikiran orang luar ketimbang produser. Padahal, dunia Islam Indonesia seharusnya bisa menjadi produser pemikiran keilmuan.

Pesantren diyakini menjadi lembaga pendidikan informal yang mampu mencetak pribadi berakhlaqul karimah serta membekali para santri dengan ilmu agama yang cukup komplit. Namun pesantren saja dirasa tidak cukup. Satu model pesantren modern dengan jadwal pagi hingga siang sekolah/kuliah dan sore sampai malam mengaji di satu tempat yang sama, dirasa lebih ideal. Akan tetapi, mungkin akan muncul lagi gugatan, lantas kapan ada waktu buat mereka untuk bersosialisasi dengan "dunia luar" dan belajar kehidupan "yang sesungguhnya"? Waduh.

Sejarah Panjang

Kita semua mafhum akan sejarah keberadaan pesantren yang sangat panjang. Jika masa ditarik ke belakang, pesantren tak bisa dilepaskan dari kehadiran agama Hindu pada abad ke-4. Hindu dan kemudian Islam yang datang pada abad ke-15 sama-sama menyosialisasikan warisan budaya. Dua agama ini juga memiliki para pemegang kearifan. Brahmana di Hindu dan ulama di Islam.

Pesantren muncul seiring akulturasi budaya Islam dengan tradisi pertapaan yang sudah lebih dahulu lahir pada masa Hindu-Buddha. Guru dan murid hidup di satu tempat selama proses belajar-mengajar (Olman Dahuri dan Nida' Fadlan, 2016). Pada

era pemerintahan raja-raja Hindu, pendidikan berlangsung di padepokan, di bangunan seperti pendopo dekat candi. Model padepokan ini berlanjut pada masa kerajaan Islam, yang kemudian disesuaikan menjadi pesantren, ditambah dengan langgar atau surau.

Pesantren di Jawa pada abad ke-17 menjadi pusat gravitasi baru kehidupan masyarakat dan mampu menyetarakan strata sosial kaum santri dan priayi. (Howard M Federspiel, The Oxford Encyclopedia of the Islamic World). Datangnya bangsa Portugis yang membuka sekolah agama dan VOC yang membangun sekolah perkebunan pada abad ke-17 tidak membunuh pesantren. VOC memusatkan pembangunan sekolah di Indonesia bagian Timur. Pada tahun 1645, di Ambon sudah berdiri 33 sekolah perkebunan dengan 1.300 siswa. Pada tahun 1708 jumlah siswa meningkat menjadi 3.966 orang.

Pemerintah Hindia Belanda waktu itu tidak memperhatikan atau acuh tak acuh pada pesantren, bisa jadi karena tidak tahu atau karena enggan turut campur. Ketika muncul Pan Islamisme di Timur Tengah dan Mesir, terjadi juga gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Muncullah gerakan kaum muda di Sumatera Barat, Jamiatul Khoir di Jawa, lalu organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Belanda membebaskan orang untuk beragama melalui kebijakan *policy of religious neutrality*, tapi pemberian pelajaran agama di sekolah formal harus seizin gubernur genderal (pada tahun 1809).

Dalam rezim Orba, agenda negara dianggap paling penting dan masyarakat sipil dianggap penting karena mereka merupakan sarana untuk mencapai agenda itu (Jones, 2015). Model komando dalam hal penetapan budaya diperkuat selama Orba, yang membenarkan adanya intervensi negara yang lebih besar. Kebudayaan di bawah Soeharto digunakan untuk membenarkan hubungan hierarkis kekuasaan (Jones, 2015).

Dalam kasus kebijakan pesantren, Soeharto merangkul pesantren tapi dengan syarat-syarat seperti penerapan kepramu-

kaan dan pengajaran P4. Tujuannya agar pesantren takluk pada pemerintah, agar pesantren yang sejatinya independen dan bahkan telah membentuk subkultur sendiri, terhubung dengan pemerintah. Selain itu, pesantren juga ditarik masuk ke ranah politik.

Penelitan di dua pondok pesantren di Cirebon Jawa Barat, yakni Ponpes Kempek dan Ponpes Tegalgubug, cukup menggambarkan penetrasi pesantren ke dalam kehidupan masyarakat. Ponpes Kempek Ciwaringin Cirebon berada di perkampungan yang dikelilingi persawahan. Suasananya hening. Pada tahun 2000, jumlah penduduk di Desa Kempek mencapai 3.837 jiwa dan jumlah santri di Ponpes Kempek berjumlah 1.492 yang sebagian besar memang warga sekitar (Wahid, Marzuki dan Muhaimin AG, 2001: 206).

Pengajaran di pesantren yang didirikan K.H. Harun bin Abdul Jalil itu sangat memengaruhi gaya hidup para santrinya. Para pengasuhnya sangat dihormati dan berpengaruh. Akibatnya, para pengasuh pesantren mulai berpolitik, atau setidaknya mendukung partai politik tertentu. Sebab, parpol yang berafiliasi dengan kiai selalu menang karena santri dan masyarakat mengikuti garis politik kiai.

Pada satu masa saat Orde Baru, Partai Persatuan Pembangunan menang di Kempek karena didukung kiai. Ketika mayoritas kiai pindah ke Golkar, Golkar pun menang. Begitu pula ketika pada tahun 2000-an para kiai mendukung Partai Kebangkitan Bangsa, PKB menang di Kempek. Begitulah karisma kiai di mata santri dan masyarakat sehingga kerap dimanfaatkan oleh partai, golongan tertentu, dan penguasa.

Begitulah dari masa ke masa pesantren selalu menjadi lahan tarik-ulur kepentingan banyak orang, seiring dengan hampir tidak pernah surutnya kepercayaan masyarakat pada pesantren sebagai lembaga yang mampu meluluskan (tentu tidak semuanya) pribadi berakhlak mulia. Hingga kini masih banyak orang tua yang memercayakan pendidikan anaknya ke pesantren. Bahkan muncul

para orang tua berpendidikan sekolah umum yang menyekolahkan anak-anaknya ke pesantren.

Kitab Kuning

Boleh jadi kitab kuning memang menjadi daya tarik utama pesantren. Kitab kuning terasa "wah" banget bagi masyarakat urban dan bisa memahami isi kitab kuning adalah hal luar biasa, membuatnya menjadi berbeda. Jika seseorang telah memiliki kapital ekonomi dan kapital budaya—meminjam istilah Pierre Bourdieu—dalam kehidupan Islam urban, maka kapital budayanya makin membesar pada saat ia mengenal kitab kuning. Hal ini bisa dilihat dari, misalnya, kaum Islam urban yang mengaji kitab Ihya Ulumuddin asuhan cendekiawan Ulil Abshar Abdalla (sejak Ramadan 2017), yang kemudian mampu berpenetrasi dengan alam "tradisional". Bayangkan, di dalam satu majelis "kopi darat Ngaji Ihya" ada sosialita dan lulusan pesantren (yang masih kinyis-kinyis), sama-sama sarungan.

Kitab kuning memang menjadi rujukan utama pembelajaran di pesantren. Kitab yang dalam bahasa Indonesia berarti buku, dalam konteks pesantren mengacu pada buku-buku bertuliskan Arab yang berisi tentang berbagai keilmuan Islam seperti tauhid, fikih, tasawuf, sejarah, dan ilmu bahasa (nahwu dan sharaf). Karena warna kertas kitabnya biasanya kuning (meski ada juga yang putih), maka kitab rujukan disebut kitab kuning.

Kitab adalah akar tradisi keilmuan Islam di Nusantara di mana pesantren adalah lembaganya. Melalui pesantren, akses terhadap kitab-kitab yang berisi khazanah ilmu-ilmu keislaman dalam bahasa Arab menjadi terbuka (Tim Peneliti Balai Litbang Kemenag: 2015). Kitab kuning karangan ulama-ulama lama dari Arab dan Mesir dipertahankan untuk dipakai, tapi banyak pesantren tidak lagi memakai semua kitab rujukan seperti dahulu. Melemahnya kajian kitab kuning terjadi karena modernisasi dan globalisasi,

seperti terjadi di pesantren Madrasah Al-Hikamus Salafiah Babakan Ciwaringin Cirebon (Tarobin, 2015).

Seiring perkembangan zaman, pesantren-pesantren di Indonesia juga menggunakan kitab-kitab baru yang disesuaikan dengan kondisi kekinian. Kitab-kitab itu dibuat oleh para santri NU, misalnya Ahkamul Fuqaha (2011) tentang panduan hidup sehari-hari Muslim nusantara. Kitab lain adalah Thariqah al-Hushul ala Ghayat al-Wushul (2002) tentang ushul fikih karangan K.H. A Sahal Mahfudh (Fatoni, M Sulton, 2015).

Banyak kiai pesantren yang menyusun kitab rujukan sejak abad ke-19, seperti di Jakarta ada K.H. Ahmad Marzuki (Jatinegara), K.H. Abdul Majid (Pekojan), dan K.H. Mahmud Ramli (Menteng). Mereka adalah para kiai yang belajar bertahun-tahun di Arab Saudi dan Mesir, berguru pada ulama-ulama besar di sana. Karya-karya K.H. Marzuki misalnya Siraj al-Mubtadi fi Usul al-Din al-Muhamadi, berisi ilmu kalam/teologi/tauhid (Iswanto, Agus. 2015: 44).

Menjembatani Dualisme Pendidikan

Sejak Indonesia merdeka, pemerintah telah berusaha menjembatani dualisme pendidikan Islam, yakni pendidikan Islam tradisional atau pesantren dan modern atau sekolah. Pemerintah berkewajiban melaksanakan amanat UUD 45 Pasal 31 tentang pendidikan, karena UUD telah disepakati menjadi UU tertinggi dalam negara yang memuat dasar seluruh sistem hukum dalam negara (Supardi, Nunus. 2013).

Maka itu, pada tahun 1946, lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tentang Pemberian Bantuan Kepada Madrasah, termasuk di dalamnya pesantren. Inilah produk kebijakan pertama tentang madrasah di masa kemerdekaan. Madrasah dan pesantren pun makin berkelindan. Banyak pesantren mendirikan juga madrasah di lingkungannya, sebagai bentuk penyesuaian dengan sekolah modern.

Madrasah yang umumnya dikelola oleh yayasan dan atau pesantren adalah sekolah unggul yang bercirikan Islam. Alangkah bagus jika bisa mengombinasikan pesantren dan madrasah. Dengan demikian, anak madrasah diharapkan memiliki aspek intelektual, emosional, dan spiritual yang baik (Yusuf, 2016).

UU Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pendidikan Agama di Sekolah Umum membuat sekolah-sekolah agama untuk mencetak guru bermunculan, seperti Sekolah Guru Agama Indonesia, Institut Agama Islam Negeri, dan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri. Setelah itu pada tahun 1975 diterbitkan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri yakni Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Aturan itu untuk menjembatani perbedaan pendidikan pesantren, madrasah, dan sekolah umum. Akhirnya melalui UU Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan Islam dikelola oleh Kemenag.

Pendirian perguruan tinggi Islam berlangsung sejak 50-an. Menteri Agama K.H. Wahid Hasjim dalam sambutannya saat pembukaan PTAIN di Yogyakarta pada 26 September 1951 menekankan pentingnya perguruan tinggi Islam di negara yang mayoritas warganya beragama Islam. PT Islam akan melahirkan generasi pemikir yang cerdik pandai dan bertakwa. “Akan tercegahlah suatu bahaya terbelahnya generasi bangsa kita yang akan datang (Wahid, 2001). ”

Pesantren dan madrasah yang sama-sama memberi bekal keilmuan, akhirnya diintegrasikan. Sebab jika seseorang hanya mengaji di pesantren, ia tidak akan mendapatkan ijazah untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Maka madrasah negeri pun banyak yang lokasinya menyatu dengan pesantren. Para siswa belajar di madrasah dari pagi hingga siang, dan mengaji di pesantren dari sore hingga malam.

Merujuk data Education Management Information System Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Tahun 2015/2016, terdapat

28.961 pondok pesantren di Indonesia. Perinciannya, 15.057 (52%) pesantren salafiyah atau hanya mengaji saja dan sisanya 48% pesantren plus pendidikan formal/nonformal. Adapun total santri pesantren berjumlah 4.028.668 orang. Dari jumlah itu, 1.858.352 santri (46,13%) masuk madrasah (MI/MTS/MA) dan 1.343.230 santri masuk sekolah umum (SD/SMP/SMA). Sebanyak 67.320 santri melanjutkan ke perguruan tinggi dan 82.046 santri mengikuti program kesetaraan. Jadi, masih ada 16,82% atau 677.712 santri yang hanya mengaji kitab saja (Kompas, 24 Oktober 2016).

Ternyata banyak santri yang hanya ingin mengaji saja di pesantren. Soal bagaimana kelak menghidupi diri dan keluarganya, bisa dipikirkan nanti. Banyak pesantren yang lantas mendirikan unit usaha, bertani, dan beternak. Seperti dikatakan Khofifah Indar Parawansa (2013: 172), pesantren tidak hanya melahirkan lulusan yang berorientasi menjadi ustaz dan ustazah, tapi membekali para santri dengan "ilmu dunia", yakni keterampilan untuk besaing dalam lapangan kerja. Dengan begitu, lulusan pesantren tak hanya menjadi pekerja rumah tangga di luar negeri tapi juga mampu menjawab persoalan kemiskinan dan kebodohan.

Ma'had Aly

Ma'had Aly adalah lembaga perguruan tinggi yang dikembangkan oleh pesantren, sebuah institusi keilmuan agama murni yang berbasis pada kitab kuning atau kitab berbahasa Arab yang disusun oleh ulama-ulama dunia. Terdapat 13 Ma'had Aly di 13 pesantren di Indonesia yang telah mendapat surat keputusan dari Kementerian Agama. Surat keputusan izin pendirian 13 Ma'had Aly diserahkan oleh Kemenag di Pesantren Hasyim Asy'ari, Tebuireng, Jawa Timur, 30 Mei 2016 (portal resmi NU, 30 Mei 2016).

Menag Lukman Hakim Saifuddin berharap, wawasan keindonesiaan dimasukkan ke dalam kurikulum Ma'had Aly,

selain ilmu-ilmu agama murni, seperti fikih, ushul fiqih, hadis, dan tasawuf. Hal itu penting dilakukan karena lulusan Ma'had Aly harus mampu memetakan kondisi masyarakat di sekelilingnya dan berperan dalam masalah-masalah kebangsaan. Ma'had Aly menjadi satu-satunya lembaga pendidikan tinggi keagamaan yang paling bertanggung jawab merespons perkembangan zaman (wawancara dengan Menag Lukman Hakim Saifuddin, 2 Juni 2016).

Di sini jelas, pemerintah membuat kebijakan yang menguntungkan dua belah pihak, negara dan pesantren. Imbasnya meluas ke santri dan masyarakat juga. Kemenag membantu agar eksistensi Ma'had Aly diakui negara sehingga dibuatlah peraturan menteri agama yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Di satu sisi, pemerintah menitipkan pesan agar muatan kebangsaan diajarkan. Selebihnya pemerintah tidak menginterversi hal-hal lain terkait kurikulum. Di sini tampak kebijakan kebudayaan yang menjangkau masa depan. Pemerintah menangkal paham radikalisme dan fundamentalisme menyusup ke pesantren. Negara sangat berkepentingan dalam hal ini, pun masyarakat.

Ma'had Aly bertugas menghasilkan ulama yang kredibel. Jangan sampai ada orang yang tidak jelas keilmuannya tiba-tiba dipanggil kiai atau ulama, lalu menjadi populer karena sering tampil di televisi. Padahal, ulama adalah orang yang menjadi rujukan keilmuan keagamaan dan memiliki kualifikasi ataupun syarat keilmuan yang dijamin. Sosok ulama juga menjadi wajah keislaman di Indonesia pada umumnya (Harian Kompas, 4 Juni 2016).

Kebijakan pemerintah terkait pesantren dalam kaitan dengan pendidikan Islam dan pendidikan umum, tampak lebih baik di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pesantren tetap dibiarkan mandiri, tapi ada bantuan fasilitasi. Meski demikian, tantangan pesantren makin besar terkait kemandirian, agar tidak tergoda

bantuan dana dan dimanfaatkan oleh kepentingan parpol. Seperti diketahui, Yayasan Peduli Pesantren yang didirikan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menawari pengasuh Ponpes Tebuireng Jombang K.H. Salahuddin Wahid untuk masuk dalam kepengurusan. Akan tetapi, Gus Solah menolaknya (*www.kompas.com*, 9 Desember 2016).

Epilog

Hari santri. Presiden Joko Widodo telah menandatangani Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 tentang penetapan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Keppres tersebut ditandatangani Jokowi pada 15 Oktober 2015. Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj menuturkan alasan soal tanggal 22 Oktober itu, bahwa pada 22 Oktober 1945 adalah tanggal ketika pendiri NU, Kiai Hasyim Asy'ari, mengumumkan fatwanya yang disebut sebagai Resolusi Jihad.

Resolusi Jihad yang lahir melalui musyawarah ratusan kiai dari berbagai daerah tersebut merespons agresi Belanda kedua. Resolusi itu memuat seruan bahwa setiap Muslim wajib memerangi penjajah. Para pejuang yang gugur dalam peperangan melawan penjajah pun dianggap mati syahid. Oleh karena itu, dengan atau tanpa persetujuan pemerintah, PBNU akan tetap merayakan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Ada pengakuan resmi negara atau tidak, agenda memperingati Resolusi Jihad akan terus berjalan.

Pemerintah telah membekali aturan. Keppres itu setidaknya menjadi pengingat bagi pesantren untuk tidak berhenti mengevaluasi diri, sehingga hari santri tidak terbatas pada gelegar dan selebrasi saja. Mengingat banyak hal yang saya sebutkan di atas, pesantren tetap dan akan terus mendapat tantangan dari dalam maupun luar. Saya kembali teringat penuturan atau lebih tepatnya sentilan Wakil Rois Aam PBNU K.H. Miftahul Akhyar pada Gerakan Nasional Ayo Mondok 2016 di Pasuruan Jawa Timur, yang tentu masih terkait dengan Hari Santri Nasional.

Ia mengatakan, bisa jadi saat ini tengah terjadi senjakala pesantren. Bukan berarti pesantrennya akan bubar, tapi roh pesantren memudar. Dahulu, petuah para kiai pesantren sangat dijunjung tinggi. Bahkan adakalanya perintah kiai itu lebih sakti dari undang-undang. Hal itu terjadi karena kiai memiliki nilai *uswatun hasanah*, pemberi teladan yang baik. Kiai masa kini berbeda. "Apakah krisis kepemimpinan itu juga melanda pesantren? Apakah pesantren mengalami senjakala? Tentu tidak semua. Sekarang kiai-kiai mobilnya bagus-bagus, tidak lagi sederhana. Bukan berarti tidak boleh punya mobil bagus. Tapi kita butuh ketulusan itu, ketawadu'an, kesederhanaan, yang seharusnya memancar dari pesantren," papar Miftah.

Mari kita renungkan bersama.

Referensi

Dahuri, Olman dan Nida' Fadlan. 2016. Pesantren-pesantren Berpengaruh di Indonesia.

Fatoni, M Sulton. 2015. NU dan Islam Nusantara dalam buku Islam *Nusantara: Dari Ushul Fiqh hingga Paham Kebangsaan*. Bandung, Mizan

Federspiel, Howard M. 1995. *The Oxford Encyclopedia of the Islamic World*. London, Oxford University Press.

Hasjim, A Wahid. 2011. *Mengapa Saya Memilih Nahdlatul Ulama*. Bandung, Penerbit Mizan

Iswanto, Agus. 2015. K.H. Ahmad Marzuki: Masalah Penilaian Kafir dalam Karya Tulisnya dalam buku *Pemikiran Moderat dalam Karya Ulama Nusantara*. Jakarta, Balitbang Kemenag.

Jones, Ted. 2015. *Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia: Kebijakan Budaya selama Abad ke-20 hingga Era Reformasi*. Jakarta, Yayasan Pustaka Obor.

Parawansa, Khofifah Indar. 2013. *Islam, NU, dan Keindonesiaan*. Bandung, Nuansa Cendekia.

Supardi, Nunus. 2013. *Kebudayaan dalam Lembaga Pemerintah dari Masa ke Masa*. Jakarta, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Tarobin, Muhammad. 2015. Madrasah al-Hikamus Salafiyah Babakan Ciwaringin Cirebon, dalam buku *Kontekstualisasi Kajian Kitab Kuning di Pesantren*. Jakarta, Balitbang Kemenag.

Tim Peneliti Balitbang. 2015. *Kontekstualisasi Kajian Kitab Kuning di Pesantren*. Jakarta, Balitbang Kemenag.

Umar, Yusuf. 2016. *Manajemen Pendidikan Madrasah Bermutu*. Jakarta, Refika Aditama.

Wahid, Marzuki dan Muhaimin AG. 2001. Dinamika Pendidikan Islam: Respon Pesantren terhadap Modernisasi Pendidikan dalam buku *Kebijakan Kebudayaan di Masa Orde Baru*. Jakarta, LIPI dan Ford Foundation.

Harian Kompas, tanggal 4 Juni 2016 dan 24 Oktober 2016.

kompas.com tanggal 9 Desember 2016.

nu.or.id tanggal 30 Mei 2016.

Mewarisi Tradisi Dakwah Walisanga, Menuju Lembaga Pendidikan Unggulan

K.H. Luqman Harits Dimyathi

Saya lahir dan besar di pesantren Tremas, Pacitan. Kehidupan saya tak terpisahkan dari denyut nadi pesantren. Suatu ketika saya berkunjung ke sebuah pesantren, yang pada masa kepengasuhan ayahnya, santrinya berjumlah ribuan. Hampir enam ribu santri, tetapi ketika diteruskan oleh putranya sebagai generasi kedua, santrinya tinggal 20 orang saja. Seketika perasaan dan pikiran saya campur aduk antara sedih dan marah. Meskipun itu bukan pesantren saya dan kepunyaan orang lain serta tidak ada hubungan kekeluargaan. Kondisi semacam ini bisa dialami oleh pesantren mana saja. Saya yakin ini pasti ada yang salah. Nurani saya merasa terpanggil dan tergerak untuk berbuat sesuatu agar hal semacam ini tidak terjadi lagi. Dalam pikiran saya seketika terbersit, "Ayo Mondok ... Ayo Mondok ... Ayo Mondok, jangan sampai pesantren ditinggalkan oleh santrinya." Inilah pemicu pertama gerakan Ayo Mondok.

Lalu yang kedua, saat pemaparan visi ketua PBNU terpilih dalam Muktamar Makasar 2010, Kiai Said Aqil Siroj, yakni *audah ila pesantren*, Kembali ke Pesantren. Visi ini tepat sekali dengan kegelisahan saya. Saya kemudian menghubungi Gus Reza (Reza Imam Yahya, Lirboyo, Kediri) dan Gus Rozin (Abdul Ghofarrozin, Kajen, Pati). Saya sampaikan semua keinginan saya untuk mendorong perhatian masyarakat kembali ke pesantren. Keduanya menyambut baik dan bersedia membantu.

Tapi tak ada perjuangan yang mudah. Setelah empat tahun berjalan ide saya belum mendapat respons yang maksimal dari berbagai pihak. Bahkan nyaris tak ada gerakan. Hati saya semakin gelisah dan otak tak bisa berhenti mencari jalan keluar. Alhamdulillah, saya dalam posisi wakil ketua PWNU Jatim, akhirnya mendapatkan waktu untuk bersua Kiai Mutawakkil selaku Ketua PWNU Jawa Timur. Saya sampaikan kegelisahan itu. Kiai Mutaawakkil menyambut dengan antusias dan bertanya, "Apa kendalanya, Gus?"

Saya sampaikan bahwa gerakan ini harus dikawal dengan IT dan media. Tanpa keduanya, gerakan ini kurang berdaya. Kiai Mutawakkil merespons dengan cepat dengan memperkenalkan saya kepada Hakim Zayli, Direktur TV 9. Saat saya bertemu dengan Hakim dan menyampaikan gagasan Ayo Mondok, dia menjawab dengan sangat bersemangat. Sebagai pelaku media Hakim melihat peluang besar dari gerakan ini untuk menggerakkan masyarakat kembali ke pesantren.

Saya kemudian dengan bantuan PP RMI mengundang para kiai, sekitar 15 kiai dan Nyai, yang memiliki kegelisahan yang sama untuk hadir di Kantor TV 9, Surabaya. Dari ruang Aula TV-nya warga *nahdliyyin* inilah, pada 4 Mei 2015, ahirnya digagas Gerakan Ayo Mondok. Para kiai yang hadir meminta saya untuk tidak kepalang tanggung mengawal gerakan ini dan bersedia menjadi koordinator. Saya menerima amanah itu asalkan dibantu oleh Hakim Zayli sebagai sekretaris dan gerakan ini dapat diluncurkan di PBNU. Begitulah, sebulan kemudian di lantai 8 Gedung PBNU, 1 Juni 2015 yang bertepatan dengan 15 Sya'ban 1436 H., Gerakan Ayo Mondok secara resmi diluncurkan oleh Ketua Umum PBNU K.H. Prof. Dr. Said Aqil Siraj. Acara ini disiarkan secara langsung oleh TV 9. Secara keorganisasian, gerakan ini berada di bawah koordinasi Pengurus Pusat Rabithan Ma'ahid Al-Islamiyah (Asosiasi Pesantren-Pesantren NU).

Gerakan ini sebagai bentuk kepedulian kalangan pesantren yang tergabung dalam RMI terhadap fenomena dunia pendidikan yang gagal menanamkan pendidikan karakter kepada pelajar dan mahasiswa. Secara moral, hanya pesantren yang bisa menyelamatkan generasi muda dari kencenderungan-kecenderungan pendidikan yang merusak. Perilaku yang baik hanya bisa dilakukan dengan pembiasaan secara terus-menerus dalam bimbingan guru yang berpengalaman. Pembiasaan selama 24 jam penuh dengan pengawasan, pembinaan dan pendampingan yang terus-menerus adalah bentuk pendidikan karakter yang sudah lama dilakukan di pesantren, jauh sebelum isu pendidikan karakter muncul.

Gerakan ini merupakan upaya serius para pengasuh pesantren untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa pesantren bukan sekadar alternatif, namun lembaga pendidikan unggulan, baik dari segi prestasi akademik maupun dari segi kemampuan manajerial, *leadership*, dan *networking*. Pesantren mewarisi tradisi keislaman Walisanga yang menyebarkan Islam secara damai, santun, toleran, dan sangat menghormati tradisi lokal.

Para kiai membimbing para santri untuk mendalami dan mengamalkan nilai-nilai keislaman yang berpadu dengan tradisi, budaya, dan kearifan lokal sehingga menghasilkan pribadi-pribadi yang cinta Islam, berkomitmen penuh terhadap NKRI, toleran dalam beragama, dan menyebarkan Islam yang menjadi rahmat bagi semua.

Dakwah Walisanga pada hakikatnya proses pendidikan umat yang dilestarikan pesantren. Karena itu, pendidikan pada dasarnya bukan sekadar transfer ilmu, melainkan pembinaan generasi muda agar menjadi pribadi mandiri, matang, dan dewasa, baik secara intelektual, sosial, maupun spiritual. Proses yang luput dari pendidikan di luar pesantren.

Dengan adanya Peraturan Meteri Agama (PMA) Nomor 13 Tahun 2014 dan Nomor 18 Tahun 2014, lulusan pesantren (dengan

persyaratan tertentu) diakui sederajat dengan Madrasah Ibtidaiyah (setingkat SD), Madrasah Tsanawiyah (SMP), dan Madrasah Aliyah (SMA), sesuai dengan level pencapaiannya. Lulusan pesantren bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (termasuk ke perguruan tinggi negeri). Dengan kebijakan itu, lulusan pesantren punya akses luas untuk bisa melanjutkan pendidikannya tanpa terhambat problem administratif seperti sebelumnya.

Menjadi Koordinator Nasional Gerakan Ayo Mondok, sementara posisi saya di "ujung dunia", sungguh sebuah amanah yang sangat berat. Namun berkat dukungan keluarga dan para sesepuh NU juga para pengurus PBNU, saya niatkan semua ini untuk sebagai khidmah dan mencari keberkahan. Berkhidmah pada kiai, pada pesantren, pada RMI dan PBNU. Bayangan pesantren yang menurun drastis karena ditinggal pendirinya, selalu menjadi motivasi besar agar hal itu tidak terjadi lagi di pesantren lain. Di luar struktur NU, saya juga didukung oleh Asparagus (Asosiasi para Lora dan Gus/anak-anak kiai). Mereka inilah para asisten utama kiai dalam menjalankan kegiatan harian pesantren.

Pesantren Makin Diminati

Pertemuan, halaqah, dan silaturahmi membahas pesantren semakin intensif dilakukan di bawah payung Ayo Mondok. Silaturahmi Nasional (Silatnas) Ayo Mondok pertama di laksanakan di Pasuruan, Jawa Timur, 13-15 Mei 2016. Lalu Silaturahmi Daerah (Silatda) wilayah Jawa Tengah dan DIY dilaksanakan di Surakarta, 17-19 Oktober 2017. Silatda berikutnya akan dilaksanakan di Jawa Barat dan Banten, lalu Sumatra. Pertemuan-pertemuan ini menampung berbagai usulan para pengasuh pesantren *(bottom up)* untuk dijadikan program *Ayo Mondok*. Pesantren itu milik para kiai dan nyai, merekalah yang lebih tahu program apa yang tepat untuk mereka. Para pelayan di tingkat nasional hanya berusaha menjembatani dan membagi informasi.

Dari data statistik yang dibuat oleh PP RMI, terlihat pergerakan angka yang luar biasa. *App Ayo Mondok* mulai terisi data pesantren dan dicari oleh orang tua yang ingin memondokkan anaknya. Pesantren semakin hari semakin diminati oleh masyarakat, baik kalangan bawah, menengah, sampai atas. Bahkan tren sekarang, masyarakat urban di perkotaan, berbondong-bondong memondokkan putra dan putri mereka di pesantren. Mereka mulai merasakan kejenuhan hidup di perkotaan dan mulai sadar bahwa kehidupan yang berakar pada agama itu akan membangun nilai-nilai spiritual dan kemandirian, juga membangun kepada cinta tanah air dan negaranya. Gerakan ini direspons sangat baik oleh masyarakat luas dan menjadi gerakan yang positif untuk Indonesia.

Saya ingin mencontohkan perkembangan Pesantren Tremas setelah adanya Gerakan Ayo Mondok ini. *MasyaAllah*, kami pun kelabakan dari sisi kesiapan sarananya. Dengan membludaknya santri baru, akhirnya kami sebagai pengurus pesantren menganggap bahwa lonjakan jumlah santri ini sudah *over load*. Kondisi serupa juga dialami banyak pesantren lain. Baik pesantren *kholafiyah* (modern) maupun pesantren *salafiyah* (tradisional) sama-sama mengalami lonjakan jumlah santri. Peningkatan jumlah santri ini juga dialami oleh sejumlah pesantren yang mulai dibangun dan sedang berkembang. Sebagian pesantren memang tetap konsisten dengan sistem *salafiyah* murni, yakni hanya mendalami kitab kuning yang berisi khazanah keislaman klasik. Pesantren semacam ini jumlahnya cukup besar, lebih dari 30% dari total 27.230 pesantren sesuai data Kemenag 2012. Pesantren-pesantren inilah yang menghasilkan ulama-ulama masa depan yang menguasai khazanah keislaman secara mendalam.

Alhamdulillah, poster Ayo Mondok sudah tersebar di mana-mana. Slogan Pesantrenku Keren menjadi kebanggaan kalangan pesantren. Apalagi setelah Presdiden Joko Widodo meresmikan Hari Santri pada 22 Oktober 2015, gaung gerakan Ayo Mondok

semakin diterima masyarakat luas. Muncul kepercayaan diri yang tinggi bahwa alumni pesantren bisa berkiprah di bidang apa pun, ditopang dengan karakter yang kuat dan pola hidup sederhana. Atas capaian ini, sebagai pelayan Gerakan Ayo Mondok ini, saya merasa bahagia dan bersyukur.

Pesantren Bersih dan Sehat

Salah satu konsekuensi naiknya antusiasme masyarakat untuk menyantrikan anak-anaknya adalah kesiapan sarana dan prasarana yang memadai. Apakah jumlah toliet sudah cukup dan bersih, akan menjadi pertanyaan para orang tua. Ketika santri terkena penyakit kulit *(gudik)* orang tua sekarang tidak serta merta percaya bahwa itu adalah berkah. Gudik bagaimanapun merupakan penyakit, dan penyakit itu harus diobati dan dihilangkan penyebabnya, yakni dengan menyediakan air dan lingkungan yang bersih. Bahwa gudik itu tanda sudah menjadi santri cocok untuk santri *zaman old*, sementara santri-santri *zaman now* membutuhkan lingkungan yang bersih dan sehat. Kebersihan sebagian dari iman, cukup menjadi dalil yang kuat sebagai perintah untuk menciptakan lingkungan pesantren yang bersih dan sehat ini.

Upaya untuk menjaga kebersihan air ini misalnya bisa dilakukan dengan "mengganti" cara berwudu. Jika dulu santri berwudu langsung pada bak air, maka bisa diganti dengan cara mengalirkan air melalui keran. Dengan demikian air yang sudah dipakai langsung terbuang dan air di bak penampungan air selalu berganti dengan air yang baru. Begitu juga dengan penempatan *septic tank* yang berjarak cukup jauh dari sumber air bersih dan saluran pembuangan air yang lancar harus selalu diperhatikan.

Bersih dan sehat itu tidak harus mewah. Kegiatan kebersihan *(tazayyun)* bersama yang dilakukan oleh para santri, selain menjadi ajang bergotong royong juga sebagai kesempatan untuk merawat fasilitas yang ada. Ketersediaan sarana dan prasarana memang dikembalikan pada kemampuan setiap pesantren. Oleh karena itu

setiap pesantren harus menentukan sendiri batasan daya tampung santri agar kebersihan dan kesehatan itu dapat terjaga.

Dalam kaitan sarana dan prasarana ini, saya berharap kepada para pengasuh pesantren untuk mandiri. Dan tidak tergantung pada bantuan pemerintah. Kalau pemerintah mau membantu, dengan catatan tidak memberatkan kepada pesantren, itu hak pesantren untuk menerima atau menolak. Tapi jangan sekali-kali pesantren hanya tergantung pada bantuan pemerintah. Kalau perlu dibalik, pesantren membantu pemerintah, membantu negara.

Kekhawatiran Intervensi

Kendala lain yang masih mengganjal gerakan ini adalah kapasitas IT terkait aplikasi Gerakan Ayo Mondok ini punya aplikasi. Sekalipun telah dijelaskan bahwa gratis dan akan ada tim yang membantu dalam memasukkan *data base* pesantren, tetapi di lapangan masih banyak hambatan. Bagi pesantren di perkotaan atau pinggiran kota yang tidak ada masalah sinyal internet, tentu tidak ada hambatan koneksi, tetapi untuk pesantren di pedalaman, koneksi internet merupakan masalah besar. Namun, kami sepakat untuk mengatasi berbagai kendala itu sehingga dalam lima tahun ke depan PP RMI akan memiliki data lengkap pesantren-pesantren NU, mulai dari sejarah, kurikulum dan lingkungan sekitar. Data ini tentu akan menjadi aset yang luar biasa.

Ada juga sebagian pengasuh yang menyangka gerakan "Ayo Mondok" ini akan mengintervensi pesantren, memengaruhi kurikulum, orientasi politik, dan lain-lain. Kami memaklumi kekhawatiran ini sebab berbagai program yang coba masuk ke pesantren hanya bersifat temporer, misalnya untuk kepentingan Pemilu. Dengan sabar dan telaten kami sampaikan bahwa gerakan "Ayo Mondok" tidak ada niat sama sekali mengintervensi pesantren, khususnya dalam kurikulum. Gerakan ini sifatnya *khidmah,* membantu mengatasi kendala atau problem yang ada di pesantren tersebut, lalu bersama-sama dicarikan jalan keluarnya.

Kendala lain adalah posisi pengurus gerakan "Ayo Mondok" yang bermacam-macam dan dari daerah yang saling berjauhan serta punya kesibukan yang beragam. Untuk bertemu dan rapat pun harus mencari-cari waktu agar tidak mengganggu kegiatan yang lain. Para pengurus ini adalah pengasuh pesantren, sementara di pesantren masing-masing sudah banyak rutinitas dan kegiatan. Untuk kendala yang satu ini diatasi dengan silaturahmi virtual, misalnya melalui piranti media sosial.

Memperkuat Islam Nusantara

Para pelayan Gerakan Ayo Mondok sadar sepenuhnya bahwa gerakan pesantren juga dilakukan pihak-pihak lain yang berbeda akidah hingga mereka yang ingin mengganti ideologi negara. Munculnya para "pengantin bom" yang belajar di pesantren cukup mengganggu citra pesantren. Untuk itu sudah tepat jika Ketua Umum PBNU K.H. Said Aqil Siraj selalu tegas menyebutkan bahwa pesantren NU tidak mengajarkan terorisme dan para teroris itu pasti bukan dari pesantren di lingkungan NU. Maka kepada pengasuh pesantren yang bergabung dalam Gerakan Ayo Mondok kita tegaskan pentingnya menjaga *Islam Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyyah*. Ajaran Islam yang beradaptasi dengan lokalitas yang kemudian dikenal sebagai Islam Nusantara. Gerakan Ayo Mondok bisa membantu memacu menguatnya kembali Islam Nusantara di negeri ini.

Kekuatan Islam Nusantara, antara lain ditopang oleh ikatan kekeluargaan yang kuat. Hadratus Syaikh Hasyim Asy'ari melanjutkan tradisi ini, memperkuat jalinan antarpesantren melalui ikatan pernikahan. Beliau berbesanan dengan para kiai lain yang membuat perkembangan NU sangat cepat dan mengakar. Kepada anggota Asparagus, saya mulai menyosialisasikan kembali tradisi besanan antarpesantren ini. Secara spontan misalnya, saat istri Gus Rozin melahirkan putrinya beberapa waktu yang lalu, saya langsung katakan, "Ini calon menantu saya."

Kepada para Asparagus ini juga saya sampaikan bahwa di pundak mereka semua ada amanah yang sangat berat. Ada warisan pondok yang besar dengan ribuan santri. Kalau tidak mempersiapkan diri dengan baik untuk masa depan, tidak mustahil akan gagal, dan kalau gagal tentu kita semua berdosa. Melalui Gerakan Ayo Mondok ini kita berpikir bersama untuk menyongsong masa depan itu.

Lalu saya sampaikan juga agar pesantren-pesantren besar yang sudah mapan, mulai membagi perhatian kepada pesantren-pesantren lain yang masih dalam tahap pengembangan. Itulah gunanya Gerakan Ayo Mondok, yang sudah mapan terus meningkatkan pelayanan kepada santri dan umat, sementara yang masih berkembang terus dibantu dan didukung agar semakin kuat.

Pentingnya Peran Ning/Nyai

Ketika Asparagus terbentuk di beberapa daerah di Jawa Timur, sejumlah Ibu Nyai Muda atau para Ning, menyampaikan protes karena mereka seolah tidak diberi ruang gerak. Protes mereka diterima dan terbentuklah jalinan para ibu nyai di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sumatra. Saat Gerakan Ayo Mondok diluncurkan, mereka menjadi pendukung utama.

Dukungan para ibu nyai ini luar biasa membantu kami untuk memahami persoalan santri, khususnya santri perempuan yang kompleks. Dari urusan sepele seperti saluran toilet yang sering mampet karena tersumbat pembalut hingga hal-hal lain yang khas perempuan. Para ning ini menjadi pintu masuk yang efektif untuk pembahasan persoalan gender di pesantren.

Salah satu ibu nyai yang perlu saya sebut adalah Ning Uul atau Nyai Maria Ulfa dari Lasem. Ia menginisiasi kampanye anti-narkoba di pesantren. Pada Silatda Ayo Mondok di Surakarta, Ning Uul bersama para ibu nyai yang lain secara khusus merumuskan konsep kampanye ini. Dari para nyai ini juga kami menjadi lebih memahami bahwa ketika seorang kiai pengasuh pesantren wafat,

maka beban seluruhnya beralih ke pundak ibu nyai. Lalu siapa yang melatih atau menyiapkan para ibu nyai yang tiba-tiba harus jadi pemangku perantren ini? Dengan keterlibatan para ibu nyai muda dalam Gerakan Ayo Mondok ini, persoalan-persoalan yang selama ini tak tersentuh dan tak mendapatkan ruang, menjadi terbuka dan dibahas bersama-sama secara terbuka. Dan ternyata pesantren yang dipimpin oleh ibu nyai yang sudah menjadi ulama perempuan, cukup banyak jumlahnya. Contoh sukses para ibu nyai ini menjadi bukti bahwa pesantren sangat terbuka dengan peran perempuan.

Dengan dukungan para kiai muda (gus) dan para ibu nyai muda (ning), saya optimis Gerakan Ayo Mondok akan menemukan bentuk idealnya; melayani kebutuhan santri milenial secara maksimal, menyediakan sarana prasarana yang semakin baik, responsif terhadap perkembangan sekitar, dan tentu saja penguatan kajian kelimuan yang terus meningkat sebagai ciri khas pesantren.

(Pewawancara: Imam Muhtar)

Menuju Kemandirian Pesantren

K.H. Abdul Ghofarrozin

Sekarang ini pesantren banyak jenisnya, tidak lagi seperti dulu, tetapi semua masih sama dalam kerangka *tafaqquh fiddiin'*. Secara prinsip pesantren tetap membimbing semua santri menguasai ilmu keagamaan yang mendasar. Secara garis besar, pesantren terbagi menjadi dua jenis. *Pertama*, pesantren yang mereproduksi ulama, ahli agama. Inilah pesantren yang tetap menjaga tradisi keilmuan klasik, yang masih menjaga keharusan untuk menghafal berbagai kitab mulai dari tata bahasa Arab hingga hukum Islam (fikih). Di pesantren jenis ini santri tidak berhenti pada level sekolah menengah tetapi terus berlanjut hingga tingkat tinggi *(ma'had aly)*. Lalu ditambah lagi dengan *tabarrukan*, mengaji ke sejumlah pesantren untuk mendapatkan sanad kitab-kitab tertentu.

Kedua, pesantren yang mempersiapkan santri yang punya keahlian di luar ilmu agama. Dalam belajar tata bahasa Arab, mereka tidak perlu hafal *Alfiyyah ibnu Malik,* mengaji fikih juga tidak harus sampai ke kitab *Fathul Wahab.* Mereka berkonsentrasi mendalami berbagai keilmuan seperti kedokteran, kimia, matematika. Di pesantren jenis ini cocok jika diterapkan metode-metode baru, seperti menghafal cepat, cara cepat kitab kuning, dan lain-lain.

Jadi ke depan alumni pesantren ada yang menjadi *muttafaqqih fiddin* dan ada yang *muttakhosshish* (spesialis) yang mempunyai keahlian pada ilmu-ilmu tertentu di luar ilmu agama.

Banyak pesantren yang merosot ketika ditinggal wafat kiai utamanya. Kiai memang menjadi figur sentral di pesantren, ia menjadi pelaksana harian sekaligus melakukan fungsi kehumasan.

Tetapi sekarang banyak juga pesantren yang sudah berjalan *by system*. Kiai bukan lagi satu-satunya faktor. Contoh pesantren yang ditinggal sesepuhnya tetapi bertambah pesat perkembangannya yaitu Pesantren Denanyar, Tambak Beras, dan Cipasung. Ketiganya sudah menerapkan sistem kolegial yang saling mendukung dan melengkapi.

Secara alamiah pesantren menemukan bentuk barunya. Memang ada persoalan ketika pengasuh utamanya tokoh nasional atau tokoh yang terkenal lintas provinsi. Saat kiai tersebut wafat, ada sesuatu yang "bolong." Putra-putri atau saudara-saudaranya tidak bisa segera menggantikan peran level nasionalnya itu.Tetapi itu tidak serta merta menjadikan pesantrennya menurun. Fungsi internalnya tetap berjalan karena sudah dipegang oleh level kedua dan ketiga, oleh para gus dan menantu. Bahkan ada pesantren yang mengajak profesional untuk bergabung di dalamnya. Oleh karena itu, saya optimis keberlangsungan pendidikan pesantren tidak akan turun. Sebagai sebuah organisme, ia akan menemukan sendiri caranya untuk survive.

Tantangan IT

Pesantren sekarang ini merupakan kelanjutan dari dakwah Walisanga. Maka bagi saya, tidak ada pesantren wahabi. Kalau ada pesantren yang wahabi itu berarti bukan pesantren. Pesantren itu khas nusantara, khas Indonesia. Pesantren yang asli itu secara genealogis, memiliki hubungan darah maupun hubungan keilmuan, yang bersambung kepada Walisanga. Maka yang secara genealogis tidak bersambung ke Walisanga berarti bukan pesantren, itu lembaga pendidikan biasa. "'Pesantren" yang mengajarkan kekerasan seperti cara menggunakan senjata tajam dan perakitan bom, Itu bukan pesantren, melainkan hanya mengaku-aku pesantren tetapi hakikatnya bukan pesantren.

Selama ini pesantren bersikap defensif terhadap isu radikalisme. Pesantren bereaksi ketika dirinya merasa terancam,

ketika santrinya ada yang ikut paham yang aneh-aneh itu. Pesantren belum bersikap ofensif, secara aktif membuat sistem yang membuatnya imun dari pengaruh radikalisasi.

Harus dicermati bahwa dakwah-dakwah radikal itu menggunakan media sosial yang di pesantren justru masih dianggap sebagai ancaman atau gangguan. Cara berpikir anak-anak muda saat ini *(zaman now)* memang berbeda. Mereka *digital born* sementara saya dan orang-orang yang berumur di atas empat puluh tahun itu hanya *digital migrant*. Karena pemegang kebijakan di pesantren adalah orang yang *digital migrant*, masih belum menyadari bahwa yang mereka asuh adalah *digital born*.

Pesantren sekarang mempunyai tantangan cukup serius karena *ghozwul fikr* (perang pemikian) sudah bergeser dari Timur Tengah ke Indonesia dengan intensitas yang semakin meningkat. Problemnya adalah pesantren belum cukup sadar bahwa mereka harus menggunakan media sosial dengan bijak untuk keperluan ini. Inilah salah satu kelemahan pesantren yang harus diperbaiki.

Pesantren belum melihat teknologi sebagai mitra, sebagai *wasilah* (sarana) yang bisa digunakan, tetapi masih dianggap sebagai ancaman. Ini yang membuat akses terhadap teknologi itu dibatasi. Kalau ada santri yang mengakses *gadget* itu masih secara diam-diam. Di satu sisi santri masih belum begitu membutuhkan, mereka harus fokus belajar dan tidak membutuhkan *gadget* karena semua kebutuhan santri sudah dipenuhi oleh pesantren. Tetapi itu membawa madarat juga karena *gadget* adalah alat dalam konteks *ghozwul fikr* dan remaja sekarang tidak bisa dilepaskan dari *gadget*. Teknologi itu pada akhirnya memang seperti pisau yang bermata dua; tergantung mau dipakai apa, untuk memasak atau melukai orang lain.

Pesantren masih melihat *gadget* itu adalah sebuah ancaman karena bisa untuk "memukul orang". Padahal bisa diajarkan kepada mereka untuk menggunakan *gadget* secara bijak, bertahap, dan melalui mekanisme yang benar. Inilah sebenarnya yang

membuat kita tertinggal dalam "perang" di media sosial karena di pesantren tidak disiapkan untuk itu. Bukan hanya mengatur penggunaan *gadget*, tetapi juga harus dimulai dari sudut pandang, melihat teknologi sebagai *wasilah* untuk mencapai tujuan. Karena kalau melihat sejarah, tidak ada satu pun peradaban yang menang melawan kemajuan teknologi.

Saya bersyukur beberapa pesantren, melalui kiai dan para gus, sudah memiliki kesadaran dan mengaplikasikan teknologi sebagai sarana untuk berdakwah dan pembelajaran, walaupun jumlahnya belum banyak.

Menyamakan Frekuensi

Memang masih banyak pesantren yang memegang prinsip *ma wajada 'alaihi aba-ana*, apa yang telah dicontohkan oleh para pendahulu. Akibat terlalu kaku masih ada yang tidak mau mengurus legalitas pesantrennya karena sejak dahulu juga tidak pernah didaftarkan. Ada juga yang masih menolak menggunakan *speaker* tetapi sudah mau menggunakan *handphone* (HP). HP diperbolehkan karena dalam kitab kuning ada dicantumkan kata *hatif*, yang berarti suara tanpa rupa. *Hatif* ini dianalogikan kepada HP.

Dalam amatan saya, para kiai muda, para gus yang mendedikasikan hidup mereka sepenuhnya untuk meneruskan pekerjaan ayahanda mereka, pada tingkat tertentu bisa dikatakan berhasil. Memang, tidak semua aspek yang diraih oleh sang ayah dapat dilanjutkan oleh sang anak. Ada yang berhasil meneruskan jejak keilmuannya, aspek manajerial pengelolaan, jejaring atau komunikasi ke luar, adaptasi dengan hal-hal baru di dunia pendidikan, dan seterusnya. Mungkin seiring waktu jika kolektivitas pengelolaan pesantrennya bisa dijaga, mereka dapat menyamai bahkan melebihi "prestasi" sang ayah. Jika semakin banyak pesantren yang bisa mencapai hal ini, maka harapan agar kalangan pesantren bergerak lebih ke tengah, menjadi *mainstream* atau kelas menengah yang ikut menentukan, akan tercapai.

Kelompok muda pesantren ini harus diberi ruang dan kesempatan untuk berkiprah. Mereka bisa menjadi jembatan agar "bahasa pesantren" bisa dipahami oleh publik dan pengambil kebijakan. Selama ini ada komunikasi yang terputus atara pesantren dengan publik dan pengambil kebijakan. Gus Dur menyebutkan bahwa "pesantren sebagai subkultur" yang punya struktur dan pola pikir sendiri, mempunyai bahasanya sendiri, pola komunikasi dan kode-kode sendiri, sekalipun pesantren itu tidak terpusat tetapi terpencar di mana-mana. Semua itu harus bisa dipahami oleh publik dan pengambil kebijakan. Perlu ada kesamaan frekuensi dengan dunia di luar pesantren untuk memberikan kesempatan orang luar mengenal pesantren dan sebaliknya.

Mencari kesamaan frekuensi inilah salah satu agenda RMI yang belum selesai. RMI masih berusaha membangun kembali kepercayaan pesantren terhadap RMI sebagai asosiasi yang menyuarakan kepentingan mereka. Kepercayaan itu bisa tumbuh kembali jika RMI melakukan kerja-kerja nyata yang dirasakan manfaatnya oleh pesantren. Dari tumbuhnya kepercayaan itu barulah bisa dijalin konsolidasi pesantren.

Liga Santri Nusantara

Sekian tahun setelah Reformasi, bangsa Indonesia dihadapkan pada kondisi yang berpotensi merenggangkan rajutan kebangsaan. PBNU berpandangan bahwa keberadaan pesantren menjadi semakin relevan dalam menjaga keutuhan bangsa. Maka digagaslah Liga Santri Nusantara (LSN), ajang sepak bola antarpesantren dari seluruh Indonesia. PBNU menugaskan RMI untuk mengelola kegiatan ini. Melalui LSN, masyarakat Indonesia diajak kembali menggalang nilai-nilai kebersamaan dan kerja sama yang merupakan komponen penting bagi keutuhan NKRI.

Pesantren dan sepak bola merupakan dua simbol pemersatu semenjak keduanya tumbuh menjadi bagian dari perjalanan bangsa Indonesia. Eratnya sepak bola dengan kehidupan santri menjadikan

olahraga ini sebagai kegiatan unggulan dalam setiap aktivitas yang berhubungan dengan pesantren. Dan sepak bola terbukti mampu menjadi sebuah kegiatan yang inklusif dan menembus sekat-sekat perbedaan suku, etnis, bahasa, keyakinan serta simbol-simbol primordial lainnya.

Melihat besarnya potensi pemain sepak bola yang belum dibina secara terukur dan terarah di kalangan santri, maka perlu adanya wadah yang tepat untuk memfasilitasi tumbuhnya pesepak bola yang profesional. Melalui penyelenggaraan kegiatan LSN, diharapkan lahir pemain bola profesional yang dapat mengusung nama baik Indonesia di ajang sepak bola nasional dan internasional.

LSN sudah berlangsung tiga putaran. Kami bekerja sama dan belajar bersama mengelola perlombaan beskala nasional ini. Ini sesuatu yang brau bagi kami. *Alhamdulillah* pamor LSN semakin naik ditandai oleh terus bertambahnya pesantren yang terlibat. Dalam LSN 2017 misalnya, diikuti oleh 1.024 kesebelasan (pesantren) dari 34 provinsi yang terbagi dalam 32 region.

Tiga Kemandirian

Dengan adanya peringatan Hari Santri Nasional (HSN) sejak 2015, RMI bisa membuat tema-tema utama yang diangkat secara periodik. Misalnya pada HSN 2017 temanya kemandirian: 'Santri Mandiri, NKRI hebat'. Kemandirian ini diwacanakan pada tiga hal, *pertama*, budaya. Pesantren itu mempunyai kebudayaan yang bisa dikembangkan sedemikian rupa dan itu harus mandiri. Kalau membahas Indonesia, maka tidak bisa lepas dari pesantren. Pesantren itu sebuah peradaban besar yang sudah berlangsung dalam waktu yang lama. Sejak Raden Fatah menjadi Sultan Demak, itu merupakan bagian dari peradaban pesantren. Dalam istilah Kiai Imam Azis, pesantren itu *great civilization*. Pada masa prakemerdekaan, pesantren ikut mendorong terwujudnya kemerdekaan Indonesia. Setelah merdeka, pesantren ikut menjaga kedaulatan NKRI ini apa pun taruhannya. Oleh sebab itu pesantren

harus mampu merumuskan kembali manifesto kebudayaannya yang selaras dengan isu-isu kekinian.

Kedua, mandiri secara ekonomi. Sampai saat ini pesantren itu tidak mendapatkan sentuhan APBN atau APBD, sekalipun sama-sama ikut membayar pajak kepada negara. Jasa pesantren untuk NKRI juga tak perlu diragukan. Kenyataannya pesantren *survive* serta terus berkembang. Kemandirian ekonomi ini mutlak diwujudkan karena kalau dana APBN masuk ke pesantren, pasti ada resiko hukum dan administratif yang bisa saja akan membatasi kreatifitas pengembangan keilmuan yang di pesantren.

Ketiga, kemandirian secara politik. Di sentra-sentra pesantren seperti Jawa Timur dan Jawa Barat, tampak sekali bagaimana politik praktis ikut "merusak" hubungan antarpesantren yang berbeda kandidat. Tak bisa dipungkiri perbedaan kandidat atau jago ini melahirkan kubu-kubu. Sekalipun semua calon dari NU, bagi saya, siapa pun yang menang maka yang kalah justru NU. Kalah secara kultural dan organisasional. Karena siapa pun yang menang, *cost* sosial yang dibayarkan dalam hajat politik seperti Pilkada, jauh lebih besar daripada manfaat yang mereka terima. Apalagi jika terjadi *like and dislike* dalam alokasi APBD yang lebih mendahulukan pesantren pendukung kandidat tertentu, ini akan menimbulkan luka yang lama sembuhnya.

Maka saya sepakat jika pesantren itu berpolitik kebangsaan yang lebih berjangka panjang, bukan berpolitik praktis yang jangka pendek. Pilihan pada politik kebangsaan inilah yang akan membuat *pesantren* mandiri secara politik. Apalagi jika kemandirian ekonomi sudah bisa diwujudkan, maka kemandirian politik ini akan semakin kuat. Semoga kenyataan ini akan direspon oleh pesantren yang akan membuka *ma'had aly* agar ada yang membuka konsentrasi kajian politik *(siyasah)*.

Dengan tiga kemandirian itulah pesantren akan menjadi pilihan masyarakat. Atau menjadi sistem pendidikan nasional. Sebab Sisdiknas Indonesia saat ini masih mengacu pada warisan

penjajah (Belanda) yang memisahkan antarilmu agama dan ilmu umum. Sisdiknas sekarang masih memisahkan antara madrasah dan sekolah. Bagi saya, pesantren mempunyai potensi untuk menawarkan dirinya sebagai *back bound* pendidikan nasional. Untuk menuju ke arah itu, pesantren telah memberikan bukti. Dari sisi sejarahnya sudah teruji, basis tradisinya kokoh berakar, hingga loyalitasnya pada negara yang tidak diragukan lagi.

Potensi Ekonomi Pesantren

Potensi pesantren dan SDM pesantren itu sesungguhnya sangat besar tetapi masih ada jarak antara potensi dan realitas. Masih dibutuhkan upaya keras sehingga pesantren bisa unggul. Masih diperlukan usaha yang sangat keras agar pesantren bisa menjadi agen perubahan. Kesemua itu harus dapat diwujudkan karena pesantren tidak bisa lagi mengabaikan tantangan adanya generasi milenial dan kelas menengah. Generasi milenial adalah pemilik masa depan dan kelas menengah dalam penentu kebijakan di Republik ini.

Pesantren itu dihadapkan dengan industri yang padat modal, sesuatu yang bukan wilayahnya. Pesantren itu mengandalkan jumlah, karena itu usaha yang padat karya lebih tepat diterapkan. Usaha ritel, yang mengandalkan jejaring masyarakat, itu lebih tepat untuk dikembangkan. Dengan bantuan infrastruktur teknologi, usaha model ritel akan berkembang dengan lebih baik. Tetapi jangan sampai usaha ritel ini pada akhirnya hanya kepanjangan tangan dari para pemilik modal besar. Ada pesantren yang sudah memproduksi sabun, pembalut, makanan organik, madu, sarung, kopiah, fashion, kitab, itulah yang diberi peluang dipasarkan di ritel-ritel pesantren. Jika ritel pesantren fokus pada semua kebutuhan santri saja, itu akan menghidupkan jejaring ekonominya. Apalagi kalau bisa memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar.

Saya ingin RMI segera punya aplikasi yang dimanfaatkan untuk berjualan berbagai produksi pesantren. RMI sudah mulai

mendaftar potensi setiap pesantren sekalipun belum sistematis. Memang masih diperlukan pra kondisi, misalnya RMI memfasilitasi pesantren yang punya produk agar bisa mendapatkan izin dari Disperindag setempat, sertifikat halal MUI, dan seterusnya sehingga usahanya berjalan dan pihak pesantren percaya pada "jasa" yang ditawarkan oleh RMI.

Walhasil, peran strategis pesantren di masa depan bukan lagi mimpi. Proses yang dinamis untuk menuju tiga kemandirian pesantren itu tengah berlangsung. Dengan *track record positif* sejak negara bangsa Indonesia belum ada, maka jangan ada lagi kecurigaan berlebihan dari penguasa kepada pesantren seperti di masa Orde Baru. Sudah saatnya pesantren menjadi mitra strategis yang mendapat peran signifikan dalam menentukan kebijakan negara, khususnya di bidang pendidikan dalam kerangka penguatan karakter bangsa.

(Artikel ini diolah dari wawancara dan data NU Online)

Bagian 2
"Dari Indonesia untuk Dunia"

Falsafah Keragaman di Benak Agamawan: Bagaimana Warga NU Mesir Memandang Realitas?

M. Nova Burhanuddin, Lc.

Pucuk dicinta ulam tiba. Mungkin itu pepatah yang paling pas untuk melukiskan warga NU belajar ke Al-Azhar. Kembali pada jati diri. Bagaimana tidak, kalau boleh disederhanakan, Al-Azhar adalah saudara kembar tua NU. Semua ormas keagamaan boleh jadi juga belajar dari Al-Azhar. Tapi hanya NU yang paling mirip. Baik secara metodologi maupun pengaruh di masyarakat. Maka warga NU belajar ke Al-Azhar itu seperti memperdalam kembali ke-NU-annya.

Pengantar di atas akan membantu kita menyadari apa yang akan kita bahas dalam tulisan bersahaja ini. Bahwa memang setiap orang pasti menilai sesuatu dari konteks dia hidup, selain tentunya objek yang dia ingin nilai. Maka dengan begitu warga NU Mesir tentu berangkat dari kesadaran sebagai mahasiswa/i Al-Azhar, juga sebagai bangsa Indonesia di perantauan. Pun dalam berinteraksi dan menyikapi perkembangan sosial politik di Indonesia.

Sebagai mahasiswa/i[34] Al-Azhar, pasti berangkat dari basis keilmuan Aswaja yang menjadi inti keilmuan Al-Azhar. Yakni berakidah *asy'ari-maturidi*, bermazhab fikih salah satu dari mazhab

---

34 Perlu ditulis di sini, ternyata mayoritas lebih nyaman menyebut dirinya santriwan/wati daripada gelar mahasiswa/i Al-Azhar.

empat, bertasawuf dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran beragama mereka berangkat dari fondasi-fondasi tersebut. Lalu kesadaran sebagai bangsa Indonesia tetap mereka lestarikan dan kembangkan, dengan cara selalu mengikuti dan berinteraksi dengan perkembangan sosial politik di Indonesia walaupun secara umum. Tidak pernah ada kasus seseorang yang kemudian memilih beralih menjadi warga negara Mesir. Kita semua sangat bersyukur menjadi bagian dari bangsa Indonesia Raya yang hijau makmur. Kesadaran sebagai azhari/aswaja dan bangsa Indonesia, keduanya sekaligus, menjadi sangat penting. Tak lain sebagai bandul keseimbangan antara pengetahuan agama yang bersifat ilmiah dan interaksi sehari-hari yang bersifat manusiawi. Tumbang salah satu pasti sangat aneh. Apalagi bagi warga NU di mana saja, yang sebenarnya dituntut AD/ART untuk menjadi saleh secara agama dan saleh secara sosial. Mengingat NU adalah organisasi keagamaan dan sosial *(jam'iyyah dîniyyah ijtimâ'iyyah)*.

Kesimpulan bandul keseimbangan tersebut sangatlah penting, untuk meredam sedini mungkin godaan terjun dunia politik praktis ketika menyandang sebagai pengurus NU. Juga meredam sikap acuh tak acuh pada perkembangan sosial politik Indonesia dan dunia. Penegasan kesadaran beragama dan bersosial secara seimbang juga menjadi penting dalam konteks Indonesia akhir-akhir ini, ketika kita menyaksikan narasi-narasi hitam yang mengoyak persatuan dan kesatuan kita, hanya atas nama perjuangan pilpres dan pilkada.

Panasnya situasi tersebut yang mendorong tulisan bersahaja ini muncul. Penulis mencoba membacanya dari perspektif dan visi besar NU yang begitu strategis dan krusial dalam menangani konflik-konflik kebangsaan, seperti terekam sepanjang sejarah republik. Demi kemaslahatan nusa, bangsa, dan agama.

Realitas dan Keragaman

Penulis belum pernah membayangkan keragaman itu begitu jelas dan niscaya sampai penulis sendiri mengalaminya. Realitas, bagaimanapun juga, dipenuhi dengan fenomena keragaman yang luar biasa. Keniscayaan itu bisa menjadi sumber daya maupun bencana, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Tentu saja tiap kita punya cara yang berbeda untuk menyikapi keragaman realitas yang pasti tersebut.

Bagaimana seorang agamawan menyikapi keragaman? Yang *pertama* kali harus dilakukan adalah menerimanya sebagai realitas yang tak terelakkan. Penerimaan ini penting, sebagai pengakuan dan kejujuran, yang tanpanya tiada harapan kemajuan dan perubahan. Dari sana baru kita dapat membangun pemahaman dan keilmuan yang lebih tepat dan teliti.

Warga NU yang Azhari ketika memandang keragaman pasti menerimanya sebagai kenyataan yang bisa dikaji dengan pendekatan keilmuan Aswaja. Warga NU akan memandangnya sebagai realitas penciptaan yang memang selalu dicirikan dengan penuh keragaman (ةرثكلاب فصتم قلخلا). Keragaman yang niscaya ini tidak menafikan Sang Pencipta Yang Maha Esa, دحأ هللا. Bahkan dengan menghayati dan merenungkan keragaman yang luar biasa itu bisa mengantarkan kita pada kesimpulan bahwa Sang Pencipta itu pasti ada, dan Dia pasti Maha Esa. Ini diulas panjang lebar dalam ilmu Tauhid/Kalam.

Yang *kedua*, dalam ajaran tasawuf, alam raya dan fenomena sosial tak lebih merupakan ragam-ragam *tajalli* Allah SWT. Ia bukan Tuhan itu sendiri, hanya *tajalli-tajalli*-Nya, ketika Ia "menampilkan" diri-Nya di hadapan makhluk dalam suatu kesempatan. *Tajalli*-Nya beragam, tapi Allah SWT tetap Maha Esa. Dia bisa dirasakan kehadiran-Nya di setiap kesempatan, ketika senang maupun susah. Maka sudah sepantasnya manusia mentadabburi sifat-sifat dan nama-nama-Nya, mengagumi kebesaran dan keindahan-Nya, bersyukur dan memohon ampun hanya kepada-Nya.

Dua pengertian yang diambil dari dua ajaran ilmu di atas memberi nuansa baru bagi warga NU Mesir khususnya dan warga NU seluruh dunia untuk menghayati kehidupan dengan harmonis nan berilmu. Materi harmoni tersebut menurunkan nuansa berbeda yang bijak. Suatu nilai yang amat dibutuhkan kini melihat perkembangan situasi sosial politik Indonesia dan Mesir dewasa ini.

Pendekatan harmoni itu bergerak menyusuri labirin realitas yang penuh paradoks. Tidak untuk disingkirkan, tapi sebaliknya untuk dihayati dan diselami keindahan penciptaan-Nya dan keagungan *tajalli*-Nya. Pendekatan yang penuh nilai kebajikan dan keramahan. Sebagaimana yang sering diungkapkan oleh Prof. Dr. KH. Sa'id 'Aqil Siraj selaku Ketua Umum PBNU, "Kami ingin mengedepankan Islam yang penuh harmoni." Sikap harmoni yang menerima perbedaan sebagai keniscayaan, yang melakoni keramahan sebagai lelaku. Keindahan-keindahan semacam ini terwujudkan berkat menghayati kandungan ajaran kalam dan tasawuf secara mendalam. Suatu bonus kehidupan yang tentu tidak bisa dicapai oleh orang-orang yang justru mengharamkannya. Sayang sekali.

Nuansa harmoni tersebut melahirkan pemahaman yang baik terhadap kenyataan bangsa Indonesia sebagai bangsa *Bhinneka Tunggal Ika*. Suatu falsafah dasar berbangsa dan bernegara yang digali dari kenyataan Nusantara, dengan puluhan ribu pulau, beragam topografi mulai dari lautan, daratan, pegunungan, dedanauan, pepadangan, hamparan, ratusan suku, ratusan bahasa, ratusan budaya, ratusan latar belakang sosial, kultural, politik. *Bhineka Tunggal Ika* adalah kenyataan tak terelakkan, sebelum menjadi falsafah pemahaman. Nah, falsafah kenyataan ini ternyata bisa didekati dan dimengerti dari ajaran kalam dan tasawuf di atas. Yakni dari sudut pandang penciptaan yang beraneka dan *tajalli* Tuhan yang beragam. Tidak bertentangan, bahkan makin menguatkan dan mengkayakan. Bila *Bhineka Tunggal Ika* diartikan "berbeda-beda tapi tetap satu jua" dalam pengertian sosial politik,

maka itu tidak bertentangan dengan pemahaman ajaran kalam dan tasawuf di atas. Pada asalnya keduanya berbeda satu sama lain. Akan tetapi ketika dibandingkan, yang satu dalam kategori sosial politik, yang lain dalam kategori pengetahuan dasar murni, keduanya tidak bertentangan satu sama lain. Lebih tepatnya pengertian Bhineka Tunggal Ika di atas lebih khusus dari dua ajaran tersebut. Berarti ada titik temu. Karena bagaimana juga, fenomena sosial politik adalah termasuk fenomena penciptaan dan *tajalli* Tuhan. Bahkan semangat keduanya sama dalam hal menerima perbedaan dan keragaman dalam konteks kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, membaca *Bhineka Tunggal Ika* dari sudut pandang kalam dan tasawuf tentu semakin memperdalam dan mengkayakannya. Sehingga kerukunan antardisiplin ilmu ini merupakan keharmonisan yang patut dikagumi.

Keharmonisan tersebut bukan alamiah. Karena ada sebagian orang Islam, sayang sekali, selalu melihat segala sesuatu dari sudut pandang ideologis. Bahkan Islam pun dibuat sesempit ideologi. Kajian kalam dan tasawuf di tangan mereka berubah menjadi ideologi yang sempit, yang menyerang ke mana-mana tanpa solusi. Di tangan mereka tauhid dan akhlak tak lebih dari kontrak politik yang kaku dan reaksioner. Tentu, ajaran semacam itu bukan ajarannya para *Salafinâ Ash-Shâlih*. Bukan ajaran Ahlussunnah wal Jama'ah yang ilmiah dan moderat.

Merupakan suatu anugerah tiada tara warga NU selalu berusaha melestarikan dan mewarisi ajaran dan tradisi Walisanga yang mulia. Walisanga dengan strategi budayanya terbukti ampuh menyikapi realitas Nusantara yang kompleks. Gabungan antara kedalaman ilmu, keteguhan iman, dan kebersihan hati, digabung dengan pengalaman kehidupan praktis di lapangan bumi Nusantara, mereka semua miliki. Lalu berhasil mengislamkan banyak sekali umat dengan elegan. Tanpa konflik kebangsaan. Tanpa mencabut kebudayaan. Tanpa kekerasan. Boleh dikata, dakwah ala Walisanga adalah contoh sukses menyikapi keberagaman di Tanah Jawa. Karena itu, sungguh warga NU punya beban moral dan historikal

sebagai pelari estafet kearifan Walisanga. Menembus garis *finish* di ujung dunia. Menyebar ke mana-mana dengan indahnya. Tidak berlebihan kiranya kita berkata, "Dakwah Walisanga adalah keniscayaan di bumi Nusantara." Sejarawan NU Agus Sunyoto dalam *Atlas Walisanga* mengisahkan, pernah terjadi di era pra-Walisanga puluhan ribu keluarga pendakwah didatangkan dari sebuah kerajaan Islam demi mendakwahkan Islam di Tanah Jawa. Hasilnya: semuanya dibantai habis penduduk setempat, tinggal segelintir keluarga saja. Kita lihat itu, bagaimana kebudayaan lain dari negeri antah-berantah mencoba berdakwah di Tanah Jawa. Tanpa strategi kebudayaan. Tanpa pengetahuan supranatural. Tanpa pengetahuan praktis yang coba berdamai dengan alam. Nyatanya hanya berbuah pahit. Tanah Jawa memang kejam. Tanpa kearifan budaya dan keluhuran spiritual, mustahil Walisanga berhasil.

Perdamaian dan Kemaslahatan

Kini kita masuk seputar hal-hal yang lebih konkret, setelah sebelumnnya membahas hal-hal pelik terkait filosofi keragaman dalam ajaran kalam dan tasawuf. Lalu kita padukan. Tentu itu kolaborasi yang menarik dalam memaparkan sebuah ide.

Perdamaian dan kemaslahatan adalah tujuan bermasyarakat di mana saja. Apalah artinya bangsa besar tanpa perdamaian tanpa kemaslahatan. Tanpanya mana bisa negara tahan. Bahkan itulah tujuan manusia berkelompok-kelompok, berkumpul, bersyarikat, berorganisasi, bernegara. Bahkan ajaran syariat diturunkan di dalamnya mengandung tujuan-tujuan mulia tersebut. Hal itu dapat kita pahami dari mempelajari fikih dan maqashid syariah.

Ajaran fikih dalam Islam dibuat demi kemaslahatan orang Islam dan semua orang pada umumnya. Ia menekankan pada penilaian syariah terhadap perilaku-perilaku *mukallaf*: Wajib, kah? Sunnah, kah? Mubah, kah? Makruh, kah? Haram, kah? Ini sangat erat kaitannya dengan balasan pahala atau dosa di akhirat kelak,

yang tidak bisa diketahui manusia hubungannya dengan alam dunia kalau bukan karena ada wahyu Allah SWT yang disampaikan Sang Rasul SAW.

Dalam segi sosial kemasyarakatan, aturan-aturan fikih yang kompleks itu pasti mengandung hikmah, maslahat, motif dalam dirinya sendiri. Ketika manusia mentaatinya akan bermanfaat baginya di dunia akhirat. Sebaliknya bila melanggarnya manusia bisa mendapat kesusahan di dunia dan balasan kelak di akhirat. Jaringan hikmah dan maslahat yang terkandung di dalamnya menunjukkan kerapian dan kompleksitas ajaran fikih.

Jaringan hikmah dan maslahat dalam fikih, juga dalam ayat-ayat Alquran dan Sunnah, serta perilaku Sang Nabi SAW bila dikuak dan dipandang secara universal akan memperlihatkan pola-pola unik. Yang kemudian oleh para ulama disebut dengan Maqashid Syariah. Yang menarik, oleh Imam Al-Ghazali dalam *Al-Mustashfâ*, maqashid syariah tersebut dikatakan dipelihara juga di semua ajaran agama. Yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Dengan detail aturan yang berbeda-beda, tentu saja.

Maqashid syariah dengan begitu merupakan nilai-nilai dan tujuan-tujuan yang universal. Suatu level cita-cita yang diperlukan masyarakat, bangsa, dan negara kapan pun dan di mana pun. Apalagi di masa-masa sulit penuh fitnah sepeti di Indonesia kini. Tentu akan sangat menarik kalau coba kita baca masalahnya dan kita carikan solusinya dari formulasi nalar fikih dan maqashid syariah yang luhur tersebut.

Misalnya kita bicara soal Pancasila. Lebih tepatnya—coba kita menantang diri sendiri—soal polemik Pancasila versus Piagam Jakarta yang masih saja menyisakan kubu-kubu petarung. Ada yang terang-terangan, ada yang diam-diam.

Terkadang penulis berpikir, "Itu aneh. Asli. Lha Pancasila itu kesepakatan bersama pendiri bangsa, kok masih dilawan, oleh orang Islam, lagi?"

Fitnah. Betul-betul fitnah.

Kita tidak sedang bicara sejarah di sini. Kita hanya membicarakan intisari polemik Pancasila versus Piagam Jakarta dari kacamata ajaran fikih dan maqashid syariah, demi mencari solusi aplikatif terbaik.

Pancasila bagaimanapun juga adalah kesepakatan para pendiri bangsa. Kekuatan legalitasnya sangat tinggi. Apalagi secara hukum syariat sudah jelas, sah, dan tidak bertentangan. Menolaknya dengan alasan apa pun pasti menimbulkan fitnah, karena sama dengan melawan kesepakatan bersama. Padahal pertolongan Allah SWT diperuntukkan bagi kebersamaan *(jamâ'ah)*.

Bahkan pun ketika orang-orang *zaman now* mencoba membenturkannya dengan Piagam Jakarta yang menurutnya lebih baik dan lebih syar'i, masih menyisakan persoalan kalau kita mau jujur. Karena tetap saja tidak maslahat bagi kerukunan pemeluk semua agama, terutama yang tinggal di daerah timur yang mayoritas non-Muslim. Belum lagi ancaman pemisahan dari NKRI yang sejak dahulu sampai sekarang masih saja nyata adanya. Menjaga keutuhan NKRI pastinya lebih diutamakan. Dan itu lebih maslahat secara fikih dan maqashid syariah.

Yang cukup mengherankan, gerakan merongrong Pancasila demi Piagam Jakarta itu dilakukan orang Islam sendiri. Tidakkah mereka mengerti Fikih Prioritas? Apakah dengan penghapusan subkalimat "dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya" menjadi hanya "Ketuhanan Yang Maha Esa" para Muslimin tidak bebas menjalankan ibadah dan syariat yang diyakininya?

Tentu tidak, bukan, dan pada kenyataanya tidak, kan? Karena ada peraturan lain di bawah Pancasila yang menjamin kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Sekali lagi, penempatan jaminan kebebasan menjalankan syariat bagi umat Islam berada di bawah Pancasila itu sebagai

kebijakan yang sangat strategis. Karena jika tidak, akan menghadapi ancaman disintegrasi yang sungguh berbahaya. Jadi keputusan itu sebuah *win-win solution*, yang bisa kita ambil semangatnya dari sebuah kaidah fikih:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

(Jika ada dua mafsadah saling bertentangan yang tak bisa dicari kemungkinan lain, maka dijaga mafsadah yang paling besar dengan melakukan mafsadah yang lebih kecil.)

Ada lagi kaidah lain:

ما لا يدرك كله لا يترك جله

(Apa yang tidak bisa dicapai seluruhnya, tidak boleh ditinggal sebagian besarnya.)

Syariat di bawah naungan Pancasila berjalan seperti biasa. Bahkan sangat masif. Indonesia di antara negara yang terlihat sangat religius. Bahkan lebih religius secara umum dibanding di Mesir, sebagaimana penulis rasakan. Tidak semua aspek, tentu. Tapi dari aspek syiar agama yang digelar masif. Karena di Mesir tidak banyak tempat boleh diselenggarakan acara-acara syiar agama dengan terbuka. Kebijakan pemerintahannya berbeda. Ini tidak menafikan ada aspek lain yang mana di Mesir lebih maju. Kajian keislaman tingkat lanjut misalnya.

Bagaimana dengan hukum *jinâyât* di Indonesia? Tidakkah itu menunjukkan syariat Islam tidak leluasa di Indonesia? Oh, tidak. *Jinâyât* dalam fikih Islam itu tidak dilepas-bebas seperti halnya hukum-hukum yang lain. Ia punya syarat lebih karena berkaitan dengan peradilan dan hukuman. Harus terbebas syubhat, di antaranya. Ketika ada syubhat, bahkan banyak syubhat, maka hukuman *h̲udûd* bisa diganti *ta'zîr* yang lebih ringan. Karena ketika kena *h̲udûd*, harus benar-benar bebas syubhat, lantaran sekali dihukum nyawa yang melayang, anggota tubuh yang terpotong

tidak bisa kembali lagi. Jadi harus benar-benar *clear*. Lalu bab tentang *jinâyât* juga wewenang pemimpin/imam/presiden/hakim, bukan diserahkan orang per orang. Begitulah kerapian dan hikmah hukum fikih dalam Islam. Jadi klaim syariat tidak bisa berjalan di bawah Pancasila sama sekali tidak benar.

Intinya Pancasila bukan agama, tidak bisa menggantikan agama, atau menyaingi agama. Pancasila hanyalah sebuah ideologi resmi Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Ia menyerap dan mensintesiskan dari banyak sumber, termasuk dari Islam dan agama-agama lain, dari kearifan Nusantara selama 2000 tahun lamanya, dari budaya lokal kerajaan-kerajaan kuno Nusantara, dari ajaran para empu, para pujangga, pencerahan India, Iran, Arab, Tiongkok, Eropa, Rusia, dan Amerika. Sementara agama jelas jauh lebih luas dari ideologi. Agama adalah wahyu Tuhan, sementara ideologi adalah buah usaha manusia untuk mencapai cita-cita yang diimpikan bersama. Menyamakan agama dengan ideologi, atau memperlakukannya layaknya ideologi tentu salah kaprah. Jauh dari hidayah yang diajarkan agama. Boleh jadi *ruwete* banyak pergerakan keagamaan dewasa ini berasal dari kegagalan mereka membedakan antara agama dan ideologi. Seharusnya mereka dan kita semua berbenah.

Seni Mengambil Keputusan

Subjudul pertama berkaitan dengan kenyataan hidup yang beragam, harus diterima dan disyukuri. Kita melihatnya dari ajaran tauhid/kalam dan tasawuf. Subjudul kedua tentang perdamaian dan kemaslahatan sebagai cita-cita semua masyarakat, bangsa, dan negara. Kita membahasnya dari ajaran fikih, kaidah fikih, dan maqashid syariah. Nah subjudul ketiga ini membahas soal seni mengambil keputusan. Hal ini tak lain melihat kiprah NU sepanjang sejarah republik yang mati-matian membela Pancasila dan keutuhan NKRI, namun keputusan-keputusannya yang brilian (terutama yang berkaitan dengan politik) sering tidak dimengerti

publik, bahkan cenderung selalu diserang. Sebagai organ gerbong tradisionalisme Islam terbesar di Indonesia dan dunia, NU selalu berangkat dari warisan para ulama dalam menganalisis persoalan dan mengambil keputusan. Yang menonjol, mereka selalu saja menyandarkan keputusannya, bahkan pun dalam hal politik, pada pertimbangan Ilmu Alat ala Pesantren. Itulah metodologi khas NU, juga Al-Azhar sebagai saudara tuanya. Kita akan bahas seni mengambil keputusan dari perspektif ilmu alat.

Ilmu-ilmu alat adalah ilmu-ilmu untuk menganalisis teks, fenomena, bahkan ilmu lain. Ia digunakan sebagai parameter dan standar ketika berinteraksi dengan objek-objek lain yang berkaitan. Ia digunakan juga untuk mengambil keputusan karena berfungsi untuk mengukur. Jadi ada dua fungsi: menganalisis dan mengambil keputusan. Menganalisis untuk mendapatkan pemahaman, sementara mengambil keputusan untuk menentukan sikap ilmiah dan amaliah.

Ilmu Alat dalam tradisi pesantren-pesantren NU merupakan primadona dan kekhasan yang tak dimiliki pesantren model lain, pada umumnya. Kurikulum ilmu alat di sana sistematis, runtut, berkelanjutan, mendalam, tuntas. Berkat jasa tiga serangkai ulama penyusun pendidikan pesantren NU: Imam Nawawi Al-Bantani dari Banten, Jawa Barat; KH. Sholeh Darat dari Semarang, Jawa Tengah; Syaikhuna Muhammad Khalil dari Bangkalan, Jawa Timur. Dengan dasar ilmu alat itu para santri memahami ilmu-ilmu maqashid, seperti tauhid, fikih, tasawuf, tafsir, hadits, sejarah, juga filsafat dengan mendalam. Karena sebetulnya orang yang pemahaman ilmu alatnya bagus, pemahaman ilmu maqashidnya pasti bagus, tidak sebaliknya.

Dalam ilmu manthiq kita mengenal pelajaran Semantik (دلالة الألفاظ على المعاني). Di sana dibahas bagaimana sebuah kata berhubungan dengan maknanya yang dimaksud, apakah sempurna, sebagian, ataukah hanya konsekuensi logis? Bagaimana hubungan satu kata dengan kata lain, satu makna dengan makna lain? Apa itu

juz`* (sebagian), apa itu *kull* (keseluruhan), apa itu *juzîy* (partikular), apa itu *kullîy* (universal)? Bagaimana sebuah kata memiliki makna tunggal atau makna berbilang: *'Alam*, kah? *Musytarak*, kah? *Musyakkik*, kah? *Mutawâthi`, kah? *Manqûl*, kah? *Haqîqah*, kah? *Majâz*, kah? Apa itu *mafhûm*? *Mâ Shadaq*? Apa itu definisi? Apa itu yang didefinisikan? Apa saja syarat-syarat definisi? Bagaimana cara mengambil kesimpulan langsung dari suatu pernyataan? Apa itu premis? Konklusi? Bagaimana menyusun sebuah dalil? Bagaimana menarik kesimpulan dari susunan dalil? Apa itu deduksi? Apa itu induksi?

Dalam ilmu ushul fikih diajarkan apa makna dari bentuk-bentuk pernyataan dalam Alquran dan Sunnah? Apa makna bentuk-bentuk perintah? Bentuk-bentuk larangan? Apa itu umum? Khusus? Apa itu *muthlaq*? *Muqayyad*? *Manthûq*? *Mafhûm*? *Nashsh*? *Zhâhir*? Apa saja sumber hukum dalam Islam? Apa itu Alquran? Sunnah? Ijma`? Qiyas? Apa itu *istihsân*? *Istishhâb*? *Ârâ` Ahl Al-Madînah*? *Syar'u Man Qablanâ*? Apa syarat-syarat ijtihad? Bagaimana mencari dan menentukan *'illah*? Bagaimana mekanisme *tarjîh*?

Ilmu alat tersebut mampu menganalisis suatu pernyataan dan fenomena sosial dari akar epistemologinya sehingga kita bisa memahaminya dengan baik, lalu menyikapinya dengan tepat. Sekarang kita coba, ya, membahas soal khilafah yang tengah jadi *trending topic* dari pendekatan ilmu alat. Tentu pada bagian yang menurut penulis menarik dan krusial saja.

HTI memahami khilafah dengan unik dan aneh. Mereka memahaminya jelas tidak lewat ulama dan ilmu alat yang tepercaya sehingga menjadi utopis, kaku, dan keras. Propaganda mereka terindikasi ingin mengudeta. Seperti ditunjukkan banyak artikel HTI yang tersebar yang berisi soal langkah-langkah kudeta, yang diawali dengan pembusukan citra pemerintah dan sistem pemerintahannya di mana pun dan kapan pun. Puncaknya tentu saja kudeta, dengan meminta TNI untuk merebut kekuasaan untuk kemudian diserahkan ke HTI untuk dijadikan khilafah.

Mirip dengan kasus HT internasional yang nyata-nyata pernah mencoba melakukan kudeta di beberapa negara, dan gagal. Mereka pun dibubarkan dan jadi organisasi terlarang di banyak negara. Indonesia terhitung terlambat puluhan tahun dibanding negara-negara Islam lain.

Apa yang unik dan aneh dari pemahaman HTI soal khilafah? Mereka memahami khilafah sebagai isim *'alam* yang hanya memiliki satu pengertian. Padahal sudah jelas khilafah itu beragam. Ada *Khilâfah Râsyidah* pada tiga puluh tahun pertama setelah Rasul SAW tiada. Ada *Khilâfah Ghairu Râsyidah*, yakni masa Dinasti, Kesultanan, Kerajaan, Imperior, Negara-negara Bangsa yang membentang sejak naiknya Sayyidina Mu'awiyah bin Abi Shufyan sampai kelak munculnya Imam Mahdi RA. Ada *Khilâfah 'alâ Minhâj an-Nubuwwah,* yakni pada era Imam Mahdi RA. Dengan pengertian yang beragam soal khilafah itu, maka kata *khilâfah* punya dua kemungkinan: ia adalah kata *musytarak* atau *ẖaqîqah-majâz*. Lalu kita perhatikan, ternyata level khilafah model pertama, kedua, dan ketiga tidak sama. Yang pertama sempurna di masa lampau; yang kedua tidak sempurna; yang ketiga sempurna di masa depan. Maka kata *khilâfah* tidak bisa dikatakan *musytarak*. Jadilah *Khilâfah Râsyidah* adalah *ẖaqîqah* di masa lampau; *Khilâfah Ghairu Râsyidah* adalah *majâz*; sementara *Khilâfah 'alâ Minhâj an-Nubuwwah* adalah *ẖaqîqah* di masa depan era Imam Mahdi RA.

Artinya, klaim HTI mau mendirikan *Khilâfah 'alâ Minhâj an-Nubuwwah* hanyalah klaim kosong, karena Imam Mahdi RA belum ada. Itu hanya propaganda internasional untuk mengacaukan sistem pemerintahan dunia Islam. Arti lain, NKRI dengan Pancasilanya sudah absah secara syariat Islam, tidak bisa diganti dengan khilafah versi HTI, karena toh NKRI sudah khilafah, meski levelnya tidak sempurna, *ghairu râsyidah*. Persis dengan semua negara Islam kini, tidak ada satu pun yang sempurna. Tapi tetap harus diakui keabsahan pemerintahannya secara fikih demi kemaslahatan umat Islam yang lebih besar.

Hanya dengan pemahaman satu kata *khilâfah* saja dengan tepat sesuai ilmu alat yang tepercaya, kita bisa mencapai kesimpulan-kesimpulan penting tersebut. Kita juga akhirnya tahu hakikat HTI yang sebetulnya, tidak mudah ketipu dengan jargon-jargon islami yang mereka propagandakan. Begitulah kalau ilmu alat khas NU sudah turun tangan.

Masalah lain yang menarik adalah klaim kafir, mengafirkan orang lain *(takfîr)*. *Takfîr* masih saja mewabah di dunia Islam. HTI membawa *takfîr* dengan menyatakan sistem-sistem pemerintahan semua negara Islam kini adalah sistem kufur, sistem kafir. Salafi-Wahhabi membawa *takfîr* atas praktik-praktik *tawassul*, *tabarruk*, *istighâtsah*, ziarah kubur, dan lain sebagainya yang sudah membudaya di Indonesia dan banyak negara Islam. Kadang mereka-mereka ini suka mengelak, "Kita mengafirkan perbuatan mereka yang kufur, bukan mengafirkan mereka." Pernyataan mengelak itu keluar ketika didesak fatwa para ulama yang melarang praktik pengkafiran sembrono karena itu sangat dilarang dalam agama.

Takfîr harus dijauhi. Itu dosa besar dan merusak tatanan. Ia dilarang. Tapi *takfîr* harus dipelajari supaya orang tidak terjerumus ke dalamnya. Bagaimana membedakan *takfîr* yang harus dijauhi dengan *takfîr* yang harus dipelajari? Itu dibahas di paragraf berikut. Tapi sebelum ke sana, perlu diketahui bahwa *kâfir* punya banyak arti. Yang dimaksud di sini adalah *kâfir* dalam istilah tauhid dan fikih yang berarti lawan Islam, bukan Islam, keluar dari Islam, yang mana balasannya adalah kekal di neraka.

Untuk membedakan dua macam *takfîr*, penulis coba pakai ilmu logika. Memahami suatu proposisi *(qadhiyyah) takfîr*, orang harus tahu empat hal ini. *Pertama*, tahu subjek yang dimaksud. *Kedua*, tahu sifat/perbuatan yang dimaksud. *Ketiga*, tahu penisbatan sifat/perbuatan kepada subjek yang dimaksud. *Keempat*, tahu bahwa penisbatan sifat/perbuatan kepada subjek yang dimaksud itu sesuai realitas yang berkaitan. Yang *ketiga* dan *keempat* disebut dengan *takfîr*. Bedanya, yang *ketiga* disebut *takfîr* secara

relasional *(nisbatan)*; ini yang harus dipelajari supaya terhindar dari terjerumus pada *takfîr*. Yang *keempat* disebut *takfîr* secara penghukuman *(hukman)*; ini yang harus sesuai dengan realitas; dilarang diobral ke mana-mana tanpa pembuktian realitas. Gabungan keempat hal tersebut dinamakan *takfîr* secara asentual *(tashdîqan)*. Jadi ada *takfîr nisbatan*, *takfîr hukman*, dan *takfîr tashdîqan*. Orang menghukumi kafir orang lain atau kelompok lain secara nyata harus sampai pada fase *takfîr* asentual ini. Yang jelas harus melewati semua fase tersebut, terutama harus mengandung fase *keempat* tersebut atau *al-hukm*. Jika tidak, berarti dia sedang bermain-main dengan hukum, sedang mengikuti hawa nafsu. Dia terancam dosa besar.

Kadang mereka itu suka mengelak, bahwa tidak sedang mengafirkan orangnya, hanya perbuatannya. Lha ini juga bermasalah. Karena tidak ada ceritanya sifat bisa lepas dari subjek, perbuatan bisa lepas dari yang berbuat, suatu sistem tanpa ada yang membuat dan menikmati sistemnya. Apakah mereka dengan begitu menyatakan kelak yang disiksa hanya perbuatannya saja, sifatnya saja, sistemnya saja, pelakunya bebas tidak disiksa? Ini benar-benar bid'ah, salah kaprah.

Dari sini kita tahu memang ilmu alat khas pesantren sangat membantu dalam memecahkan persoalan. Bahkan persoalan pelik yang mungkin banyak orang terbuai dengannya. Bagaimana tidak, ketika jargon dan propaganda yang dipakai adalah Islam? Ya, mana berani bersikap orang-orang. Dengan ilmu alat yang tepat, kalangan pesantren NU bisa leluasa menentukan sikap ilmiah tanpa harus mengorbankan keilmuan Islam mereka.

Mungkin hanya itu yang bisa penulis haturkan dalam tulisan bersahaja ini. Sebagai warga NU yang sedang menimba ilmu di Al-Azhar, penulis yakin ilmu-ilmu khas pesantren NU sangat bermanfaat. Apalagi di zaman penuh fitnah dan hoaks seperti sekarang. NU bahkan telah terbukti sepanjang sejarah Republik menjadi katalisator perdamaian di hutan belantara kehidupan

yang penuh keragaman. Seolah *Bhinneka Tunggal Ika* telah luruh dalam setiap dada warga NU, dibawa berlari walau pedih perih. Sebagaimana kata Gus Dur, "Berapa pun besar dan risikonya, NU akan menjaga keutuhan NKRI." Juga kata mutiara Hadratus Syaikh KH. Hasyim Asy'ari, "Agama dan cinta tanah air adalah dua kutub yang tidak berseberangan. Cinta tanah air adalah bagian dari agama, dan keduanya saling menguatkan."

Jejak Islam Nusantara di Tengah Kompleksitas Multikulturalisme Australia

Ahmad Khoirul Umam, Ph.D

Di tengah konstalasi politik internasional yang acap kali menempatkan Islam sebagai "pihak tertuduh" atas beragam aksi radikalisme dan terorisme global, gagasan Islam Nusantara yang selama ini digaungkan komunitas Nahdlatul Ulama (NU), menjadi sangat relevan untuk diperkenalkan kepada masyarakat internasional. Ikhtiar tersebut merupakan langkah penting dan strategis untuk membangun persepsi positif di tengah pandangan miring yang sarat dengan nuansa kebencian dan kecurigaan yang selama ini telah mapan di kalangan dunia Barat, tak terkecuali di Australia, sebuah negara berperadaban Barat yang "terjebak" di tengah-tengah kawasan Asia dan Pasifik. Tulisan pendek ini akan membahas tentang bagaimana dinamika keislaman di tengah masyarakat sekuler dan multikultural di Australia, serta bagaimana tantangan yang dihadapi dalam upaya membumikan identitas dan gagasan Islam Nusantara di negeri yang berada di ujung selatan dunia ini. Artikel ini berpendapat bahwa interaksi antarkomunitas Muslim di Australia ini merupakan "miniatur dunia Islam" yang sangat kompleks. Kompleksitas itu tercermin dari perbedaan mazhab, latar belakang kebangsaan dan identitas kultural yang membuat corak komunitas Muslim Australia sangat berwarna. Di tengah kompleksitas tersebut, ada upaya saling memengaruhi dan mempertahankan identitas masing-masing. Dalam kondisi tersebut, jaringan Nahdlyin setidaknya dapat melakukan dua hal. *Pertama*, mendorong gerakan moderasi dalam

praktik keislaman untuk memperkuat gerakan kelompok moderat di Australia. *Kedua*, melakukan advokasi terhadap kebijakan dan pembentukan opini publik yang berpotensi mengisolasi dan memarginalkan Muslim secara general. Kendati demikian, jamaah Nahdliyin dan juga umat Islam Indonesia di Australia secara general belum mampu mengoptimalkan perannya. Sebab, dinamika komunitas Muslim Indonesia di Australia masih sangat dibayang-bayangi oleh konstalasi kepentingan dan politik identitas di tanah air. Terbatasnya level pemahaman dalam khazanah keislaman yang ditambah oleh terbatasnya tingkat kedewasaan politik warga, membuat komunitas Muslim Indonesia di Australia cenderung *inward-looking*, terfragmentasi dan berpotensi semakin terpinggirkan dalam kompleksitas interaksi komunitas Muslim Australia secara general. Realitas ini menjadi peluang sekaligus tantangan besar bagi *stakeholders* Muslim Indonesia, khususnya para kader dan intelektual muda Nahdlatul Ulama dalam upaya mempromosikan Islam Nusantara ke dalam arus besar diskursus keislaman di Australia.

Islam dan Kompleksitas Multikulturalisme Australia

Australia memiliki sejarah panjang dalam persinggungannya dengan dunia Islam. Jauh sebelum otoritas kolonial Inggris mendarat di Negeri Kanguru ini, Islam telah terlebih dahulu berinteraksi secara intensif dengan penduduk lokal. Hal tersebut dicatat oleh banyak sekali karya-karya antropologis yang ditulis oleh Ganter (2008), Kitley, Chauvel dan Reeve (1989), dan lainnya. Para antropolog tersebut menyebutkan bahwa Islam telah diperkenalkan oleh komunitas nelayan nusantara berdarah Bugis dan Makassar yang melakukan eksplorasi sumber daya laut di mana ikan dan teripang, jenis hewan invertebrata yang sangat populer untuk kebutuhan medis kala itu, sebagai komoditas utamanya. Untuk menyuplai kebutuhan pasar atas teripang yang tinggi di China dan negara-negara Asia lainnya, nelayan Bugis itu menempuh jalur perdagangan laut di sepanjang perairan Samudera

Hindia hingga menyentuh daerah tapal batas daratan Australia Utara.

Indahnya proses interaksi budaya antara komunitas Muslim Bugis dan warga Aborigin Australia ini berusaha dibantah keras oleh Ian McIntosh (1996) yang menuliskan narasi berbeda tentang relasi dua kelompok tersebut dengan nuansa dominasi, eksploitasi, dan ketimpangan ekonomi yang akut hingga membuat konflik dan gesekan diantara keduanya tidak terelakkan. Namun argumentasi McIntosh (1996) tampaknya cenderung simplistik dan hanya fokus pada efek samping sebuah komunikasi di mana konflik dan kompetisi acap kali menjadi keniscayaan sekaligus bumbu-bumbu di balik indahnya sebuah interaksi. Argumentasi McIntosh (1996) jelas tidak dapat membantah fakta sejarah tentang sikap saling menghargai dan menghormati antara komunitas Aborigin dan Muslim Bugis yang ditandai oleh adanya akulturasi budaya, seni hingga genetik yang dibuktikan oleh keberadaan komunitas hasil perkawinan antar-ras di antara mereka di sekitar wilayah Laut Arafuru dan Laut Banda (Kitley, Chauvel & Reeve, 1989).

Relasi Muslim Bugis dan komunitas Aborigin tersebut kemudian mengalami fase surut pasca kehadiran kolonialisme Inggris yang mulai menancapkan jangkar kekuasaannya di sekitar akhir abad 18, yang ditandai oleh mendaratnya armada militer yang dipimpin oleh Kapten James Cook di pinggiran New South Wales. Islam kembali mewarnai peradaban awal Australia ketika koloni Inggris mulai mengembangkan infrastruktur dasar di sejumlah titik strategis di benua yang terletak di ujung selatan dunia tersebut. Untuk melakukan itu, koloni Inggris melakukan ekspedisi untuk menembus padang tandus dan wilayah-wilayah tak terjamah di belantara Australia. Karenanya, didatangkanlah kelompok para penunggang unta dari Afganistan yang ditugaskan untuk membuka medan-medan sulit guna memfasilitasi para pakar geologi yang disiapkan pemerintah Inggris untuk memetakan potensi alam dan pengembangan infrastruktur selanjutnya.

Pada era 1860-an, gelombang para penunggang unta Afganistan yang kuat dengan ajaran dan tradisi keislaman itu mendarat di Melbourne dan Adelaide. Setelah sejenak berkoloni dan mendirikan masjid pertama di daratan Australia, tepatnya di kota Adelaide pada tahun 1882, kelompok Muslim yang akrab dengan sebutan "Afghans" ini selanjutnya berhasil menembus wilayah tengah melewati daerah Alice Springs yang terlerak di antara negara bagian Adelaide, sebuah kota di ujung selatan benua dan Darwin yang berada di ujung utara benua. Napak tilas perjalanan ekspedisi tersebut belakangan dikenang dengan jalur kereta api "The Ghan" yang menawarkan indahnya eksotisme benua Australia hingga sekarang.

Persinggungan Islam dan Australia terus terjadi memasuki era modern di awal abad 20-an. Pasca perjanjian Westminster pada tahun 1900, Australia memilih memisahkan diri dari kekuasaan Inggris dan memilih berdiri sendiri sebagai sebuah negara persemakmuran yang independen dan tidak bergantung pada otoritas London. Sebagai negara baru, Australia membuka pintu bagi semua jenis imigran dari berbagai latar belakang untuk memperkaya peradabannya. Pintu migrasi Australia kemudian mengalami penyempitan setelah pemerintahnya menetapkan berlakunya kebijakan *White Australian Policy* (1960-an) yang mengutamakan imigran kulit putih dan membatasi imgran non-kulit putih untuk menciptakan "keseimbangan" baru dalam komposisi demografi Australia masa depan. Kebijakan "Australia Putih" yang didukung oleh kelompok kanan ini kemudian mendapatkan respon keras dari dunia luar karena dianggap kaku, rasis dan diskriminatif.

Di bawah pemerintahan Withlam, kebijakan tersebut melunak setelah Partai Buruh mendesak dan memprakarsai wajah Australia yang lebih multikultural dan tidak diskriminatif sejak 1965 dan mengedepankan kebijakan asimilasi untuk memperkuat jaringan ekonomi, budaya, dan juga keamanan Australia itu sendiri (Mackie,

1997). *Asbabul wurud* dari penentangan kebijakan "Australia Putih" tersebut tentu tidak hanya dilatar belakangi oleh pergeseran paradigma atau cara pandang masyarakat Australia terhadap prinsip dasar kemanusiaan dan anti-diskriminasi, melainkan juga bertalian dengan kepentingan pragmatis ekonomi Australia yang sedang menggeliat dan membutuhkan banyak tenaga kerja untuk mencukupi kebutuhan tenaga kerja di sektor pertanian, perkebunan, tambang, dan jasa.

Berdasarakan catatan McDaugal (1998), perubahan pola migrasi di Australia di era 1970an tersebut membuka pintu bagi masuknya komunitas Muslim dari negara-negara Eropa Timur seperti Albania, Bosnia, dan negara-negara pecahan Yugoslavia lainnya, lalu dari Timur Tengah seperti Libanon, Suriah, Mesir, Saudi Arabia, dan lainnya, kemudian Asia Selatan laiknya India dan Pakistan, hingga dari tetangga sendiri di Asia Tenggara seperti Indonesia dan Malaysia. Arus besar migrasi ini salah satunya dicatat oleh McDaugal (1998: 158) yang menyebutkan bahwa antara 1971 hingga 1992, jumlah imigran Asia yang datang ke Australia meningkat dari 9.010 imigran, atau sekitar 5% dari total imigran yang masuk sebesar 170.010 orang, menjadi 60.910 orang atau 50% dari total 107.390 orang.

Tingginya arus imigran dari negara-negara Asia ini semakin menemukan momentumnya ketika Australia kembali berusaha mencari dan mendefiniskan ulang jati diri bangsanya. Sebagaimana disebutkan oleh Huntington (1991a) bahwa Australia dalam konteks identitas peradaban memiliki kesamaan nasib dengan Turki. Kedua negara itu dijuluki oleh Huntington (1991b) sebagai *torn countries*, yakni negara yang tidak memiliki identitas peradaban yang jelas karena terjebak di tengah-tengah wilayah geografis yang memiliki budaya, adat istiadat dan sistem nilai yang sangat berbeda dengan mereka. Jika Turki sebagai negara Muslim terjebak di tengah-tengah komunitas negara Eropa, maka Australia merupakan negara berperadaban Barat yang terjebak di tengah kawasan Asia dan Pasifik. Untuk menjawab solusi tersebut, Australia di bawah

pemerintahan Perdana Menteri Paul Keating (1991-1996) bersama Menteri Luar Negerinya yang sangat fenomenal Gareth Evans merumuskan kebijakan luar negeri yang berorientasi pada gagasan *Asianising Australia*. Yakni, sebuah ikhtiar pencarian identitas Australia untuk mengatasi perasaan keterasingan yang selama ini menyergap negerinya karena perbedaan budaya secara mendasar dengan negara-negara tetangganya di Pasifik Selatan dan Asia Tenggara (FitzGerald, 1997).

Keating & Evans (1992) berusaha meyakinkan warganya bahwa Australia harus menyadari pentingnya melebur dengan entitas budaya Asia dengan memahami nilai-nilai Asia *(Asian values)* yang dalam konteks tertentu dipandang *compatible* dengan nilai dasar peradaban Australia. Kebijakan *Asianising Australia* ini tidak berjalan mulus karena dicurigai oleh para pemimpin Asia Tenggara yang dikomandoi oleh Mahatir Muammad, Soeharto dan Lee Kwan Yew sebagai strategi Australia untuk perlahan mengambil alih komando kekuatan ekonomi-politik Asia Tenggara. Meskipun akhirnya tidak berjalan sesuai harapan, kebijakan *Asianising Australia* ini terbukti semakin melipatgandakan jumlah imigran Asia di wilayah Australia. Bahkan menurut prediksi Steketee (1997) dan Cotton (1997), jika pada tahun 1995 warga Asia yang tinggal di Australia bisa berkisar 4,8%, maka pada tahun 2031 diperkirakan bisa lebih dari 7,5%. Oleh karena itu, pada tahun 2025 diperkirakan 19,5% warga Australia akan dijejali oleh imigran Asia maupun warga Australia keturunan Asia. Dalam hal ini termasuk mereka adalah eksodus warga dari negara-negara miskin dan negara perang dari masyarakat Muslim Timur Tengah dan Asia Selatan.

Besarnya antusiasme masyarakat asing untuk berdatangan ke Australia juga dipicu oleh kian mapannya fondasi perekonomian Australia yang juga diimbangi oleh orientasi pelayanan publik berstandar tinggi di bidang kesehatan dan pendidikan bagi warganya. Oleh karena itu, mereka yang berasal dari negara-negara miskin dan korban konflik serta perang saudara tak berkesudahan,

rela menggadaikan nyawa mereka terombang-ambing di tengah lautan sebagai pencari suaka *(asylum seeker)* untuk bisa masuk dan diterima di Australia. Sebuah negeri gersang dan kering kerontang di pojok selatan planet ini, namun kaya akan budaya, makmur dan sejahtera secara ekonomi, kuat sistem pertahanannya, maju teknologi dan tradisi keilmuannya, serta terjamin kesehatan masyarakatnya sejak masa kecil hingga hari tuanya.

Walhasil, setelah bertahan sekian lama, pada awal abad 21 lalu, setidaknya sudah ada sekitar 350.000-an umat Islam dari 60 negara yang tinggal di Australia. Berdasarkan survei nasional yang diselenggarakan pemerintah federal Australia pada 2016, Islam termasuk kelompok agama yang secara kuantitas kecil namun signifikan dan terus mengalami pertumbuhan jumlah di Australia. Perkembangan Islam itu berbanding terbalik dengan tingkat popularitas agama Kristen yang selama ini menjadi agama mayoritas di negeri Kanguru ini.

Memang, Kristen masih menduduki peringkat pertama dengan jumlah penganut sebesar 52% dari total populasi, yang mana 22% di dalamnya merupakan penganut Katolik. Tapi angka tersebut sebenarnya menunjukkan penurunan signifikan dalam lima dekade terakhir ini. Jika ditilik berdasar survei nasional pada tahun 1966, jumlah penganut agama Kristen saat itu mencapai angka fantastis yakni 88%, lalu menurun menjadi 74% hingga terjun bebas menjadi 52% pada 2016. Kondisi tersebut bukan menunjukkan adanya perpindahan keyakinan masyarakat Australia dari satu agama ke agama lain, melainkan merepresentasikan pergeseran cara pandang masyarakat Australia terhadap entitas keberagamaan. Telah jamak diketahui, tidak sedikit gereja-gereja tutup di Australia, perayaan Natal selalu ramai tetapi lebih banyak diisi oleh pesta-pesta budaya yang seolah tercerabut dari entitas makna perayaan keagamaan mereka. Tampaknya modernisme telah menggeser cara pandang mereka, sehingga tren masyarakat yang menyatakan diri tidak beragama baik mereka yang mengklaim diri sebagai ateis maupun agnostik (tak beragama meskipun percaya pada konsep ketuhanan),

terus meningkat tajam dari angka 19% pada tahun 2006 menjadi 30% pada tahun 2016.

Sementara itu, jumlah umat Islam mengalami peningkatan dari yang semula hanya 1,71% pada 2006, atau sekitar 340.394 warga, menjadi 2,6% atau berkisar 500.000 warga dari jumlah total populasi Australia. Peningkatan angka tersebut tidak hanya disebabkan oleh masuknya sejumlah imigran Muslim baru, tetapi juga dipengaruhi oleh instruksi para imam masjid dan komunitas Muslim di sejumlah negara bagian menyerukan kepada masyarakat Muslim untuk tidak lagi menutupi identitasnya sebagai Muslim. Dengan harapan semakin besar jumlah angka riil di dalam survei, semakin besar dan serius perhatian pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan dan tantangan yang dihadapi Muslim Australia secara general. Komunitas Muslim terbesar di sana lebih banyak terkonsentrasi di kota-kota besar laiknya Sydney (47.3%) dan Melbourne (30.3%) (ABS, 2008). Berikut ini adalah gambaran afiliasi keberagamaan masyarakat Australia kontemporer yang direkam oleh survei terakhir pemerintah federal (Australian Bureau of Statistics, 2017).

20 Agama Terbesar di Australia

2016	2011
No religion – 30.1%	Catholic – 25.3%
Catholic – 22.6%	No religion – 22.3%
Anglican – 13.3%	Anglican – 17.1%
Uniting Church – 3.7%	Uniting Church 5.0%
Christian, (Not further defined)– 2.6%	Presbyterian and Reformed – 2.8%
Islam – 2.6%	Eastern Orthodox – 2.6%
Buddhism – 2.4%	Buddhism – 2.5%
Presbyterian and Reformed – 2.3%	Islam 2.2%

2016	2011
Eastern Orthodox – 2.1%	Christian (Not further defined) 2.2%
Hinduism – 1.9%	Baptist – 1.6%
Baptist – 1.5%	Hinduism 1.3%
Pentecostal – 1.1%	Lutheran – 1.2%
Lutheran – 0.7%	Pentecostal 1.1%
Sikhism – 0.5%	Judaism – 0.5%
Other Protestant – 0.5%	Jehovah's Witnesses – 0.4%
Judaism – 0.4%	Sikhism – 0.3%
Jehovah's Witnesses – 0.4%	Seventh–day Adventist – 0.3%
Seventh-day Adventist – 0.3%	Other Protestant – 0.3%
Latter-day Saints – 0.3%	Salvation Army – 0.3%
Oriental Orthodox – 0.2%	Latter-day Saints – 0.3%

Fragmentasi, Islamofobia, dan Penguatan Politik Sayap Kanan

Angka 2,6% atau yang setara dengan sekitar setengah juta pemeluk Islam di Australia tersebut bukanlah entitas tunggal. Di balik angka tersebut tersimpan kompleksitas kelompok dan tradisi sektarian yang berbeda dalam bermazhab dan konsep syariatnya. Secara general, Sunni menduduki persentase terbesar komunitas Muslim Australia, disusul Syiah, dan kemudian Ahmadiyah. Sebagaimana interaksi yang terjadi di berbagai negara, kedua kelompok terakhir sering kali dianggap berbeda dan melenceng jauh dari konsep dasar akidah keislaman karena pengakuan mereka terhadap Sahabat Ali dan Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi terakhir pasca-Muhammad.

Meskipun perbedaan itu nyata, tetapi sering kali terjadi titik konvergensi dalam proses interaksi mereka yang disatukan oleh Alquran dan juga disebabkan oleh keterbatasan infrastuktur dan

fasilitas publik dalam menjalankan kewajiban fardu yang bersifat kolektif seperti salat Jumat dan kegiatan-kegiatan lainnya. Menyikapi perbedaan ini, Imam Uzair, salah satu pemimpin Muslim Sunni karismatik berdarah Pakistan kelahiran London yang menjadi Imam Masjid Holland Park, sebuah masjid tertua di negara bagian Queensland, menyadari betul bahwa perbedaan dalam konsep dasar akidah dan muamalah di antara mereka itu jelas adanya. Kendati demikian, beliau tetap memberi ruang kepada sejumlah keluarga Syiah yang hendak beribadah dan mengikuti kajian-kajian tafsir yang diselenggarakan di masjidnya. Dalam perbincangan santai saya dengan Imam Uzair di kediamannya di kawasan Holland Park pada akhir 2015 lalu, Imam Uzair mengatakan, "Saya membiarkan mereka untuk salat di Masjid (saya). Saya paham, jelas kita berbeda. Kita juga menyaksikan perbedaan itu telah menciptakan konflik, perang dan pertumpahan darah tak berkesudahan di negara-negara kita. Lalu, akankah kita ingin ikut-ikutan membawa pertumpahan darah itu ke tanah yang damai, penuh 'susu dan madu', dan menjamin hak-hak kita dalam ber-Islam ini?", ujarnya menyisipkan pesan damai di tengah terangnya perbedaan.

Di Sydney, para penganut Sunni banyak terkonsentrasi di daerah Lakemba, Wiley Park, Bankstown, serta Auburn. Di Queensland, komunitas Sunni bertebaran di daerah Logan, Hollan Park, Darra, Lutwytch, Camira, dan lainnya. Di Adelaide, komunitas Sunni ini juga banyak terkonsentrasi di daerah Port Adealaide, Marion, Little Gilbert, dan lainnya. Kelompok Sunni ini banyak mengekspresikan diri ke dalam berbagai bentuk asosiasi seperti Tabligi Jamaat, Ahlu Sunnah wal Jamaah Association Australia (ASWJA), Hizbut Tahrir, Dawate Islami, Muhammadiyah, hingga Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama Australia-Selandia Baru (PCI NU ANZ). Sementara itu, kelompok Syiah di Sydney banyak terkonsentrasi di daerah Campbelltown, St George, Auburn, Bankstown, dan lainnya. Di Queensland, mereka banyak terkonsentrasi di daerah Logan dan sekitarnya. Kelompok-kelompok mereka diekspresikan dalam komunitas-komunitas lebih kecil seperti Alawites, Ismaili,

dan lainnya. Sedangkan komunitas Ahmadiyah di bawah komando Ahmadiyya Muslim Assiciation of Australia (AMAA) banyak bertebaran di berbagai negara bagian, seperti di Masjid Baitul Huda di Sydney, Masjid Baitu Salam dan Masjid Baitu Masrur di Queensland, Masjid Mahmud di Adeaide, dan lainnya. Meskipun interaksi mereka kurang cair, sebagaimana yang terjadi di berbagai belahan dunia lainnya, tetapi sistem penegakan hukum Australia yang menjamin kebebasan hak mereka dalam beragama, "memaksa" mereka untuk tertib dan menghormati perbedaan keyakinan mereka masing-masing.

Sementara itu, di dalam kelommpok Sunni sendiri, terdiri atas beragam mazhab yang coraknya sesuai dengan negara asal masing-masing. Mereka yang berasal dari Asia Tenggara mayoritas menganut Mazhab Syafii. Sementara komunitas Muslim Asia Selatan cenderung mengacu pada Mazhab Hanafi, sedangkan yang berasal dari bagian Timur dan Utara Afrika banyak yang menggunakan Mazhab Maliki, dan Mazhab Hambali bercorak Wahabi banyak dipraktikkan mereka yang berasal dari Timur Tengah, khususnya Arab Saudi. Meskipun Mazhab Syafii relatif lebih populer dibanding lainnya, bukan berarti kelompok Sunni berkarakter monolitik. *Fiqh* dan yurisprudensi Syariat Islam dalam Mazhab Syafii yang dikenal lentur dalam mempertimbangkan kelangsungan budaya dan kearifan lokal membuat kelompok-kelompok bermazhab Syafii tersebut mempertahankan ciri dan karakter asal negara masing-masing.

Walhasil, masjid, sekolah, lembaga-lembaga amal, kelompok masyarakat dan asosiasi komunitas Muslim di Australia pada dasarnya cenderung terfragmentasi dan pada derajat tertentu bersikap eksklusif berdasarkan pengotak-kotakan ras, budaya, etnik, dan bahasa mereka masing-masing. Pengkutuban komunitas itu terjadi di hampir semua kelompok, baik mereka yang berasal dari Asia Selatan, Asia Tenggara, Timur Tengah, Eropa Balkan tempat asal komunitas Anglo-Celtic Muslim Australia, hingga Sub-Sahara Afrika. Intensitas interaksi mereka lebih banyak didominasi

oleh komunikasi internal dengan anggota komunitas internal asal negaranya seperti Bosnia, Turki, Lebanon, Iran, Fiji, Albania, Sudan, Somalia, Mesir, Palestina, Iraq, Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, Malaysia dan juga Indonesia sendiri. Kecenderungan semacam ini persis dengan pandangan teoritik yang dikemukakan antropolog David Brown dalam bukunya bertajuk *The State and Etnic Politics in Southeast Asia* (1994: 159) bahwa setiap kelompok etnis di dunia ini hampir selalu memiliki kecenderungan yang sama, yakni lebih suka berinteraksi dengan internal kelompoknya sendiri ketimbang yang lain.

Di tengah kompleknya fragmentasi sosial tersebut, komunitas Muslim Australia dihadapkan pada tantangan besar berupa "Islamofobia" yang juga jamak dialami oleh komunitas Muslim lain di berbagai belahan dunia Barat. Hossein Essmaili (2011) dari Flinders Law School, Flinders University, menilai bahwa Islamophobia di Australia pada dasarnya dipicu oleh dua faktor dasar yang telah mapan di masyarakat Barat. *Pertama*, adanya keyakinan ekstrem di kalangan Barat yang memandang Islam memang secara natural benar-benar tidak sesuai dengan nilai dan budaya Barat. *Kedua*, adanya pandangan bahwa memercayai Islam memang bisa *compatible* dengan sistem nilai, budaya, dan pemerintahan Australia, tetapi sikap rasisme, *stereotype*, dan kecurigaan yang amat besar dari masyarakat lokal terhadap Muslim sering kali memicu ketegangan yang tak terelakkan. *Kedua*, sikap tersebut sering kali dipertegas dan di-*maintain* dalam bias pemberitaan media sehingga kian menambah kesalahpahaman dan ketegangan dengan Muslim Autralia secara general. Sikap-sikap tersebut memang jarang ditampilkan secara verbal dan vulgar karena kuatnya sistem penegakan hukum yang siap menindak siapa pun yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak keberagamaan. Tetapi, sejumlah insiden vandalisme terhadap masjid seperti pelemparan kepala babi di kompleks masjid oleh orang tak dikenal atau praktik coret-mencoret di bangunan masjid merupakan fakta jelas bagaimana ketegangan itu masih ada.

Tantangan Islamophobia itu semakin besar kita relasi Islam-Barat memasuki era baru setelah tragedi terorisme 11 September 2001 yang meluluhlantakkan World Trade Centre (WTC) di New York dan sebagian gedung Pentagon. Australia yang saat itu berada di bawah kepemimpinan perdana John Howard sangat agresif dalam mendukung kekuatan *coalition of the willingness* untuk *war on terror* yang saat itu digalang Presiden George Walker Bush. Ketegangan dan kepanikan masyarakat Australia terhadap komunitas Muslim semakin besar ketika tragedi bom Bali terjadi pada 12 Oktober 2002, di mana 202 orang yang di dalamnya termasuk 88 orang warga Australia tewas akibat kebiadaban bom itu.

Rangkaian tragedi itu kembali disusul oleh ledakan besar bom di JW. Marriot, Jakarta (2003) dan juga yang di depan kedutaan besar Australia di bilangan Kuningan, Jakarta (2004). Semua tragedi itu membuat warga Australia berpikir seolah radikalisme dan terorisme telah begitu dekat di depan mata mereka. Sehingga terorisme menjadi salah satu *concern* utama pemerintah Australia yang diindikasikan oleh intensifnya penggunaan kata "terorisme" dalam pidato-pidato kenegaraan Perdana Menteri John Howard sebanyak 762 kali sejak September 2001 hingga akhir April 2006 (Michael, 2009). Sejak saat itu, umat Islam, khususnya bangsa Indonesia sebagai negara Asia terdekat Australia dengan komposisi penduduk Muslim terbesar dunia, tak hanya dianggap sebagai mitra strategis tetapi juga potensi ancaman yang besar bagi stabilitas keamanan internal Australia.

Oleh karena itu, sebelum dilengeserkan oleh rival politiknya dari Partai Buruh Kevin Rudd, pemerintahan Howard pada 23 Agustus 2005 berusaha melakukan konsolidasi ulang untuk merajut kembali ikatan multikulturalisme Australia, dengan meminta perwakilan komunitas Muslim Australia untuk menyepakati poin-poin dasar loyalitas mereka dalam berbangsa dan bernegara untuk menjaga Australia dari segala bentuk upaya tindak kekerasan, terorisme, dan perilaku-perilaku yang mencederai prinsip toleransi antaretnik, agama, dan kebudayaan yang berbeda (Department

of Immigration and Citizenship/DIAC, 2005). Sikap ini tidak jarang direspon dengan kecurigaan dan juga kemarahan sebagian kelompok Muslim yang memandang pemerintah Australia sudah melampaui batas dalam mendukung perang anti-teorisme di Iraq dan Afganistan yang ternyata hanya mengorbankan ribuan kaum sipil tak berdosa dan jelas tak mampu membuktikan tudingan-tudingan awal tentang kepemilikan senjata kimia massal di bawah penguasa Saddam Husein yang disebut-sebut memiliki hubungan dengan kelompok Al-Qaeda di bawah komando Osama bin Laden.

Oleh karena itu, ketika Australia dipimpin Perdana Menteri Tony Abbott kembali mengajak seluruh elemen bangsa Australia untuk mendukung negaranya dalam setiap kebijakan luar negeri melalui konsep "The Australia Team", tidak sedikit umat Islam terutama di Melbourne dan Sydney yang dikomandoi oleh para imam masing-masing, menolak ajakan tersebut. Penolakan itu menjadi pertanyaan besar bagi loyalitas bernegara dan juga ketidakmampuan sebagian umat Islam dalam melebur menjadi bagian integral masyarakat Australia.

Huessin Esmaili (2015) mensinyalir resistensi dari sebagian kelompok Muslim tersebut tidak hanya didasari oleh alasan-alasan yang berkaitan dengan kebijakan *jihad* di atas, tetapi ada alasan yang lebih mendasar lagi berkaitan dengan tafsir keberagamaan mereka dalam memaham konsep *ummah* dan *dhimmah*. Tidak sedikit dari kelompok Muslim Australia meskipun sudah menetap bahkan menjadi warga negara setempat tetapi masih menggunakan pendekatan dangkal dalam memahami kedua terminologi tersebut. Meskipun secara administrasi tercatat sebagai warga negara, tetapi mereka tetap percaya bahwa teritori tempat mereka berada adalah bumi Allah yang tidak perlu disekat oleh batas-batas kewilayahan. Mereka tetap meyakini konsep umat yang satu *(ummatan wahidah)* dan tidak mau tunduk di bawah pemerintahan kafir meskipun itu *dhimmah*, bukan *harb*.

Mereka juga tidak mengakui konsep kewarganegaraan *(citizenship)* dan kebangsaan *(nation-state)* karena keduanya bersumber dari tradisi hukum dan politik Barat. Meskipun kelompok ini kecil, suara nyaring mereka sering kali lebih mewarnai dibanding kelompok besar yang moderat. Dengan demikian ketika muncul jaringan *Islamic State (darul Islam fi al-Iraqi wa-Syam)*, jaringan-jaringan tersebut langsung menemukan sinyal keterhubungan dengan mereka yang mengidolakan konsep khilafah. Kondisi tersebut semakin menguatkan kelompok politik sayap kanan di Australia dalam menyudutkan posisi Muslim, yang salah satunya ditandai oleh bangkitnya *One Nation Party* yang dipimpin oleh Paula Hanson yang saat ini mendapatkan kursi di parlemen baik di tingkat negara bagian maupun federal.

Moderasi Islam dan Urgensi Peran Islam Nusantara di Australia

Kompleksitas persoalan umat Islam tersebut menjadi peluang sekaligus tantangan besar bagi Muslim Indonesia, khususnya bagi para kader dan intelektual muda Nahdlatul Ulama yang bermukim di Australia. Jaringan Nahdlatul Ulama yang direpresentasikan oleh keberadaan Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama Australia-Selandia Baru (PCI NU ANZ) tidak dapat dilepaskan dari figur Dr. Nadirsyah Hosen, Ph.D, tokoh intelektual dan ulama Nahdlatul Ulama yang kini menjadi dosen senior di School of Law, Monash University, Melbourne. Karena kapasitas keilmuan dan kealimannya, Gus Nadir, sapaan akrab pemilik dua gelar doktor yang sebelumnya juga sempat menjabat sebagai Associate Profesor di School of Law, University of Wollongong, New South Wales tersebut, dipercaya menjadi Rois Syuriah PCI NU ANZ yang menggerakkan seluruh jaringan kader-kader muda NU di Australia dan Selandia Baru. Di bawah komando Gus Nadir, gerakan jaringan NU ANZ ini juga ditopang oleh berbagai elemen, mulai dari para intelektual NU yang menjadi akademisi di kampus-kampus besar Australia dan Selandia Baru, para mahasiswa yang tengah berjihad

menempuh studi di tingkat Master maupun Doktoral, hingga warga Nahdliyyin yang telah lama menetap dan mengasuh jamaah lokal di wilayah masing-masing.

Keberadaan jaringan Nahdliyyin di Australia dan Selandia Baru tersebut memiliki peran strategis dalam mendorong dan mengklarifikasi wacana-wacana strategis terkait dengan Islam karena beberapa alasan. *Pertama*, Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar yang menjadi tetangga terdekat sekaligus "bamper" pertahanan dan keamanan Australia di kawasan Asia-Pasifik. Jika Indonesia membuka wilayah perairannya, Australia akan menjadi negara yang sangat rentan akibat besarnya arus imigran ilegal yang berusaha masuk wilayah Australia. *Kedua*, besarnya populasi Muslim Indonesia menjadi miniatur sekaligus indikator penting bagi dinamika keislaman yang paling dekat dengan negaranya. Karena itu, ketika muncul tragedi bom Bali (2001 dan 2002) dan bom di Kedutaan Australia di Jakarta (2004), pandangan terhadap Islam Indonesia langsung berubah dan hal itu secara tidak langsung juga berimplikasi terhadap sikap warga lokal terhadap komunitas Muslim di Australia. *Ketiga*, sebagai kelompok yang mengedepankan Islam moderat, jaringan Nahdliyyin dan umat Islam Indonesia secara general dapat menjadi penyangga utama bagi peningkatan kualitas diplomasi antara Indonesia, Australia dan juga Selandia Baru yang selama ini diliputi oleh nuansa sikap saling curiga yang melahirkan pola hubungan keterasingan sebagai negara tetangga (Ball dan Wilson, 1991; George & McGibbon, 1998; Philpott, 2001; dalam Umam, 2015).

Secara konsep dasar keagamaan, jaringan Nahdliyyin tentu tidak jauh berbeda dengan kelompok Sunni *Alhu Sunnah wal Jamaah* secara general yang berasal dari berbagai macam negara. Dalam aspek teologis, mereka menggunakan cara pandang Asy'ariyah dan Maturidiyyah, dalam konteks fikih, mereka mempraktikkan muamalah Mazhab Syafi'i, sedangkan dalam tasawuf, mereka mengadopsi pemikiran Imam Ghazali dan Imam Junaidi al-Baghdadi. Yang membedakan adalah, Jaringan Nahdliyyin

tidak berangkat dari negara yang mengalami konflik dan perang saudara yang tak berkesudahan. Pengalaman empiris di Indonesia tentang bagaimana relasi Islam dan negara-bangsa dapat saling memperkuat, mengakomodasi dan tidak berbenturan satu sama lain menjadi hal penting untuk ditawarkan sebagai paradigma alternatif dalam proses integrasi masyarakat Muslim Australia.

Di sinilah, peran Islam Nusantara menjadi relevan. Tentu dalam konteks ini, penulis tidak ingin terjebak atau menjebak dalam perdebatan diskursus identitas Islam Nusantara pada masa awal muncul di internal maupun di eksternal kalangan Nahdliyyin sendiri. Konteks Islam Nusantara di sini tidak ditujukan untuk mengukuhkan pengotakan sekaligus tudingan terhadap persepsi negatif yang selama ini disematkan kepada Islam ala Arab yang sarat dengan nuansa kaku, tidak ramah, keras, diskriminatif dan tidak toleran terhadap tradisi lokal, yang justru sering kali menciptakan ketegangan di dalam komunitas Muslim itu sendiri. Konteks Islam Nusantara di sini lebih diartikan sebagai kekhasan praktik dan pengalaman dalam ber-Islam di Indonesia yang identik mengedepankan spirit *wasathiyyah,* atau *middle path,* atau jalan tengah, atau moderat (Kamali, 2015). Tentu praktik keberislaman tersebut tidak hanya terjadi di kalangan Nahdliyyin, melainkan di sejumlah organisasi Islam kemasyarakatan lain di Indonesia, seperti Muhammadiyah, Perti, Nahdlatul Wathan, dan lainnya. Karena itu, interaksi harmonis di kalangan kader muda Nahdliyyin dan Muhammadiyah di Australia-Selandia Baru yang sering menemukan titik konvergensi karena persamaan cara pandang ber-Islam dan bernegara, acap menyitir semangat "Islam Nusantara Berkemajuan".

Tetapi di internal jaringan Nahdliyyin sendiri, yang memiliki akar kuat dalam rujukan kitab-kitab *mu'tabar,* menjadi penting dan *urgent* dalam mendorong proses transformasi pemikiran keislaman di Australia. Setidaknya dua hal dasar yang selama ini berusaha dijalankan oleh jaringan Nahdliyyin dalam mempromosikan Islam Nusantara ke dalam arus besar diskursus keislaman di Australia.

Pertama, mengedepankan moderasi dalam praktik keberislaman untuk mendorong integrasi komunitas Muslim dalam konteks kenegaraan di Australia. Dengan melakukan moderasi berdasarkan pada cara pandang dan penafsiran ulama *mainstream* terhadap teks-teks Alquran dan Sunnah, diharapkan dapat mendorong terciptanya keseimbangan dan harmoni sosial dalam spektrum kehidupan bernegara. Semangat *tasamuh* (toleran), *tawasut* (moderat), *tawazun* (harmoni) ini perlu terus digelorakan untuk memperkuat barisan kelompok moderat yang selama ini cenderung kurang aktif dalam meredam pergerakan opini kelompok radikal yang minor.

Misalnya, terkait dengan penolakan sejumlah kalangan Muslim Australia untuk menjadi bagian integral Australia karena perbedaan tafsir *ummah* dan *dhimmah,* dapat didialogkan dengan pendekatan-pendekatan *fiqh siyasah* yang selama ini lazim dipraktikkan di Indonesia. Kenyataan bahwa Australia sebagai *darul shulh* atau negara damai dengan pemerintahan kafir *dzimmi* dan bukan *harby* dalam memperlakukan warga Muslim di negaranya, dapat didekati dengan kaidah fikih *ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh* atau apa yang tak mungkin terwujud seluruhnya, tak boleh ditinggalkan yang terpenting (di dalamnya). Jika idealisme mewujudkan negara Islam sesuai konsep keyakinan mereka tidak dapat terwujud, sementara negara tempat mereka tinggal telah melindungi dan menjamin hak-hak mereka dalam ber-Islam, hendaknya Muslim Australia dapat menerima untuk menjadi bagian integral negara tersebut. Australia sebagai negara sekuler dengan pemerintahan yang didominasi oleh *kafir dzimmi*, telah menjamin kebutuhan dasar Muslim terkait *maqasidu al-syariah*, yakni keselamatan fisik *(hifdzu an-nafs)*, keselamatan keyakinan agama masing-masing *(hifdzu ad-din)*, keselamatan keluarga dan keturunan *(hifdzu an-nasl)*, keselamatan harta benda dan milik pribadi dari gangguan yang tidak sesuai sistem hukum *(hifdzu al-mal)*, dan keselamatan hak milik dan profesi *(hifdzu al-milk)*. Adapun aspirasi ketidaksetujuan terhadap sikap politik luar negeri Australia yang berkaitan dengan

nasib umat Islam di luar negeri, hendaknya dapat disalurkan pada sistem dan mekanisme politik yang diberikan kepadanya.

Kedua, jaringan Nahdliyyin di Australia dan Selandia Baru juga dapat mengadvokasi gerakan untuk menetralisir gerakan politik sayap kanan yang berpotensi menyudutkan masyarakat Islam. Dengan identitas Islam yang berasal dari Indonesia, Nahdliyyin menempati posisi strategis secara politik regional untuk lebih didengarkan oleh negara tetangga ini. Misalnya, dalam Konferensi Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama Australia-Selandia Baru (PCI NU ANZ) di Adelaide pada akhir 2016 lalu, PCI NU ANZ mengecam keras pernyataan Senator Australia Pauline Hanson yang mengusulkan penghentian masuknya imigran Muslim ke Australia. Jaringan Nahdliyyin yang dikomandoi Gus Nadir menilai bahwa senator Pauline Hanson dari *One Nation Party*, kelompok sayap kanan politik di Australia telah bersikap intoleran dan berpotensi menebarkan kebencian terhadap umat Islam di Australia. Hal itu sangat kontraproduktif dengan sikap damai dan akomodatif mayoritas Muslim Australia yang taat aturan dan membayar pajak untuk pembangunan negara. PCI NU ANZ juga mengecam sikap Hanson yang seolah meng-*copy* gerakan anti-Islam di Eropa yang cenderung bersikap diskriminatif terhadap penggunaan burkini oleh Muslimah. Karena semua itu adalah bagian dari kebebasan ekspresi keberagamaan yang dijamin oleh hak asasi manusia dan tentu konstitusi Australia.

Dengan mendorong gerakan moderat dan mengadvokasi kebijakan yang berkaitan dengan umat Islam di Australia dan Selandia Baru, PCI NU ANZ berharap setiap *stakeholders* dan pengambil kebijakan di kedua negara tersebut dapat mengikuti saran bijak dari John Esposito (1990) yang menyerukan bahwa, *"Muslims are 'very much part of the mosaic of Western societies, no longer foreign visitors but fellow citizens and colleagues."* Untuk itu, langkah-langkah strategis ini perlu dilakukan untuk meredam praktik dan cara pandang yang mengisolasi dan marginalisasi terhadap komunitas Muslim di Australia dan Selandia Baru.

Dengan itu, Islam Nusantara dapat menjadi ikon unik dalam arus besar diskursus keislaman di Selandia Baru dan Australia.

Tantangan Besar di Tengah Keterbatasan

Langkah-langkah tersebut tentu tidak hanya menjadi tugas kaum Nahdliyyin, melainkan juga semua umat Islam Indonesia di Australia dan Selandia Baru secara general. Kendati demikian, tentu tidak mudah melakukannya. Setidaknya ada dua alasan mengapa hal-hal tersebut tidak mudah dilakukan. *Pertama*, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, ketidakmudahan itu disebabkan oleh kompleksitas multikultralisme di dalam komunitas Muslim di Australia dan Selandia Baru itu sendiri. *Kedua*, dinamika komunitas Muslim Indonesia masih sangat dibayang-bayangi oleh konstalasi kepentingan dan politik identitas di tanah air. Di tengah pembelahan umat akibat konstalasi politik di dalam negeri, terbatasnya level pemahaman dalam khazanah keislaman yang berbanding terbalik dengan tingkat kepercayaan diri yang sering kali melampaui batas kemampuan dan kapasitasnya dalam memahami variasi pemikiran-pemikiran keislaman, ditambah oleh terbatasnya tingkat kedewasaan politik warga, membuat komunitas Muslim Indonesia di Australia dan Selandia Baru cenderung *inward-looking*, terfragmentasi dan berpotensi semakin terpinggirkan dalam kompleksitas interaksi komunitas Muslim Australia secara general.

Karena itu, pihak masing-masing di internal komunitas Muslim Indonesia perlu melakukan refleksi kembali, untuk bersinergi, guna membentuk komunitas yang lebih solid dan moderat. Selain itu, sinergitas tersebut juga perlu mendapatkan dukungan besar dari pemerintah dan komunitas yang lebih besar di Indonesia. Misalnya, Kementerian Agama, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan organisasi kemasyarakatan yang lain, perlu mendukung dengan mensuplai dan memfasilitasi kehadiran para intelektual Islam Indonesia yang memiliki kapasitas ilmu memadai

dan kecakapan bahasa Inggris dan Arab, untuk hadir ke Australia dan Selandia Baru. Sehingga dakwah Islam Nusantara yang damai dan moderat tidak hanya dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia di kedua negara tersebut, tetapi juga dapat mengisi forum-forum kajian di masjid dan komunitas Islam di luar Indonesia, seperti Timur Tengah, Sub-Sahara Afrika, Asia Selatan dan juga Asia Tenggara lainnya. Dengan itu, kita dapat menyosialisasikan dan mempromosikan Islam Nusantara yang menjadi ciri khas Islam Indonesia ke dalam arus besar diskursus keislaman di Australia dan juga Selandia Baru.

Referensi

Cotton, J., & Ravenhill,J (eds), *Seeking Asian Engagement: Australia in World Affairs 1991-95*, University Press, Melbourne, 1997.

Esmaili, Hossein, *Australian Moslem and Citizenship: Syaria Law and the Democratic Nation State, AltLJ*, Vol. 36:4, 2011.

Esmaili, Hossein, "Australian Muslims: The Role of Islamic law and Integration of Muslim Into Australian Society", *Flinders Law Journal*, 2015.

FitzGerald, S., *Is Australia an Asian Country?*, Allen & Unwin, St Leonards, NSW, 1997.

Ganter, R.(2008). "Muslim Australians: the deep histories of contact", *Journal of Australian Studies*, Volume 32,4, 2008.

Huntington, Samuel, P (a)., 'Religion and the Third Wave', *The National Interest*, Summer, 1991, pp. 29-41.

Huntington, Samuel P. (b)., *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*, New York, M.E. Sharpe, 1991.

Kamali, Mohammad Hashim, *The Middle Path of Moderation in Islam: The Qur'anic Principle of Wasatiyyah*, Oxford & New York: Oxford University Press, 2015.

Kitley, Philips, Richard Chauvel, David Reeve, *Australia di Mata Indonesia; Kumpulan Artikel Pers Indonesia 1973-1988*, Jakarta, PT Gramedia, 1989.

McDougall, Derek, *Australian Foreign Relations, Contemporary Perspectives*, Longman, Melbourne, 1998.

McIntosh, Ian, "Islam and Australia's Aborigines? A Perspective from North-East Arnhem Land", *The Journal of Religious History,* Vol. 20, No. 1, 1996.

Michael, Michális S., "Australia's Handling of Tensions between Islam and the West under the Howard Government", *Asian Journal of Political Science*, Vol. 17, No. 1, April 2009, pp. 45-70.

Umam, Ahmad Khoirul, 'Wajah Damai Minoritas Islam di Ausralia', dalam Sumanto Al Qurtuby, *Berguru ke Kiai Bule: Serba Serbi Kehidupan Santri di Barat,* Mizan, Bandung, 2012.

Umam, Ahmad Khoirul, 'Relasi Indonesia-Australia Pasca Abbott', *Kompas,* 1 Oktober 2015.

Transnasionalisasi Islam Nusantara: Perspektif Asia

Ali Amin

Menjadi Muslim Minoritas

Setelah Osama bin Laden tewas, dan Al Qaeda meredup pamornya, dunia punya monster baru yang lebih mengerikan yaitu ISIS atau *Islamic State of Irak and Syam*. Aksi kekezamannya yang di luar batas keadaban manusia, oleh para pelaku dan simpatisannya diklaim sebagai praktik yang diabsahkan ajaran Islam. Sementara Islam saat ini dinyatakan berbagai survei sebagai agama terbesar kedua di dunia, dan tumbuh paling pesat di negara-negara non-Muslim (Survey PEW, 2016) membuat masyarakat internasional khawatir akan masa depan peradaban manusia. Kecemasan itu, seperti yang terungkap di media dan percakapan umum dimaklumi beredar luas di Eropa mengingat Islam berkembang di sana sangat pesat. Orang Eropa mungkin bertanya apakah saat ini mereka sedang berdampingan dengan pengikut atau simpatisan ISIS yang suatu saat akan menggantikan kultur bangsa Eropa. Kesan negatif terhadap imigran Muslim di Eropa, yang lebih menonjolkan identitas politik Islamismenya dan menolak berintegrasi memperkuat kekhawatiran dan prasangka mereka akan Islam.

Rentetan bom bunuh diri di Mesir, Baghdad, Paris, Belgia dan London yang diklaim oleh ISIS; berita tentang pemenggalan dua wartawan Jepang dan warga Kanada serta praktik perbudakan yang ISIS legalkan, berulang kali mengiris-iris perasaan setiap manusia yang waras. Saya merasa, bagian dari identitas tersakral saya telah

dibajak. Muslim yang tinggal di tengah masyarakat non-Muslim pasti merasakan "beban" berat "berbagi" identitas dengan monster yang sedang diwaspadai masyarakat global. Setiap terjadi bom bunuh diri dan penembakan massal, sebelum pelakunya diketahui, Muslim selalu berharap semoga pelakunya bukan seorang Muslim. Jika ternyata ia seorang Muslim atau mempunyai ciri-ciri etnis Muslim, maka minoritas Muslim seperti berada dalam ruang pasung dengan kaki dan tangan terikat serta mulut yang dikunci. "Muslim di mana saja sama, mereka bersaudara, mereka akan lebih bersimpati kepada sesamanya meskipun terhadap mereka yang telah berbuat teror" begitu mungkin masyarakat non-Muslim menduga.

Kenyataan yang lebih menyesakkan bagi saya, orang Indonesia yang berada di negeri mayoritas non-Muslim, adalah suara umat Islam yang kontra ISIS tidak cukup kuat. Banyak dari mereka yang terkesan bersikap mendua; berbeda antara ucapan dan sikap, bahkan banyak lagi yang terkesan apologetik. Mengakui ISIS salah tapi mencari kambing hitam dengan memercayai teori konspirasi. Banyak masyarakat yang lebih percaya bahwa ISIS itu semata-mata produk Barat, Amerika, Israel dan sekutunya untuk memecah belah dan mendeskreditkan Islam, sembari melupakan bahwa pemahaman tersebutlah yang telah membiarkan diam-diam ISIS berkembang. Di Indonesia, banyak juga yang justru keberatan dengan program pemerintah yang tegas mengonter radikalisme. Mereka lupa sesungguhnya ada masalah mendasar dalam pemahaman dan kesadaran keagamaan masyarakat Muslim sehingga ISIS meraih simpati dan mendapatkan dukungan. Sebagian kelompok Islam lain mencoba membesarkan isu konspirasi tersebut sambil menganggap nihil bukti empirik bahwa ISIS tumbuh berkembang karena interpretasi teologi yang kacau. Jika ISIS oleh dokter dinyatakan sebagai penyakit yang jelas berakar dalam interpretasi Islam yang sembrono, serta didorong oleh kondisi-kondisi sosial lainnya, sebagian umat Islam menuduh dokterlah yang salah mendiagnosa penyakit itu, dan mencampakkan formula obat yang

sudah diresepkan. Bagi saya, ISIS adalah kanker stadium tertinggi yang diawali oleh stadium-stadium sebelumnya berupa radikalisme agama.

Sikap diam, ragu, terbata-bata, atau terlalu retoris pada banyak kelompok Islam dalam mengonter kebiadaban kelompok teroris, karena pada dasarnya terdapat arsiran kepentingan ideologi dan pragmatisme (motivasi ekonomi dan politik) pada kelompok kelompok tersebut dengan pengusung ideologi terorisme. Ideologi takfir ISIS beririsan dengan ideologi kelompok-kelompok Islam pengusung ide-ide purifikasi. Ideologi ini mempunyai konsepesi tersendiri tentang Islam yang harus suci dari elemen sejarah dan budaya masyarakat setempat. Sejauh mana teologi purifikasi ini dan jaringannya memengaruhi masyarakat berkorelasi dengan respons mereka terhadap radikalisme Islam dan terorisme. Untunglah organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama, kelompok terbesar umat Islam di Indonesia, tak ragu sedikit pun menyatakan perang terhadap radikalisme agama yang telah menjelma menjadi salah satu fenomena global dalam dunia Islam. Walaupun digempur dari berbagai sisi dengan label pengusung bid`ah, khurafat, pembela penista agama, pelindung aliran sesat dan lain-lain, NU beserta Bansernya tak ragu sedikit pun membela pemahaman Islam yang ramah, Islam Indonesia yang menjamin kehidupan ber-*Bhinneka Tunggal Ika*. Purifikasi yang menjadi pintu gerbang ideologi radikalisme Islam *by nature* menjadi garis pemisah antara kelompok Islam yang malu-malu dan yang yakin dalam menolak radikalisme dan terorisme dalam Islam.

Terjebak Saham Saudi

Globalisasi Islam (Sunni) dalam empat dekade terakhir berkiblat pada dua ideologi purifikasi yang lahir dan berkembang di Timur Tengah. Pertama Islam politik (Islamisme) dan yang kedua pos-Islamisme. Islam politik yang biasa disebut Qutbisme adalah ideologi keislaman yang berakar dari pemikiran tokoh

Ikhwanul Muslimin Sayid Qutb juga Al Maududi (Pakistan) yang berintikan keharusan pendirian negara Islam demi terwujudnya masyarakat Islami (Basam, 2002 dan Roy, 2006). Selain karena perintah Allah, pendirian negara Islam adalah prasyarat agar umat Islam bisa kembali kepada ajaran Islam dan mencapai kejayaannya. Pemerintah atau penguasa di negara Muslim yang tidak berdasar konstitusi syariat Islam mereka sebut *taghut* yang harus dilawan. Setelah ideologi ini mengalami banyak kegagalan, berkembanglah ideologi purifikasi berikutnya yang "apolitik". Mereka percaya menegakkan Islam tidak perlu dengan mendirikan negara Islam. Cukup mengganti budaya dan tradisi masyarakat sesuai dengan syariat Islam. Mereka meyakini yang terpenting adalah Islamisasi masyarakat (yang sudah Islam). Menjauhkan Islam dari kultur non-Islam; mensucikan Islam dari elemen-elemen tradisi masyarakat lokal dengan hanya merujuk pada Quran dan Sunnah seperti yang dipahami kaum Wahabi. Tentu saja misi ini sangat bersinggungan dengan keyakinan masyarakat Muslim Indonesia (terutama di Jawa), yang sudah lama ber-Islam tetapi tiba-tiba dinyatakan tidak benar Islamnya sehingga perlu di-Islamkan kembali.

Popularitas pos-Islamisme (Wahabi) di Indonesia, diawali dengan peristiwa revolusi Iran di akhir tahun 1970-an. Di masa itu anak muda Islam terpana dengan revolusi Iran di bawah tokoh karismatiknya Khomeini. Mereka anggap suasana di Indonesia bisa mencontoh Iran dalam melawan Orde Baru yang sedang antipati terhadap Islam. Banyak lulusan pesantren, dan aktivis mahasiswa terhipnotis dengan karisma Khomeini yang bisa menumbangkan rezim sekuler Shah. Kepemimpinan Khomeini dan ideologi revolusi Ali Syariati menjadi buah bibir di forum-forum diskusi aktivis mahasiswa Muslim. Ide-ide tokoh Syiah menjadi *suplement* para aktivis dalam mengkritik rezim Orde Baru. Fenomena yang sama juga terjadi di negara-negara Muslim lainnya di Asia dan Afrika.

Saudi cemas! Reputasi pusat kekuatan Sunni merasa tersaingi oleh demam revolusi Iran. Demonstrasi di musim haji tahun

1987 oleh Jamaah dari Iran dianggap rongrongan nyata Iran yang akan mengganggu wibawa otoritas Saudi. Datanglah Saudi ke Indonesia (dan negara lain juga) untuk menanamkan pengaruhnya. Booming kekayaan minyak Saudi dialirkan ke Indonesia negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Disebarkanlah hasil keuntungan bisnis minyak mereka melalui individu dan institusi berpengaruh di Indonesia. Mereka yang punya kedekatan personal maupun institusional dengan Timur tengah kecipratan berkah dan menjadi pintu masuk pengaruh ideologi padang pasir. Di antaranya yang paling menonjol adalah jaringan Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) yang didirikan oleh almarhum Moh. Natsir yang juga sebagai salah satu pengurus Rabithah Alam Al Islamy di Mekkah. Lewat rekomendasi atau bantuan Pak Nastir, DDII atau jaringannya, mereka dibuatkan masjid, gedung asrama, ruang kelas, perpustakaan, fasilitas beasiswa, dan lain-lain. Di sebuah pesantren besar di Jawa timur gedung terbesarnya dinamai gedung Saudi.

Tak hanya sarana prasarana, kegiatan peningkatan pengetahuan bahasa dan keagamaan juga difasilitasi. Dibangunkan laboratorium bahasa, didatangkan pengajar dari Timur Tengah, guru-guru di-*training* bahasa dan aqidah Wahabi berhari-hari dengan iming-iming melanjutkan kuliah di Mekkah atau Madinah dengan nominal beasiswa yang fantastis. Buku-buku terbitan WAMY menjadi suvenir populer bagi siapa saja yang datang ke DDII atau Kedutaan Saudi. Di luar itu, proyek penguatan ideologi Saudi di Indonesia yang paling efektif adalah dibangunnya LIPIA (lembaga Ilmu pengetahuan Islam Arab).

LIPIA hingga sekarang adalah lembaga yang cukup populer bagi para santri. Kuliah di Jakarta gratis bahkan digaji lebih dari PNS (dahulu) merupakan hal yang didamba-dambakan santri. Ribuan santri tiap tahunnya berlomba untuk kuliah gratis DI, D2, D3 bahkan S1 di gedung representatif di Jakarta. Banyak lulusan LIPIA di kemudian hari menjadi jaringan yang efektif bagi Saudi untuk memainkan perannya di berbagai pelosok Indonesia. Mereka

berkiprah mengajar di lembaga-lembaga pendidikan formal seperti sekolah, pesantren bahkan perguruan tinggi. Banyak juga yang mendirikan lembaga dakwah non-formal sendiri seperti pengajian di kampus-kampus umum, penerbitan, hingga penyaluran bantuan ke pelosok pedesaan. Beberapa lembaga *charity* alumni LIPIA atau Saudi menyalurkan dana pembangunan masjid, musala hingga hewan kurban di daerah-daerah terpencil. Di kemudian hari, alumni LIPIA yang tersebar di berbagai daerah banyak yang bergabung menjadi pengurus sebuah partai yang memperjuangkan formalisme Islam.

Tidak ada makan siang gratis. Saudi tidak memberikan dananya kecuali kepada individu atau institusi yang mendukung ideologinya. Desain masjid yang akan disumbang harus menyesuaikan dengan selera mereka. Tidak ada masjid sumbangan Saudi berbentuk layaknya masjid Kudus atau Demak yang berarsitektur Jawa. Mereka tidak akan memberikan dananya kepada pesantren atau kiai yang banyak mempraktikan "bidah" dan "khurafat". Bagi pesantren atau madrasah, salah satu trik mendapatkan dan juga mengikuti kemauan dan kesenangan mereka. Termasuk membuka kran bagi masuknya pola pikir dan ide-ide Wahabi melalui kurikulum dan pengajarnya. Ada pesantren yang menutup poster-poster foto pendirinya demi menyambut syekh-syekh dari Saudi yang mengharamkan gambar manusia. Mereka juga meliburkan alunan pujian, solawat, syair Arab atau Jawa yang biasa dibacakan santri saat menunggu iqomat.

Saat ini modal sosial Saudi berupa jaringan ideologi sudah cukup kuat di Indonesia. Mereka punya ratusan ribu alumni universitas di Saudi, alumni LIPIA, alumni dauroh, lembaga penyalur dana Saudi, dan lain-lain termasuk keluarga dan simpatisannya yang siap melancarkan ekspansi "ideologi Sahara" lewat berbagai sendi kehidupan masyarakat baik pendidikan, politik, sosial, ekonomi dan budaya. Apa pun tidak disukai Saudi akan disuarakan oleh mereka yang pernah "berutang" saham Saudi. Begitu fatwa ulama Saudi tentang Syiah dan Ahmadiyah keluar, secara otomastis *net-*

work Saudi yang berada di lembaga-lembaga kegamaan di Indonesia seperti MUI, DDII, pesantren dan lain-lain, dan perwakilannya yang ada hingga kecamatan bahkan desa mensosialisasikan fatwa tersebut, baik lewat ceramah atau tulisan media. Dua, tiga dekade berlalu, saat ini adalah waktu panen raya mereka. Tak heran di era digital abad 21 ini, tiba-tiba saja akhirnya masyarakat menjadi kejam kepada saudara sendiri. Teman-teman sekampung bahkan saudara yang mengikuti Ahmadiyah atau Syiah seperti di Mataram, Kuningan, Madura dan Bangka, menjadi musuh yang harus terusir di kampung halamannya sendiri. Mereka sesama Muslim yang berbeda tafsir Quran-pun dicap liberal, munafik, kafir, musuh Islam, hingga jenazahnya tak layak disalatkan.

Minoritas Muslim dan Globalisasi Pos-Islamisme

Pos-Islamisme tidak saja menerpa sebagian masyarakat Muslim di negeri Muslim, tapi juga masyarakat Muslim di negeri non-Muslim baik di Eropa, Amerika, Australia, maupun di Asia. Fenomena ini selain menigkatkan tensi hubungan antara Muslim dan non-Muslim juga mengonfirmasi keyakinan non-Muslim setempat seperti yang mereka baca dari sejarawan Inggris, Bernard Lewis bahwa Islam memang terbuat dari tradisi kekerasan dan intoleran terhadap perbedaan.

Globalisasi *post*-Islamisme (Wahhabisme) ke negeri non-Muslim didukung oleh tiga faktor terkait aktivitas migrasi transnasional: *Pertama*, migrasi Muslim ke negeri non-Muslim; *kedua*, pengiriman agamawan, dai, guru atau Imam beraliran Wahhabi; *ketiga* sumbangan dana pembangunan dan kegiatan masjid dari jaringan Wahhabi. Islam adalah agama terbesar kedua bagi mereka yang tinggal di negeri bukan tempat kelahirannya (Cesari 2007). Kebanyakan warga Muslim dari Asia Selatan, Tenggara, dan Afrika bermigrasi ke wilayah kaya di Timur Tengah seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Qatar atau negara negara di sekitar tempat tingal mereka sendiri. Tapi tidak sedikit

umat Islam yang bermigrasi ke negara-negara non-Muslim. Berbagai faktor pendorong *(push)* dan penarik *(pull)* baik karena krisis di tempat asal atau kesempatan yang lebih baik di negeri tujuan mendorong Muslim meninggalkan tanah airnya.

Para pengkaji migrasi sepakat, di tempat yang baru, para migran mengalami masa transisi yang berat. Perbedaan bahasa, kebiasaan, hukum, adat istiadat dan budaya, serta status minoritas membuat para migran acap merasakan *loneliness, homesickness*, bahkan stres. Di sisi lain juga fenomena yang umum di kalangan mereka; kaum imigran yang meninggalkan keluarga dan tanah airnya untuk mencari kerja, di tempat yang baru selalu mendapatkan bantuan, perlindungan, pertolongan, persahabatan dan komunitas yang meringankan beban hidup mereka. Laiknya hubungan *muhajir dan anshor,* yang pertama dibantu oleh yang kedua dalam mencari tempat tinggal, mencari kerja, belajar bahasa lokal, bahkan soal kebutuhan hidup. Mereka yang tidak pandai berbahasa lokal akan sangat tergantung dengan jaringan yang baru dikenalnya. Dalam kondisi tersebut, berkelompok, berkomunitas menjadi kebutuhan utama kaum migran termasuk bergabung dengan komunitas masjid, musala dan pengajian bagi kaum migran Muslim. Mereka masuk dalam *network* baru. Sayangnya banyak masjid-masjid di luar negeri yang dikunjungi warga Indonesia lebih banyak dikelola dan diimami warga etnis Timur Tengah dan Asia Selatan yang terhubung dengan *network* ideologi purifikasi tertentu di negeri asalnya.

Sejak tahun 1980-an, pemerintah Saudi sangat intens menyalurkan dana bantuan sarana dan prasana bagi umat Islam di seluruh dunia termasuk di negeri non-Muslim. Banyak masjid di Eropa dan Amerika berdiri berkat aliran dana hasil keuntungan minyak bumi di Saudi dan pemerintah di jazirah Arab lainnya. Pembangunan beberapa masjid dan musala di Jepang juga tak lepas dari kontribusi pihak Saudi atau jaringannya. Di kemudian hari, sebagaimana hukum mutualisme berlaku, pihak penerima dana akan merasa berutang ke pihak penyumbang sehingga

keinginan pihak pengusung ideologi Saudi untuk meneruskan misinya dengan mudah terfasilitasi. Imam, dai, atau ustaz pengajar bermadhab Wahhabi, atau utusan Saudi diterima dengan sangat terbuka karena mereka adalah perwakilan pihak penyumbang yang juga datang tidak dengan tangan kosong.

Para imam masjid di Eropa, Amerika yang kebanyakan beretnis Timur tengah, atau Asia selatan difasilitasi pihak Saudi atas permintaan pengurus masjid atau jamaah setempat. Bisa juga dari organisasi mereka di Pakistan atau Bangladesh yang berafilasi ke Jemaat Islami, partai Islam di Pakistan yang mengusung Islamisme. Mereka mendapatkan sebagian penghasilannya dari pihak Saudi dan Jamaah. Beberapa masjid di Jepang mengangkat imam utusan organisasi keislaman yang mempunyai kedekatan dengan partai Jemaat Islami. Para imam tersebut mempunyai kualifikasi berstandar; lancar berbahasa Arab dan Inggris, hafal Alquran atau sebagiannya dan juga mempunyai kualifikasi sarjana kajian Islam.

Hampir semua imam beretnis Pakistan di Jepang yang pernah saya temui juga mempunyai kualifikasi di atas; alumni madrasah dan perguruan tinggi di Pakistan atau di Timur Tengah termasuk Universitas Madinah, tempat pengaderan dai dan ulama Wahhabi global. Di bulan Ramadan saat kaum Muslim berkumpul untuk beribadah dengan intensif, masjid-masjid itu mendatangkan imam dari negara mereka sendiri Pakistan, Bangladesh, atau Timur Tengah. Keberadaan organisasi Islam yang berafiliasi ke Jamaat Islami di Pakistan yang bersahabat baik dengan pihak Saudi, menjadikan diskurus keislaman yang dominan di negara-negara non-Muslim juga "Wahabi *friendly*".

Di Jepang, komunitas Muslim Asia Selatan terutama Pakistan dan Bangladesh meskipun bukan kelompok mayoritas, memberikan warna keislaman yang cukup dominan. Hal ini dimungkinkan karena karakter migrasi masyarakat sub-kontinen India berbeda dari orang Indonesia. Meskipun imigran Indonesia memiliki jumlah mayoritas, orang Asia Selatan, di samping awal bermigrasi ke Jepang, tapi kebanyakan status migrasi mereka menetap

untuk jangka panjang *(permanent resident)*, bahkan selamanya *(naturalized)*. Profesi mereka juga lebih *settled* seperti teknisi IT, eksekutif kantoran, hingga yang terbanyak *businessman*. Dengan niat menetap di Jepang dan melancarkan bisnisnya, mudah ditemui pria-pria Pakistan/Bangladesh menikahi perempuan-perempuan Jepang. Mereka juga membentuk asosiasi masyarakat Muslim Jepang yang beranggotakan warga beretnis Asia Selatan terutama Pakistan dan berhasil mendirikan tak kurang dari sepuluh masjid di berbagai kota Jepang.

Sebaliknya mayoritas imigran Indonesia di Jepang adalah pekerja magang dan pelajar yang hanya tinggal dalam jangka pendek (sekitar tiga tahun). Ada pekerja profesional yang umumnya lulusan perguruan tinggi di Jepang. Yang terakhir pun kebanyakan tidak ingin berlama-lama tinggal di Jepang. Dalam struktur sosial komunitas imigran, para pekerja tetap profesional, dan mahasiswa mempunyai status dan peran yang penting dalam organisasi-organisasi keislaman Indonesia di Jepang. Kondisi ini menentukan corak kegiatan dan orientasi organisasi masyarakat Muslim Indonesia di Jepang.

Oleh karena kelompok terpelajar baik mahasiswa maupun pekerja profesional asal Indonesia berlatar keluarga kelas menengah di daerah asalnya, suasana dan wacana ke-Islaman yang mereka bawa ke Jepang mencerminkan diskursus dan praktik yang menjadi trend di kalangan kelas menengah Muslim di tanah air. Maraknya pengajian-pengajian umum yang diisi ustaz-ustaz Salafi atau Tarbawi di sekolah menengah dan kampus serta media populer berimbas pada pilihan narasumber yang mereka jadikan referensi dan kemudian didatangkan dari Indonesia. Beberapa penceramah Wahhabi yang pernah dan sering diundang ke Jepang di antaranya: Zaitun Rasmin, Tengku Zul Karnain, Harry Mukti, Bachtiar Nasir, Khalid Basalamah, dan beberapa penceramah yang sering tampil di TV Salafi Indonesia. Kondisi yang sama juga terjadi di kalangan TKI di Korea. Mahasiswa-mahasiswa asal Indonesia menjadi kelompok yang cukup menentukan dalam mewarnai diskurus ke-Islaman di

kalangan diaspora Indonesia di sana.

Islam Nusantara Transnasional

Jika terorisme adalah penyakit kronis yang merusak tubuh Islam, maka ideologi purifikasi Wahabi adalah pintu masuk virus radikalisme yang merusak sel-sel tubuh umat Islam. Semakin lebar pintu purifikasi dibuka, semakin deras virus menjangkiti dan menggrogoti tubuh masyarakat. Islam perspektif moderat yang diperjuangkan oleh kaum Nahdiyin dengan ideologi "Islam Nusantara"-nya berfungsi sebagai antibodi yang memberikan imunitas tubuh dari serangan virus radikalisme itu. Sejauh mana virus bisa mengancam dan antibodi bisa bertahan bahkan mengusir musuhnya tergantung banyak hal; tapi yang paling penting salah satunya adalah kemauan masyarakat sendiri untuk memperkuat anti virus dengan antara lain meng-*upgrade* secara berkala, dan memberi suplemen-suplemen penguat antivirus tersebut. Maka PBNU dan warga NU sebagai pemilik lisensi *software* antivirus Islam Nusantara harus memasarkannya secara masif tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia internasional. Di negeri-negeri Muslim, PBNU dan warganya bisa meningkatkan hubungan yang erat dengan kelompok tradisonal, tarekat, dan sufisme untuk memobilisasi aliansi kaum religius nasionalis. *Network* NU tersebut yang berada di Asia Selatan, Asia Tengah, Asia Barat dan Afrika akan dapat mengglobalkannya ke *network* transnasional mereka di negeri-negeri non-Muslim tujuan migrasi seperti Eropa, Amerika, Kanada dan Australia. Sudah saatnya Muslim Nusantara membalas budi kaum pendakwah awal dari Asia Selatan dan Timur Tengah dengan Islamnya yang ramah terhadap tradisi lokal nusantara. Sekarang saat negeri-negeri tersebut diterpa badai Islam global yang menghinakan tradisi setempat, kita yang tumbuh dalam "kemewahan" tersebut pantas mengembalikannya lagi ke negeri moyang guru-guru Islam kita. Selain itu, PBNU sendiri harus memulai dakwah transnasionalnya secara fokus ke Asia Pasifik terutama Jepang, China, Korea, Taiwan dan Hongkong.

Mengapa Asia Pasifik?

Pertama, dakwah transnasional Islam Nusantara sangat penting dimulai dari Asia Timur terutama Jepang, Korea, dan Cina. Di samping bahwa ketiga negara tersebut, saat ini adalah raksasa Industri global, dan investor terbesar pembangunan infrastruktur di dunia, di mana keberhasilan dakwah Islam di masyarakat tersebut dapat berefek positif bagi *branding* Muslim setempat dan internasional dengan semakin terbukanya banyak kesempatan untuk saling mendukung dan bekerja sama dalam banyak hal. Penerimaan yang positif dari bangsa Jepang, Korea, dan Cina terhadap Islam akan memberikan pandangan alternatif bagaimana dunia non-Muslim non-Barat dalam melihat Islam.

Yang lebih penting adalah "kesempatan" Islam Nusantara berperan sebagai pionir dan pemain kunci layaknya "walisanga" lainnya dalam kegiatan dakwah Islam di negeri-negeri tersebut. Kemungkinan ini didasarkan pada beberapa alasan. *Pertama*, populasi imigran Muslim di Asia Timur; Jepang, Korea, Taiwan, dan Hongkong yang terbanyak berasal dari Indonesia. Mereka berpotensi menjadi *supporting audiance* "dakwah lisan" ulama-ulama nusantara, dan sekaligus pelaku dakwah *(bil hal)* yang dapat memberi contoh masyarakat setempat dalam memahami Islam yang *rahmatan lilalamin*. Dengan dominasinya di kalangan imigran Muslim, pendatang dari Indonesia juga berpotensi memberi pengaruh kepada imigran Muslim lainnya dari luar Indonesia. Jika di UK, Kanada atau Amerika kebanyakan Muslim imigran berasal dari Pakistan atau India, maka di Asia Timur, Muslim Indonesia (Islam Nusantara) bisa menjadi warna yang dominan. Jumlah populasi imigran Indonesia di Jepang dan Korea dapat terus ditingkatkan karena negara-negara tersebut sedang mengalami krisis populasi generasi produktif. Di tahun-tahun ke depan, negara-negara tersebut akan mengalami *overpopulation* generasi lansia. Tuntutan untuk terus menjaga stabilitas ekonomi akan memaksa mereka mempermudah jalur migrasi warga negara asing untuk menggantikan posisi tenaga kerja yang tidak produktif lagi.

Kedua, terkait dengan kesempatan Indonesia mewarnai Islam di Asia Timur di dukung oleh faktor kemampuan bahasa asing yang lebih seimbang. Di Amerika dan Eropa, imigran Indonesia secara jumlah dan status sosial tidak bisa bersaing dengan imigran dari Asia Selatan karena kendala bahasa. Bahasa Inggris yang menjadi *second language* bagi penduduk Asia Selatan serta Bahasa Arab yang juga populer di kalangan mereka, membuat akses sosial dan ekonomi mereka lebih luas termasuk juga dalam bidang dakwah. Terkecuali, perlu diketahui Ustaz Syamsi Ali yang terkenal sukses berdakwah di New York, juga lulusan Pakistan yang saya yakini bisa berbahasa Urdu sehingga cukup mendapatkan respek di kalangan Muslim *upper class* di NY yang beretnis Pakistan. Di Jepang, Korea serta Cina, kemampuan bahasa Inggris tidaklah dihargai lebih tinggi dari bahasa lokal. Karena soal kemampuan bahasa yang merata tersebut, orang Indonesia mempunyai kesempatan yang sama, bahkan lebih dari orang Asia Selatan karena Indonesia mempunyai hubungan sejarah dan emosi yang lebih dekat dengan Asia timur

Ketiga, secara posisi geografis, jarak dari Indonesia ke wilayah Asia Timur jelas lebih dekat daripada ke Eropa atau Amerika, sebuah kelebihan yang memungkinkan migrasi dan transnationalisasi dakwah lebih mudah dilakukan. Jarak dari Jakarta ke Tokyo atau Seoul dan sebaliknya dengan pesawat, lebih cepat dan nyaman ditempuh daripada Jakarta-Papua dan sebaliknya (termasuk transit). Begitu pun biaya *shipping* (pengiriman barang) dengan kapal, yang lebih murah dan cepat dilakukan dari Jakarta ke Busan/ Seoul/ Tokyo dan sebaliknya daripada Jakarta-Papua atau Ambon dan sebaliknya. Dibantu dengan teknologi yang semakin murah dan super cepat yang tersedia di negara maju tersebut, persoalan-persoalan biaya karena jarak bisa dengan lebih mudah dan murah diatasi dibandingan mobilisasi dakwah Islam Nusantara ke Amerika atau Eropa.

Keempat, persoalan karakter budaya orang Asia Timur yang lebih dekat dengan Indonesia daripada dengan orang Timur

tengah dan Asia Selatan. Saat ini, meskipun Jepang, Korea, dan China adalah negara industri maju dan dianggap negara yang paling ramah terhadap *atheism* (Survei PEW 2014), tapi mereka mempunyai tradisi agama yang berakar pada nenek moyang *(ancestors)*. Survei nasional selalu menyebut sekitar 70-80 persen orang Jepang mempraktikan ritual Shinto dan Buddha secara bersamaan yang telah lama dipraktikan masyarkat Jepang. Beberapa antropolog menyebutkan bahwa praktik keteraturan, disiplin dan kebersihan masyarakat Jepang tidak lepas dari akar tradisi Shinto dan Buddhism (tradisi Asia Timur) yang sangat menekankan harmoni manusia dan alam (di antaranya Kawano 2013). Sangat mudah menemui rumah tradisional orang Jepang terutama di kampung-kampung mempunyai tempat ritual pemujaan nenek moyang mereka. Mereka mempunyai keyakinan dan tradisi yang mirip masyarakat Jawa dalam misalnya ritual *slametan*; mereka menganggap bahwa setiap tempat di bumi dihuni oleh spirit KAMI yang berasal dari nenek moyang yang telah meninggal. Begitu pun orang Cina; mereka adalah masyarakat yang sangat memuliakan nenek moyang keluarganya. Sebuah praktik dan tradisi yang susah berdamai dengan ideologi Wahhabi yang generik menghakimi syirik dan kafir terhadap praktik tradisi lokal. Inilah mungkin salah satu alasan yang menyebabkan kenapa orang Jepang dan Korea terlambat dan enggan mengenal Islam. Mereka korban hegemoni media yang mengesankan Islam identik dengan budaya Arab yang miskin apresiasi terhadap karya seni seperti musik, lukisan dll yang sering menjadi ungkapan penghormatan terhadap nenek moyang dan cita rasa khas orang Jepang. Dalam konteks harmoni dengan alam dan tradisi nenek moyang, nampaknya Islam Nusantara sebagai manhaj NU lebih mempunyai *chemistry* untuk berdialog dengan budaya masyarakat Jepang.

Kelima, suasana batin masyarakat Asia Timur terutama Jepang yang telah melewati masa puncak kemajuan industrialisasi, di mana segenap kekuatan bangsa telah terus-menerus dikerahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi yang sudah jenuh

menghasiklan tingkat stres yang sangat tinggi. Budaya kecanduan kerja *(workholic)*, kebutuhan hidup di perkotaan yang mahal, perubahan struktur dan institusi dan nilai-nilai keluarga seperti perkawinan, perceraian dan hubungan laki-laki dan perempuan, anak dan orang tua, tuntutan komunalisme yang sangat kuat membuat orang Jepang hidup dalam keadaan tertekan. Tak heran tingkat bunuh diri yang sangat tinggi. Banyak orang Jepang yang sesungguhnya membutuhkan pengalaman "spiritual" alternatif untuk meringankan persoalan hidup mereka; termasuk mungkin pengalaman spiritual dan berkeyakinan. Dalam suasana krisis seperti ini, pengalaman baru berinteraksi dengan dakwah Islam berpotensi besar menyumbangkan pemaknaan yang lebih terhadap pengalaman spiritual mereka. Jika strategi dakwah "budaya" walisanga diterapkan, bukan tidak mungkin banyak orang Jepang tertarik ber-Islam.

Terkait dengan kelima faktor di atas, tulisan ini mengajukan usulan mengenai transnationalisasi Islam Nusantara di Asia Pasifik dengan strategi-strategi berikut: *Pertama*, pengiriman pekerja terampil (*skilled*) harus ditingkatkan daripada pekerja non-terampil (unskilled). Sementara ini Indonesia lebih banyak mengekspor *unskilled worker,* baik ke Timur Tengah maupun ke Asia Pasifik. Sayangnya pemerintah Indonesia lebih lemah dibandingkan pemerintah Filipina, dalam pendampingan TKI *non-skill* yang rawan dieksploitasi. Dominasi *unskilled worker* dari Indonesia menjadi stereotip tersendiri bagi imigran Indonesia sehingga kurang berkontribusi kesan positif di mata orang lokal. Hubungan majikan dan pembantu yang subordinatif mempersulit dakwah Islam dari orang Indonesia ke orang lokal di Hongkong atau Taiwan. Pengiriman tenaga terampil seperti perawat harus menjadi prioritas. Mereka lebih mempunyai hubungan kerja yang setara. Siswa-siswi program perawat atau *caretaker* di Indonesia harus dibekali kemampuan profesi dan bahasa asing yang lebih baik. Meningkatnya jumlah tenaga terampil dari Indonesia di Jepang akan membuka banyak kesempatan baru termasuk pernikahan

orang Jepang dengan Indonesia yang harus didahului dengan proses "konversi" agama. Seperti pedagang-pedagang Muslim Gujarat yang dahulu datang ke Indonesia dan menikahi perempun-perempuan lokal, kaum imigran Indonesia mempunyai kesempatan yang serupa di Jepang dan membesarkan keturunannya dalam keluarga Muslim. Harus kita ingat bahwa para pendakwah awal dari India dan Timur Tengah yang datang ke Indonesia dahulu umumnya mempunyai status sosial yang cukup tinggi, seperti ulama karismatik dan sakti, saudagar kaya, utusan resmi atau keturunan raja seberang, yang memudahkannya berinteraksi dengan kaum *upper class* bahkan bangsawan setempat, dan berefek domino bagi konstituennya.

Kedua, terkait dengan usulan di atas, pengurus dan warga NU yang sangat berkepentingan dengan globalisasi Islam nusantara perlu memperhatikan dua hal; pertama mempersiapkan SDM yang terampil yang akan berkerja, sekolah, dan berdakwah di Jepang. Termasuk juga mempersiapkan warga NU yang andal dalam mendampingi imigran kelas pekerja. Kedua berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk dapat secara serius memeperhatikan warga Indonesia di luar negeri termasuk dalam pembinaan keagamaan. PBNU harus mendorong agar kedutaan-kedutaan bisa memberikan fasilitas-fasilitas pembinaan keagamaan sesuai dengan arah pembangunan nasional. PBNU juga perlu membuat program pemberangkatan dai atau pengajar Islam yang akan menjadi narasumber di kelompok-kelompok pengajian di Asia Timur. PBNU harus bekerja sama dengan berbagai pihak misalnya kementerian dalam negeri di Jepang, Kedutaan Jepang di Indonesia dan NGO di Jepang dalam memastikan hak-hak warga Indonesia sebagai pekerja terlindungi.

Ketiga, salah satu yang bisa dilakukan PBNU dalam jangka pendek adalah berkolaborasi dengan pemerintah dalam meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga terampil ke Asia Timur. PBNU hendaknya memperbanyak sekolah-sekolah atau Prodi Keperawatan dan membekali peserta didik dengan keterampilan

profesi serta bahasa Jepang atau Korea. SMK-SMK di wilayah NU atau milik NU juga hendaknya ditingkatkan penguasaan keterampilan dan penguasaan bahasa Asia. Agar terasa kehadirannya, PBNU juga dapat membuat program pendampingan sosial keagamaan dengan pemberangkatan dai atau imam yang mempunyai *skill* bahasa Jepang dan membentuk lembaga advokasi perwakilan PBNU. Selain itu, PCINU setempat baik di Jepang, Korea, Cina, Hongkong harus dilibatkan, mahasiswa berlatar NU juga bisa direkrut menjadi tenaga relawan setempat. Fakultas Dakwah di UNU dan STAINU harus dibekali salah satu dari bahasa Jepang, Korea atau Mandarin agar dapat mengabdikan diri sebagai representasi NU di negara-negara tersebut untuk jangka waktu tertentu. Terkait dengan program pengiriman dai, PBNU harus menginisiasi kerja sama dengan lembaga pemerintah atau non-pemerintah di Jepang agar dai-dai NU bisa diterima mudah di masyarakat Jepang termasuk soal visa khusus; misalnya kegiatan keagamaan. PBNU tentu saja bisa memberdayaan PCINU setempat untuk mendukung program advokasi tersebut.

Keempat, sebagai program jangka panjang, PBNU perlu mencontoh beberapa langkah transnationalisasi Islam Nusantara ke Asia seperti halnya transnationalisasi Wahhabi ke kantong-kantong masyarakat Muslim dunia. Seperti langkah pemerintah Saudi yang membangun Universitas Madinah tahun 1960-an sebagai kawah candradimuka dai-dai Salafi (Wahhabi), PBNU perlu mendorong terciptanya institusi akademik yang melahirkan ulama-ulama yang peka terhadap isu-isu keislaman, keindonesiaan/kenusantaraan dan kemanusiaan. Satu atau dua universitas Islam negeri yang ada perlu ditingkatan kualitasnya dan fasilitasnya agar juga menjadi rujukan sarjana dan pendakwah dari negeri lain termasuk Asia Timur. Juga bekerja sama dengan perguruan Islam lainnya di dunia, misalnya Al Azhar, Universitas-universitas Islam di India, Turki, dan beberapa negara Asia Tengah lainnya yang ramah dengan studi dan praktik sufisme sebagaimana tradisi NU.

Kelima, PBNU juga perlu mendorong pemerintah membangun "Nusantara Corner" di berbagai negara di Asia untuk memberikan informasi terkait budaya Indonesia terutama Islam Nusantara. *Nusantara Corner* berfungsi sebagai tempat informasi dan pembelajaran tentang budaya Indonesia terutama agamanya. Seperti Saudi yang membagun LIPIA yang menyediakan beasiswa bagi masyarakat lokal, Pemerintah RI juga bisa menyediakan beasiswa lebih banyak lagi kepada sarjana Islam dari beberapa negara di Asia untuk studi di Indonesia. PBNU bisa mengembangkan kerja sama dengan Muslim dari negara lain juga pemerintahannya dalam isu-isu migrasi. Memperkenalkan Islam Nusantara ke khalayak tentang Islam Nusantara dengan pembangunan masjid Indonesia yang representatif dan unik sebagai pusat aktivisme internasional dan advokasi imigran Indonesia serta media informasi bagi warga non-Muslim dan warga setempat.

Penutup

Sebagai rumah bagi populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia menjadi tumpuan masyarakat dunia pada umumnya. Mereka berharap Indonesia menjadi pemimpin dunia Islam untuk menunjukkan Islam yang moderat dan memberi rahmat bagi seluruh alam. Panen surplus populasi produktif yang akan dicapai Indonesia sebelum 2030 berpotensi melejitkan bangsa dengan identitas keislamannya di tengah lesunya pertumbuhan populasi bangsa-bangsa (maju) non-Muslim. NU dengan pengikut terbesar di Indonesia mempunyai tanggung jawab yang berat untuk mengantarkan anak-anak muda RI melejitkan Indonesia dalam bingkai Pancasila. Seorang Indonesianis dari Jepang, Prof. Mitsui Nakamura, di depan anak anak muda NU suatu ketika berkata, "Di zaman *post–truth* ini, perdamaian dunia terletak di pundak NU." Semoga saja kita kaum muda NU bisa mengembannya.

Referensi

Connor, Phillip. "Contexts of immigrant receptivity and immigrant religious outcomes: the case of Muslims in Western Europe." *Ethnic and Racial Studies* 33.3 (2010): 376-403.

Cesari, Jocelyne. *When Islam and democracy meet: Muslims in Europe and in the United States*. Springer, 2004.

Kastoryano, Riva. "Religion and incorporation: Islam in France and Germany." *International Migration Review* 38.3 (2004): 1234-1255.

Tibi, Bassam. *The challenge of fundamentalism: Political Islam and the new world disorder*. Vol. 9. Univ of California Press, 2002

Roy, Olivier. *Globalized Islam: The search for a new ummah*. Columbia University Press, 2006.

Kawano, Satsuki. *Ritual practice in modern Japan: Ordering place, people, and action*. University of Hawai'i Press, 2013.

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/04/06/why-Muslims-are-the-worlds-fastest-growing-religious-group

http://www.independent.co.uk/news/uk/atheists-countries-list-six-world-most-convinced-a6946291.html

Melebur Hijau ke dalam Biru: NU, Eropa, dan Siasat Idgham Abad ke-21

Zacky Khairul-Umam

Sian atau *cyan* terwujud dari campuran antara warna biru dan hijau. Dinukil dari Bahasa Yunani, *kuanos*, sian biasa diterjemahkan ke dalam bahasa Arab sebagai *azraq samāwī* yang berarti biru langit. Jika biru merupakan simbol dari Eropa, maka hijau dalam hal ini mengacu pada Nahdlatul Ulama (NU). Mungkinkah hijau NU dilebur ke dalam biru Eropa sehingga menghasilkan biru langit/Islam yang mencerahkan umat manusia?

Barangkali pertanyaan tersebut merupakan bagian dari klise terkait dengan upaya retoris terus-menerus untuk mengglobalkan Islam nusantara belakangan ini. Tapi, sebelum menemukan jawaban yang realistis kita bisa menguraikan strategi dengan melihat berbagai ruang lingkup dan sudut pandang. Ia tidak cukup dijadikan sebagai cita-cita ideal tanpa melihat beragam kenyataan yang ada. Untuk melihatnya, kita perlu memperhatikan hubungan jangka panjang antara Islam dan Eropa terlebih dahulu.

Islam, Eropa, dan Islam Indonesia

Eropa dan Islam punya tautan yang lama, bahkan lebih lama ketimbang perkembangan Islam di Indonesia. Bagi Eropa, Islam sudah tidak asing lagi. Ia sudah dikenal sejak zaman pertengahan awal melalui ragam hubungan yang rumit yang tidak bisa diikhtisarkan melalui titik singgung permusuhan saja. Ilmu

pengetahuan, teknologi dan seni yang berkembang di wilayah Islam dulu tidak selalu dianggap *liyan* dalam tubuh Eropa. Sisi perkembangan kebudayaan Islam justru menyatu perlahan-lahan dalam sejarah perkembangan Eropa Latin zaman klasik melalui berbagai titik temu. Islam seolah-olah dianggap bukan agama baru, melainkan dipahami sebagai bid'ah lama bagi Eropa. Sebab dalam ajaran dan aspek materialitas budaya yang dikembangkan orang Muslim dulu dicerap orang Eropa-Kristen melalui kacamata kemiripan, bukan justru karena konsep berlainan. Itu kenapa sejarawan dan filsuf Prancis Michel Foucault misalnya menganggap bahwa produksi pengetahuan Eropa/Latin abad pertengahan dibangun dari titik temu keserupaan [dari dunia Islam].

Meskipun dalam hal politik banyak sekali titik tengkar antara Islam dan Eropa seperti kita dengar dari kisah Perang Salib, namun banyak sekali silang kebudayaan di antara keduanya. Tanpa Islam, singkat kata, Eropa tidak akan pernah mengenal Masa Pencerahan. Islam adalah penyelamat pengetahuan kuno, terutama Yunani, tetapi ia sekaligus memiliki semangat kreativitas yang luar biasa sehingga menghasilkan kebudayaan klasik yang inovatif dan orisinal. Hingga kemudian, pada masa modern awal, setidaknya pada abad ke-16 akhir, kaum intelektual Eropa memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan kajian Arab dalam proyek humanisme mereka. Dan ini berlangsung hingga masa Ernest Renan di abad ke-19 yang berpengaruh hingga hari ini. Jaringan intelektual dan sarjana Eropa jarak jauh pada abad ke-17 dan ke-18, yang dinamakan dengan *respublica literaria*, juga erat berkelindan dengan keharusan untuk meneroka pengetahuan tradisi Arab-Islam sebagai ruang bumi yang tak diketahui alias *terra incognita*. Islam ialah bagian dari teroka pengetahuan Eropa yang mereka sebut sebagai "dunia baru" demi membentuk "manusia modern".

Sementara itu pada masa yang sama, *respublica literaria* di dunia Islam memiliki roh yang lain dan tidak serupa. Jaringan intelektual jarak jauh ini bahkan sudah erat-berkelindan dari Maroko hingga Indonesia, berkisar 13 ribu kilometer—sebuah rentang geografis

yang sangat luas ketimbang Eropa zaman Pencerahan paling banter berkisar 2000 kilometer. Para pemikir dan tokoh besar seperti Syamsuddin Samatra'i, 'Abd al-Ra'uf Singkeli, Yusuf Makassari, hingga 'Abd al-Samad Palimbani dan Ahmad Mutamakkin terkait dengan wacana keilmuan yang lebih luas hingga ke seluruh Samudera Hindia dan wilayah Islam di Laut Mediterania. Yang menggerakkan energi mereka dalam tataran global setidaknya ada dua. *Pertama*, tarekat persaudaraan Sufisme yang memiliki jaringan internasional. *Kedua*, otoritas keagamaan terutama melalui studi hadis. Tanpa dua ikatan ini, aspirasi dan solidaritas keislaman global saat itu tidak mungkin ikut terwujud dengan sendirinya. Bahkan, energi anti-kolonialisme pun digerakkan oleh simpul sufistik seperti kita baca dalam sejarah.

Kemudian, abad ke-19 adalah abad Eropa yang menentukan. Kita bisa menghitungnya mulai dari 1800, sesuai persetujuan para sejarawan global belakangan ini, sebagai era yang sangat penting bagi Eropa. Ia mulai memetik buah hasil dari penanaman dan pencangkokan kebudayaan abad-abad sebelumnya. Revolusi Industri di Inggris, Revolusi Prancis dan tentu saja Revolusi Amerika memberikan dampak yang besar bagi nasib benua ini di masa berikutnya. Secara politik dan militer, juga ilmu pengetahuan, masyarakat Eropa unggul dan apa-apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa dikaitkan dengan apa yang berkembang di Eropa. Kolonialisme mencengkeram di berbagai dunia Islam, tak terkecuali di Nusantara. Hanya Aceh yang sangat kukuh mempertahankan marwahnya sebagai kedaulatan Islam terakhir di bumi Jawi. Kesulatanan lain tak memiliki sejarah heroik sehebat Aceh. Atas penghisapan di bumi Jawa, Douwes Dekker mengkritik kolonialisme melalui *Max Havelaar*, yang didengar di seluruh Eropa. Tapi kehadiran Belanda tak selamanya membuat sejarah penentangan, terutama oleh figur-figur Islam tradisional seperti Syekh Nawawi Banten, kendati ia tak pernah diasingkan seperti Syekh Yusuf Makassari. Dari masa Raden Saleh, Ronggowarsito hingga masa Kartini, Sosrokartono, dan Husein Djajadiningrat

selalu ada golongan yang tak saja berpijak pada tradisi lokal, misalnya ke-Jawa-an atau ke-Minang-an, tetapi juga belajar etos kemajuan Barat melalui pendidikan dan fasilitas Belanda, bahkan hingga menjejak ke Eropa. Mereka ialah para bangsawan Nusantara dengan berbagai privilese karena dekat dengan akses ke-Eropa-an. Setidaknya sejak awal abad ke-19 kita sudah bisa melihat dua kecenderungan nyata antara dua golongan. Pertama, Islam tradisionalis yang anti-Belanda dan karena itu, sulit untuk menerima pendidikan Barat bahkan prinsip ini masih ada hingga seratus tahunan kemudian. Kedua, Islam berkemajuan yang mau mengadopsi perkembangan Barat. Tetapi, tentu saja di antara kedua golongan ini ada irisan yang saling terkait dan tidak bisa dipertentangkan.

Masa pascakolonial di paruh kedua abad ke-20 menjadi pembeda antara Indonesia dan Belanda serta negeri pascakolonial lainnya dengan Paris dan London sebagai *metropole* pada masa kolonialisme. Jika kita lihat misalnya Paris dan London, orang Muslim dan orang Asia-Afrika umumnya banyak sekali menduduki dua kota ini. Bekas jajahan Prancis dan Inggris memiliki hubungan emosional-historis yang erat. Yahudi Aljazair yang terdidik Prancis kemudian menjadi filsuf terkemuka Prancis di abad ke-20, yakni Jacques Derrida. Demikian halnya bisa kita sebut banyak nama lain di Paris atau London. Tapi, adakah nama Indonesia yang menjadi tokoh terkemuka dalam berbagai bidang di Belanda kontemporer? Lebih spesifiknya, adakah nama Muslim dari Indonesia yang berkiprah besar pada pembangunan Belanda mutakhir? Barangkali akibat kecenderungan kebijakan kolonial Belanda dan sedikitnya orang jajahan yang berkarier di Belanda sejak dulu menjadi kecenderungan umum bahwa orang Indonesia sangat terlambat dalam berdiaspora, berbeda dengan masyarakat/bangsa lainnya yang sudah menganggap globalisasi dengan enteng saja, terlepas dari berbagai sebabnya, apakah migrasi akibat perang, krisis atau sukarela demi memperbaiki taraf kesejahteraan. Memang ada sejumlah masyarakat Indonesia di Belanda, namun dibandingkan

dengan imigran dari Maroko, Lebanon, Turki, dan lainnya, jumlah tersebut sangat kecil. Hal ini yang menyebabkan seorang pengkaji Muslim di Eropa dari Amsterdam, Thijl Sunnier, berkesimpulan bahwa kontribusi orang Indonesia di Belanda masih belum kentara. Secara kuantitatif belum memadai, dan secara kualitatif belum banyak tokoh yang dapat memengaruhi ruang publik di Belanda khususnya dan Eropa pada umumnya.

Jika di negeri bekas penjajah saja masih sedikit, apalagi jumlah imigran asal Indonesia di negara lainnya seperti Inggris, Jerman, Prancis, dan seterusnya. Secara umum, diaspora Indonesia di Eropa masih secuil dibandingkan dengan diaspora bangsa lainnya. Irisan diaspora pun lebih banyak disebabkan karena faktor politik: separatisme dan peristiwa 1965. Secuil yang bermigrasi karena kesukarelaan. Dan dari irisan ini, berapa banyak yang berkultur Nahdliyyin atau memiliki simpati pada gerakan ala NU? Dengan memahami situasi ini, kita bisa memetakan kemampuan kader NU di luar negeri untuk bergerak. Tantangan internal dari diaspora kita sendiri ialah kesediaan untuk menjalin berbagai sinergi dengan berbagai pihak karena tidak semua negara di Eropa memiliki banyak kader dan simpatisan NU. Dalam taraf tertentu, gesekan yang ada karena persoalan politik dan perbedaan pendapat menjadi penghalang yang tidak mudah dikikis saat ini.

Muslim Indonesia secara umum belum menjadi suara di Eropa. Itu bisa dilihat dari kebijakan negara-negara Eropa Barat sendiri yang melihat bahwa realitas Islam hari ini ialah Muslim yang ada di Eropa didominasi oleh kelompok imigran. Muslim Indonesia tidak termasuk dalam bagian ini. Tentu saja tidak semua Muslim di Eropa itu imigran. Sejak ratusan tahun silam, ketika Imperium Usmani melakukan ekspansi politik pada abad ke-15 dan ke-16 ke Eropa Timur hingga perbatasan dengan Vienna dan Budapest, desa-desa berpenduduk Muslim mulai dibangun, apakah mereka terdiri dari penduduk yang berpindah agama ataupun mereka yang berpindah dari Anatolia. Inilah Muslim-muslim lokal Eropa yang sesungguhnya, yang bisa direntang sejak masa Gazi Husrev-Bey,

gubernur Usmani di Bosnia, hingga Alija Ijetbegovic, politikus dan pemikir Bosnia modern. Di Eropa sendiri, ada ketimpangan wacana. Apa yang sering disebut Eropa biasanya identik dengan Eropa Barat, seperti halnya posisi Jawa di Indonesia. Padahal Eropa Tengah dan Timur juga penting dan menjadi wilayah yang tidak boleh dilupakan dalam konstelasi, mobilitas serta perubahan sosial-politik, termasuk Islam Eropa itu sendiri. Maka, jika suara Muslim lokal dari Eropa sendiri belum didengar setidaknya dalam wacana akademik dan perdebatan di parlemen, maka apalagi dengan Muslim Indonesia di Eropa; terlebih irisan sebagiannya ialah mahasiswa yang hanya datang dan pergi sementara waktu.

Nahdlatul Ulama (NU) di Eropa

Setelah menyelesaikan pendirikan di Baghdad, Gus Dur bertolak ke Eropa pada 1970. Jerman adalah tujuannya. Awal mulanya Gus Dur ingin mendalami kajian klasik dengan persyaratan bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin dengan pengantar bahasa Jerman. Hanya bahasa Arab saja yang sudah ia kuasai sungguh-sungguh. Ia tak bisa memenuhi persyaratan itu. Mungkin jika ia mengambil program studi Arab dan Islam, ceritanya lain. Tapi karena hal itu, akhirnya ia bertolak ke Belanda hingga 1971. Selama tinggal di Eropa Gus Dur ikut memelopori berdirinya Persatuan Pemuda Muslim se-Eropa (PPME) di Den Haag bersama kawan-kawannya, termasuk Kiai Hanbali yang pernah menimba ilmu bersamanya di Kairo. Bagian terbesar dari perkumpulan ini diisi oleh kader Nahdliyyin. Sejarah perkembangan dan jaringan PPME sendiri sudah ditulis oleh Dr. Sujadi untuk mempertahankan gelar doktoralnya di Leiden.

Hingga 2005, Muslim Indonesia dan Asia Tenggara umumnya masih bisa bersatu dalam wadah PPME, setidaknya dalam level paguyuban. Namun seiring dengan menjamurnya pengaruh gerakan Salafi-Wahabi, seperti bisa kita perhatikan dalam perkumpulan tersebut di Amsterdam, friksi bermunculan. Sekelompok jamaah yang tidak memegang teguh tradisi ala NU memutuskan untuk

keluar. Ini mengingatkan kita pada cerita kaum *khawarij* yang keluar dari konsensus politik dalam masa Islam awal. Tapi tidak sekonyong-konyong Pengurus Cabang Istimewa (PCI) NU terbentuk. Secara institusional, NU di Eropa belum terbentuk secara masif hingga 2010. Jadi, sejak 1971 atau masa sebelumnya hingga 2010, setidaknya secara kultural warga Nahdliyyin sudah ikut mengisi berbagai kegiatan di beberapa titik di Eropa dalam ruang lingkup yang terbatas, jika bukan tidak ada sama sekali.

Meski NU di Eropa secara kelembagaan sudah bergeliat sebelum 2010, namun eksistensinya mulai tampak dan berdiri kokoh setelah tahun itu. Jerman, Prancis, Inggris, Belanda, Belgia, hingga Rusia dan Spanyol sudah membentuk PCI NU atau perkumpulan warga Nahdliyyin secara resmi. Kendati, tidak semua perkumpulan ini mengantongi surat keputusan resmi dari Pengurus Besar NU di Kramat Raya. Terpenting, niat dan tekad sudah ditancapkan untuk melestarikan tradisi Islam Nusantara dengan semangat kemajuan terkini. Mungkin hanya PCI NU Belanda yang belakangan menjadi spesial di mata Kramat Raya. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena ceruk Nahdliyyin terbesar ada di negeri kincir angin ini. Boleh dikata, setidaknya melalui kesepakatan tak tertulis, PCI NU Belanda berperan sebagai ketua dari NU se-Eropa.

Pada perhelatan akbar 2015, disusul 2017, dan mungkin akan diulang saban dwi-tahunan, yang diselenggarakan di Den Haag dan Amsterdam menjadi tolok ukur kesuksesan kawan-kawan Belanda dalam mengumpulkan kader Nahdlyin se-Eropa. Bahkan mahasiswa dari kawasan Mediterania hadir, sebagian besarnya diwakili oleh kawan-kawan Maroko. Penulis pada perhelatan 2015 itu mengusulkan untuk membentuk Aliansi Eropa-Mediterania, karena selama ratusan tahuan sebetulnya Eropa tak bisa dilepaskan perannya dari geopolitik di kawasan Mediterania. Mudahnya akses informasi di zaman Facebook dan Twitter dewasa ini semakin memudahkan jalur komunikasi dan silaturahmi. Tak saja sekawasan Eropa, tetapi juga seluruh dunia. Tapi pertemuan fisik antara kawan-kawan di Eropa dan Mediterania tentu saja menjadi

sorotan utama: mereka semakin erat berhubungan melalui media sosial.

Memiliki banyak ahli fikih dan teologi, PCI NU Maroko menjadi langganan sebagai pembicara dan pembahas persoalan fikih dan keagamaan umumnya yang datang dari masyarakat Muslim Indonesia di Eropa. Mereka kerap diundang ke berbagai tempat di Belanda, kadang kala ke negara lainnya. Sedikit demi sedikit, mengandalkan *penghulu* agama dari NU kian berkembang. Pengajian-pengajian khas tradisi NU pun semakin marak. Kita bisa menghitungnya di London, Amsterdam, Paris, Berlin, dan kota-kota lainnya di seantero Eropa Barat. Ini hal yang patut disyukuri, sebab anak-anak muda NU tidak menyembunyikan identitasnya. Berkebalikan dengan ini, biasanya mereka yang berafiliasi ke gerakan Salafi dan tarbiyah memiliki nama samaran lain dan mengatasnamakan Islam secara umum, meskipun kadang kala banyak sekali segi keislaman di dalamnya dikemas dalam ruang yang eksklusif. Coba saja perhatikan bagaimana dakwah NU dari London hingga Konya di Turki dikembangkan. Kader-kader muda NU tak pernah surut menonjolkan simbolnya. Sama seperti kader PCI Muhammadiyah di Eropa, yang tampaknya kurang bergeliat seperti PCI NU belakangan ini, mereka berdakwah secara terbuka tanpa menyembunyikan identitas. Itu merupakan cerminan dari tanah air: NU dan Muhammadiyah adalah pilar terdepan dari *ummatan wasatan* yang tak pernah malu menyebut nama.

Muslim Turki di Jerman memiliki Ditib, singkatan dari *Diyanet İşleri Türk İslam Birliği*, yang hingga kini menjadi organisasi Muslim Turki terbesar di Jerman. Pusatnya di Koeln. Ia merupakan wakil resmi pemerintahan Turki di luar negaranya untuk urusan keagamaan. Khatib sekaligus imam yang membawakan pesan-pesan keagamaan resmi dikirim langsung dari Turki, sebuah sistem yang bisa kita gali dari warisan zaman Usmani. Tentu saja banyak organisasi dan jaringan Muslim Turki atau diaspora lainnya. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa NU di Eropa tidak atau belum berperan seperti Ditib. Kawan-kawan Nahdliyyin di kawasan

ini lebih banyak bekerja secara sukarela. Tidak ada pengiriman resmi dari Indonesia. Sering kali, iuran kas dan pengeluarannya ditanggung masing-masing jamaah. Meskipun struktur dan otoritas NU seperti Katolik, tapi dalam hal pelaksanaannya di Eropa ia serupa Protestan. Kemandirian diusung. Semangat berdikari ala Bung Karno menjadi tumpuan dari tegaknya jam'iyyah atau kelembagaan. Bahkan di antara mahasiswa yang masih mengandalkan dari beasiswa, mereka ikut menyumbang dan berkiprah sesuai dengan kemampuan. Etos ini perlu dijaga. Kita tidak perlu mengandalkan sesuatu yang datang dari jauh untuk dikucurkan. Justru kita perlu belajar kembali bagaimana tradisi filantropis dalam sejarah Islam berkembang dan justru menopang kebudayaan Islam itu sendiri. Pelan tapi pasti kita perlu belajar dari Muhammadiyah tentang etos kemandirian ini yang diterjemahkan dalam berbagai bidang pendidikan dan kesehatan.

Aspek filantropis itu bukan saja soal bagaimana kita harus mendirikan masjid sendiri, seperti di Amsterdam dan Brussels, dan beberapa inspirasi dari Berlin misalnya, tetapi juga seberapa jauh kita mampu menyumbang untuk kemanusiaan. Beberapa kali kita pernah menyumbang untuk krisis kemanusiaan. Ada satu contoh lain yang perlu ditiru. Yakni, Indonesia fuer Deutschland, disingkat menjadi IfD, secara simbolik merupakan politik resistensi dari AfD, Alternativ fuer Deutschland, sebuah partai sayap kanan di Jerman yang belakangan ini mendapatkan porsi yang lumayan di parlemen. Inisiatif dari Hendra Arifin, seorang Nahdliyyin profesional di Berlin, IfD sudah berhasil dicanangkan. Sekali mengadakan eksperimen sosial dengan anak-anak belia dan remaja Indonesia sebagai pesertanya. Mereka memberikan bantuan sosial untuk para warga Jerman yang tuna-wisma dan pada hakikatnya tuna-kuasa yang terpinggirkan. IfD pada intinya membantu mengembangkan ajaran keagamaan untuk membantu kaum mustadl'afin. Ke depan, gerakan atomis di Berlin ini akan terus ditingkatkan. Tentu saja dalam level lebih luas, aspek filantropis akan diarahkan pada bagaimana kader NU menjadi himpunan yang

memberikan manfaat luas bagi problem kemanusiaan di Jerman atau Eropa secara umum. Ini harus dipikirkan lebih jauh, sebab kita harus menghitung berbagai sumber daya manusia yang ada. Para profesional pakar teknologi, pebisnis, dan wiraswasta lain berlatar belakang Nahdliyyin sebetulnya bisa dikumpulkan. Jika harus, mereka secara spesifik sebaiknya didata dan dipersatukan agar banyak kita terikat secara kuat di seantero Eropa. Dalam sebuah nazam ala santri mengenai kumpulan huruf *ikhfa'* berbunyi: *if dā thanā kam jāda shakh un qad samā/dum ayyiban zid fī tuqan a' ālimā*. Untuk bersatu itu, ini prinsip yang perlu dipegang: "Bersatu berbarislah bersama orang-orang terpuji, betapa banyak karena kemurahannya orang mencapai martabat tinggi, teruskan menebar kebaikan dan tambahkan ketakwaan, lalu taklukkan orang/rezim yang zalim."

Ada analogi lain yang menarik dari Jerman. Seorang pegawai imigrasi Jerman memberi pertanyaan mengapa hanya sedikit mahasiswa Indonesia yang menetap di Jerman untuk berkarier dan hidup. Padahal, kata si pegawai itu, mahasiswa Indonesia rata-rata pintar dan hampir tidak mempunyai masalah sebagaimana "imigran" lain. Sayangnya, setelah menyelesaikan kuliah, mereka lebih memilih pulang atau pindah ke negara lain. Jerman justru membutuhkan darah muda ini. Inilah realitasnya: sedikit dari kita yang mau tinggal di Eropa. Jerman sendiri, melalui kebijakan Merkel yang kontroversial, menerima imigran dari Timur Tengah untuk menutupi defisit sumber daya manusia beberapa dekade mendatang. Jika ada sekelompok mahasiswa Nahdliyyin berminat untuk mengembangkan kariernya di Jerman atau negeri Eropa lainnya, bukankah ini akan menjadi energi tersendiri buat NU? Jadi, kita memang membutuhkan orang seperti Hendra Arifin dan Bram Fernandin, pemilik Restoran Nusantara di Berlin, untuk semakin menghidupkan gairah gerakan NU ala Eropa. Siapkah kita?

Tantangan Saat Ini

Muslim yang benci Islam, karena trauma masa lalu, akan seperti Ayaan Hirsi Ali. Apa pun di matanya, Islam ialah cela dan noda. Tinggal namanya saja yang berbau Islam. Muslim yang ingin terlepas dari dogma kekakuan, akan seperti Seyran Ateş yang mendirikan sebuah masjid liberal di Berlin. Muslim yang ingin menerapkan negara Islam, bisa bergabung ke Al-Qaeda seperti halnya "Grup Frankfurt" pada 2000 yang berafiliasi ke Osama Bin Laden atau belakangan ISIS. Muslim yang ingin tetap berwarga Eropa tapi tetap ingin memegang tradisi dan membangun peradaban yang maju bisa berperan apa adanya. Nah di antara semuanya, posisi kader NU se-Eropa berada pada garis yang terakhir, yakni selain terus menggali potensi diri, mereka ingin menyumbang sesuatu untuk tri-dimensi ukhuwah: keislaman, kebangsaan dan kemanusiaan. Inilah tiga hal yang tak pernah lepas sebagai kompas. Ketiganya saling terkait, sehingga tidak ada istilah egoisme dalam kamus imparsialisme atau *kulliyyah*.

Jelas kita tidak berpihak pada radikalisme, ekstremisme dan terorisme dengan mengatasnamakan Islam. Kita juga berusaha agar Islamofobia yang terus bereinkarnasi dalam bentuknya yang bermacam-macam tiap tahun terus melejut, setidaknya kita bisa ikut mengikisnya. Eropa kini diliputi oleh masa kritis yang jika tidak diantisipasi oleh masyarakat dan pemerintahnya sendiri justru akan semakin mengkhawatirkan ke depan. Retorika jargon fasisme sayap kanan menghiasi warna politik belakangan ini. Sejak Brexit 2016 muncul yang sebetulnya menyimpan sentimen anti-imigran, politik sayap kanan Eropa semakin bergeliat. Di Hungaria, Belanda, Prancis dan Jerman sama. AfD mendapatkan kursi yang lumayan di parlemen Jerman, sebanyak 13 persen. Sebuah angka yang patut diwaspadai, boleh jadi ia meningkat tajam nanti dan mengembalikan retorika neo-Nazi yang menakutkan. Mungkin kita harus menelisik ideolog sayap kanan semacam Götz Kubitschek di Jerman yang memberikan landasan intelektual bagi gerakan anti-Islam, Pegida alias Patriotische Europäer gegen die Islamisierung

des Abendlandes, serta partai kanan semacam AfD itu. Ditambah lagi Jerman, contoh lain, memiliki sejumlah ilmuwan ahli Islam yang justru kini sangat anti-Islam, misalnya Tilman Nagel dan Hans-Thomas Tillschneider. Orang-orang seperti ini bisa menyerang keislaman dari inti ajaran Islam itu sendiri, karena mereka memiliki kemampuan bahasa Arab dan lainnya dengan sangat mumpuni.

Untuk menghadang gerakan sosial-intelektual semacam itu, dibutuhkan kecerdasan. Maka NU se-Eropa pun harus mengedepankan kecerdasan dalam berpikir dan bertindak. Dalam sebuah acara NU Jerman di Karlsruhe pada Oktober 2017, yang sejatinya mengundang Gus Mus sebagai pembicara utama, masyarakat Jerman sangat antusias. Mereka merindukan gambaran Islam yang berwajah keindonesiaan di Eropa. Islam Indonesia dianggap mereka sebagai Islam yang toleran, terbuka dan berwajah manis. Hanya saja, kita belum menggali berbagai kemungkinan bagaimana untuk membumikan Islam khas Nusantara dalam ruang ke-Eropa-an? Mungkin, jawabannya ialah menggunakan strategi *idgham*. Secara literal ia merupakan istilah dari "memasukkan huruf yang satu ke huruf yang lainnya". Secara metaforis ia merupakan sebuah siasat bagaimana supaya gerakan NU memasuki beragam ruang kehidupan di Eropa tanpa harus menonjolkan kehijauannya. Ini adalah strategi. Ia bisa menyatu dalam situasi apa pun. Ia berbaur, tetapi masih memiliki etika dan prinsip keislaman yang dipegangnya. Pada urutannya, ia ingin mencelupkan kehijauannya dalam kebiruan Eropa, sehingga terwujudlah warna sian, sebuah warna yang melebur keduanya. Tentu saja ini hanya amsal, dan ini berdimensi jangka panjang. Kader-kader spartan NU tak butuh banyak. Dalam Perang Thermopylon zaman purba, untuk mengalahkan raja-diraja *(shahanshah)* Persia, Xerxes I, warga Sparta di Yunani hanya membutuhkan 300 pemberani tetapi cerdik berstrategi dan kuat bertahan dengan kemampuan berperang yang prima. Demikianlah kader NU se-Eropa perlu bertindak. Tentu saja yang dihadapi bukanlah peperangan. Musuh besar kita hanya satu menaklukkan ketidaktahuan alias kejahilan. Masyarakat Eropa

kebanyakan sudah melek, tapi bisa jadi jahil akan Islam. Mencari 300 kader pilihan barangkali memerlukan waktu, sebagaimana Nabi Muhammad juga membutuhkan waktu untuk membentuk para sahabat dan masyarakatnya yang majemuk dalam menciptakan "umat yang beriman". Sahabat-sahabat Nabi sendiri merupakan teladan lain seperti serdadu terbaik Spartan itu.

Tapi ingatlah, saya tidak sedang menawarkan teologi jihad peperangan. Saya berbicara tentang jihad sosial-kebudayaan. Dan dalam aspek ini, kita juga membutuhkan kader yang militan—sebuah antitesis dari kultur NU itu sendiri sebetulnya. Justru saya melihat, para penggerak NU di Eropa ialah wakil dari kader terbaiknya, dan tidak sedikit di antaranya yang bisa membalikkan antitesis itu. Sebagian di antaranya sudah menguasai persoalan *artificial intelligence*, *big data*, dan hal-hal terkait lainnya. Inilah abad ke-21 yang perlu dihadapi. Dan kenapa kita cocok untuk menerapkan siasat idgham itu? *Pertama*, kader NU tidak akan mudah untuk mengkafirkan orang lain sebagaimana lazimnya dalam teologi aswaja. Sehingga mereka tidak akan berpura-pura mencari rezeki di negeri lain pada saat yang bersamaan menolak berbagai sistem kehidupan setidaknya dalam level pemikiran. *Kedua*, khazanah fikih mereka sangat luas sehingga bisa menghasilkan cakrawala berpikir dan bertindak yang luwes sesuai dengan konteksnya. Ini modal yang sangat penting dalam mengarungi kehidupan di mancanegara. Ketiga, teologi Asy'ari pada waktunya bisa mengantarkan para kader NU untuk berpikir logis dan filosofis dalam menerima argumen ilmiah yang memungkinkannya tidak jatuh pada rejeksionisme dan/atau Buccailisme. Rejeksionisme misalnya menerima anggapan bahwa bumi itu datar dengan polosnya. Buccailisme contohnya mencocokkan antara sains dan agama secara berlebihan—meskipun istilah ini merendahkan pengalaman ber-Islam dari Maurice Buccaile sendiri.

Dengan melihat berbagai kesungguhan kader NU di Eropa, saya melihat bahwa aspek teologis dari *kasb* yang agak fatalistik justru sudah dihindari. Artinya, meskipun masih menganggap bahwa amal

perbuatan manusia itu tidak terlepas dari ketentuan Tuhan, mereka terus berupaya setinggi mungkin untuk memaksimalkan kehendak manusia atau iradah yang dengannya ia bisa terbebas dari berbagai keterbelakangan. Dan terakhir, mereka memiliki dimensi Sufistik yang tinggi. Puncaknya ialah kearifan diri sebagaimana hadis Nabi, *man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu*. 'Abd al-Ra'uf Singkeli mengutip Abu al-Hasan al-Syadzili, pendiri tarekat persaudaraan Syadziliah, memberikan pengertian ungkapan ini: siapa menyadari dirinya dengan kefakiran, akan menyadari Tuhannya dengan kekayaan-Nya; siapa menyadari dirinya dengan kedaifan, akan menyadari Tuhannya dengan kekuatan-Nya; siapa menyadari dirinya dengan kelemahannya, akan menyadari Tuhannya dengan kedigdayaan-Nya; siapa menyadari dirinya dengan kerendahannya, akan menyadari Tuhannya dengan kemuliaan-Nya. Manusia itu *faqir*, *a'īf*, *'ajz* dan *dhillah* sementara Tuhan itu melekat dengan *ghanī*, *quwwah*, *qudrah* dan *'izzah*. Tidakkah ini cukup menjadi gerakan insan yang progresif bagi NU di Eropa/global?



Foto: NU Maroko (Ayman al-Akiti)



Foto: NU Belgia (Nanang)



Foto: NU Jerman (Dimas)



Foto: NU Belanda

Bagian 3
“Gus Dur: Sang Pembuka Pintu”

Gus Dur, Pribumisasi Islam, dan Pancasila

Trisno S. Sutanto

—Sebagai kenangan untuk alm. Djohan Effendi

Siang itu, tanggal 22 Desember 2000. Tiba-tiba telepon seluler saya berdering. Sebuah pesan pendek masuk, mengundang saya ke Istana karena Ibu Sinta Nuriyah Wahid ingin mengadakan perayaan Hari Ibu bersama para aktivis gerakan perempuan dan *interfaith*. Saya memutuskan untuk memenuhi undangannya. Sudah lama saya tidak *sowan* ke Presiden Abdurrahman Wahid. Ini merupakan kesempatan yang cukup langka.

Banyak teman, terutama aktivis gerakan perempuan, hadir di sana. Kami makan dan minum, berdiskusi santai sembari bercanda. Sesekali Ibu Sinta tertawa lepas. Tubuhnya berguncang-guncang di atas kursi rodanya, tetapi Gus Dur tidak muncul.

Menjelang magrib saya pamit pulang, dan bertanya pada Ibu Sinta apa boleh menemui Gus Dur sebentar untuk pamit. "Masuk saja," kata Ibu Sinta, "Bapak lagi di ruang makan."

Jadi saya pun memberanikan diri masuk ke ruang tengah. Di meja makan yang lebar, saya melihat Gus Dur duduk sendirian. Di hadapannya ada cangkir teh panas dan beberapa kudapan. Lalu tangannya meraba-raba, mencari-cari di mana letak cangkir itu.

Pemandangan itu membuat hati saya terenyuh. Dengan cepat saya mengambil cangkir yang dicari Gus Dur, dan mendekatkan ke tangannya. Saya berlutut di samping Gus Dur sembari membisikkan nama saya.

"Oh kamu juga datang, toh," kata Gus Dur. "Acara di depan sudah selesai?"

Saya menjawab belum. Tetapi saya ingin pamit lebih dahulu, karena nanti malam saya berjanji akan makan bersama untuk merayakan ulang tahun istri saya. Kemudian saya mencium punggung tangan Gus Dur. Ia tersenyum, dan berpesan agar saya berhati-hati di jalan.

Figur Multi-paradoks

EPISODE pertemuan pendek itu selalu tertancap dalam ingatan saya. Setiap kali saya mengingatnya, kesenduan yang saya rasakan akan kembali. Sebab dalam episode pendek itu saya melihat figur Gus Dur yang penuh paradoks. Pada satu sisi, inilah figur yang kepadanya begitu banyak harapan maupun kekhawatiran jutaan orang ditumpahkan. Tetapi, pada sisi lain, ini juga figur yang sangat rentan karena keterbatasan fisiknya, sendirian di meja makan dan harus meraba-raba untuk menemukan cangkirnya tanpa pengawal atau pelayan. Padahal dialah Presiden negara ini.

Kenyataan paradoksal itu sungguh sulit dipahami. Dan mungkin tak akan pernah mampu dipahami, bahkan oleh orang-orang yang paling dekat dengan dia. Sebab Gus Dur, boleh dibilang, merupakan figur multi-paradoks *par excellence* yang sangat sulit—kalau bukan mustahil—ditemukan bandingannya. Semua ini berawal dari latar belakang kehidupan, baik keluarga maupun pengembangan dirinya yang sangat unik.

Dalam diri Gus Dur, kita menyaksikan percampuran ajaib yang menjadikannya figur multi-paradoks, seperti diperlihatkan Greg Barton lewat telaah biografis yang kaya tentang kehidupan Gus Dur.[35] Lahir dari garis keturunan NU tanpa cela, yang

---

35 Greg Barton, *Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*, Yogyakarta: LKiS dan www.gusdur.net, 2003.

mewarisi darah dari dua tokoh besar pendiri NU (Hadratus Syaikh K.H. Hasyim Asy'ari dan K.H Bisri Syamsuri), sejak awal Gus Dur diperkenalkan pada semangat kosmopolitan oleh ayahnya, K.H. Wahid Hasjim, mantan Menteri Agama yang meninggal muda karena kecelakaan. Sejak dini, Gus Dur pernah dititipkan ke seorang *mualaf* asli Jerman, Williem Iskandar Bueller yang membuatnya jatuh cinta pada musik klasik, khususnya Beethoven, maupun tinggal di rumah K.H. Junaidi, ulama modernis anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah. Semangat kosmopolitan itulah yang kemudian berkembang subur lewat penjelajahannya ke dalam tradisi pemikiran Islam klasik maupun dialog intens dengan ilmu-ilmu sosial, filsafat, serta ekspresi kultural Barat, yang dengan rakus dilahap Gus Dur semasa belajar di Kairo dan Baghdad. Konon ia fasih dalam empat bahasa asing, sekaligus dapat membaca dalam tiga bahasa asing lainnya.

Semua pengaruh itu membentuk sintesis yang penuh dengan tegangan paradoksal sehingga kerap mengecoh orang. Bagaimana mungkin anak seorang kiai yang sangat berakar dalam sub-kultur pesantren tradisional, justru suka sekali dengan *An die Freude* dari Simfoni ke-9 Beethoven, kecanduan sepak bola, serta mampu berdialog dengan teori-teori sosial modern dari Barat? Bagaimana menjelaskan figur yang berakar kuat dalam khazanah Islam klasik, mengimani dan menghidupinya sehari-hari dengan laku sufistik namun, pada saat bersamaan, justru menjadi tokoh utama yang terus-menerus tanpa lelah memperjuangkan pluralisme, kesetaraan, dan nilai-nilai demokratis?

Soal ini yang akan menjadi fokus esai kenangan saya. Yang jelas, Gus Dur mampu menghidupi—atau bahkan mengolah dan "memainkan"—tegangan-tegangan paradoksal itu sebagai modal kultural demi perjuangan visinya. Salah satu contoh terkenal adalah

tegangan antara sosok Gus Dur sang *zahid*[36] yang, bagi sebagian pengikutnya, telah mencapai *maqom* sebagai *wali Allah*, dengan sosok *maestro* politisi. Berulang kali Gus Dur memberitahu sahabat-sahabat dekatnya, seperti Marsillam Simanjuntak, Greg Barton, alm. Djohan Effendi, Alwi Shihab dan lainnya, bahwa suatu kali ia akan menjabat sebagai Presiden Indonesia. Ia sangat yakin dalam hal ini. Padahal kebanyakan dari mereka, seperti pernah suatu kali dituturkan alm. Djohan Effendi kepada saya, menganggapnya hanya sebagai lelucon. Tak seorang pun percaya pada omongan Gus Dur bahwa dia akan menjadi Presiden, mengingat rezim totaliter Orde Baru waktu itu kelihatan sangat kokoh.

Karena itu kebanyakan dari mereka, apalagi para pengamat lainnya, terkejut dan kebingungan saat akhirnya Sidang Umum MPR menentukan Gus Dur sebagai Presiden, walau Megawati Soekarnoputri yang memenangkan Pemilu 1999. Terlepas dari segala *kasak-kusuk* politik di belakangnya, termasuk langkah-langkah "Poros Tengah" di bawah komando Amien Rais untuk menjegal Megawati, kenyataan bahwa Gus Dur yang akhirnya terpilih itu memang sungguh mengejutkan. Padahal, seperti dikenang Barton, Gus Dur sendiri sejak awal Juli 1998 sudah "memberitahu saya, secara bergurau, atau kelihatannya demikian saat itu, bahwa jika tak ada orang lagi yang cocok menjadi Presiden, maka ia akan bersedia memikul tanggung jawab tersebut."[37] Tidak heran jika cerita-cerita seperti itu makin menambah legenda tentang kemampuan adikodrati Gus Dur yang, bagi banyak pengikutnya, dianggap sebagai *wali Allah* yang "*weruh sak durunge winarah*" (tahu sebelum kejadian).[38]

---

36 Telaah yang luar biasa mengenai dimensi sufistik Gus Dur dapat ditemukan dalam K.H. Husein Muhammad, *Sang Zahid: Mengarungi Sufisme Gus Dur*, Yogyakarta: LKiS, 2012.

37 Greg Barton, *Biografi Gus Dur*, *op.cit.*, h. 12.

38 Lihat *https://www.facebook.com/KumpulanKaromahSyaikhAbdulQodirJailaniRa/posts/563918756962196*

Tampaknya Gus Dur sangat menikmati legenda-legenda tentang dirinya yang berkembang dalam masyarakat itu. Sebagai seorang *maestro* politik, dia sadar bahwa cerita-cerita legendaris itu merupakan bagian penting dari modal kulturalnya yang, jika dikelola dan dipakai dengan baik, akan sangat berguna bagi perjuangan visi besarnya bagi masa depan Indonesia yang demokratis dan adil. Dan untuk kepentingan itu, ia tidak segan-segan membuat cerita legendaris tentang dirinya.

Misalnya, salah satu legenda yang sampai sekarang masih diyakini banyak kalangan: pengakuan Gus Dur bahwa dirinya adalah seorang keturunan Tionghoa! Bahkan ia dapat "membuat" silsilah yang cukup panjang sampai Putri Campa yang menjadi selir dari Raja Brawijaya V. Dari perkawinan itu, lahirlah dua anak: Tan Eng Hian (kemudian dikenal sebagai Raden Patah, pendiri Kerajaan Islam Demak) dan Tan A Lok, seorang putri, yang nantinya menikah dengan orang Tionghoa yang menjadi ulama Muslim, Tan Kim Han. Hanya saja, Gus Dur tidak konsisten. Kadang ia mengaku keturunan dari Tan Eng Hian (Raden Patah), kadang pula dari Tan Kim Han.[39]

Tentu saja, pengakuan Gus Dur saat itu menggegerkan banyak kalangan. Sependek ingatan saya, tidak pernah ada upaya ilmiah untuk membuktikan atau menggugurkan pendakuan itu. Dan mungkin pembuktian semacam itu memang tidak diperlukan. Sebab langkah yang dilakukan Gus Dur, menurut saya, lebih merupakan siasat kultural—suatu politik simbol yang dengan piawai dimainkan Gus Dur untuk memperjuangkan kepentingan tertentu sesuai visinya.

Maksud saya begini: Pendakuan Gus Dur itu tidak dapat dilepaskan dari konteks tragedi Mei 1998 yang sangat menyakitkan bagi warga keturunan Tionghoa. Peristiwa kekerasan dalam skala

---

39 Baca lika-likunya dalam *https://www.merdeka.com/peristiwa/saat-gus-dur-mengaku-keturunan-tionghoa-tulen.html.*

yang besar itu telah menciptakan ketakutan, sehingga mendorong eksodus warga keturunan Tionghoa keluar dari Indonesia. Kita tahu bahwa peristiwa itu pula yang mengantar runtuhnya rezim Orde Baru. Di tengah kecemasan itulah, Gus Dur tampil dan mengaku diri sebagai keturunan Tionghoa. Ia seperti memasang badan dan memberi ketenteraman. Itu yang ditegaskan K.H. Said Aqil Siradj pada tahun 1998. Menurut Siradj, Tan Kim Han memiliki putra Raden Rachmat (Sunan Ampel), yang kemudian menurunkan K.H. Hasyim Asy'ari, kakek Gus Dur dan pendiri NU. "Dengan demikian, tidak ada istilah pri dan non-pri, Muslim dan non-Muslim," ujarnya.[40]

Siasat kultural yang dijalankan Gus Dur rupanya cukup ampuh dan bertahan lama. Bahkan sampai sekarang. Ketika pidato pertama Gubernur DKI terpilih, Anies R. Baswedan memakai kosakata "pribumi" dan menimbulkan heboh besar di mana-mana beberapa waktu lalu, seseorang mengingat kembali cerita tentang "leluhur" Gus Dur itu dan mengunggahnya di Facebook. Di situ Gus Dur menjadi salah satu "patriot tanah air berdarah keturunan" karena merupakan "Tionghoa pertama yang menjadi Presiden RI"![41]

Terlepas dari soal benar atau tidaknya pendakuan itu, bagi masyarakat keturunan Tionghoa nama Gus Dur memang harum. Pada tanggal 10 Maret 2004 di Kelenteng Tay Kek Sie, Gus Dur—yang datang dengan kostum pakaian tradisional Tionghoa—dinobatkan sebagai "Bapak Tionghoa Indonesia". Setidaknya, di bawah pemerintahan Gus Dur itulah peraturan yang selama ini mendiskriminasi warga keturunan Tionghoa, mulai dari pelarangan adat dan budaya sampai agama Khonghucu, berhasil dicabut. Dan perayaan Imlek pun menjadi salah satu hari raya nasional.

---

40 Sebagaimana dilaporkan dalam *http://nasional.kompas.com/read/2016/02/08/07070061/Gus.Dur.Ulama.Nyentrik.yang.Mengaku.Keturunan.Cina.Tulen?page=all.*

41 Lihat *https://www.facebook.com/bakti.nusa/posts/1732052863473849.*

Warisan

Cerita-cerita semacam itu bisa diperpanjang oleh banyak kesaksian lain. Terlepas dari sikap dan gayanya yang acap kali *nyeleneh* dan membingungkan banyak orang, ada hal yang tak pernah dapat dipungkiri: warisan terbesar Gus Dur adalah pada upaya pembaruan internal dalam tubuh umat Islam, khususnya NU, serta ketegarannya di dalam membela kelompok-kelompok "minoritas" yang tertindas. Dan keduanya merupakan keniscayaan bagi kokohnya Indonesia sebagai negara demokratis yang berdasarkan Pancasila. Sebagai catatan, di sini saya memakai istilah "minoritas" *bukan* sekadar dalam artian kuantitatif, tetapi juga merujuk pada kelompok-kelompok yang rentan karena akses mereka untuk hidup yang layak dibatasi oleh berbagai alasan.

Jelas keduanya saling berkelindan erat. Pembelaan Gus Dur bagi kelompok-kelompok minoritas merupakan bagian tak terpisahkan dari upayanya melakukan pembaruan internal umat Islam. Sementara upaya pembaruan itu—atau, untuk memakai istilah yang diperkenalkan Gus Dur sendiri, suatu "pribumisasi Islam" —merupakan *conditio sine qua non* bagi berkembangnya demokrasi di Indonesia. Menurut saya, itulah visi utama yang menjadi fokus perjuangan Gus Dur seumur hidupnya. Karena itu izinkan saya mengelaborasi soal ini lebih jauh.

Sepanjang hidupnya, Gus Dur tampil sebagai salah seorang intelektual Muslim yang paling gigih membela Pancasila. Di sini, lagi-lagi, faktor latar belakang keluarga punya peranan signifikan. Seperti diingatkan Douglas E. Ramage dalam esai klasiknya mengenai pemikiran politik Gus Dur, ada "ikatan sentimental dengan Pancasila" yang membuat Gus Dur begitu tegas dan kokoh membelanya. Berulang kali Gus Dur menegaskan bahwa ayahnya, K.H. Wahid Hasyim, ikut berperan dalam merumuskan Pancasila. "Ia menjelaskan, pada tahun 1945 Soekarno meminta

nasihat pimpinan NU, termasuk ayahnya yang ia yakini membantu Soekarno merumuskan Pancasila," tulis Ramage.[42]

Selain alasan "ikatan sentimental" itu, Gus Dur juga sadar dan yakin bahwa negara Pancasila merupakan bentuk negara yang paling sesuai dengan pandangan teologis para kiai NU yang melihat tidak perlu mendirikan negara Islam, dan Pancasila sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam itu sendiri. Penegasan itu disampaikan saat Muktamar ke-27 di Situbondo (1984), di mana NU secara formal menyatakan bahwa Indonesia sebagai sebuah negara republik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 merupakan "bentuk negara yang sudah final".

Kita tahu, dalam Muktamar 1984 itu Gus Dur memainkan peran penting bersama K.H. Achmad Siddiq. Keduanya seperti dwitunggal yang bertanggung jawab merumuskan serta mendorong transformasi dan revitalisasi NU. Salah satu langkah strategisnya adalah dengan mengeluarkan NU dari politik praktis untuk "Kembali ke *Khittah* 1926". Langkah ini sebenarnya strategi yang cerdik untuk mempertahankan "otonomi" NU dari kecenderungan totaliter rezim Orde Baru saat itu yang berusaha mengooptasi partai-partai politik (lewat fusi partai-partai di mana NU dimasukkan ke dalam PPP) dan memonopoli tafsir Pancasila (lewat keharusan agar Pancasila menjadi azas tunggal partai politik). Dengan meninggalkan politik formal kepartaian, maka

---

42 Lihat Douglas E. Ramage, "Demokratisasi, Toleransi Agama dan Pancasila: Pemikiran Politik Abdurrahman Wahid", dalam Greg Fealy dan Greg Barton (penyunting), *Tradisionalisme Radikal: Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*, Yogyakarta: LKiS, 1997, h. 197. Selain ayah Gus Dur, dalam pertemuan itu juga dihadiri Kiai Masykur, tokoh NU yang menjadi Komandan Pasukan *Sabilillah* waktu itu dan Kiai Kahar Muzakkir dari Partai Islam Indonesia (PII), serta Muhammad Yamin sebagai tuan rumah. Sebenarnya bukan Soekarno meminta nasihat, melainkan lebih merupakan pertukaran ide untuk menemukan kompromi terbaik bagaimana mengelola kemajemukan masyarakat dalam negara yang dicita-citakan bersama itu. Paling tidak kesan itu yang dapat ditangkap dari kesaksian lisan Kiai Masykur, sebagaimana dikutip dalam Andrée Feillard, *NU vis-à-vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, Yogyakarta: LKiS, 1999, h. 32 – 35.

sebenarnya terbuka ruang-ruang *politis* yang lebih beraneka ragam di mana NU dapat memainkan peranan kritis terhadap rezim Orde Baru, yakni dengan membangun wacana dan gerakan demokrasi yang independen bersama elemen-elemen masyarakat sipil lainnya, seperti pers, intelektual, budayawan, gerakan buruh, maupun organisasi-organisasi keagamaan non-Islam.

Gus Dur sadar, posisinya sebagai Ketua Umum PBNU—organisasi Islam dengan massa terbesar—akan selalu dilirik dan digoda untuk aneka kepentingan, baik oleh Soeharto, partai-partai politik, militer, sampai para pengusaha. Sungguh dibutuhkan kehati-hatian ekstra di dalam mengelola basis massa yang sangat besar. Bagi Gus Dur, sesuai dengan visi besarnya untuk membangun negara demokratis yang berdasarkan Pancasila, maka NU harus selalu berada "di tengah", yakni mengembangkan prinsip *tawassuth* (moderat) sehingga mampu memainkan peran sebagai "jangkar kestabilan politik". Namun hal ini juga membutuhkan "pembaruan internal" di dalam tubuh NU maupun umat Islam secara keseluruhan, agar cita-cita Islam sebagai *rahmatan lil alamin* (rahmat bagi seluruh dunia) dapat dicapai.

Dalam konteks itulah, gagasan "pribumisasi Islam" yang dilontarkan Gus Dur sejak 1980-an memperoleh signifikansinya. Sayang sekali Gus Dur tidak pernah mengelaborasi gagasan itu secara komprehensif dalam tulisan, kecuali dalam sebuah tulisan pendek yang didasarkan pada wawancara lisan Abdul Mun'im Saleh,[43] namun gagasan dasarnya memiliki gema yang kuat dan bahkan sempat menimbulkan kontroversi yang panas di media massa. Boleh jadi, dengan gagasan itu Gus Dur menyentuh salah satu pokok perbincangan dan keprihatinan banyak kalangan teolog

---

43 Lihat tulisan pendek Gus Dur, "Pribumisasi Islam", dalam Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, suntingan Tim Desantara, Depok-Jakarta: Desantara, 2001, h. 109 – 128.

maupun agamawan yang kritis.[44]

Pada satu sisi, dengan gagasannya itu Gus Dur sedang mengkritik kecenderungan "Arabisasi" yang menguat, seperti tampak dalam maraknya penggantian istilah-istilah bahasa Indonesia ke bahasa maupun ekspresi kultural Arab. Orang mulai gemar memakai *milad* sebagai ganti "ulang tahun", *ikhwan* sebagai ganti "teman/ sahabat" dan lainnya, seiring maraknya proses "jilbabisasi" untuk menggantikan "kerudung ala Melayu". Dan dalam soal ini muncul kontroversi panas ketika, dengan gaya *nyeleneh*-nya, Gus Dur mengusulkan untuk—menurut reportase media—"mengganti" ucapan *assalamu'alaikum* dengan "selamat pagi".[45]

Terlepas dari kontroversi itu, gagasan Gus Dur sebenarnya memiliki sisi lain yang jauh lebih visioner dan mendasar: ia sedang membuka ruang dan mengupayakan "rekonsiliasi" antara agama dengan budaya setempat. Proses "Arabisasi" yang dikritik Gus Dur dapat membuat kita "tercerabut dari akar budaya kita sendiri". Lagi pula, proses itu belum tentu sesuai dengan kebutuhan. Namun Gus Dur juga menolak sinkretisme atau "pembauran agama dengan budaya". Pesan Islam sebagai agama wahyu yang bersifat universal harus tetap dipertahankan, namun pada saat yang sama wahyu itu "dipahami dengan mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual, termasuk kesadaran hukum dan rasa keadilannya."

---

44 Sebagai perbandingan, di kalangan para teolog kristiani pada tahun-tahun yang sama juga berlangsung percakapan seputar "kontekstualisasi" maupun "pribumisasi" (lebih sering dipakai terjemahan literal: *indigenisasi*) warta Injil. Misalnya, untuk menyebut beberapa contoh, lihat kajian ringkas yang menarik dari Pdt. Prof. E.G. Singgih, Ph.D, *Dari Israel ke Asia: Masalah Hubungan Antara Kontekstualisasi Teologi dengan Interpretasi Alkitabiah*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, edisi revisi, 2012 [cetakan pertama: 1982]. Dari Katolik, lihat karya J.B. Banawiratma, *Jesus Sang Guru*, Yogyakarta: Kanisius, 1977.

45 Seperti dicatat M. Syafi'i Anwar dalam tesis MA-nya yang kemudian diterbitkan, Gus Dur sempat membela gagasannya dalam kolom di majalah *Amanah*, bahwa ia tidak bermaksud "mengganti" ucapan salam tersebut, tetapi sekadar "merelevansikan"-nya. Lihat M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, Jakarta: Penerbit Paramadina, 1995, h. 243 catatan no. 37.

Begini Gus Dur merumuskan gagasan dasarnya:

> "Pribumisasi Islam bukanlah 'jawanisasi' atau sinkretisme, sebab pribumisasi Islam hanya mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lokal di dalam merumuskan hukum-hukum agama, tanpa mengubah hukum itu sendiri. Juga bukannya upaya meninggalkan norma demi budaya, tetapi agar norma-norma itu menampung kebutuhan-kebutuhan dari budaya dengan mempergunakan peluang yang disediakan oleh varisasi pemahaman *nash*, dengan tetap memberikan peranan kepada *Ushl Fiqh* dan *Qaidah Fiqh*."[46]

Atau, kalau mau dirumuskan dengan cara lain, polarisasi dan ketegangan antara agama dengan budaya akan selalu ada. Keduanya membentuk kutub-kutub penting bagi kehidupan manusia. Namun hal itu tidak berarti bahwa salah satu kutub harus ditundukkan pada yang lain, entah agama tunduk pada budaya atau sebaliknya, melainkan ketegangan tersebut harus dihidupi dan dikelola dengan bijaksana. Suatu posisi yang mencerminkan pengalaman pribadi Gus Dur sendiri yang multi-paradoks, sekaligus pengalaman konkret NU yang sejak awal selalu berdialog dengan budaya-budaya lokal.

Indonesia sebagai "Rumah Bersama"

Dengan itu menjadi jelas, kritik Gus Dur terhadap proses "Arabisasi" bukanlah sekadar kritik terhadap fenomena mode sesaat, yakni maraknya pemakaian istilah dalam bahasa Arab, tetapi dilandasi oleh visi utamanya agar nilai-nilai luhur dan universal Islam yang diyakininya mampu mewarnai sekaligus memperkokoh negara demokratis yang berdasarkan Pancasila. Dan di situ, gagasannya tentang "pribumisasi Islam" menemukan dimensi politisnya.

---

46 Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan, op.cit.*, h. 111.

Islam yang diyakini dan diperjuangkan Gus Dur adalah Islam yang ramah dan terbuka, yang memberi ruang dan mampu berdialog dengan budaya-budaya lokal, paham pemikiran, ekspresi budaya maupun keyakinan lainnya yang sangat beragam. Dengan cara itu, maka Islam akan mampu menjadi kekuatan transformatif-liberatif bagi masyarakat, dan bukannya menjadi alat politik demi sekadar meraih atau melanggengkan kekuasaan. Kedewasaan penghayatan nilai-nilai keislaman seperti itulah yang akan dapat mewarnai sekaligus memperkokoh Indonesia sebagai "rumah bersama" semua kelompok. Menurut saya, gagasan tersebut sungguh sangat visioner dan jauh mendahului zaman. Sekarang ini, visi keislaman yang dikemukakan Gus Dur itulah yang kemudian dikenal sebagai "Islam Nusantara".

Tentu saja Gus Dur tidak seorang diri bergulat dan mencetuskan pandangan tentang Islam yang terbuka, sangat menghargai pluralisme dan nilai-nilai inti demokrasi itu. Ada banyak cendekiawan Muslim yang, walau bekerja sendiri-sendiri, secara bersama-sama melahirkan paradigma yang sering disebut sebagai "neo-modernisme" atau bahkan "liberal".[47] Tetapi Gus Dur, sebagai figur multi-paradoks, punya keunikan tersendiri. Sebab di sini, lagi-lagi, kita melihat sisi lain dari paradoks Gus Dur: seorang yang sangat berakar pada Islam tradisional, namun mampu merangkul dan mengembangkan pandangan keagamaan yang pluralistik dan menghargai nilai-nilai inti demokrasi.

Bertolak dari gagasan itu, kita dapat memahami mengapa Gus Dur dengan tegas menolak sekelompok intelektual Muslim terkemuka yang gencar mengupayakan pembentukan "masyarakat Islam", maupun menolak undangan untuk bergabung ke dalam ICMI

---

47 Istilah itu datang dari disertasi Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia: Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholis Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib, dan Abdurrahman Wahid*, Jakarta: Paramadina dan Pustaka Antara, 1999. Baca juga tesis Master M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia*, *op.cit.*, yang melukiskan pergulatan serupa.

yang direstui Soeharto pada Desember 1990. Bagi Gus Dur, seperti dikemukakan pada Douglas Ramage yang mewawancarainya,

> "Saya berbeda pendapat dengan Amien Rais (ilmuwan politik, pemimpin Muhammadiyah yang aktif di ICMI) yang ingin membuat sebuah masyarakat Islam. Bagi saya, 'masyarakat Islam' di Indonesia bertentangan dengan konstitusi, karena akan menempatkan non-Muslim sebagai warga negara kelas dua. Tetapi, sebuah masyarakat Indonesia di mana kaum Muslim kuat—kuat artinya berfungsi secara baik—saya pikir itulah yang terbaik."[48]

Di situ lagi-lagi Gus Dur menegaskan visi kenegaraannya. Dan untuk melawan upaya Soeharto memanfaatkan Islam (lewat ICMI) sebagai basis baru legitimasinya setelah menurunnya dukungan militer, pada tahun 1991 Gus Dur dan sahabat-sahabatnya membuat Fordem (Forum Demokrasi) di Jakarta, sekaligus menginisiasi DIAN/Interfidei di Yogyakarta. Jika Fordem bergerak pada tataran politik, sebagai forum untuk mengembangkan pandangan-pandangan alternatif tentang demokrasi, pembangunan, maupun komitmen pada kesatuan nasional, maka DIAN/Interfidei merupakan laboratorium sosial guna menyemai kecambah pluralisme di tengah masyarakat. Inisiatif DIAN/Interfidei itu, yang dibentuk Gus Dur bersama sahabat-sahabat dari multi-agama, seperti alm. Pdt. Eka Darmaputra, alm. Ibu Gdong Oka, alm. Djohan Effendi, alm. Th. Sumartana, dan lainnya, sebenarnya merupakan terobosan guna mengembangkan perjumpaan-perjumpaan dialogis antar-iman dari bawah sebagai *counter discourse* terhadap "politik perukunan" rezim Orde Baru.[49] Lewat perjumpaan-perjumpaan dialogis itulah

---

48 Sebagaimana dikutip dalam Douglas E. Ramage, "Demokratisasi, Toleransi Agama dan Pancasila", *op.cit.*, h. 206.

49 Saya mengelaborasi soal ini dalam tulisan lain. Lihat Trisno S. Sutanto, "Negara, Kekuasaan, dan 'Agama': Membedah Politik Perukunan Rezim Orba", dalam Zainal Abidin Bagir, dkk., *Pluralisme Kewargaan: Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia*, Bandung dan Yogyakarta: Mizan dan CRCS-UGM, 2011., h. 115 – 148.

kecambah *civil society*, yakni kelompok-kelompok lintas-iman dan lintas-etnis, berkembang subur dan memegang peranan penting di dalam proses transisi setelah runtuhnya Orde Baru.

Terlalu banyak kalau kita mau merinci sumbangan Gus Dur bagi gerakan antar-iman di Indonesia. Ia bukan saja melontarkan gagasan-gagasan yang visioner, walau sering dibungkus dengan istilah yang *nyeleneh*, tetapi juga berusaha membangun jembatan di antara kelompok-kelompok keagamaan dan tanpa letih membela kelompok "minoritas" yang tersisihkan. Misalnya, di lingkungan gereja-gereja Protestan, Gus Dur merupakan cendekiawan Muslim yang selalu hadir dan memberi sumbangan pikiran dalam forum SAA (Seminar Agama-agama) serta forum diskusi di LPS/Balitbang (Lembaga Penelitian Sosial/Badan Penelitian dan Pengembangan) PGI yang dikelola oleh sahabat-sahabatnya, seperti alm. Pdt. Fridolin Ukur, alm. Th. Sumartana, maupun Prof. Dr. Olaf Schumann. Sementara pembelaannya bagi "minoritas" yang tersisihkan sudah menjadi legenda tersendiri yang akan selalu dikenang oleh bangsa ini. Tanpa letih ia membela mereka yang tersisihkan, mulai dari Inul Daratista, Ulil Abshar-Abdalla, Pesantren Al-Mukmin Ngruki, sampai rakyat Irak, Palestina, Aceh, maupun Ambon. [50] Semua itu digerakkan oleh visi Islamnya yang universal dan humanis, yang mampu merangkul dan mengayomi semua kalangan.

Sungguh, Gus Dur merupakan salah satu sintesis terbaik dari situasi multi-paradoks yang menyertai perjalanan bangsa ini. Dan saya bangga pernah mengenal dan berguru padanya.

Jakarta, akhir November 2017

---

50 Lihat esai-esai Gus Dur yang dikumpulkan dalam Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama, Masyarakat, Negara Demokrasi*, Jakarta: The Wahid Institute, 2006. Esai-esai itu merupakan kumpulan kesaksian pembelaan Gus Dur bagi mereka yang tersisihkan.

Jalan Panjang Isu-isu Perempuan di Lingkungan NU

Neng Dara Affiah

Isu perempuan di lingkungan NU mulai bergulir awal 1990-an. Saat itu saya menjadi Redaksi Pelaksana Tabloid Warta NU. Pimred dipegang oleh Arifin Junaidi dan Gus Dur menjadi Penanggung Jawab. Gus Dur memberi ruang kepada kami untuk menuliskan isu-isu perempuan. Sosok Gus Dur ini memang menginspirasi sekali. Dia fasih bicara tentang film, marksisme, kebudayaan Eropa, sesuatu yang di luar keseharian dunia pesantren. Gus Dur itu kuat sekali mengartikulasikan gagasan-gagasan kemajuan dari para pemikir Barat. Melalui Warta NU itulah saya pertama kali menulis tentang *Teologi Perempuan dalam Islam*. Tulisan ini masih saya simpan sampai sekarang karena merupakan titik tolak saya memulai mereinterpretasi teks Alquran, Hadis, dan kitab-kitab kuning soal perempuan. Saya mengolah pandangan Kiai Masdar F Mas'udi, Prof. Quraisy Shihab, dan lain-lain.

Sebelum 90-an, organisasi-organisasi Islam seperti NU "dipaksa" bergabung dengan pemerintah Orde Baru yang menggunakan pendekatan ibuisme negara yang menghasilkan Dharma Wanita dan akibatnya mensubordinasi perempuan itu. Sementara pendekatan *gender and development* itu bersifat kritis. Misalnya menyoal soal ideologi patriarki. Lalu mempersoalkan juga tafsir agama yang misoginis. Dahulu tidak ada yang menyoal tafsir agama karena dipikirnya baik-baik saja gitu*loh* dan tidak punya muatan misoginis. Dan yang ketiga adalah isu seksualitas.

Setelah isu gender ini masuk ke lingkungan NU, pesantren, maka dimulaikan pengkajian ulang terhadap teks-teks kitab yang populer menyangkut hubungan laki-laki dan perempuan, misalnya kitab *Uqudul Lujain*. Saat ini gender sudah semakin diterima, tidak hanya soal domestik tetapi jauh lebih luas seperti menyoal kepemimpinan perempuan.

Saya menyelesaikan sekolah menengah dari Pesantren Cipasung, Tasikmalaya. Meskipun saya di pesantren, saya punya kegelisahan yang luar biasa. Sejak dari rumah saya, sudah punya bacaan yang cukup luas. Jadi ketika harus kembali mengaji kitab-kitab kuning, itu rasanya membosankan. Beruntung saat itu di Cipasung sudah ada IAIC, ada buku-buku bacaan yang dapat memenuhi dahaga keilmuan saya. Sekalipun duduk di bangku SMA, interaksi saya justru dengan mahasiswa IAIC sehingga saya bisa ikut Mapaba PMII sebelum saya jadi mahasiswi.

Ketika saya melanjutkan studi ke IAIN di Ciputat, dengan kegelisahan intelektual yang meluap-luap, lalu bisa bersua dengan figur Gus Dur, saya serasa memasuki fase *auflkalrung*. Apalagi ketika saya bisa membantu beliau di Warta NU yang akhirnya memicu saya untuk serius memikirkan soal gender. Interaksi yang intensif dengan Gus Dur itu memotivasi saya menggeluti isu-isu perempuan. Jadi paradigma kesetaraan gender di NU itu, bermula dari ada pertukaran yang didorong oleh Gus Dur. Gus Dur membuka ruang bagi anak-anak muda untuk saling berinteraksi dan beradu argumen. Isu gender ini tidak hanya dibahas oleh kelompok perempuan tetapi juga didiskusikan bersama laki-laki. Melalui Gus Dur, saya bisa berdiskusi dengan intelektual muda NU seperti Imam Azis, Ulil Abshar Abdalla, Jadul Maula, Hairus Salim, Saifullah Yusuf.

Sekuler dan Religius

Sebelum akhirnya aktif di Pengurus Pusat Fatayat NU, saya bergabung di organisasi Kalyana Mitra yang lebih bersifat sekuler

karena sama sekali tidak pernah menggunakan pendekatan keagamaan. Ini organisasi gerakan gender pertama di era Orde Baru, yang melakukan *counter* terhadap hegemoni perempuan. Sejak semester lima, saya mulai ikut diskusi-diskusi di Kalyana Mitra. Saya bersua Myra Diarsih, Sita Kayam, Debra Yatim. Mereka teman-teman dari kelompok sosialis. Bersama Lisa Hadiz saya mengelola *news letter* Kalyana Mitra.

Tahun 1990 berdiri organisasi Solidaritas Perempuan. Para pendirinya itu Ati Nurbaiti, Cita Gracia Andang Sejati, Nursyahbani Katjasungkana dan Tati Krisnawati. Saya bergabung menjadi anggota organisasi baru ini. Jadi dalam mengusung isu kesetaraan gender ini saya punya dua kaki, satu kaki di organisasi sekuler dan kaki lain di organisasi yang religius bahkan sufistik. Kalau organisasi sekuler cenderung kaku dan keras dalam menyarakan satu isu. Kalau ada penolakan, bawaanya itu emosi dan marah. Di organisasi religius saya lebih menemukan harmoni, tidak selalu frontal karena selalu ada negosisasi *yang win-win solution*. Ada satu prinsip yang dipegang oleh para santri: *ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh*. Apa-apa yang tidak bisa diraih semuanya maka janganlah ditinggal semuanya. Dengan demikian saya bisa menjadi jembatan bagi pertemuan dua pendekatan yang berbeda ini.

Sebagai santri saya memang tidak bisa meletakkan kesantrian saya, sekalipun saya bergabung dalam organisasi yang benar-benar sekuler. Saya selalu mencoba menyambungkan semua wacana dengan ajaran Islam, mencari bagaimana caranya mengaitkan Islam dengan isu-isu feminisme ini. Dalam proses pencarian itulah, saya menemukan artikulasinya melalui tulisan-tulisan Fazul Rahman. Dalam konteks Indonesia, saya menemukan persambungan Fazlur Rahman ini dengan artikulasi pemikiran Masdar F. Masúdi. Kalau Gus Dur ibaratnya membuka pintu diskursus kesetaraan gender, maka Masdar ini yang mengisi rumahnya melalui P3M.

Implementasi pendekatan agama dan budaya juga saya dapatkan dari Gus Dur. Misalnya saat mulai aktif di Fatayat, kami mendapatkan dukungan dana dari lembaga internasional seperti *Ford Foundation*. Mulailah muncul kecurigaan dari internal NU bahwa kami menjadi agen orang asing yang kafir. Gus Dur segera mengingatkan kami dengan bertanya,

"Kalian menggunakan tema apa di dalam pelatihan-pelatihan ini?"

"Pelatihan Gender, Gus."

"Kalian nggak usah pakai kata-kata itulah. Pakailah misalnya *Halaqoh Kepemimpinan Perempuan* atau *Halaqoh Kepemimpinan Wanita*. Orang kita itu nggak penting isinya, yang penting itu kemasannya."

Dan benar saja, setelah berganti kemasan seperti saran Gus Dur, pelatihan-pelatihan selanjutnya bisa diterima di lingkungan NU. Pendekatan keagamaan dan kultural semacam ini yang tidak saya dapatkan di Kalyana Mitra. Gus Dur memang pembuka jalan bagi kami dalam menggulirkan isu-isu perempuan di lingkungan NU.

Negosiasi dengan Kultur

Ketika mulai aktif di P3M, saya ikut mengelola program Fikhunnisa (Fikih Perempuan) bersama Lies Marcoes dan Kiai Masdar. Kami menyelenggarakan *halaqoh* (seminar) di berbagai pesantren, misalnya angkatan pertamanya di Pesantren Cipasung. Dari *halaqoh* Cipasung ini muncul sosok Ida Nurhalida dan Djudju Zubaedah, sebagai bagian dari pengelola pesantren yang mulai intensif menggulirkan isu kesetaraan gender. Lalu dari Pesantren Maslakul Huda, Kajen, Pati, muncul sosok Nyai Nafisah Sahal.

P3M menjalin kerja sama dengan organisasi massa perempuan seperti Fatayat, BMWOI (BadanMusyawarah Ormas Wanita Islam), dan Pesantren. Tapi kerja sama yang dirasakan paling berhasil itu

dengan Fatayat dan Pesantren, karena keduanya berakar kuat di masyarakat.

Perspektif gender di NU itu diadopsi sedemikian rupa, berdialog dengan kultur santri, jadi tidak sepenuhnya mengangkat isu-isu feminisme. Untuk isu KDRT, umpamanya, Fatayat dan sejumlah pesantren mendirikan lembaga pelayanan korban kekerasan. Kalangan NU dan pesantren bisa menerima gagasan ini, bahkan sebagian rumah penampungan sementara korban KDRT itu berada di lingkungan pesantren. Tapi soal penghormatan terhadap suami, itu ya tetap dijaga dan mendapat tempat yang cukup kuat. Misalnya, dalam isu poligami misalnya. Kalau pendekatan sekuler itu sudah pasti solusinya bercerai karena dianggap sudah menyangkut harga diri. Sementara kalau di NU masih ada negosiasi-negosiasi, sekalipun pada pokoknya tetap menolak poligami.

Inilah harmoni pertemuan nilai-nilai Islam NU dengan isu-isu modern seperti kesetaraan gender. Kalau konsep gender itu diterapkan semuanya di lingkungan pesantren, tentu akan merusak tatanan yang sudah ada. Saya lebih memilih diambil separuh dulu yang bisa diterima semua pihak agar perjuangan kaum perempuan ini bergerak maju.

Keluwesan kultur NU dan pesantren inilah yang membuat saya bertahan dan lebih realistis. Saya beradaptasi dengan kultur di mana saya lahir dan tumbuh sehingga menjadi satu kekuatan, satu bangunan yang kuat karena fondasi yang kokoh. Isu feminism bisa digulirkan tanpa harus beranjak dari akar kultural kita sebagai santri, dan pada saat bersamaan dapat menyambut sesuatu yang baru yang mendorong kemajuan kultur kita itu.

Saat ini isu kesetaraan gender sudah lumrah di lingkungan NU dan pesantren. Tidak ada lagi yang secara kaku menolak. Dari pengalaman panjang bernegosiasi ini kami menemukan pola dalam mempertemukan gagasan baru dengan kultur pesantren. Pada dasarnya pesantren itu terbuka pada ide-ide baru, tetapi harus ada jaminan bahwa ide itu tidak akan merusak tatanan yang sudah

ada tetapi justru akan menguatkan dan membawa pada kemajuan bersama.

Apalagi di lingkungan NU itu terdapat sejumlah figure kuat yang menginspirasi gerakan perempuan. Ada Ibu Solehah Wahid, Ibu Aisyah Hamid Baidlowi, Ibu Sinta Nuriyah, dan lain-lain. Figur-figur ini sangat berarti di tingkat *grassroot*. Dan di pesantren itu ternyata banyak *local genius*, para perempuan yang tangguh yang tidak menyebut dirinya sebagai feminis atau aktivis perempuan. Beberapa di antara mereka ada yang menjadi pengasuh pesantren secara mandiri.

Ketua PBNU Perempuan

Ada satu hal yang masih saya idamkan di NU, yaitu masuknya ulama perempuan dalam struktur PBNU, sebagai salah satu Ketua PBNU yang bertugas mengkoordinasi segala urusan perempuan. Kalau melihat peta demografi Indonesia masa depan di mana jumlah perempuan akan lebih banyak dari laki-laki, maka persoalan perempuan harus mendapatkan perhatian yang lebih dari sebelumnya. Dan yang lebih mengerti urusan perempuan tentulah perempuan itu sendiri. Memang sudah ada Muslimat, Fatayat, dan IPPNU. Alangkah lebih baik kalau ketiga badan otonom ini di bawah koordinasi ulama perempuan yang menjadi salah satu Ketua PBNU. Jadi ke depan jika menyangkut keputusan-keputusan tentang perempuan, sudah ada Ketua PBNU perempuan yang bisa bersuara dan membahasnya.

Saya berharap kepada kader-kader muda NU yang selama ini menekuni isu kesetaraan gender, jika kelak mereka masuk dalam struktur PBNU, bisa memperjuangkan harapan ini. Namun, sekalipun saya berharap ada keterwakilan ulama perempuan dalam struktur PBNU, saya tidak hendak memaksakan kehendak. Saya sadar untuk mewujudkan harapan itu masih diperlukan negosiasi yang panjang. Sambil menunggu waktu, saya ingin mensyukuri terlebih dahulu apa yang sudah diraih para aktivis perempuan

NU selama ini. Jalan yang panjang, berliku, melelahkan, sekaligus menggembirakan.

Dan, kelelahan melakoni perjalanan panjang itu serasa hilang dengan terselenggaranya Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) pertama yang diselenggarakan di Pesantren Pondok Jambu, Babakan, Ciwaringin, Cirebon (25-27 April 2017). Pesantren yang diasuh oleh aktivis perempuan Nyai Hj. Masriyah Amva.

KUPI

KUPI adalah suatu rangkaian panjang dari kerja-kerja aktivis perempuan Muslim di Indonesia. Dimulai sekitar awal tahun 1990-an melalui kerja-kerja yang digawangi Lies Marcoes di P3M dan saya sebagai asisten beliau saat itu. Kerja-kerja P3M dilanjutkan oleh Rahima yang digawangi oleh Farha Ciciek, AD Eridani dan kemudian menghasilkan anak lembaga lain, yakni Fahmina di Cirebon. Langkah kerja Fahmina rupanya lebih gesit dan bergerak cukup maju karena mempunyai ide-ide kuat dengan ikon KH. Husein Muhammad, Faqih Abdul Kodir, dan Marzuki Wahid. Fahmina melalui Faqih menciptakan lagi Shalawat Keadilan yang sepanjang acara Kongres Ulama Perempuan lagu tersebut dijadikan mars wajib bagi setiap mata acara. Penyelenggaraan acara di Cirebon pun bukan tanpa alasan, karena Nyai Masriyah Amva, pimpinan Pondok Pesantren Warung Jambu adalah salah satu kader Fahmina.

Kerja-kerja *mainstreaming* gender dan Islam ini kami teruskan di Pimpinan Pusat Fatayat NU saat Maria Ulfah Anshor sebagai ketua umumnya. Fatayat di Maria mengarusutamakan perspektif gender dalam kerja-kerjanya secara sistematik dan terstruktur. Meski kami sering bersebrangan dan dimarahi oleh KH. Hasyim Muzadi yang saat itu menjadi ketua umum PBNU, tetapi kami pantang menyerah untuk suatu visi yang hendak kami perjuangkan melalui organisasi ini.

Di tahun 2009, saat saya sebagai komisioner Komnas Perempuan dan saat itu sebagai ketua Sub Komisi Pendidikan dan Litbang, kami: Nana Kamala Candrakirana, Kiai Hussein Muhammad, Tati Krisnawaty dan Nani Zulminarni yang dibantu oleh Yenny Widjaja dan Ida yang saat itu sebagai badan pekerja di Sub Kom Pendidikan, menginisiasi berdirinya organisasi Alimat. Sebagaimana namanya, organisasi ini berpretensi menggabungkan para ulama perempuan dari pelbagai disiplin ilmu pengetahuan Islam untuk dapat menjawab masalah-masalah yang mendiskriminasi dan melanggengkan kekerasan terhadap perempuan atas nama ajaran Islam. Sejumlah aktivis perempuan terlibat dalam organisasi ini, supaya terjadi pertukaran pemikiran dengan realitas empirik perempuan yang digeluti para aktivis.

Tiga organisasi inilah, yakni Rahima, Fahmina dan Alimat sebagai penyelenggara Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) perdana 2017. Ada kritik terhadap penyelenggaraan KUPI yang harus didengar. Kritiknya adalah bahwa para aktor yang terlibat di KUPI masih orang-orang lama dan tidak menampilkan generasi yang baru. Kritik itu barangkali ada benarnya, karena bagi saya sendiri, keterikatan pada Kongres ini cukup kuat. Bukan pada kongresnya itu sendiri sebagai suatu sejarah baru dalam gerakan perempuan Indonesia, khususnya gerakan perempuan Muslim, tetapi peristiwa ini merupakan rangkaian kerja-kerja panjang sebagaimana yang saya tuliskan di atas.

Sewindu Gusdurian: Gus Dur Sudah Meneladankan, Saatnya Kita Melanjutkan

Alissa Qatrunnada Munawwaroh (Alissa Wahid)

Gusdurian itu tidak ada tanggal berdirinya karena berupa gerakan organik. Tiba-tiba saja tumbuh. Bermula dari rapat-rapat di Taman Amir Hamzah, Jakarta, beberapa bulan setelah Gus Dur wafat. Lalu ketemulah nama Gusdurian yang pertumbuhannya jauh melebihi perkiraan awal. Melalui pertemuan intensif di Ciganjur, terbentuklah Yayasan Bani K.H. Abdurrahman Wahid yang memayungi Pojok Gus Dur, Jaringan Gusdurian, Abdurrahman Wahid Center yang di UI.

Sekarang komunitas yang aktif ada di 85 kota. Selain itu, ada pula daerah yang banyak Gusdurian tetapi tidak membentuk forum secara resmi, seperti di Aceh dan Bali, tetapi saling terhubung satu sama lain *(connected)*. Ada yang terbentuk karena inisiatif lokal, ada yang dibentuk oleh teman-teman yang sudah tahu tentang Gusdurian lalu membentuk di tempatnya berasal. Tidak ada yang *top down*. Gusdurian itu banyak orang NU-nya, tapi banyak juga yang bukan orang NU.

Jaringan Gusdurian lebih berkarakter gerakan sosial, bukan tipikal LSM. Program tidak di *drive* oleh Funding. Dalam pertemuan penggerak nasional Gusdurian menyepakati sejumlah isu akan ditekuni, misalnya promosi toleransi. Pada Hari Toleransi

Internasional 16 November 2017, kampanye berhasil dilakukan di 50 kota secara mandiri.

Salah satu pengalaman paling mengharukan selama mengelola Jaringan Gusdurian adalah waktu menghadiri Kelas Pemikiran Gus Dur (KPG) di Pontianak. Jadwal sudah disusun rapi oleh panitia dan sehari sebelumnya saya sudah berada di Pontianak. Saya akan mengisi materi pada hari Sabtu pukul 10.00. Jumat malam tiba-tiba saya menerima telepon dari Ibu dan meminta saya agar menemani beliau memasang batu nisan makam di Jombang pada Sabtu siang. Saya tentu tak bisa menolak perintah Ibu. Agar bisa mengejar jadwal pemasangan nisan itu saya harus naik pesawat pukul 08.00, berarti saya harus membatalkan memberi materi KPG.

Namun, ketika panitia coba menawarkan alternatif waktu kepada peserta, jadwal materi saya diajukan menjadi pukul 05.00, di luar dugaan semua peserta menyepakatinya. Sabtu pagi, bakda subuh, ruangan sekolah LP Ma'arif yang digunakan untuk KPG itu penuh. Jadi ini persis kuliah subuh. Sekitar 100 peserta dengan penuh semangat mengikuti paparan saya. Kalau peristiwa ini terjadi di Jawa Timur, saya tidak terlalu kaget, tetapi ini di Pontianak, Kalimantan Barat. Ya Allah, sungguh kejadian ini menjadi tambahan energi buat saya untuk mengelola Gusdurian secara lebih baik lagi.

Empat Elemen

Ada empat elemen dalam Gusdurian. *Pertama*, manajemen isu. persoalan isu strategis yang perlu disikapi seperti isu keadilan dalam konteks agama atau ekonomi. Bagaimana membela petani atau lingkungan, seperti docontohkan Gus Dur saat menolak PLTN di Gunung Muria.

Kedua, mengelola secara nasional. *Ketiga*, mengelola Gusdurian itu sendiri. Apakah setiap pencinta Gus Dur itu pasti Gusdurian, apakah semua orang yang mengaku Gusdurian itu kemudian bisa sahih menjadi Gusdurian. Kami tidak punya dewan etik untuk itu,

tetapi kami ingin memastikan bahwa masyarakat itu mengerti bahwa kalau orang menyebut dirinya Gusdurian, maka secara otomatis sikapnya tidak terjebak mayoritas minoritas, tidak eksklusivis, tidak ekstrem. *Tawassut,* sesuai prinsip dalam NU.

Apalagi kalau dekat-dekat pemilu, banyak orang yang mengaku Gusdurian. Biar nanti masyarakat yang mengukur, apakah pengakuan itu benar atau hanya kepentingan politik jangka pendek.

Keempat, pendampingan komunitas lokal, di mana para Gusdurian berkumpul. Ketika mereka berkumpul atas nama Gusdurian itu memang berdaya guna. Di Yogja ada komunitas santri Gus Dur yang mempunyai Majelis Shalawat Gus Dur. Kami mau memastikan bahwa jaringan Gusdurian bisa men-support komunitas tersebut ini untuk mengembangkan apa yang mereka mau. Gusdurian Tuban punya SMP Gus Dur. Gus Durian Lumajang ada Laskar Hijau yang fokus pada isu lingkungan. Gusdurian Tual punya PAUD, dan seterusnya. Jaringan Gusdurian berusaha memfasilitasi dan mendukung kreativitas lokal itu agar berkembang sesuai harapan masing-masing. Kehadiran Gusdurian di daerah bukan sebagai kompetitor bagi yang lainnya, apalagi yang sesama berkultur NU, tetapi lebih sebagai *connector*, penyambung ke jejaring yang lebih luas.

Setiap komunitas Gusdurian didirikan oleh orang-orang yang ada di daerah dan dimiliki oleh mereka. Di Jember tumbuh Gusdurian-Gusdurian muda, mereka berproses dan mengatasnamakan dirinya Gusdurian dan mulai diundang siaran di radio untuk membicarakan soal toleransi, dan lain-lain. Di Sulawesi komunitas Gusdurian sudah tumbuh di sejumlah kota. Sambutan hangat seperti itu sungguh di luar ekspektasi awal dan tentu saja membuat kami bahagia. Kami dari Sekretariat Nasional (Seknas) hanya meminta satu, yakni mengikuti kesepakatan Jaringan Gusdurian untuk tidak berpolitik praktis.

Dalam pertemuan nasional yang kami adakan, Seknas hanya menyediakan konsumsi dan penginapan, biasanya di pondok pesantren, seperti pertemuan 2016 di Pesantren Pandanaran, Yogyakarta yang dihadiri 250 peserta. Untuk biaya transportasi mereka tanggung sendiri.

Tujuan Gusdurian

Ada beberapa tujuan Gusdurian. *Pertama*, pangkalan untuk tetap mempertahankan Gus Dur sebagai inspirasi, untuk nilai-nilai, pemikiran, dan perjuangan. Kalau misalkan ada yang mencari rujukan tentang demokrasi, keadilan sosial, bisa punya tempat untuk mempelajari keduanya sehingga wacananya tetap bergulir di Indonesia. Kami yakin bahwa apa yang dicita-citakan Gus Dur itu belum tercapai, masih panjang. Oleh karena itu, kita bersama memelihara itu. Gus Dur itu milik banyak orang, menjadi simbol perjuangan demokrasi dan keadilan. Gusdurian bukan tempat untuk semata-mata memuji-muji Gus Dur.

Kedua, kami ingin membuka ruang bagi lahirnya orang-orang seperti Imam Azis, Savic Ali, Hairus Salim, dan tokoh-tokoh lain yang pernah bersentuhan dengan Gus Dur dan berkiprah sesuai keahliannya. Hal ini dilakukan dengan meneruskan apa yang dahulu dijalankan oleh Gus Dur ketika mulai memperkenalkan tokoh-tokoh pesantren ke dunia yang lebih luas, seperti Gus Mus dan Kiai Sahal.

Ketiga, membangun jejering yang lebih kuat, mengonsolidasikan jejaring yang lebih kokoh. Gus Dur adalah seorang *connector* berbagai pihak yang saling berkepentingan. Orang yang punya kepentingan ekonomi dengan orang yang punya kepentingan agama, bisa ketemu melalui Gus Dur. Kami ingin peran itu digantikan oleh Jaringan Gusdurian. Kalau menunggu lahirnya satu sosok seperti Gus Dur, tentu susah sekali dan lama. Maka kami inginkan agar jaringan inilah yang berfungsi bersama.

Tapi perlu dicatat bahwa Gusdurian tidak mengklaim sebagai satu-satunya yang meneruskan pemikiran dan perjuangan Gus Dur. Kami juga tidak memaksakan kepada siapa pun harus bergabung. Gusdurian ini buat yang berminat saja. Kami tentu senang sekali kalau ada orang membawakan nilai-nilai Gus Dur dan mengaplikasikannya dalam program yang mereka perjuangkan.

Mimpi yang paling ideal kami adalah punya sekolah Gusdurian di berbagai tempat. Semuanya menjadi penggerak. Lalu para Gusdurian itu menjadi pemimpin-pemimpin gerakan sosial di lingkungan masing-masing, di ruang yang mereka pilih. Membuka ruang untuk belajar tentang pemikiran Gus Dur kemudian menjadi pemicu semangat untuk bergerak.

Dua Isu Strategis

Dalam perkembangan jejaring Gusdurian, tidak terhambat dengan adanya kelompok intoleran. Kami memakai cara Gus Dur yang tidak mengukur dirinya dari lawan. Gus Dur berjalan dengan tujuannya sendiri. Bahwa tujuan ini berkontestasi dengan apa yang dilakukan lawan, mungkin saja terjadi, tetapi tidak pernah merasa bahwa dia tidak bisa mencapai tujuan itu karena dihalang-halangi. Gus Dur itu tidak pernah *blamming,* menyalahkan orang lain atas nasib diri sendiri .

Jadi Gusdurian itu juga mengukur dirinya dengan meterannya sendiri, bukan dengan ukuran orang lain. Bahwa kemudian para kompetitor itu tumbuh dan berkembang, itu harusnya jadi tantangan sekaligus peringatan bahwa pertumbuhan dan perkembangan mereka itu membahayakan umat, bukan membahayakan Gusdurian itu sendiri. Oleh karena itu saya menolak sikap reaktif.

Isu strategis yang digarap saat ini adalah toleransi dan demokrasi. Kami sedang berkonsentrasi pada narasi keduanya baik secara *offline*; merevitalisasi lagi kelompok-kelompok lintasiman, membangun ruang-ruang pertemuan baru di berbagai lapisan, misalnya melalui program Tembang, yang merupakan inisiatif

KWI, Gusdurian dan ANBTI. Kami mengumpulkan anak-anak muda dari organisasi berbasis agama untuk berkumpul, bukan untuk membahas isu toleransi, tapi isu-isu lain seperti isu anak muda dan dunia kerja, anak muda dan pendidikan, anak muda dan antikorupsi, anak muda dan gerakan lingkungan hidup, anak muda dan sosial media, dan lain-lain. Agenda Gusdurian sederhana, kami ingin menciptakan ruang-ruang pertemuan ketika mereka nanti sudah dewasa, menjadi pemimpin-pemimpin di organisasinya masing-masing, itu sudah ada hubungan yang erat satu sama lain. Program ini sudah berjalan di Jakarta, Merauke, Yogyakarta, Kalimantan, Kupang.

Lalu kita juga fokus pada gerakan *online,* untuk memberikan wacana tandingan dari dominasi narasi ekslusivisme Islam dan pemurnian Islam. Dua hal ini berbahaya untuk masa depan Indonesia karena nanti akan muncul mayoritanianisme. Gusdurian mencoba fokus mengeksplorasi narasi tandingan berupa kampanye tematik. Jalur *online* ini cukup efektif, misalnya salah satu tema kampanye Gusdurian ada yang diakses oleh 2 juta orang. Apalagi saat materi yang kita viralkan itu ikut dibagikan oleh para pesohor seperti Ari Kriting, Adhie MS, Iwan Fals, Lukman Saifuddin, dan lain-lain.

Gusdurian sebagai entitas diharapkan dapat menjadi aktor pendorong perubahan. Kalau seorang Alissa sendirian mendorong perubahan, mungkin hanya berhasil –katakanlah-- paling 5 persen, tetapi ketika para Gusdurian bergerak, daya dorongnya akan menjadi besar, bisa jadi 20 persen.

Perlindungan Hak Warga

Sekalipun kami konsisten menjaga dengan partai politik, dalam konteks pemerintah lokal, kami mulai mendesakkan program toleransi, diawali dari enam kota. Diharapkan program toleransi dapat diadopsi dalam peraturan daerah, dan sebaliknya jika ada Perda yang intoleran dapat dicabut. Selain ke aparat pemerintah

kota, kami juga sosialisasi ke polisi dan aparat terkait lainnya. Respon awal cukup bagus, sebagaimana dilaporkan teman-teman di Yogja bahwa saat mereka mengundang pihak Polda dan Korem, ada perwakilan yang datang.

Apakah itu nanti akan bisa membawa perubahan yang lebih jauh, masih perlu ditunggu. Yang jelas saya mulai banyak diundang oleh pihak kepolisian untuk sosialisasi masalah toleransi ini. Salah satu yang kami sodorkan adalah perubahan paradigma kepolisian dari menomorsatukan harmoni sosial, ketenteraman dan ketertiban, menjadi mendahulukan hak konstitusi sebagai landasan harmoni sosial. Harmonisasi sosial itu dibangun di atas perlindungan terhadap hak-hak warga negara dan ini yang terus, berkali-kali saya sampaikan di depan direktur Bareskrim seluruh Indonesia di rapat kerja mereka.

Dalam kasus Bandara Kulonprogo, misalnya, kami konsern pada pemenuhan hak-hak warga yang tergusur. Kami bersama Mas Imam Azis sudah menemui warga yang jadi korban pembangunan bandara. Proses ganti rugi sebetulnya lancar, tetapi ada sekitar 70 KK yang memang tidak ingin penghidupan dan kehidupan mereka berpindah dan berganti. Mereka sangat terikat dengan tanah di mana mereka lahir.

Waktu bersua mereka, saya hanya mengingatkan agar mereka punya plan A, plan B dan seterusnya. Saya meminta kalau ada apa-apa, semuanya direkam, sekalipun hanya menggunakan HP. Itu akan jadi bukti setiap proses yang berlangsung.

Atensi Internasional

Sebagai gerakan masyarakat sipil, Gusdurian sudah mendapatkan atensi hingga level internasional, sebagai salah satu komunitas pegiat isu toleransi, perdamaian dan demokrasi. Misalnya belum lama ini Gusdurian diundang oleh *The Elders*, organisasi internasional yang didirikan oleh Nelson Mandela dan saat ini dipimpin oleh Kofi Annan, saat berkunjung ke Indonesia.

Utusan The Elders yang datang adalah Ernesto Zedillo (mantan Presiden Meksiko) dan Gro Harlem Brundtland (mantan Perdana Menteri Norwegia). Mereka datang membawa isu kesehatan. Mereka menjelaskan bahwa eksklusivisme agama di Indonesia itu bukan hanya soal intoleransi atau soal gereja ditutup, tetapi terkait dengan status kependudukan orang Indonesia dengan masifnya gerakan antivaksin, poligami, nikah muda, yang kesemua itu nanti mejadi problem kesehatan dan status kependudukan dan akan menyasar ke semua aspek.

Rupanya aktivitas kami menyuarakan isu-isu kesehatan selama ini ditangkap pula oleh lembaga internasional seperti The Elders. Gusdurian diundang bukan karena saya anaknya Abdurrahman Wahid. Bahkan kedua utusan itu baru tahu kalau saya anaknya Gus Dur setelah mereka melihat nama saya dan bertanya untuk memastikan.

Gusdurian ikut di hampir semua gerakan masyarakat sipil nasional. Gerakan advokasi kemerdekaan beragama, gerakan Islam ramah, anti korupsi. Bahkan Gusdurian menjadi salah satu hostnya Anti-Corruption Youth Camp 2017. Di jagat sosial media, komunitas NU yang paling terasa kehadirannya saat ini ada tiga pihak: NU Online, Gusdurian, dan Ansor.

Gusdurian juga sempat menjadi model kampanye global. Kami mendapat pujian dari masyarakat sipil global untuk kampanye MDGs. Pada tahun 2014 - 2015, bertepatan dengan *lobbying* akhir agenda-agenda pembangunan dunia. Komunitas *civil society* global agak khawatir dengan ketidaterlibatan masyarakat umum dalam isu ini. Waktu itu ada 1.600 *civil society organisation* (CSO) dari seluruh dunia yang bersepakat untuk membuat kampanye, namanya *action twenty fiveteen*. Melalui aksi ini kita mengabarkan kepada rakyat bahwa para pemimpin negara itu sedang bernegosiasi menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar.

CSO-CSO global itu rata-rata membuat kampanye di satu-dua tempat, sementara Gusdurian di 55 kota dengan melibatkan masyarakat. Caranya sederhana saja, kami meminta teman-teman Gusdurian untuk *nongkrong* di area publik, lalu melakukan semacam survei warga yang ada di sana dengan mengajukan pertanyaan sederhana. Misalnya pertanyaan, "Selain soal kesejahteraan ekonomi, hal apa yang menurut Anda perlu menjadi perhatian pemerintah supaya rakyat itu sejahtera?" Dari 55 kota itu kami mendapatkan 2.600 responden. Dalam pertemuan MDGs di Nairobi, Gusdurian mendapatkan apresiasi karena selain kampanye langsung ke tengah masyarakat, juga berhasil melibatkan masyarakat untuk bersuara merespon isu MDGs ini.

Memanusiakan Manusia

M Imam Aziz

NU itu pada dasarnya mengedepankan visi persatuan dan kebangsaan. Mukaddimah Qanun Asasi jelas memuat hal tersebut. Pada realitasnya memang umat Islam tidak satu, tetapi dengan perbedaan-perbedaan itu NU tetap mengajak untuk bersatu, tidak harus melebur, tetapi bekerja bersama-sama. Sejarah membuktikan itu, pada 1939 NU bersama sejumlah Ormas Islam mendirikan MIAI. Lalu pada masa pendudukan Jepang ikut mendirikan Masyumi. Ketika terjadi fusi yang dipaksakan oleh Orde Baru, NU juga menyatu dalam PPP. Selalu ada jalur-jalur untuk merajut persatuan itu sekalipun masing-masing berbeda. Kini NU juga menginisiasi Lembaga Persahabatan Organisasi Islam (LPOI).

Pada dasarnya NU bersikap menerima dan mengakui kehadiran orang dan kelompok lain, termasuk orang-orang yang berbeda keyakinan dan agama sebagai sesama warga negara. Inilah implementasi dari persaudaraan sesama warga bangsa (*ukhuwwah wathoniyah*) dan sesama manusia (*ukhuwah basyariyah*).

Sekalipun berbeda pilihan politik, atau berbeda cara dalam mencapai satu tujuan, hubungan kemanusiaan itu harus selalu dijaga. Begitu juga dengan orang atau kelompok yang berbeda agama. Perbedaan keyakinan dan agama itu adalah urusan hati. Alquran mengajarkan, *"Sekalipun kedua orang tuamu itu mengajakmu untuk menyekutukan Tuhan, tolaklah dan jangan ta'ati, tetapi pergaulilah mereka (sebagai sesama manusia) dengan baik."*

Kecuali kalau ada serangan, maka kewajiban kita semua adalah mempertahankan diri. Tetapi ketika tidak ada serangan, maka

tidak alasan bagi kita kecuali saling membantu. Semua punya hak, antarsesama muslim, antartetangga, antar yang berbeda agama/ keyakinan, semua ada haknya.

Empat Prinsip NU

Ada empat prinsip yang merupakan dasar sikap moderat NU yaitu: sikap tengah-tengah dalam beragama (*tawassuth)*. Tidak ekstrem kiri, tidak juga ekstrem kanan. Sikap toleransi (*tasamuh*), menghargai perbedaan serta menghormati orang yang memiliki prinsip hidup yang tidak sama asalkan tidak mengubah akidah. Sikap seimbang (*tawazun*) dalam menggunakan dalil *aqli* (akal) dan dalil *naqli* (teks Quran dan Sunnah). Dan sikap teguh serta lurus dalam ajaran Islam dan keimanan kepada Allah SWT (*i'tidal)*.

Berdasar pada empat prinsip tersebut maka ijtihad politik NU bertujuan untuk mengatur dan mengelola kemaslahatan rakyat dalam hal penegakan keadilan yang menyeluruh, menciptakan keamanan umum, dan meningkatkan kesejahteraan yang merata. Ijtihad politik NU didasarkan pada tujuan membangun manusia dan kesepakatan bersama untuk mencapai cita-cita berbangsa. Dalam konteks Indonesia, NU bersama komponen bangsa lainnya menyepakati sebuah negara bangsa berbentuk republik dengan prinsip demokrasi modern. Indonesia dalam ijtihad NU telah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kewajiban NU adalah mengingatkan bahwa pemerintahan sekarang ini haruslah menegakkan hukum bagi siapa saja, agar keadilan dirasakan oleh semua rakyat Indonesia.

Pemerintah tidak boleh tunduk pada sekelompok orang yang memaksakan kehendaknya di luar proses demokrasi dan hukum yang berlaku. Jika pemerintah tunduk pada kelompok-kelompok ini, maka akibatnya sistem demokrasi yang kita bangun akan mundur ke belakang.

NU dan Pancasila

Kesan dan penilaian bahwa NU itu oportunistik dalam langkah-langkahnya, itu semata-mata bersifat politis. Itu pandangan orang yang tidak mengerti benar tentang NU. Bagi NU sebenarnya, selama bisa kerjasama maka akan diupayakan kerjasama. Tetapi kalau sudah menyerang, seperti pada zaman Orde Baru, maka NU pun melawan, karena ada hak NU yang diabaikan di situ. Itulah yang terjadi saat NU bergabung di dalam Masyumi atau PPP. Ketika hak-hak NU dikesampingkan, maka NU pun melakukan perlawanan hingga akhirnya memutuskan untuk keluar. Pada masa sekarang, sekalipun NU terlihat mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo, ketika ada kebijakan yang "menyerang" seperti penerapan FDS (Full Day School), maka NU bereaksi melawan.

Dalam suasana represif seperti diera Orde Baru, NU jelas melakukan perlawanan. Sekalipun ada pihak-pihak di internal NU atau pesantren yang mengambil jalan tidak konfrontatif, langkah itu diambil untuk menyelamatkan umat. Mereka bersembunyi di tempat terang.

Dalam Munas NU 1979 di Kaliurang, PBNU tidak mau menyebut Presiden Soeharto sebagai Bapak Pembangunan. Tetapi Kongres GP Ansor di Semarang menyematkan gelar itu. Menurut K.H. Chalid Mawardi, Ketua GP Ansor saat itu, itulah cara yang diambil agar NU tidak "dihabisi" oleh rezim Orde Baru. Inilah strategi untuk menyelamatkan aktivitas NU. Sebab pada waktu itu, jangankan pengajian, rapat saja bisa dibubarkan. Suasananya sangat represif.

Pada masa kepemimpinan Orde Baru, saat PBNU masih dipimpin oleh K.H. Idham Chalid, NU itu lumpuh. Jangankan untuk menyelenggarakan acara besar, memasang plang NU saja tidak diperbolehkan. Sekolah-sekolah NU diharuskan ganti nama kalau mau tetap berjalan. Militerisme mencengkeram berbagai aspek kehidupan yang membuat saluran demokrasi mampat.

Untuk mencairkan suasana represif itu, pada Munas NU 1983 di Situbondo, NU menetapkan Deklarasi Hubungan Pancasila dengan Islam. Pada hakikatnya deklarasi ini sebuah perlawanan terhadap Orde Baru. Coba perhatikan butir-butir deklarasinya:

(1) Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara Republik Indonesia bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama. (2) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar Negara Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjiwai sila-sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam. (3) Bagi Nahdlatul Ulama, Islam adalah akidah dan syari'ah, meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antarmanusia. (4) Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syari'at agamanya. (5) Sebagai konsekuensi dari sikap di atas, Nahdlatul Ulama berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni dan konsekuen oleh semua pihak.

Perhatikan kalimat berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni dan konsekuen, itu merupakan perlawanan terhadap hegemoni tafsir Pancasila-nya Orde Baru. Rezim waktu itu menafsirkan Pancasila secara melebar-lebar, seperti UU yang diberi nama P4 (Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila). Seperti etika tetapi dipaksakan dan mengikat, untuk sebenarnya-- mengamankan militerisme. Waktu itu semua bupati dijabat tentara, pejabat pemerintahan diisi tentara, Rektor IAIN dan Menteri Agama diduduki militer, bahkan kepala koperasi pun dijabat oleh tentara. Polisi juga menjadi bagian dari militer. Semua itu menakutkan bagi masyarakat sipil. Gus Dur didukung para kiai sepuh, melawan situasi dan kondisi sedemikian itu juga dengan Pancasila. Pancasila harus ditafsirkan *bil lafzhi wal ma'nal murod,* secara lafad dan makna, dengan konstitusi. Pedomannya harus dengan UUD.

Bagi NU, tafsir resmi atas Pancasila adalah konstitusi, UUD 1945. Ini adalah penerimaan tetapi terkandung di dalamnya sebuah perlawanan. Itulah cara NU. Orang yang tidak mengerti suasana kebatinan para ulama NU dalam mencapai kesepakatan seperti ini, dengan simplistis menyebut NU oportunistik. Padahal suasana dalam Munas itu sangat panas. Ada gerakan sejumlah ulama yang anti Pancasila. Beberapa kiai besar juga masih menolak.

Perlawanan itu terus konsisten dilakukan oleh Gus Dur hingga pelaksanaan Rapat Akbar pada 2 Maret 1992 dengan tema kesetiaan kepada NKRI, Pancasila dan UUD 1945. Jauh sebelum ada gegeran HTI dan Wahabi seperti sekarang, Gus Dur sudah mengingatkan ada bahaya ke depan yang akan merongrong NKRI, Pancasila, dan UUD 1945. Lucunya waktu itu, pemerintah malah ketakutan dengan upaya Gus Dur ini. Rapat Akbar nyaris dibatalkan dan akhirnya kehadiran peserta dibatasi. Itulah perlawanan secara kultural cara NU, konsisten Munas 1983 hingga Rapat Akbar 1992. Konteks besarnya adalah melawan militerisme.

Gus Dur dan Demokrasi

Reformasi pada umumnya membuat perubahan besar. Terbuka peluang-peluang dengan adanya demokratisasi. Gus Dur menjadi salah satu aktor reformasi, tetapi unik. Dia memanfaatkan peluang reformasi itu tetapi tidak dipakainya sendiri, tidak mementingkan kelompoknya saja. Ketika menjadi Presiden RI, malah yang diajak terlibat dalam pemerintahannya berasal dari berbagai kalangan. Dari pihak NU malah hanya beberapa orang saja. Bagi Gus Dur, orientasinya itu bukan pada kekuasaan. Demokrasi ia maknai sebagai bagaimana mengelola negara ini secara bersama-sama.

Ketika itu Gus Dur dilengserkan dengan memorandum yang bersifat politis, bukan karena ia melanggar konstitusi. Kalaupun Gus Dur menyayangkan kejatuhannya, bukan pada posisi kepresidenannya, melainkan pada cara para politisi itu menjatuhkannya yang menunjukkan bahwa mereka belum siap

untuk berdemokrasi secara baik. Demokrasi masih dijadikan alat untuk memaksakan kehendak, merancang sesuatu di luar konstitusi. Kalau pada waktu itu semua politisi berpegang hanya pada konstitusi, maka Gus Dur tidak akan lengser.

Menuju demokrasi yang ideal itu memang berat. Masyarakat Indonesia belum terbiasa dengan cara berdemokrasi. Bagi Gus Dur, dalam demokrasi itu yang tertinggi adalah kemanusiaan. Jangan sampai kekuasaan mengalahkan kemanusiaan. Kekuasaan harus tunduk pada kemanusiaan. Jangan sampai kekuasaan itu tidak memanusiakan manusia. Untuk itu GD sangat percaya sistem demokrasi.

Ada yang mengesankan bagi kami sebagai aktivis mahasiswa di penghujung 1980-an. Waktu itu Gus Dur mengatakan, *"Kalian jangan mengaharpkan saya akan seperti ini terus, suatu saat akan saya ambil peluang kekuasaan itu."* Tentu saja saya dan kawan-kawan kaget. Kami membayangkan Gus Dur itu sebagai simbol perlawanan, dan akan terus demikian. Makanya ketika Sidang MPR RI 1999, dalam hati kecil saya menolak Gus Dur jadi presiden.

Pesan yang selalu diulang-ulang oleh Gus Dur kepada kami, kaum muda NU, adalah soal keindonesiaan dan demokrasi. Berkali-kali ia menekankan bahwa aliran garis keras itu sudah ada sejak dulu di berbagai kelompok. Ada di kelompok Islam, militer, pejabat pemerintah. Gus Dur mengingatkan agar kami tidak membuat stigmatiasi, karena di kelompok Islam, tentara, pemerintahan, pasti ada orang-orang baik. Di kelompok agama yang berbeda ada itu pasti yang baik. Di kalangan NU sendiri pasti ada yang baik dan ada pula yang buruk. Kami diwanti-wanti agar jangan anti sama sekali, apalagi anti pada kelembagaannya. Menurut Gus Dur, pasti masih ada unsur-unsur kemanusiaannya yang bisa diambil dari setiap kelompok.

Soal hubungan dengan kelompok yang berbeda agama atau katakanlah dengan orang kafir, bagi Gus Dur, kafir ini ada dua level.

Ada yang menolak agama dan ada juga yang menolak kebenaran. Gus Dur mempunyai logikanya sendiri. Orang boleh berbeda dari segi keyakinan, tapi jika masih menjunjung tinggi kebenaran, maka orang itu bukan kafir, melainkan hanya menolak agama yang terlembaga saja. Dalam agama itu ada nilai-nilai yang universal dan ada nilai-nilai yang parsial. Nilai-nilai parsial itulah yang menolak agama yang berbeda. Selama tidak memusuhi, maka mereka wajib dilindungi. Dalam konteks Indonesia, perlindungan itu menjadi tanggung jawab muslim sebagai mayoritas.

Setelah lengser dari jabatan presiden, yang tidak berubah dari Gus Dur adalah gagasan berdemokrasi dan kemanusiaannya. Kalau soal pilihan politiknya, ia hanya mengikuti aturan saja. Setelah dikalahkan oleh pengadilan dalam kasus perebutan PKB, Gus Dur menerimanya.

Legacy Gus Dur adalah pembangunan sistem sebagai landasan berbangsa dan bernegara. Ia meletakkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan bernegara secara murni dan konsekuen. Ia mengembalikan tentara pada posisinya, memisahkan polisi dari tentara, memisahkan keamanan dengan pertahanan. Itu capaian yang luar biasa yang harus dipertahankan. Hanya saja karena masa pemerintahan yang singkat, ia belum berhasil mengangkat aspek ekonomi. Militer tidak boleh berpolitik ini menjadi pilar demokrasi yang sehat.

Gus Dur yang berpengalaman hidup di Timur Tengah, mengajak untuk berkaca pada sejarah Islam, bahwa tentara berpolitik itu sangat berbahaya. Pada awalnya Nabi Muhammad itu tidak punya pengawal pribadi apalagi pasukan. Ketika terjadi peperangan, semua sahabat tanpa kecuali ikut serta. Oleh karena itulah banyak para intelektual sahabat yang hafal Alquran ikut terbunuh. Itulah dasarnya NU menolak cita-cita negara Islam, karena Nabi Muhammad memang tidak mewujudkannya. Cita-cita Nabi Muhammad adalah menyempurnakan akhlak.

Baru setelah Nabi wafat dan khalifah yang empat juga mangkat, muncullah sistem pemerintahan dinasti yang diklaim sebagai pemerintahan model Islam. Dalam perjalanan dinasti ini, banyak kasus karena keturunannya lemah, maka yang menguasai kemudian adalah militer. Sejarah mencatat, ketika militer berkuasa, hancurlah peradaban. Maka militer itu harus dijauhkan dari politik.

Gus Dur dan Islam Moderat

Salah satu dalil yang kerap dikutip Gus Dur adalah pendapat seorang ahli ushul fikih bernama Izzuddin Ibnu Abdissalam seorang ahli ushul fikih, *semangat pemidanaan itu dalam hukum acaranya selalu dipersulit dalam pembuktiannya*. Misalnya dalam kasus zina, itu harus disaksikan oleh empat orang yang melihat langsung. Intinya dalam hukum Islam itu mendorong untuk memberi maaf. Lebih baik salah memberi maaf daripada salah menjatuhkan hukuman. Inilah salah satu semangat *makarimul akhlaq* yang menjadi dasar keterutusan Nabi Muhammad. Hukum bisa jalan tetapi di atas hukum itu masih ada memaafkan, untuk kasus apa saja.

Memaafkan itu lebih baik dan meminta maaf itu juga lebih baik. Kalau meminta maaf itu semangatnya *astaghfirullahal 'adzim* (aku memohon ampunan kepada Allah). Kalau memaafkan itu semangatnya *fa'fu 'anhum wastagfir lahum* (maka maafkanlah mereka dan mintalah ampunan untuk mereka).

Bahwa ada pro dan kontra terhadap sikap dan pendapat Gus Dur, itu merupakan proses pembelajaran. Kekuatan Gus Dur itu terletak pada wacana dan praktik. Misalnya, orang melihat ada kiai NU yang masih berpandangan keras/konservatif dalam suatu hal, maka akan dibandingkan dengan Gus Dur. Secara kultural ada proses deligitimasi yang pada akhirnya membuat kiai tersebut jadi lebih moderat. Hal itu bisa terjadi karena nilai-nilai yang terinternaslisasi melaui contoh dan perilaku Gus Dur dengan segala resikonya.

Meskipun di era Gus Dur sebelum lahirnya PKB, NU itu tidak berpolitik, tetapi pendidikan politiknya luar biasa. Pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) itu sangat kuat. Praktiknya, Gus Dur bicara tentang Pancasila yang diterapkan secara murni dan konsekuen, soal pluralisme, yang ia praktikkan secara nyata. Ia misalnya jadi saksi ahli pengadilan pasangan peghayat dari Kuningan, Gugum dan Susi, yang diadili karena menikah secara adat. Ia merujuk pada Pancasila dan UUD 1945 bahwa kepercayaan warga negara itu dilindungi oleh konstitusi. Waktu itu belum ada tokoh yang sebanding dengan Gus Dur dalam isu yang sama. Pergaulan Gus Dur dengan tokoh-tokoh agama dan kepercayaan itu memang sangat luas sehingga *civic education* itu menjadi merata yang dirasakan dampaknya sampai sekarang, sekalipun tidak ada tokoh tunggal.

Pentingnya Rekonsiliasi

Salah satu jasa Gus Dur bagi NU adalah membuka ruang bagi anak-anak muda untuk bersuara dan berkiprah. Ketika ia sudah tidak jadi Ketua PBNU dan sudah lengser pula dari jabatan presiden, Gus Dur masih menjadi pelindung bagi aktivis muda NU. Ceritanya ketika PBNU dipimpin oleh Kiai Hasyim Muzadi, para aktivis muda NU menganggap beliau berpolitik praktis dengan menjadi Calon Wakil Presiden tanpa melepaskan jabatannya sebagai Ketua PBNU. Maka untuk menyikapi hal tersebut, diselenggarakanlah Musyawarah Besar Warga NU pada 2004 di Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon. Gus Dur merestui langkah ini sebagai koreksi yang konstruktif.

Sebelum Mubes berlangsung, jaringan anak-anak muda NU sudah terlibat dalam berbagai kegiatan di berbagai tingkatan NU. Sejak awal Mubes ini tidak dimaksudkan melawan seseorang, tetapi mengkritik cara pengelolaan NU pada saat itu. Makanya yang dibahas dalam Mubes itu adalah isu-isu strategis dan tata kerja organisasi yang harus diperhatikan oleh NU. Bahwa NU

bukan hanya mengurusi soal politik. Peserta Mubes misalnya mengingatkan pentingnya soal Hak Asasi Manusia, pertanian, ekonomi. Kami berkumpul untuk membuat alternatif cara ber-NU. Dan hasil mubes itu berdampak luas karena semua pesertanya kemudian menjadi pengurus NU di masing-masing daerah. Mereka ikut terlibat merumuskan program kerja dan tata organisasi di kepengurusan NU masing-masing.

PBNU era Kiai Said sekarang ini bersemangat rekonsiliatif. Seusai Muktamar Jombang 2015 yang konon heboh itu, saya langsung sowan Kiai Solahudin Wahid dan diterima dengan baik. Terbukti dalam Munas Alim Ulama dan Konbes NU di Lombok 2017, sudah dihadiri oeh tokoh-tokoh yang katanya berseberangan dengan PBNU. Semangat rekonsiliasi internal ini tentu saja menggembirakan dan membuka peluang untuk mewujudkan rekonsliasi lebih luas secara nasional, merajut kembali kebersamaan dengan pihak-pihak yang terpinggirkan.

Saya mencatat perkembangan menarik menjelang 30 September 2017 tahun lalu. Ketika upaya untuk mengangkat memori kolektif tentang peristiwa 1965 dengan ajakan menonton film G30S PKI diangkat sedemikian rupa, Kiai Said malah menganjurkan agar masyarakat juga melihat film pemberontakan DI/TII. Pertimbangan seperti ini penting agar masyarakat semakin dewasa dan tidak terus-menerus digiring pada arah yang salah.

Kita harus melakukan rekonsiliasi secara terbuka dengan seluruh komponen warga bangsa ini, karena sekarang kita seolah-olah jalan bersama-sama dalam sebuah sistem demokrasi, tetapi sebenarnya masih dalam situasi yang saling bermusuhan. Bagi saya, kalau demokrasi masih diartikan sebatas pada proses pemilu, maka hanya akan tercapai proseduralnya saja. Padahal demokrasi itu juga memuat susbtansi. Untuk mencapai demokrasi yang lebih substansial itu diperlukan suatu konsensus nasional. Konsensus nasional itu syaratnya adalah terlebih dahulu tercipta rekonsiliasi bersama yang melibatkan semua pihak. Tidak mungkin tercapai

konsensus yang ideal kalau dalam tubuh bangsa ini masih penuh dengan permusuhan. Dalam konteks tersebut, rekonsiliasi artinya semua elemen yang ada saling mengakui bahwa saya telah bersalah, yang lain juga demikian. Kita semua pernah bersalah, tidak selalu benar, dan itu tidak usah dipermasalahkan lagi. Namun yang terpenting, satu hal yang harus dilakukan sekarang, adalah jangan mengulangi lagi kesalahan yang pernah dilakukan pada masa lalu.

Sekali lagi, memaafkan itu baik, begitu juga meminta maaf itu baik untuk dilakukan. Dengan memaafkan dan meminta maaf inilah bangsa Indonesia akan menuju kebesarannya di masa depan.

Bagian 4
“NU Penjaga NKRI”

Kita Ini Sama

H. Yaqut Cholil Qoumas

Perkembangan Ansor saat ini di luar ekspektasi saya saat pertama menjadi Ketua Umum GP Ansor. Awalnya saya hanya berpikir bahwa kerja utama Ansor itu menyiapkan kader untuk NU masa depan. Sementara di lapangan, sebagaimana kita saksikan bersama, anggota Ansor dan Banser, terlihat berhadap-hadapan secara langsung dengan kelompok-kelompok yang menginginkan pergantian ideologi negara Indonesia dengan mengusung isu khilafah. Di antara kelompok sipil yang lain di Indonesia, Ansor-Banser kini menjadi garda paling depan dalam mempertahankan keutuhan negeri ini dari rongrongan pengusung khilafah. Tetapi kalau saya nyatakan bahwa Ansor di masa sekarang berada pada masa keemasan, rasanya terlalu takabur. Cukuplah saya sebutkan bahwa ketegasan Ansor-Banser selama ini dalam menjaga keutuhan NKRI itu sangat membanggakan.

Kaderisasi Ansor mulai terasa berdenyut aktif saat dipimpin oleh Nusron Wahid. Sebelumnya proses kaderisasi nyaris mandek, tidak ada geliat kaderisasi. Secara kelembagaan Ansor cenderung digunakan hanya sebagai alat politik elit-elitnya. Ansor mengalami kebuntuan organisasi, stagnan dan tidak ada aktivitas yang berarti Saya melanjutkan sistem kaderisasi yang dirintis Nusron itu dan menemukan momentum ketika isu khilafah semakin menguat yang menuntut peran langsung Ansor di saat kelompok lain gamang atau takut.

Sikap "heroik" Ansor-Banser itu menarik perhatian banyak pemuda dari berbagai kalangan. Pengurus Pusat Gerakan Pemuda (PP GP) Ansor sampai kewalahan harus mengunjungi kaderisasi di daerah-daerah. Terkadang dalam seminggu kami harus membagi

tugas menghadiri lima undangan pelantikan anggota baru di lima provinsi yang berbeda. Sekarang kami merasakan adanya keterbatasan instruktur tingkat pusat.

Jika pada awalnya kaderisasi hanya diikuti 100-200 peserta, kini bisa mencapai 1.000 orang. Seperti terjadi di Anak Cabang GP Ansor Sukaresmi Garut, Pelatihan Kader Dasar (PKD) Ansor dan Pendidikan Latihan Dasar (Diklatsar) Banser diikuti lebih dari 1.000 peserta, sampai panitianya harus menutup pendaftaran peserta. Gairah para pemuda Indonesia untuk bergabung sebagai anggota Ansor-Banser sangat luar biasa. Untuk wilayah DKI Jakarta ini misalnya, terdapat 2.000 anggota Banser yang *on call* siap setiap saat.

Sebagai pimpinan pusat, saya melihat lonjakan pada kaderisasi Ansor-Banser ini sebagai barokah para kiai. Semakin banyak generasi muda yang ingin mencari barokah dan lebih punya harapan untuk masa depan. Sebab menjadi Ansor atau Banser itu tidak mencari apa-apa selain barokah dari para kiai, para pembimbing rohani kita. Selama mengikuti kiai, hidup kita akan selamat. Kemudian berkhidmah kepada kiai juga akan memberi jalan kesejahteraan. Dua hal ini terus saya sampaikan dalam setiap kesempatan. Secara kesejarahan Ansor adalah *Anshoru Nahdlatul Oelama* (ANO), penolong bagi para kiai NU.

Alhamdulillah, sikap dasar berkhidmah kepada kiai itu tampak dalam kaderisasi di berbagai tingkatan. Mereka membeli seragam sendiri, mengikuti pelatihan berhari-hari, lalu melaksanakan tugas yang diberikan oleh para kiai melalui NU. Apakah mereka berharap gaji? Tentu tidak, sebab menjadi Ansor atau Banser tidak bergaji.

Sikap Politik Ansor

Secara kelembagaan, Ansor bersikap netral dalam urusan politik praktis. Bahkan ketika berkunjung ke Jawa Timur, saya juga sampaikan bahwa Ansor tidak berpolitik. Tidak boleh ada dukungan kelembagaan Ansor kepada salah satu kandidat.

Bahwa sebagai kader mereka punya hak politik, tentu harus dihargai. Secara pribadi, siapa pun bisa menyatakan dukungan kepada kandidat pilihannya. Bahwa anggota Ansor-Banser punya kedekatan emosional dengan Saifullah Yusuf, itu merupakan fakta, karena beliau adalah mantan Ketua Umum PP GP Ansor.

Dalam Pemilihan Gubernur DKI 2017, Ansor secara kelembagaan juga netral. Namun saat kelompok pengusung khilafah memanfaatkan momentum dengan mendukung kandidat tertentu, maka Ansor harus bersikap. Kami harus menyatakan secara tegas bahwa Ansor menolak calon yang didukung kelompok radikal yang melakukan politisasi agama. Sikap tegas ini kemudian dibaca publik bahwa Ansor mendukung Ahok. Itulah risiko sebuah sikap.

Setelah memenangi Pilkada DKI, Gubernur Anis Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno selalu hadir jika kami undang. Keduanya tetap menghargai keberadaan Ansor dan bisa menerima sikap Ansor saat proses Pilkada berlangsung. Mereka tahu bahwa yang kami persoalkan adalah kelompok-kelompok yang menggugat kembali konsensus nasional yang telah disepakati oleh para *Founding Fathers* yaitu NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika.

Kami juga menolak klaim keagamaan oleh sekelompok kecil yang menganggap bahwa paham keagamaan merekalah yang paling benar dan orang di luar mereka itu salah. Dengan semena-mena mereka menolak jenazah Muslim yang berbeda pilihan politik. Sikap keagamaan seperti ini berbahaya karena menjadikan agama sebagai alat politik. Kami harus bersuara lantang karena mayoritas pendukung Pancasila memilih untuk diam. Saat seperti itulah kami merasa kesepian. Seolah-olah ini hanya tugas Ansor-Banser sendiri. Tidak seharusnya mereka terus berdiam diri dan harus mulai berani bergerak bersama-sama kami. Memang mayoritas itu pada dasarnya akan memilih langkah paling aman. Selama kepentingan mereka tidak terganggu, mereka akan diam.

Saya coba terus kampanyekan bahwa tidak boleh diam ketika muncul gejala seperti ini. Harus ada keberanian untuk bersuara. Saya mengapresiai tindakan musisi Ananda Sukarlan pada saat HUT Kanisius. Harus ada orang yang berani berbicara menyuarakan ketidaksetujuan atas penggunaan isu agama untuk kepentingan politik. Berkah dari Pilkada DKI adalah mendekatnya kelompok-kelompok yang selama ini diam karena berbagai alasan. Ansor menjadi sahabat bagi mereka yang sama-sama ingin menjaga kebhinekaan. Tak sedikit permohonan dari saudara-saudara non-Muslim untuk menjadi anggota Ansor. Namun secara halus kami tolak karena Ansor hanya menerima anggota Muslim yang mengikuti haluan *ahlus sunnah wal jamaah an-Nahdliyyah*. Untuk mewadahi animo besar ini, kami kemudian membentuk Sahabat Ansor.

Kisah Dua Penolakan

Ada dua kejadian penolakan atas kehadiran penceramah penganjur khilafah, di Bangil dan Garut. Keduanya melibatkan Ansor dan Banser. Dari pengalaman di lapangan seperti ini, saya melihat tindakan Ansor-Banser di Bangil bisa dijadikan preseden yang bisa diterapkan di tempat lain. Bisa dijadikan prosedur tetap (Protap) yang tidak tertulis. *Pertama*, melakukan koordinasi dengan aparat keamanan dan menyampaikan keberatan atas kehadiran penceramah disertai bukti-bukti tertulis atau visual bahwa dia pendukung khilafah. *Kedua*, meminta penceramah untuk menyatakan kesetiaan pada Pancasila dan NKRI. Ketika poin kedua ini ditolak oleh penceramah, maka aparat keamanan punya alasan yang cukup untuk menghentikan kegiatan ceramahnya. Mereka yang menolak Pancasila dan mengusung khilafah, tidak selayaknya berceramah secara bebas di Indonesia.

Cara cerdas kawan-kawan di Bangil ini lebih efektif dan cepat, sekalipun di dunia maya Ansor-Banser di-*bully,* dianggap mengusir penceramah, dan lain-lain. Biarlah informasi dunia maya dihadapi

dengan pendekatan tersendiri, yang penting di lapangan friksi dengan kelompok lain bisa dihindari.

Sementara kejadian di Garut itu sedikit lebih menengangkan. Pengurus Cabang GP Ansor Garut memiliki 5.000 Banser yang sudah terlatih. Perppu Ormas yang membubarkan HTI sudah menjadi Undang-Undang. Cukup alasan untuk menolak kehadiran penceramah pendukung khilafah. Sikap Ansor-Banser menolak kehadiran pengusung khilafah sudah tepat. Namun aparat keamanan masih gamang dalam melakukan tindakan sehingga para pendukung khilafah bisa menggoreng isu penolakan ini sedemikian rupa. Suasana yang terbangun pun dipenuhi distorsi, dibumbui berita *hoaks* media sosial yang tak terkendali.

Konsentrasi kami dari PP GP Ansor adalah bagaimana menghindari bentrok fisik. Sebab kalau sampai terjadi persekusi oleh pihak Ansor-Banser, maka para pengusung khilafah ini punya amunisi untuk menolak UU Ormas. Saya bersyukur, kawan-kawan Ansor-Banser Garut mampu menahan diri. Ketika beberapa minggu berselang hadir di Garut untuk melantik 5.000 Banser, saya sampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas keberhasilan tersebut. Kalau saja sejak awal aparat keamanan tegas bersikap, ketegangan yang di Garut itu tidak akan terjadi. Para pengusung ide khilafah itu memang tak bisa menahan diri. Dalam tablig akbar yang akhirnya diizinkan, mereka tetap mengibarkan bendera khilafah, dan aparat keamanan –lagi-lagi-- tak mengambil tindakan. Masyarakat Garut yang akhirnya bisa menilai, mana yang memegang janji dan mana yang sukanya memanfaatkan situasi untuk kepentingan sendiri.

Menghadapi Pengusung Khilafah

Saat Ansor menggerakkan Banser untuk menghadang laju gerakan Islam yang mengusung ide khilafah ini, Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) lain hanya diam. Padahal mereka sama-sama mengakui sebagai pembela Pancasila dan NKRI. Tak sedikit di antara mereka malah ikut mendukung kelompok ini,

misalnya ikut dalam aksi 212 dan aksi sejenis lainnya. Penyebabnya selain kepentingan politik adalah ketidaktahuan soal Islam secara lebih luas. Makanya saat orang-orang HTI mengibarkan bendera khilafah di setiap aksinya, yang jelas dilarang oleh undang-undang, OKP dan juga aparat keamanan hanya diam tak bertindak. Mereka takut dicap sebagai anti Islam atau menodai agama.

Karena didiamkan, secara pelan tapi pasti upaya untuk menginfiltrasi aparat dengan ideologi Islam garis keras ini terjadi. Kelompok anti Pancasila ini menyasar aparat melalui pergaulan di luar kedinasan. Sejumlah tokoh penganjur khilafah misalnya, dengan leluasa berceramah atau berkhotbah di masjid-masjid di lingkungan kepolisian. Setelah kita laporkan, barulah diganti dengan penceramah lain. Saya tidak tahu mengapa begitu bebasnya pergerakan kelompok-kelompok radikal ini, seolah tanpa filter sehingga bisa menembus ruang-ruang aparat keamanan. Gerakan HTI ini sudah dilarang di sejumlah negara Islam dan informasi tentang hal itu mudah diakses.

Kadang-kadang Ansor dengan Bansernya ini melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh aparat. Saya merasakan kegamangan aparat di tingkat bawah saat berhadapan dengan HTI karena yang diusung adalah isu agama. Bahkan tak jarang dalam mengahadapi tindakan persekusi yang dilakukan kelompok radikal ini atas kelompok yang berbeda, aparat tidak berani berhadapan langsung. Mereka meminta Banser di depan supaya menjadi alasan polisi bisa masuk untuk menindak. Padahal tanpa Banser pun aparat keamanan bisa langsung menindak.

Sebenarnya kita jengah diposisikan berhadapan secara horizontal begitu, tetapi tidak ada pilihan lain. Seperti kasus bentrok Banser dengan HTI di Makassar sebelum HTI resmi dibubarkan oleh negara. Kami sudah sampaikan kepada aparat keamanan bahwa kegiatan HTI ini merongrong keutuhan NKRI. Tetapi aparat di Makassar berkilah tidak bisa menindak karena

HTI ini baru berbicara dan belum bertindak. Aparat mengacu pada Undang-Undang Terorisme yang mengharuskan adanya tindakan terlebih dahulu. Terpaksalah Banser tampil menghadang di depan. Terjadilah bentrok dan baru aparat merasa punya alasan untuk membubarkan. Pilihan pahit ini terpaksa diambil Ansor-Banser, karena jika dibiarkan kelompok semacam HTI ini pandai memanfaatkan ketidaktahuan aparat. Itulah yang membuatnya gerakannya semakin lama semakin membesar. Setelah membesar, barulah semua pihak kelabakan.

Saya sering berdiskusi dengan Kapolri dan Panglima TNI soal ketidakpahaman aparat di bawah terhadap gerakan yang mengatasnamakan agama ini. Keduanya mengakui bahwa aparat di bawah memang masih banyak yang tidak paham dengan konstruksi gerakan Islam semacam HTI ini. Banyak aparat daerah yang membebaskan begitu saja kegiatan-kegiatan mereka, padahal jelas dalam ceramah tokoh-tokohnya menyatakan penolakan terhadap Pancasila dan akan mengganti sistem kenegaraan menjadi khilafah. Kalau saya kenal baik orangnya, saya datangi dan saya jelaskan akar dan arah gerakan semacam HTI ini. Setelah dijelaskan, barulah mereka mengerti.

HTI menjadi besar dan kuat di Indonesia tak bisa dilepaskan dengan dukungan logistik dari luar negeri. Ini yang memungkinkan mereka bergerak demikian masif, terus-menerus. Ada tokoh yang menjadi pintu masuk logistik dalam jumlah besar dari Timur Tengah ke Indonesia. Sementara kelompok-kelompok melakukan perlawanan terhadap mereka, seperti Ansor-Banser ini logistiknya *lillahi ta'ala* saja. Semangat kita didasarkan pada khidmah kepada para kiai, mencari rida dan barokahnya ulama, dan itulah yang membuat kita terus bergerak kemana pun mereka pergi. Akan kita hadapi setiap upaya merubah konsesus nasional dengan ideologi yang dibawa dari luar.

Dengan sikap persisten seperti itu, sering kali muncul pertanyaan dari berbagai pihak, apa yang dapat mereka bantu

untuk Ansor dan Banser? Saya jawab sederhana saja, biarkan kami konsolidasi dan jangan diganggu. Dengan *track record* kami selama ini, kami berharap berbagai pihak dapat mendukung proses konsolidasi internal yang kami lakukan. Sikap semacam itu bagi kami sudah cukup membantu. Kami ingin berkonsentrasi melakukan kaderisasi, revitalisasi nilai-nilai tradisi, distribusi kader, dan memperkuat kemandirian.

Moderat dan Toleran

Saya selalu berpesan, saat mengunjungi sahabat-sahabat Ansor dan Banser di daerah, tentang sikap moderat dan toleran. Indonesia ini dimerdekakan oleh semua kelompok agama dan semua kelompok etnis. Maka tidak boleh satu kelompok agama atau etnik merasa paling memiliki Indonesia. Tidak ada Indonesia kalau tidak ada Islam, Kristen dan seterusnya. Tidak ada Indonesia kalau tidak ada masyarakat Jawa, Sunda, Sumatra, dan seterusnya. Indonesia ini milik bersama dan kita harus rawat bersama-sama pula.

Kita ini sama, sama Indonesia-nya. Kita ini sama bahasanya, Bahasa Indonesia. Lagu kebangsaan kita sama, lagu Indonesia Raya. Bendera kita ini sama, Merah Putih. Kita sama terlahir di tanah Indonesia, sama minum air Indonesia, sama menghirup udara Indonesia, dan kita ini sama akan mati dan dikubur di bumi Indonesia. Sebagai bangsa Indonesia kita wajib bersyukur telah diwarisi Pancasila yang mengikat bangsa yang majemuk ini. Kemajemukan bangsa adalah kenyataan dan semua perbedaan adalah *sunnatullah*. Tugas kita sebagai hamba Allah dan kader bangsa adalah mencari persamaan dan titik temu agar bisa bekerja sama menghadapi tantangan masa depan dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan.

Lalu saya juga mengingatkan adanya kelompok-kelompok yang menjadikan ulama-ulama Timur Tengah itu sebagai rujukan utama, menafikan kiai dan ulama setempat. Para ulama Timur

Tengah yang dijadikan rujukan ini masih berpegangan pada fikih abad pertengahan yang tidak pernah diselaraskan dengan situasi kekinian. Inilah yang membuat kelompok-kelompok radikal ini dengan mudah menyalahkan amaliah warga NU, mencerca ulama-ulama NU. Padahal para kiai dan ulama NU adalah pewaris dakwah para wali yang paling berjasa mengislamkan Nusantara. Para kiai dan ulama pesantren kita ini begitu lentur beragama. Mereka berprinsip bahwa dakwah itu mengajak bukan mengejek. Dakwah itu dilakukan dengan ramah bukan dengan marah.

Banser: dalam Pusaran Populisme dan "Jebakan Batman"

Hairus Salim HS

Tulisan ini adalah sebuah refleksi mengenai peran Banser dalam tahun-tahun terakhir. Refleksi ini semacam usaha menengok dan membandingkan peran dan citra Banser beberapa tahun lalu dan kiprahnya sekarang ini. Apakah Banser masih benteng ulama dan nasionalisme Indonesia? Bagaimana ikhtiar menjadi benteng pelindung ulama dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini dijalankan?

Banser dan Tanggap Bencana

Dalam penutup buku *Kelompok Paramiliter NU* (LKiS, 2004) yang saya tulis hampir satu setengah dekade lalu, saya mengajukan harapan agar Banser kelak bisa berperan seperti Pandu dengan fungsi SAR (Search & Rescue). Harapan ini saya lontarkan karena melihat besarnya tenaga anak muda yang terserap dan terlibat di dalam kelompok ini. Hal ini kemudian dibarengi pula oleh tingginya sikap kesukarelaan dan kesetiaan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di bawah atau atas nama Banser. Kesukarelaan ini bisa dilihat dari kesediaan mengorbankan waktu produktif—yang seharusnya bisa digunakan untuk bekerja—untuk mengikuti dan terlibat di dalam kegiatan-kegiatan yang digelar Banser, baik di dalam lingkungan pesantren dan NU maupun di luarnya. Selanjutnya, kesediaan berkorban secara finansial dengan membeli sendiri baju seragam lengkap dan atribut-atributnya,

yang nilainya bisa mencapai tujuh ratus lima puluh ribuan hingga satu juta rupiah.[51] Sungguh ini kesukarelaan yang susah dipahami dari sudut pandang pragmatisme kehidupan modern.

Sementara itu di sisi lain, saya melihat waktu itu kegiatan-kegiatan Banser "hanya terbatas" menjaga dan mengatur, terutama dari segi lalu lintasnya dan mengawal para kiai atau tokoh-tokoh yang hadir di acara-acara di lingkungan pesantren dan NU. Di luar itu, diakui atau tidak, beberapa anggota Banser terlibat dalam kegiatan-kegiatan pengamanan. Sungguh eman-eman kalau hanya sebatas itu.

Di sisi lain lagi, kenyataan yang tak bisa dibantah bahwa Indonesia, menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Strategi Internasional Pengurangan Risiko Bencana (UN-ISDR) merupakan kawasan yang paling rawan bencana. Tingginya posisi Indonesia ini dihitung dari besarnya jumlah manusia yang terancam risiko kehilangan nyawa bila bencana alam terjadi.

Indonesia menduduki peringkat tertinggi untuk ancaman bahaya tsunami, tanah longsor, dan gunung berapi. Selain itu, Indonesia juga menduduki peringkat tiga untuk ancaman gempa serta duduk di urutan enam untuk ancaman bencana banjir.[52]

Dengan ancaman seperti itu, betapa besar kebutuhan kita akan para sukarelawan yang terlatih dan berpengalaman dalam masa tanggap darurat bencana. Memang ada Tagana (Taruna Tanggap Bencana), suatu kelompok anak muda yang diinisiasi dan dibina oleh pemerintah di bawah koordinasi Departemen Sosial dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di daerah-

---

51 Perbincangan dengan seorang anggota Banser, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, akhir November 2017.

52 Lih. *http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2011/08/110810_indonesia_tsunami.*

daerah. Namun kelompok ini diakui sangat terbatas, tidak kontinu dan anggotanya sering berganti. Banser, saya kira, bisa mengisi kekurangan ini, karena mereka memiliki soliditas yang kuat dan selalu aktif. Mereka bukan muncul musiman. Tentu saja peran ini bisa mereka mainkan jika mereka diberikan pengetahuan dan keterampilan, dan pelatihan yang memadai.

Kenyataannya Banser tidak diberdayakan ke arah ini. Mereka, sejauh yang saya ketahui, tidak pernah mengikuti pelatihan-pelatihan semacam tanggap darurat bencana. Oleh karena itu, sebagai contoh, ketika terjadi banjir di Jakarta, Banser sebenarnya ingin ikut membantu, tetapi bagaimana mau membantu kalau anggota Bansernya sendiri tidak bisa berenang atau terampil menjalankan pelampung, dan paling esensial tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar bagaimana membantu dan menangani korban banjir. Dengan nada bergurau, seorang pimpinan Ansor bilang, "Jangan-jangan nanti orang malah repot ngurusin anggota Banser."

Ini adalah gambaran Banser sekitar satu setengah dekade yang lalu. Kini Banser telah berkembang, dan salah satu perkembangannya adalah bisa memerankan diri seperti SAR atau Tagana, sebagaimana harapan saya, dan mungkin harapan banyak orang, beberapa tahun lalu. Bekerja sama dengan Departemen Sosial, Banser di beberapa daerah menjadi Sahabat Tagana. Belakangan bahkan mereka membentuk satuan khusus sendiri yang disebut Banser Tanggap Bencana (Bagana).[53] Terjun ke

53 Satuan ini sendiri merupakan salah satu dari enam (6) satuan yang dimiliki Banser, untuk memenuhi misinya sebagai organisasi yang bersifat keagamaan, kemanusiaan, sosial kemasyarakatan, dan bela negara sebagaimana termaktub dalam Peraturan Organisasi (PO) Pasal 23. Lima satuan khusus lainnya adalah Densus 99 Asmaul Husna, Banser Relawan Kebakaran (Balakar), Banser Relawan Lalu lintas (Balantas), Banser. Kesehatan (Banser Husada), Banser Maritim (Baritim), dan Banser Protokoler. Informasi ini saya peroleh ketika diundang mengisi acara Kursus Banser Lanjutan (Susbalan) yang digelar oleh Satkorwil Banser Jateng di Pondok Pancasila Sakti, Klaten, 27-30 Desember 2016. Yang menarik kursus ini diikuti oleh mahasiswa, sarjana *freshgraduate*, dan dosen muda.

daerah yang terdampak bencana kini menjadi bagian dari kegiatan penting Banser. Sebagai contoh, ketika terjadi bencana letusan Gunung Merapi tahun 2010, saya menyaksikan bagaimana Banser menjadi unsur penting dalam kegiatan evakuasi, rekonstruksi dan penyaluran bantuan. Bekerja sama dengan unsur-unsur masyarakat lain—entah itu dari TNI, PMII, Departemen Sosial, gereja, dan lain-lain, Banser mendirikan posko bersama.[54]

Ini adalah loncatan penting dalam perkembangan Banser. Bisa dibayangkan betapa besar sumbangan kelompok ini, jika kecenderungan ini meningkat dan meluas, serta konsisten dijalankan. Dengan jumlah anggota ratusan ribu, Banser bisa jadi merupakan kelompok relawan terbesar di Indonesia, bahkan di dunia.[55]

Mengimbangi Stereotip

Salah satu citra Banser di kalangan masyarakat umum ialah bahwa pekerjaan utama Banser adalah menjaga gereja. Citra ini bisa bersifat positif dan bisa negatif. Ia bersifat positif terutama di kalangan mereka yang bisa mengapresiasi dan menghargai makna keterlibatan Banser dalam pengamanan gereja, khususnya pada saat perayaan Natal. Terutama hal ini dalam pengertian psikologis, di satu pihak, kehadiran Banser menunjukkan bahwa Islam dan umat Muslim sama sekali tidak bermusuhan dengan siapa pun,

---

54 Jika kita buka Google dan *search* dengan kata kunci "Banser dan bencana" akan munul di sana deretan laporan bagaimana Banser banyak terlibat dalam penanganan bencana, terutama dalam tiga tahun terakhir ini.

55 Menurut Hasyim As'ari, Ketua Satkornas Banser Jawa Tengah, di Jawa Tengah jumlah anggota Banser yang terlatih, artinya pernah mengikuti setidaknya Diklatsar dan berseragam, minimal kaos oblong berlambang Banser, berjumlah kurang lebih 150.000. Kecenderungan ini tampaknya terus meningkat. Misal menurut seorang ketua Ansor Jawa Barat, Diklatsar Banser Sukabumi minggu lalu diikuti sampai 716 peserta. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Ansor dan Banser juga sangat berkembang di luar Jawa yang selama ini sepi dari kehadiran Banser.

termasuk umat Kristen. Bahkan umat Islam membuka pintu persaudaraan dan kerja sama. Hal ini ditunjukkan dengan kesediaan secara sukarela ikut membantu pengamanan maupun pengaturan lalu lintas di berbagai kota hampir setiap tahun ketika perayaan Natal berlangsung. Di pihak lain, kehadiran ini meyakinkan kalangan Kristen/Katolik bahwa Islam dan umat Islam cinta damai dan sama sekali tidak memusuhi mereka. Teroris hanya segelintir orang putus asa yang mengatasnamakan Islam, tapi mereka bukan Muslim yang sesungguhnya.

Citra yang bersifat negatif muncul terutama di kalangan segelintir umat Islam sendiri, khususnya dari mereka yang berpandangan tertutup dan eksklusif. Mereka mempertanyakan kehadiran Banser untuk ikut dalam pengamanan gereja. Mereka menganggap hal ini terlalu berlebihan karena Kristen/Katolik dianggap sebagai pesaing atau lawan. Lebih lanjut mereka mengembangkan tuduhan, ejekan dan bahkan cacian bahwa Banser antek Kristen, agen liberal, dan lain-lain dan hanya ingin mendapatkan bayaran uang untuk kegiatannya tersebut. Tuduhan ini dikembangkan dan disebarkan secara luas–sebagaimana kita lihat bertebaran di media sosial—sehingga tumbuh menjadi stereotipe. Stereotipe ini terutama menimbulkan kesan buruk pada Banser. Stereotip ini sangat tidak sehat, di satu sisi bagi Banser dan di sisi lain, bagi kalangan umat Kristen/Katolik sendiri.

Sebagai contoh pada pertengahan Oktober 2017 lalu beredar hoaks di media sosial. "Banser Mengangkat Salib" dengan sebuah foto seorang berpakaian tentara mengangkat kayu salib dalam sebuah acara di luar ruang. Hoaks, seperti biasa memainkan sikap antara mengecam dan memuji, prihatin dan salut. Dalam hoaks ini Banser didoakan agar segera diberi hidayah. "Demi nasi bungkus, kami rela mengangkat salib, menjaga gereja, ikut dibaptis, menggadaikan akidah. Karena kami *lapaaar*." Demikian narasinya.

Sungguh ini fitnah yang kejam dan tidak bertanggung jawab. Faktanya, gambar tersebut sebenarnya berasal dari acara parade paskah 2015 di Solo. Dalam parade itu ada warga Katolik yang kebetulan anggota TNI dari Yonif 413 ikut serta dengan mengangkat salib. Namun foto ini kemudian dimanipulasi dan dijadikan alat untuk menyerang Banser dan NU secara umum.

Serangan hoaks seperti ini masif dan gencar dalam 2-3 tahun terakhir ini. Dalam bagian selanjutnya akan ditunjukkan bahwa hal ini menunjukkan gejala transformasi dan kontestasi politik yang lebih dan dalam karena perkembangan keagamaan dan politik akhir-akhir ini.

Keterlibatan Banser dalam kegiatan penanggulangan bencana, saya kira, dalam banyak hal bisa melumerkan stereotipe ini. Banser benar-benar adalah "barisan serbaguna". Jika penanggulangan bencana menjadi kegiatan yang permanen dan terus-menerus, maka menjaga dan ikut mengamankan gereja adalah kegiatan *ad hoc* saja. Jika sudah tenang dan ada jaminan pasti bahwa tidak akan ada lagi ancaman bom bagi gereja, tentu saja kegiatan ini tidak diperlukan lagi.

Revitalisasi Agama dan Populisme Keagamaan

Untuk mengetahui keberadaan NU dan Banser khususnya, salah satu hal yang penting ditelusuri adalah peta dan perkembangan baru dalam kehidupan sosial-keagamaan kontemporer. Dalam sebuah tulisan, Gary D. Bouma (2008) menyebut adanya gejala "revitalisasi agama." Gejala ini, menurutnya ditandai oleh:

1. meningkatnya intensitas komitmen pada hal-hal yang bersifat keagamaan;
2. makin pentingnya identitas keagamaan;
3. kemunculan kelompok-kelompok keagamaan baru, yang berada di luar dan melawan kelompok keagamaan arus utama yang sebelumnya ada;

4. penggunaan kembali politik di dalam agama, atau agama di dalam politik, secara vulgar dan terbuka;
5. munculnya lagi kepercayaan bahwa agama adalah solusi yang mengatasi ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan banyak keliru dalam memahami gejala alam; dan
6. penghukuman yang keras terhadap kecenderungan pola-pola seks yang dianggap menyimpang dari hukum.

Revitalisasi tidak hanya terjadi di lingkungan Islam saja, tapi merupakan gejala global.[56]

Dalam konteks Islam Indonesia, gejala-gejala seperti yang ditunjukkan di atas, telah menjadi pemandangan sosial-politik sehari-hari. Besarnya jumlah orang yang hendak menunaikan ibadah haji hingga harus menunggu puluhan tahun untuk berangkat, peningkatan jumlah rumah ibadah dan banyaknya kegiatan keagamaan, untuk menyebut beberapa jelas menunjukkan gejala revitalisasi ini. Sementara itu, dari orang biasa hingga pejabat tinggi negara tidak sungkan-sungkan lagi—tidak seperti pada masa lalu—menyatakan identitas keagamaannya. Namun gejala paling menonjol adalah kemunculan kelompok-kelompok keagamaan baru, termasuk di lingkungan Islam Indonesia. Jika pada tahun 1950-an hingga 1980-an, hanya ada NU dan Muhammadiyah, kini telah banyak muncul kelompok-kelompok keagamaan, mulai yang berbasis kelompok kecil di kampus dan kampung hingga yang berwujud organisasi atau partai politik dengan lingkup nasional bahkan internasional. Sebagai ilustrasi sederhana, jika pada tahun 1950-an, atau tahun 1970-an, jika ada suatu kebijakan politik yang secara khusus menyangkut atau menyentuh kepentingan umat Islam, presiden secara langsung—atau melalui menteri agama,

---

56 Gary D. Bouma, "The challenge of Religous Revitalization and Religious Diversity to Social Cohesion in Secular Societies," dalam Bryan S Turner (ed.), *Religous Diversity and Civil Societies: A Comparative Analysis*, The Bardwell Press, Oford, 2008.

mungkin hanya cukup menelpon atau mengundang Ketua PBNU atau Ketua Umum Muhammadiyah, atau bahkan cukup MUI saja. Tapi sekarang hal demikian tidak cukup. Petanya telah berubah dan pelakunya lebih banyak dan kompleks.

Revitalisasi keagamaan jelas menimbulkan kompetisi dan konflik keagamaan, baik antar maupun inter agama. Kompetisi mengakui keabsahan eksistensi kelompok lain, menghormati dan menerima prinsip hak kebebasan memilih. Di dalam kompetisi, orang masih bisa saling belajar satu sama lain mengenai posisi mereka dan pendekatan iman mereka sehingga bisa meningkatkan komitmen dan arti penting iman. Berbeda dengan itu, konflik menolak asumsi ini, dan sebaliknya terus berupaya mengatasi, mengalahkan, atau mengonversi lawan dan pesaingnya ke dalam kelompoknya.

Jelaslah bahwa jika masih pada tataran kompetisi, hubungan satu sama lain masih sehat adanya. Tetapi jika kompetisi itu meningkat menjadi konflik, maka itu berarti alarm tanda bahaya. Yang kedua ini terjadi ketika orang terus memaksakan pandangannya dan agama makin dipakai dan dipergunakan untuk tujuan-tujuan politik.

Di dunia barat Eropa, revitalisasi ini menimbulkan goncangan dalam beberapa konsensus yang selama ini diyakini, misal soal pemisahan agama dan negara, privatisasi agama, pengeluaran pelajaran agama dari sekolah, dan penghukuman kriminal terhadap *hate speech*, yang dikenal sebagai kerangka Westphalian, yang menjadi basis dari konsensus demokrasi liberal.[57] Berbeda dengan itu, kita di Indonesia secara historis tidak pernah menerapkan secara kaku larangan mengekspresikan kegiatan agama di ruang publik, memisahkan secara tegas agama dan negara dan menge-

57 Bryan S Turner, "Religious Diversity and Liberal concensus," dalam Bryan S Turner (ed.), *Religous Diversity and civil Societies: A comparative Analysis*, The Bardwell Press, Oford, 2008.

luarkan pelajaran agama dari sekolah umum. Dalam arti itu, kita telah menjalankan suatu pola kompromi yang tak menyisihkan, dan bahkan tetap menganggap penting, kelompok agama dari dan dalam proses berbangsa dan bernegara.

Namun masalah *pertama* muncul, berkaitan dengan pensikapan terhadap meluasnya gejala ujaran kebencian. Selama ini kita tidak memiliki regulasi khusus mengenai hal ini. Selain itu, dalam sejarah yang panjang, kita tidak pernah mengalami konflik keagamaan, di mana ujaran kebencian menjadi bagian penting di dalamnya. Artinya, ujaran kebencian merupakan fenomena baru sekaligus tantangan baru dalam kehidupan sosial keagamaan kita. Masalah yang *kedua*, adanya kelompok yang ingin mengganti dasar dan bentuk negara yang telah menjadi konsensus dan konstitusi.

Penjelasan lain terhadap gejala ini, selain adanya "revitalisasi agama", adalah teori tentang kebangkitan populisme atau politik populis. Populisme adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan eskpresi perlawanan kalangan kelas bawah dan menengah terhadap tatanan ekonomi politik yang dianggap tidak adil dan menguntungkan kelompok elit yang biasanya diidentifikasi berdasarkan sistem nilai atau ideologi tertentu. Populisme bisa berasal dari orientasi politik kiri atau kanan dan bisa ditemukan dalam berbagai konteks. Di Barat, populisme belakangan diasosiasikan dengan kebijakan atau aspirasi anti-imigran yang dilihat sebagai perlawanan kelas bawah-menengah yang menyalahkan kelompok imigran tertentu atas tekanan sosial ekonomi yang mereka hadapi. Sementara di Indonesia, populisme menggunakan agama, dalam hal ini Islam. Karena itulah disebut sebagai populisme Islam.

Dalam konteks dunia Muslim, Verdi Hadiz melihat populisme Islam sebagai perlawanan kelompok kelas menengah Muslim terhadap kolonialisme Barat yang meminggirkan peran ekonomi politik umat Islam. Populisme Islam bukan hanya gerakan kelas bawah marjinal, tetapi juga dipimpin oleh kalangan profesional dan terdidik yang menuntut "reorganisasi kekuasaan agar lebih

berpihak kepada umat." Kalangan populis Islam, menurut Hadiz, sebenarnya tidak sedang melawan globalisasi ekonomi dan mempromosikan sistem ekonomi politik alternatif, meskipun mereka menggunakan slogan-slogan perlawanan terhadap Barat dan liberalisme; sebaliknya mereka berusaha mendapatkan kendali yang lebih besar atas sumber daya tanpa menciptakan sistem yang sepenuhnya baru.

Menurut Hadiz, populisme Islam baru mempunyai tujuan untuk mewujudkan sebuah negara yang dipimpin oleh orang-orang lurus yang berpihak kepada umat. Bukan berarti ini mengharuskan berdirinya negara Islam, meski tuntutan seperti ini biasanya disuarakan oleh mereka tidak cukup kuat untuk mendapatkan posisi dalam mekanisme politik yang formal. Sering kali kalangan Populisme Islam Baru menghendaki negara dan masyarakat kapitalis yang bisa melakukan redistribusi sumber daya secara lebih adil. Dengan penjelasan di atas, Hadiz menarik analisa tentang gerakan Islam politik menjauh dari argumen tentang benturan antar peradaban dan ekstremisme keagamaan yang ia anggap tidak produktif. Menurutnya, populisme Islam lebih banyak terkait dengan isu-isu profan seperti tuntutan redistribusi atas sumber daya ekonomi dan kekuasaan.[58]

Apakah revitalisasi ataupun populisme? keduanya dalam gerakannya memunculkan narasi pertentangan atau antagonisme antara dua entitas yang berlawanan secara diametral seperti pribumi versus pendatang, Muslim versus kafir, Muslim garis lurus dan Muslim menyimpang, dan lain-lain. Dalam konteks perkembangan-perkembangan baru inilah, eksistensi Banser penting dilihat karena eksistensinya sebagai benteng ulama dan pendukung NKRI menjadi penting.

---

58 Muhammad Icbal Ahnaf dan Hairus Salim. *Krisis Keistimewaan: Kekerasan terhadap Minoritas di Yogyakarta*, RS UGM, Yogyakarta, 2017. Baca juga Vedy R. Hadiz, *Islamic Populisme in Indonesia and Middle East*, Cambridge University, 2008.

Dalam "Jebakan Batman"

Pada Sabtu, 4 November 2017 yang lalu, di masjid Manarul Islam, Bangil, Pasuruan, akan digelar pengajian dengan penceramah Felix Siauw, seorang mualaf yang kini tenar sebagai da'i dan dikenal pula sebagai pendukung Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), sebuah ormas yang mengusung pendirian khilafah. Namun pengajian itu batal, karena Felix Siauw "pulang" menjelang dimulai. Dalam versi Felix Siauw yang beredar, ia menyatakan batal mengisi pengajian karena diusir oleh Banser.

Sementara itu, menurut versi Banser, pembubaran pengajian Felix Siauw terpaksa dilakukan karena yang bersangkutan tidak menyepakati tiga poin yang diajukan Barisan Serbaguna (Banser). Tiga poin itu ialah, *pertama*, Felix, mau mengakui Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Kedua*, tidak mendakwahkan konsep khilafah dalam pengajian tersebut. *Ketiga*,[59] bersedia meninggalkan HTI yang telah dibubarkan pemerintah.

Seminggu setelah itu, di daerah Jawa Barat, tepatnya di Garut, Pengurus Cabang NU setempat mengirimkan surat "keberatan kehadiran" Ustaz Bachtiar Nasir dan K.H. Ahmad Shabri Lubis yang ditujukan kepada Ketua DKM Masjid Agung Garut dalam rencana Tablig Akbar pada Sabtu 11 November 2017 di alun-alun Garut. Surat bertanggal 5 November itu mengajukan alasan karena kedua da'i tersebut"...selalu memberikan tausiyah yang tidak menyejukkan, bahkan cenderung melukai perasaan sebagian warga Indonesia dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat." Dalam bagian selanjutnya ditulis, kalau Bachtiar Nasir tetap diizinkan hadir dan menyampaikan tausiyah di acara tersebut, maka "dikhawatirkan ada gerakan massa penolakan yang membuat situasi daerah tidak kondusif," demikian isi surat resmi dengan kop Pengurus Cabang Nahdatul Ulama Kabupaten Garut.

---

59 Lihat *https://nasional.tempo.co/read/1031633/kronologi-pembubaran-ceramah-felix-siauw-di-bangil-versi-ansor*. Untuk Versi Felix Siauw bisa dicari di Google.

Kemudian Markas Wilayah – Laskar Pembela Islam Kabupaten Cirebon, sehari berikutnya, 6 November 2017 mengirimkan "surat pernyataan sikap" menolak surat keberatan Cabang NU Garut yang menolak kehadiran Bachtiar Nasir dalam tablig akbar tersebut. Penolakan abang NU Garut itu, menurut mereka melanggar "Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 22 UU HAM. Di dalam surat jika dikemukakan jika NU Cabang Garut tetap akan mengerahkan massa maka akan terjadi pertumpahan darah. Selain itu, mereka akan siap mengawal tablig akbar tersebut.[60]

Surat pernyataan ini seperti sebuah tantangan terbuka kepada NU dan Banser khususnya, baik di wilayah Garut maupun Cirebon. Ketegangan pun segera meningkat, karena kemudian terjadi koordinasi, dan konsolidasi, serta eskalasi pengumpulan anggota Banser yang ingin membalas dengan langsung melakukan penyerangan terhadap markas FPI, baik di Garut maupun Cirebon. Untunglah, karena ada pertemuan-pertemuan yang menjembatani antara kedua belah pihak dan keikutsertaan MUI dan kepolisian, bentrok itu berhasil digagalkan.[61]

Dari rekaman di media sosial dan perbincangan dengan sejumlah kolega, saya melihat beberapa kalangan terpecah dalam memandang dua peristiwa ini. Sejumlah aktivis demokrasi dan HAM serta akademisi, misalnya berdasarkan pada prinsip demokrasi liberal yang memberikan jaminan kepada siapa pun untuk menyatakan pendapat dan ekspresi, termasuk dalam hal ini kebebasan beragama, mengecam sikap Banser ini. Menurut mereka, dengan sikap itu justru Banser mempraktikkan sikap tidak toleran. Bahkan lebih jauh, Banser dianggap melanggar dan melawan hukum karena mencegah orang untuk menjalankan prinsip dasar kebebasan.

---

60 Kedua surat ini beredar luas di media sosial.

61 Dalam media sosial beredar foto-foto pengumpulan anggota Banser lengkap dengan atribut dan persenjataan.

Kalangan lain, terutama kalangan minoritas agama dan budaya yang selama dan akhir-akhir ini sering merasa terancam dan menjadi korban dari narasi pertentangan dan permusuhan yang dikobarkan kalangan Muslim garis keras, atau khawatir dengan gagasan negara Islam dan khilafah yang dijajakan kelompok-kelompok ini, sangat mendukung dan merasa tersalurkan aspirasi mereka dengan sikap Banser ini. Bahkan tak jarang mereka memuji sikap ini dan berterima kasih atas ketegasan dan keberanian Banser ini.

Sementara itu kalangan nasionalis memandang lebih kritis. Di satu pihak, mereka menerima dan mendukung secara substansial latar keberatan dan penolakan Banser tersebut. Ini merupakan hak anggota Banser. Tetapi di pihak lain, mereka memandang keberatan dan penolakan itu cukup di tataran sikap, tidak lebih dan tidak kurang. Tindakan pelarangan dengan menekan dan mengancam sudah di luar rambu demokrasi dan HAM.

Yang paling menohok tentu saja ketidaksetujuan dan kecaman yang datang dari kalangan internal Muslim sendiri, terutama kalangan yang lebih konseratif, yang menuduh Banser anti-pengajian dan sama sekali tidak memiliki rasa persaudaraan Islam. Lebih menohok lagi, kritik dan kecaman ini mengalir dari kalangan internal NU sendiri.

Penutup

Revitalisasi agama dan kemunculan populisme keagamaan, mendorong kebangkitan Banser. Ini karena kehadiran kelompok-kelompok keagamaan baru yang banyak memunculkan ketegangan dan konflik karena penggunaan *hate speech* dan mempersoalkan lagi dasar dan bentuk negara yang telah menjadi konsensus. Banser sebagai benteng NU, yang merasa NKRI merupakan bentuk negara dengan Pancasila sebagai yang telah disepakati merasa terpanggil untuk membela.

Namun dalam interaksi dan arus perbincangan dan wacana ini, Banser seperti berada dalam "jebakan batman". Di satu pihak, sikap dan tindakan mereka dipuji sebagai "hero". Tetapi di pihak lain, mereka justru dituduh arogan, jumawa, dan—paling parah—melanggar hukum dan mempraktikkan intoleransi.

Tak ada yang meragukan sikap NU umumnya dan Banser khususnya dalam komitmen pada nasionalisme dan negara kesatuan, serta kesetiaan pada Pancasila sebagai dasar negara. Komitmen NU ini tidak ada kaitan dengan jauh-dekatnya hubungan mereka dengan kekuasaan. Di dalam atmosfir di mana NU secara politik-ekonomi tersingkir dan marjinal seperti pada masa Orde Baru, komitmen pada nasionalisme dan negara kesatuan, dan dasar negara ini tetap kukuh dan kuat. Komitmen itu tidak berubah dan tetap kukuh sekarang ini, di mana—menurut banyak pendapat—NU secara politik lebih dekat dengan kekuasaan.

Komitmen NU dan Banser ini dibentuk oleh pengalaman politik yang panjang di satu pihak dan keyakinan keagamaan yang mendasar di pihak lain. NU merasa ikut mendirikan, membangun dan memiliki negara-bangsa ini. Dua tokoh pendirinya, K.H. Hasyim As'ayri dan K.H. Wahab Chasbullah adalah pahlawan nasional. Artinya NU merasa bertanggung jawab mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tuntutan untuk memberikan jaminan kesejahteraan dan kemerdekaan setiap warganya. Di pihak lain, pandangan politik keagamaan NU telah sampai pada keyakinan bahwa negara adalah semata sarana untuk memenuhi cita-cita kesejahteraan dan kemerdekaan warga. Sebagai sarana ia harus bersifat efektif dan mengingat keragaman identitas kultural-keagamaan warga negara, maka ia tidak harus bersifat formal dengan bungkus keagamaan tertentu. Karena itu NU tak hendak dan tak tertarik mengembangkan ide negara Islam, ataupun khilafah (kemaharajaan Islam). Keduanya secara gagasan maupun kenyataan politik dianggap telah kehilangan relevansi.

Tidak aneh dengan pandangan di atas, NU—terutama melalui Bansernya—menjadi pembela gigih nasionalisme, Pancasila, dan NKRI. Karena itulah, beberapa kalangan bahkan ada yang menyebut NU sebagai kelompok "ultranasionalis", lantaran sikap dan tindakan mereka untuk mendukung dan membela nasionalisme, Pancasila, NKRI demikian tegas, lurus dan lempang, yang bahkan melebihi dan melampaui kelompok-kelompok yang dalam "politik aliran" di Indonesia disebut sebagai kalangan "nasionalis-abangan".

Kendati demikian, di sini juga titik masalahnya. Karena sikap NU—dan Bansernya ini—kadang dan lebih sering tidak didukung oleh pemerintah. Sebagai contoh, dalam kasus Garut tersebut, atas jaminan Kepolisian, tablig akbar tetap digelar. Ini adalah kompromi yang bisa diterima karena tablig akbar itu sendiri merupakan hak mereka. Tetapi tuntutan NU tidak diterima di bagian paling inti, yaitu menyangkut otoritas dan kewibawaan konstitusi dasar negara. Dalam acara pengajian itu pada kenyataannya, seperti dikhawatirkan NU, berkibar banyak bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), ormas yang bercita-cita mendirikan khilafah dan tidak mengakui Pancasila sebagai dasar negara. Contoh lain, sebulan sebelumnya, NU Cirebon juga mengajukan keberatan kepada bupati Cirebon karena mengundang Bachtiar Nasir memberikan ceramah dalam acara MTC, sebuah acara keagamaan yang dibiayai oleh negara. Bagi NU, bagaimana bisa aparat sipil negara (ASN) mengundang seorang tokoh yang terbukti banyak mengobarkan permusuhan dan kebencian dalam ceramah-ceramahnya. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 tentang Ormas sudah disahkan, tetapi tampaknya pemerintah, baik ASN maupun kepolisian, masih gamang dan ragu dalam menjalankannya.[62] Bahkan dalam banyak hal, mereka mengakomodasi dan memfasilitasi dengan biaya dan

62 Baca *http://nasional.kompas.com/read/2017/10/24/16342471/perppu-ormas-disahkan-pemerintah-kini-bisa-bubarkan-ormas.*

fasilitas negara kehadiran tokoh-tokoh yang berasal dari ormas yang anti-Pancasila atau yang kerap menyebarkan *hate-speech*.

Sekali lagi, tak ada yang meragukan komitmen NU dan Banser pada Pancasila, NKRI, dan nasionalisme, serta hukum. Namun strategi untuk menegakkan kesetiaan pada Pancasila, negara kesatuan, dan nasionalisme penting direnungkan lagi. Salah satunya adalah dengan menuntut ketegasan dan komitmen yang lebih jelas kepada pemerintah untuk berada di depan dalam perjuangan ini.

Persahabatan dengan NU, Penjaga NKRI

Aloys Budi Purnomo

Adalah sebuah kehormatan bagi saya, dilibatkan dalam proses refleksi penulisan buku terkait dengan peranan Nahdlatul Ulama (NU) sebagai penjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk itu, pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Kedua, saya jadi ingat ketika mengikuti *Islamic Studies* dalam rangka studi Magister Teologi dengan Konsentrasi Teologi Kontekstual (tahun 1996-1998) di Fakultas Kepausan Teologi Wedhabakti Yogyakarta. Dengan bimbingan Prof. Dr. H Amin Abdullah, kala itu, saya membuat tulisan tentang peranan NU dalam konteks keagamaan dan kebangsaan dalam keberagaman (tulisan itu mendapat nilai A). Saat itulah, saya secara akademik, mengenal NU sebagai sebuah organisasi keagamaan yang sangat terbuka sejak awal mula pendiriannya dengan segala pergumulannya dan tarik-menarik antara warna agamis dan atau politis praktis. Acuannya adalah Khittah 1926, yang menjadi tahun kelahiran NU, tepatnya pada tanggal 31 Januari 1926. Ketiga, dalam perjalanan waktu, sebagai seorang Pastor Katolik, khususnya sebagai Imam Diosesan (Romo Projo) Keuskupan Agung Semarang, tiga belas tahun dari dua puluh satu tahun perjalanan imamat saya, saya mengalami pergaulan dan persahabatan intensif dan impresif dengan para ulama yang menjadi guru dan sahabatku, maupun rekan-rekan muda dari NU. Maka, berdasarkan dua hal terakhir tersebut, saya ingin memulai tulisan ini, bukan sebagai sebuah teori, melainkan sebagai sebuah *sharing* pengalaman bergaul intensif dan impresif dengan para guru dan sahabat dari kalangan NU dalam menjaga NKRI.

Kerangka tulisan ini saya bangun dalam tiga bingkai. *Pertama*, *sharing* pengalaman persahabatan intensif dan impresif dengan para sahabat NU, baik ulama maupun warga (santri) dan tokoh NU. *Kedua*, pemahaman saya tentang NU dan keunikannya. *Ketiga*, harapan-harapan masa depan berpangkal dari realitas dan pengalaman yang ada. Mohon maaf bila ada keterbatasan dan kekurangan dalam mengartikulasikan pengalaman tersebut melalui tulisan ini. Semoga bermanfaat dan menjadi berkat bagi umat dan masyarakat, terutama dalam rangka membangun peradaban kasih bagi masyarakat Indonesia yang bermartabat, sejahtera dan beriman, apa pun agamanya.

Persahabatan Intensif dan Impresif

Pergaulan persahabatan saya dengan NU terjadi melalui perjumpaan silaturahmi dengan para ulama-kiai, tokoh, warga (santri) dan rekan-rekan muda NU. Pengalaman itu dapat saya deskripsikan sebagai berikut. Deskripsi ini bukan sebuah imajinasi atau angan-angan mengawang di langit-langit suci, melainkan sebuah pengalaman nyata di bumi bulat (yang sesekali terasa berat karena bahkan juga harus berhadapan dengan saudara-saudaraku di "bumi datar"—meminjam istilah *kids zaman now*—yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari saya sebagai seorang Katolik, yang secara khusus mendapat panggilan sebagai seorang Romo Pastor.

Persahabatan dengan Gus Mus

Saya bersyukur boleh mengenal dan bersahabat dengan para guru saya. Izinkan kusebut pertama, guru dan sahabatku, K.H. Ahmad Mustofa Bisri atau akrab dipanggil Gus Mus. Sejak saya masih muda-remaja, Gus Mus sudah menjadi idola saya dalam hal seni dan sastra. Karya-karya beliau banyak saya baca ketika saya belajar di Seminari Menengah Mertoyudan, Magelang. Suatu hari, pada bulan Juli 2004, saya mendapat rahmat dan berkat berjumpa secara langsung dengan beliau di Rembang dalam rangka HUT

Paroki Rembang. Saya yang mengidolakan beliau mendapat rahmat dan berkat duduk berdampingan sebagai narasumber dalam sebuah seminar kebangsaan yang bertajuk peranan agama dalam pembangunan bangsa di Rembang. Saya sangat tergetar boleh merasakan energi kehidupan beliau dan ketokohan beliau sebagai ulama-kiai di kalangan NU, bahkan juga di tengah masyarakat luas di negeri ini. Hal itu menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagiku!

Di kemudian hari, perjumpaan berlanjut dalam berbagai kesempatan, baik dalam acara formal dialog kebangsaan (di auditorium RRI Semarang), dalam rangka pembacaan puisi *mbeling* (di auditorium UPGRIS), maupun di berbagai kesempatan lain (di Wisma Perdamaian dan di Klero), bahkan di rumah kediaman beliau, baik di saat suka maupun duka. Saya *sowan* ke pondok beliau di Rembang dalam keadaan duka, saat almarhumah Nyai Siti Fatimah wafat. Semalam-malaman hingga saat sahur (karena bertepatan dengan masa bulan Ramadan) dan subuh saya berjaga di dekat jenazah Nyai. Saya ditimbali dan sowan ke Rembang dalam keadaan suka, ketika Gus Mus ngundhuh mantu, setelah pernikahan si bungsu Ova, untuk *lek-lekan* cinta dalam sastra dan budaya. Karena saya tidak bisa mengikuti acara sastra dan budaya, maka saya sowan pagi harinya, berhubung malamnya, saya harus melayani umat dalam *lek-lekan* malam Paskah. Saya *sowan* beliau dalam rangka mengadu dan mohon pertimbangan serta dukungan, saat atas nama keutuhan ciptaan dan kelestarian lingkungan hidup, saya hendak menyapa para ibu yang berjuang tolak pabrik semen di Rembang. Sebelum ke lokasi para ibu tinggal di tenda-tenda darurat, saya *matur* Gus Mus dan *nyuwun pengestu*. Suatu hari, saya juga diminta kawan-kawan FKUB Jateng, Haji Taslim Sahlan dan Haji Abu Rokhmad serta Mas Iman Fadlilah untuk mengantar mereka *sowan* Gus Mus, berhubung tugas dari FKUB Jateng untuk mengantar surat dari Gubernur Ganjar Pranowo dan matur kepada Gus Mus untuk berkenan *rawuh* ke Semarang menjadi narasumber dalam rangka kebangsaan dan kerukunan. Kawan-

kawan para tokoh Muslim di FKUB itu "takut sendiri" sowan Gus Mus, dan memintaku untuk mengantar mereka. Sampai di pondok kediaman Gus Mus, mereka justru "ditegur" oleh Gus Mus, karena ngeret-eret saya untuk kepentingan itu, sebab Gus Mus lalu merasa tidak enak kalau harus menolak apalagi sampai ingkar janji oleh sebab mengatakan sanggup di depan seorang romo pastor. Secara humorik penuh sasmita, Gus Mus *ngendika*, "Romo itu *malati*... beda dengan gubernur... Saya mblenjani gubernur ndak apa-apa..., tapi mblenjani romo..., saya bisa *kuwalat*..." Begitu kurang lebih yang disampaikan Gus Mus saat itu. Haji Taslim (sekretaris FKUB Jateng), Haji Abu Rokhmad dan Mas Iman menjadi saksi semua itu, termasuk Gus Rizal dan Gus Wahyu, para menantu Gus Mus yang hadir di ruangan itu ketika itu. Sambil bercanda, Gus Mus menyentil sana-sini situasi sosial-kemasyarakatan kita, dan itu kutangkap sebagai sebuah pertanda sekaligus tekad beliau menjaga NKRI!



Salah satu kesempatan sowan Gus Mus di Rembang.
Sumber: arsip pribadi

Saya merasa terharu dan tersanjung, meski saya merasa tidak sepantasnya diperlakukan seperti itu, oleh Gus Mus, yang karya-karyanya banyak saya baca. Salah satu buku yang selalu saya baca yang merupakan karya beliau adalah *Membuka Pintu Langit*.© Setiap perjumpaan dengan Gus Mus selalu menghadirkan keteduhan,

kesejukan dan damai-sejahtera. Salah satu perjumpaan kami pernah dipotret oleh seorang wartawan, yang kemudian menjadi berita dan bahkan menjadi viral. Perjumpaan yang sebetulnya terjadi alamiah bagiku. Seperti biasanya, setiap kali berjumpa dengan beliau, saya selalu memeluk beliau dan bercipika-cipiki sebagai sahabat dalam keberagaman dan kebangsaan. Namun, sebagai seorang yang lebih muda dan yang mengidolakan beliau, saya selalu mencium tangan beliau, kendati pada awalnya, beliau tidak *kersa* (tidak mau). Adegan foto-foto proses pelukan, cipiki-cipika dan cium tangan itu menjadi berita dan viral.[63]



Sumber: arsip pribadi.

Bahkan, gara-gara itu, saya diminta untuk menjadi salah satu penyerta ketika Mata Najwa menjadikan beliau sebagai tokoh dalam "Panggung Gus Mus". Saya merasa sangat bahagia, bangga dan terharu, boleh menyertai beliau dalam acara tersebut, bahkan dengan mengiringi beliau membaca puisi "Sajak Atas Nama" dan saya mengiringi dengan launan saksofon saya perpaduan antara "Tamba Ati" dan "Kasih". Bahkan, ketika jadwal untuk ke acara Mata Najwa bersamaan dengan jadwal tahunan kami para imam membarui janji imamat kami bersama Uskup di Gereja Katedral; oleh Romo FX Sukendar Pr sebagai Administrator Diosesan, saya

63 Antara lain di *http://www.nu.or.id/post/read/67275/ketika-romo-katolik-mencium-tangan-gus-mus.*

diizinkan berangkat. Maka, jadilah, saya membarui janji imamat saya dalam acara "Panggung Gus Mus" di Mata Najwa, Metro TV, Jakarta.Ini pun menjadi pengalaman tak terlupakan bagiku.

Bersama Gus Mus, kami boleh mengalami kehadiran NU dalam menjaga NKRI. Beliau menjadi tokoh teladan yang rendah hati dalam menghayati kecintaannya pada negeri ini. Salah satu cara beliau menjaga NKRI sebagai tokoh dan ulama NU adalah melalui puisi-puisinya yang tajam, kritis, dan penuh makna membela kebenaran, memperjuangkan keadilan, dan mewujudkan damai-sejahtera dalam kehidupan. Itu pengalaman persahabatan intensif dan impresif dengan Gus Mus.

Persahabatan dengan Habib Luthfi

Ada pengalaman penting lainnya yang menampilkan persahabatan intensif dan impresif dengan tokoh ulama dari kalangan NU yang amat istimewa bagiku. Saya bersyukur mendapat rahmat boleh bersahat dengan guru saya, Maulana Al-Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya atau dikenal dengan sapaan Habib Luthfi. Suatu hari saya *sowan* ke pondok beliau di Pekalongan, pada tanggal 22 Februari 2012. Kala itu, saya bersama dengan sahabat saya Soleh Dahlan dan Agus Kimcong serta Pak Purnomo Yusgiantoro (yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan). Sejak itulah, persahabatan kami bersemi. Sesudah itu, beberapa kali kami saling jumpa dalam kesempatan acara keluarga Soleh Dahlan di Semarang. Setiap kali kami berjumpa, kami selalu saling berpelukan, bercipika-cipiki tanda persahabatan. Dan karena saya secara manusiawi berumur lebih muda dari beliau, maka saya selalu mencium tangan beliau juga sebagai tanda hormat, baik secara pribadi, maupun secara rohani. Perjumpaan-perjumpaan itu tidak pernah menjadi bahan berita. Baru dalam perjumpaan yang terjadi di Simpang Tugu Muda Semarang, dalam rangka Tausiyah Kebangsaan yang diselenggarakan oleh Makodam IV Diponegoro, perjumpaan itu menjadi berita bahkan menjadi viral di dunia

sosmed.[64]

Benar yang diberitakan, bahwa saya pribadi, sebagai Romo Pastor Ketua Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Keuskupan Agung Semarang selalu merasa adem dan ayem setiap kali berjumpa dengan beliau. Bagiku, perjumpaan dengan beliau adalah perjumpaan yang penuh barokah. Saya mengalami aura dan daya kekuatan Islam sebagai *rahmatan lil alamin*! Habib Luthfi juga secara terbuka dalam tausiyahnya, tanpa basa-basi, menyebut saya sebagai sahabat lama. Sebutan itu sudah diucapkan beberapa kali setiap kali kami saling berjumpa. Aura Islam sebagai *rahmatan lil alamin* kurasakan memancar dan berpendar menjadi cahaya yang menerangi kegelapan kehidupan berbangsa. Dan aura itu selalu dipancarkan dalam kelembutan yang tegas, ketegasan yang lembut dari seorang Habib Luthfi.



Perjumpaan Perdana tahun 2012.
Sumber: arsip pribadi.

Persahabatanku dengan Habib Luthfi menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan peranan NU dalam menjaga NKRI, justru

64 *http://regional.kompas.com/read/2017/08/15/17500151/ketika-seorang-pastor-memeluk-habib-; http://id.beritasatu.com/home/persahabatan-romo-budi-dan-habib-lutfi-bin-ali-bin-yahya/164056; http://www.tribunnews.com/regional/2017/08/15/persahabatan-seorang-pastor-dengan-habib-usai-tausiyah-kebangsaan-lalu-konser-bareng.*

karena ketokohan Habib Luthfi di kalangan *jam'iyyah* NU yang tergolong begitu lengkap baik dari sanad keilmuan maupun nasab keturunan. Dalam sebuah pengajian Harlah NU di Pekalongan, Habib Luthfi pernah mengatakan bahwa kakeknya yang bernama Habib Hasyim bin Yahya merupakan ulama, selain Mbah Kiai Kholil Bangkalan, yang dimintai restunya oleh K.H. Hasyim Asy'ari ketika hendak mendirikan NU.Karenanya, saya merasa harus dan wajib menyebut beliau bila mendeskripsikan pengalaman pergaulan persahabatanku dengan tokoh NU, apalagi dalam rangka menjaga NKRI.



Perjumpaan di tahun 2017.
Sumber: arsip pribadi.

Persahabatanku dengan Habib Luthfi kian masuk apalagi pada saat kami berkolaborasi memainkan musik. Beliau bermain keyboard. Saya memainkan saksofon. Menurut penegasan Habib Luthfi yang memiliki pengaruh besar dalam NU, musik menjadi simbol keberagaman yang harmonis, harmoni keberagaman.

Dengan jalur musik, lagu, kesenian dan kebudayaan, bersama Habib Luthfi, NU hadir dalam bentuk pencerahan, tausiyah, dan kegembiraan, nyanyian, untuk menjaga NKRI. Lagu yang beliau ciptakan, "Syiir Cinta Tanah Air" sangat bagus mengungkapkan visi dan misi itu. Tentang hal ini, masih akan kita cermati lebih detil pada bagian ketiga tulisan ini.



Duet Musik Habib Luthfi-Romo Budi
Sumber: arsip pribadi.

Berbagai Tokoh dan Sahabat NU

Selama tiga belas tahun saya bertugas di Semarang dan hampir sepuluh tahun sebagai Ketua Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Keuskupan Agung Semarang), saya banyak bergaul dan bersahabat dengan sejumlah tokoh NU, mulai dari mendiang K.H. Mahfud Ridwan (Pondok Pesantren Edi Mancoro, kini diteruskan oleh Gus Hanif), K.H. Muhammad Adnan (Ketua PWNU Jateng), K.H. Abdu Hapsin PhD (Ketua PWNU Jateng, pengganti Muhammad Adnan), Kiai Budi Hardjono (Pondok Pesantren Al-Islah, Tembalang), Prof Dr Mujahirin Tohir (FKUB Jateng), Gus Lukman (Pondok Pesantren Salafiyah Az Zuhri, Ketileng), Gus Ubaidillah Ahmad (Rembang), Gus Nuril (Sokotunggal), Gus Dianafi (Sukoharjo), Gus Jaz (Ponpes Pancasila Sakti Klaten), K.H. Zakoh (Ponpes Pandanaran Jl Kaliurang Yogya), Gus Yusuf (Tegalrejo Magelang), K.H. Muhaimin (Yogya), dan K.H. Munawir Abdul Fatah (Krapyak, Yogya). Itu bukan hanya untuk sekadar menyebut nama, melainkan mendeskripsikan pengalaman relasional yang

intensif dan impresif (mendalam dan mengesankan) dalam rangka merefleksikan peranan NU dalam menjaga NKRI bukan dalam ranah teori, melainkan praksis hidup sehari-hari.

Ada satu hal yang unik, yang kualami bersama Kiai Budi Harjono, pengasuh pondok pesantren Al-Islah Tembalang, Semarang. Persahabatan kami bahkan pernah dijadikan bahan film dokumenter oleh Kemendikbud Jakarta dalam rangka merajut persaudaraan sejati dan membangun kehidupan berbangsa yang damai. Dengan Kiai Budi, saya paling sering berjumpa dan bersama-sama dalam berbagai acara. Bahkan, saya beberapa kali sowan ke pondoknya, termasuk pula, saya belajar menari sufi atau tarian cinta di pondok beliau. Banyak santri dan penari sufi asuhannya bekerja sama dengan saya dalam berbagai kesempatan dalam rangka menjaga NKRI yang rukun, damai dan bersaudara di antara warga masyarakatnya kendati berbeda agama.

Selain bergaul dengan para ulama dan kiai yang bagiku sangat hebat dan berpengaruh, saya juga bersyukur boleh bersahabat secara intensif dan impresif dengan kawan-kawan muda NU. Saya bersahabat dengan Gus Zuhairi Misrawi yang kala itu dikenal sebagai intelektual muda NU di Jakarta. Bahkan di halaman xiii bukunya, *Alquran Kitab Toleransi, Inklusivisme, Pluralisme dan Multikulturalisme*[65], namaku pun disebut dengan ucapan terima kasih sebagai kelompok sahabat dari kalangan kristiani. Di Semarang, tokoh muda NU yang cukup penting, menjadi sahabatku sejak 2004, yakni Dr. Tedi Kholiludin, yang kukenal sejak masih mahasiswa di UIN (kala itu masih IAIN) Walisanga Semarang hingga beliau sudah bergelar doktor, berkeluarga dan dianugerahi satu putri. Masih banyak kawan-kawan muda NU yang dari UIN Walisanga yang kukenal dengan baik dan mereka mengenalku pula (semoga) dengan baik, misalnya. Khoirul Anwar, Ahmad Muqsith,

---

65 Zuhairi Misrawi, *Alquran Kitab Toleransi, Inklusivisme, Pluralisme dan Multikulturalisme, Penerbit Fitrah: Jakarta, 2007.*

Munif, Goffar yang menjadi aktivis bersama dalam menjaga keutuhan NKRI terutama di antara *kids zaman now*.

Bersama mereka ini, kami menyelenggarakan kegiatan bersama dalam rangka menjaga NKRI melalui jalur kesenian dan kebudayaan. Kami membentuk kelompok Panglima (Paguyuban Orang Muda Lintas Agama Semarang). Dari mereka dan kawan-kawan lainnya, terlahir pula komunitas merdeka yang bernama Pelita (Persaudaraan Lintas Agama), yang sebagian besar diprakarsai oleh kawan-kawan muda dari kalangan NU di Semarang.

Persahabatan dengan kawan-kawan muda NU bahkan membuat diriku pernah diundang menjadi salah satu narasumber dalam sebuah acara "Ngasor", yakni "Ngaji Bareng Ansor" di Jambu, Bedono. Mereka membangun kerukunan dan persaudaraan demi menjaga NKRI bersama para kiai sepuh dan warga masyarakat Jambu dan sekitarnya. Acara yang dibingkai dengan dialog dan dalam suasana seni dan sastra itu bertujuan untuk menjaga NKRI di tengah suasana panas di Jakarta yang dipenuhi ujaran kebencian gara-gara warna politik kekuasaan. Mereka langsung membuat langkah antisipatif dengan memperkuat bangunan kerukunan dan persaudaraan di tingkat akar rumput melalui acara "Ngasor" (Ngaji Bareng Ansor). Itu kami lakukan bukan dengan basa-basi melainkan dalam kesungguhan, sebab visinya adalah menjaga NKRI yang adalah harga mati bagi kita!

Persahabatan dengan Keluarga Gus Dur

Tentu, tanpa mengurangi rasa hormat, meski saya tempatkan di bagian akhir pada sub tema ini, persahabatan dengan keluarga mendiang K.H. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur selalu kusyukuri. Dalam beberapa kesempatan acara haul mendiang Gus Dur, keluarga Ciganjur *nimbali* saya untuk ikut serta di Ciganjur. Ibu Hj Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, bersama panitia Sahur dan Buka Keliling yang menjadi program beliau, memberi kepercayaan kepadaku untuk menjadi penyelenggara dan tuan rumah. Di Tanah

Mas, di Kebon Dalem dan di Pudak Payung Semarang, kualami persahabatan dengan Ibu Shinta Nuriyah Wahid sebagai Ibu Negara ke-4 saat mendiang Gus Dur menjadi Presiden RI. Beliau hadir melalui program sahur dan buka keliling dalam rangka menjaga NKRI dan kepedulian kepada kaum duafa, papa miskin. Tentu saja, sosok Ibu Shinta Nuriyah Wahid tidak bisa dicerabut dari komunitas NU, justru karena peranan Gus Dur dalam tubuh NU di masa hidupnya hingga bahkan setelah kematiannya.

Tanpa hasrat dan maksud untuk diingat dan dikenang, apalagi diberi ucapan terima kasih, saya sudah bersyukur boleh menginisiasi deklarasi Gerakan Humanisme Gus Dur (Gus Durian), sebuah komunitas merdeka yang bertekad mewarisi, menjaga, dan melanjutkan visi misi Gus Dur, dan itu saya lakukan 49 hari sesudah Gus Dur wafat. Itu terjadi di Taman Budaya Raden Saleh Semarang, bersama para tokoh lintas agama Jawa Tengah. Kala itu, tepatnya pada tanggal 17 Februari 2010. Dua foto yang saya cantumkan di sini, bersama dengan tokoh-tokoh yang berada di dalamnya, menjadi saksi bisu atas deklarasi tersebut, yang di kemudian hari sesudah itu, muncul berbagai gerakan Gusdurian yang diinisiasi oleh kaum muda dan mahasiswi-mahasiswa. Alhamdulillah! Syukur kepada Allah!





Sumber: arsip pribadi.

Itu menjadi sebentuk gerakan nyata untuk menghadirkan spirit Gus Dur dalam menjaga NKRI melalui berbagai aspeknya. Dan sekali lagi, sosok karisma Gus Dur tak bisa dipisahkan dari keberadaan NU. Meminjam penuturan Gus Mus, "Ada saatnya

nama besar Gus Dur melebihi NU atau katakanlah NU adalah Gus Dur dan Gus Dur adalah NU. Dalam *maqam* yang seperti itu, Gus Dur terlalu besar di NU..."[66]

Kebetulan Tuhan Yang Maha Esa menyelenggarakan bahwa saya boleh bekerja sama dalam menjaga NKRI bersama keluarga Gus Dur. Bersama Ibu Shinta Nuriyah Wahid, selain dalam rangka program beliau safari sahur dan buka keliling selama bulan Ramadan, kami juga bekerja sama menjaga NKRI melalui Kongres Persaudaraan Sejati. Kongres Persaudaraan Sejati untuk pertama kali kami selenggarakan. Kami di sini adalah Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Keuskupan Agung Semarang bersama komisi-komisi lain rumpun Dewan Karya Pastoral KAS. Kongres kami selenggarakan dalam tiga hari, melibatkan ribuan orang, dari anak-anak, remaja, orang muda dan dewasa dalam rangka menjaga NKRI yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pada kesempatan itu, Ibu Shinta kami undang untuk menjadi *keynote speaker* dengan para narasumber lintas agama (ada Buya Syafii Maarif, Bante Sri Pannavaro Mahatera, Mgr. Johannes Maria Pujasumarta, K.H. Abu Hapsin, Ph.D, Elga J. Sarapung, Gunritno). Kongres di Muntilan tanggal 25-27 Oktober 2014. Bersama Ibu Shinta, saya juga menjadi saksi peristiwa pemasangan sinci Gus Dur di Rasa Darma Semarang.

Selain bersama Ibu Shinta, saya bersyukur boleh berjuang bersama dengan para putri Gus Dur dalam berbagai kesempatan. Dengan Mbak Alisa Wahid, dalam beberapa kesempatan bersama membangun masa depan bangsa dengan kaum muda dan mahasiswa (di TBRS, UNDIP, dan di GMKA). Dengan Mbak Yenny pada kesempatan menjadi narasumber acara ASEACCU ke-23 di Unika Seogijapranata. Bersama Mbak Nita Wahid dalam kesempatan Surau Budaya di TBRS bersama Kang Idang Rasyidi.

---

66 K.H. A. Mustofa Bisri, *ibid.*, h. 116.

Dengan Mbak Inayah Wahid pada kesempatan peletakan sinci Gus Dur, pada kesempatan peresmian Langgar Tamba Ati di Karang Kletak, padepokan Romo GP Sindhunata, SJ. Melalui peristiwa-peristiwa kecil dan sederhana itu, saya melihat dan mengalami persahabatan dan kerja sama dalam menjaga NKRI. Kerja sama dengan mereka tak bisa dilepaskan dari roh dan spirit NU, justru karena kaitannya dengan mendiang Gus Dur yang oleh Gus Mus disebut identik sebangun dengan NU. Gur Dur adalah NU. NU adalah NU. Atau bahkan Gus Dur lebih besar dari NU. Justru karena itulah, maka pengalaman-pengalaman nyata itu selalu saya syukuri sebagai bagian dalam membangun peradaban kasih bagi masyarakat Indonesia yang sejahtera, bermatabat, dan beriman apa pun agamanya. Itu dilakukan bersama pribadi-pribadi yang menurut hemat saya tidak bisa dilepaskan dari NU.

Itulah deskripsi pengalaman. Pepatah mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang baik. Dari pengalaman itulah, saya belajar secara nyata, bukan melalui teori, melainkan dalam praksis, untuk membangun persahabatan dengan NU dalam rangka menjaga NKRI sebagai harga mati! Pengalaman itu berakar mendalam di jiwa, hati, pikiran dan seluruh hidupku yang tak terbantahkan dalam relasi dengan para tokoh, ulama, sahabat, dan rekan-rekan yang menjadi bagian integral dari NU. Persahabatan itu sedemikian intensif dan impresif untuk menjaga NKRI, bukan basa-basi, NKRI harga mati!

Jiwa Nasionalisme NU dalam "Empat Pilar" Kebangsaan

Setelah pada awalnya berkenalan secara akademik tentang NU, dan kemudian ditopang melalui pergaulan persahabatan intensif dan impresif, saya semakin mengenal betapa dalam NU terdapat jiwa dan semangat nasionalisme yang mendalam dan berakar, lalu menjadi pohon yang baik serta menghasilkan buah yang berguna bagi masyarakat luas. Itulah yang saya sebut dengan nasionalisme NU. Sejauh saya mengenal dan menangkap, dan saya bersyukur karenanya, jiwa nasionalisme NU terungkap dalam

sikap NU terhadap "empat pilar" kebangsaan, yakni Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945. Semua itu digumuli sejak awal mula berdirinya NU hingga saat ini dan kiranya akan terus diperjuangkan hingga masa mendatang. Hal-hal itulah yang hendak saya refleksikan pada bagian ini.

Saya sangat tertarik dan terkesan dengan yang dirumuskan dalam *Statuen Perkoempoelan Nahdlotoel 'Oelama, (1926: pasal 2 dan 3)*.Itu yang dikenal dengan Khittah 1926. Pada pasal 2 terdapat rumusan sebagai berikut, "*Adapoen maksoed perkoempulan ini jaitoe: Memegang tegoeh pada salah satoe dari mazhabnya Imam ampat, jaitoe Imam Moehammad bin Idris Asj-Sjafi'i, Imam Malik bin Anas, Imam Aboehanifah An-Noe'man, atau Imam Ahmad bin Hambal, dan mengerdjakan apa sadja jang mendjadikan kemaslahatan Agama Islam*"

Selanjutnya, dalam Khittah 1926 disebutkan pula upaya NU untuk: "*Memperhatikan hal-hal jang berhoeboengan dengan masdjid2, langgar2, dan pondok2, begitoe djuga dengan hal ahwalnja anak-anak jatim dan orang-orang jang fakir miskin. Mendirikan badan-badan oentoek memadjoekan oeroesan pertanian, perniagaan, dan peroesahaan, jang tiada dilarang oleh sjara` Agama Islam.*"

Sengaja saya mengutip apa adanya aslinya seturut ejaan ketika tekad itu dirumuskan pada tahun 1926. Menarik bahwa disebutkan dalam rumusan tersebut tentang urusan pertanian. Menurut Gus Mus, NU mewadahi yang sudah ada. Sebelum jam'iyah NU lahir pada tahun 1926, sudah ada komunitas atau jama'ah yang terdiri atas ulama dan para pengikut mereka. Pendiri mereka berbasis di desa-desa. Mereka adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan santri-santri seniornya yang dipelopori K.H. Abdul Wahab Hasbullah dan K.H. Bisri Sansuri.[67]

Berdasarkan rumusan pendirian NU pada tanggal 31 Januari 1926 tersebut, saya menangkap dan melihat bahwa berdirinya

---

67 K.H. A. Mustofa Bisri, *ibid*., h. 114-115.

NU tidak bisa dilepaskan dari tujuan membangun semangat nasionalisme bangsa yang sedang terjajah. Sebuah catatan menarik saya temukan; menjelang pembentukan NU, Kiai Abdul Halim bertanya kepada Kiai Wahab, "*Apakah rencana pembentukan organisasi ulama itu mengandung tujuan untuk menuntut kemerdekaan?*" Kiai Wahab menjawab dengan penuh isyarat,"*Tentu, itu syarat nomor satu. Umat Islam menuju ke jalan itu. Umat Islam tidak leluasa sebelum Negara kita merdeka*" Konon, Kiai Abdul Halim ragu dengan tujuan tersebut, lalu bertanya, "*Apakah usaha semacam ini bisa menuntut kemerdekaan?*" Dan Kiai Wahab pun berkata,"*Ini bisa menghancurkan bangunan perang. Kita jangan putus asa. Kita harus yakin tercapai negeri merdeka.*"[68]

Dialog tersebut dengan terang benderang memancarkan cahaya semangat dasar awal mula berdirinya NU yang didorong oleh semangat nasionalisme sejati. Jiwa dan semangat nasionalisme NU diungkapkan dan diwujudkan dengan cara membela tanah air, demi meraih kemerdekaan. Semangat nasionalisme NU tersebut diharapkan menjiwai dan mendarah daging dalam setiap warga NU. Proses pendarah dagingan semangat nasionalisme NU tersebut lantas mengalir dalam perilaku warga NU, baik secara personal maupun organisasional.

Terdapat sebelas sikap yang bisa menandai perilaku setiap warga NU terkait dengan semangat nasionalisme, yakni *pertama*, warga NU menjunjung tinggi nilai-nilai maupun norma-norma ajaran Islam. *Kedua*, mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. *Ketiga*, menjunjung tinggi sifat keikhlasan dan berkhidmah serta berjuang. *Keempat*, menjunjung tinggi persaudaraan *(al-ukhuwwah)*, persatuan *(al-ittihad)*, serta

---

68 Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*, PT. Duta Aksara Mulia, 2010, h. 3-4 sebagaimana dikutip oleh Ahmad Muntaha AM, *Sejarah, Sikap Kemasyarakatan, dan Pandangan NU tentang Pancasila dan NKRI* dalam *https://aswajamuda.com/pandangan-nu-pancasila-nkri*, 20/12/2014.

kasih mengasihi. *Kelima*, meluhurkan kemuliaan moral *(al-akhlaq al-karimah)*, dan menjunjung tinggi kejujuran dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. *Keenam*, menjunjung tinggi kesetiaan *(loyalitas)* kepada bangsa dan negara. *Ketujuh*, menjunjung tinggi nilai amal, kerja dan prestasi sebagai bagian dari ibadah kepada Allah SWT. *Kedelapan*, menjunjung tinggi ilmu-ilmu pengetahuan serta ahli-ahlinya. *Kesembilan*, selalu siap untuk menyesuaikan diri dengan setiap perubahan yang membawa kemaslahatan bagi manusia. *Kesepuluh*, menjunjung tinggi kepeloporan dalam usaha mendorong, memacu, dan mempercepat perkembangan masyarakatnya. *Kesebelas*, menjunjung tinggi kebersamaan di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.[69]

Di kemudian hari dan hingga saat ini dan sejauh saya mengalami, inilah yang menjadi harga mati bagi NU, yakni bahwa jiwa nasionalisme NU tampak sangat jelas dalam sikap dan pandangannya tentang Pancasila, *Bhinneka Tunggal Ika*, NKRI, dan UUD 1945. Bahkan secara kultur humorik – yang selama ini kukenal sangat lekat dengan NU – tekad itulah yang secara alamiah selaras dan sesuai dengan NU secara organisasional dalam PBNU. PBNU pun lantas menjadi sebuah akronim dari Pancasila, *Bhinneka Tunggal Ika*, NKRI, dan UUD 1945. Dan dalam *sense of humor* tingkat tinggi secara nasionalis tersebut, saya pun dalam beberapa kesempatan lalu bisa mengatakan dengan merdeka namun tetap dalam sikap hormat dan cinta, bahwa kendati saya ini romo pastor dari Gereja Katolik Roma, namun sesungguhnya, di Indonesia, saya pun warga PBNU, sebab saya pun bersama warga NU turut menjaga Pancasila, *Bhinneka Tunggal Ika*, NKRI dan UUD 1945. Selama ini, ketika saya mengatakan hal itu, para sahabat dan rekan dari NU langsung merespon dengan tawa bahkan bertepuk tangan, dan tak pernah menganggap saya menista mereka, sebab memang tak

---

69 Abdul Muchith Muzadi, *NU dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran; Refleksi 65 Th. Ikut NU,* Khalista: Surabaya, 2007, h. 25-26, sebagaimana juga dikutip oleh Ahmad Muntaha AM, *ibid*.

ada maksud sedikit pun untuk mengatakan hal itu dalam rangka penistaan melainkan sungguh-sungguh dalam rasa syukur dan sikap hormat dalam semangat persaudaraan sebagai warga bangsa Indonesia.

Sebagai seorang romo pastor Gereja Katolik Roma, saya sangat mengapresiasi sikap NU terhadap Pancasila yang sangat jelas, tegas, jernih dan bersih. Sikap itu diputuskan dalam Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Situbondo pada tahun 1983. Dalam keputusan tersebut diakui bahwa Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Republik Indonesia adalah prinsip fundamental namun Pancasila bukan agama, tidak dapat menggantikan agama, dan tidak dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama. Empat hal penting dinyatakan dalam keputusan tersebut bahwa, *pertama*, Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara menurut pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang menjiwai sila-sila yang lain mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam. *Kedua*, bagi Nahdlatul Ulama, Islam adalah aqidah dan syari'ah meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antarmanusia. *Ketiga*, penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dan upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan kewajiban agamanya. *Keempat*, sebagai konsekuensi dari sikap tersebut di atas, Nahdlatul Ulama berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni dan konsekuen oleh semua pihak.

NU menerima Pancasila secara definitif. Sebagaimana dinyatakan oleh K.H. Achmad Siddiq, Peletak Dasar Khitthah NU, *"Nahdlatul Ulama menerima Pancasila menurut bunyi dan makna yang terkandung dalam Undang-Undang 1945* (bil lafdhi wal ma'nal

murad), *dengan rasa tanggung jawab dan tawakkal kepada Allah.*"[70] Sejauh saya menangkap, pernyataan ini juga sekaligus menjadi suatu upaya untuk melanjutkan perjuangan yang sudah dirintis oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, kiai terbesar pada pertengahan abad ke-20 yang merintis, mendirikan dan mengaktifkan Jam'iyah Nahdlatul Ulama sebagai wadah perjuangan para pemimpin Islam tradisional sejak tahun 1926.

Justru dari beliaulah, semangat nasionalisme itu terus digelorakan dan digemakan. Tak heran bahwa K.H. Asyim Asy'ari ditetapkan sebagai pahlawan nasional, justru perjuangannya untuk bangsa ini agar merdeka dari belenggu penjajahan. Perjuangan beliau diteruskan oleh putranya, yakni K.H. Wahid Hasyim. Beliau pun amat terlibat dalam membidani kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). K.H. Wahid Hasyim juga terlibat intensif dalam merumuskan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan, kalimat awal Pembukaan UUD 1945, "Dengan rahmat Allah..." pun merupakan buah ketajaman visioner K.H. Wahid Hasyim agar bangsa ini selalu memperoleh rahmat dan berkah dari Allah.[71]

Karenanya, selain tampak dalam sikap dan pandangan terhadap Pancasila dan UUD 1945, jiwa dan semangat nasionalisme NU juga tampak dalam pandangan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bagi NU, NKRI adalah harga mati. NKRI adalah final, buah perjuangan seluruh penduduk Indonesia, termasuk umat Islam. Bagi NU, NKRI adalah negara yang sah menurut hukum Islam. Berdasarkan Resolusi Jihad 22 Oktober 1945, yang pernah diserukan oleh KH. Hasyim Asy'ari, mempertahankan dan

---

70 Pernyataan ini saya kutip dari Ahmad Muntaha AM, *ibid*. Ahmad Muntaha AM mengutip pernyataan itu dari Choirul Anam, *Pemikiran K.H. Achmad Siddiq tentang: Aqidah, Syari'ah dan Tasawuf, Khitthah NU 1926, Hubungan Agama dan Pancasila, Negara Kesatuan RI Bentuk Final, Watak Sosial Ahlussunnah, Seni dan Agama,* PT. Duta Aksara Mulia: Jakarta, 2010, h. 71.

71 Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren, Studi Pandangan Hidup Kiai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, LP3ES: Jakarta, 2015, h. 144-148.

menegakkan NKRI menurut hukum Agama Islam adalah wajib, termasuk sebagai satu kewajiban bagi tiap-tiap Muslim, dan *jihad fi sabilillah*.

Kebangsaan dan Kemanusiaan

Sejak awal mula, keberadaan NU, sebagai sebuah organisasi terbesar di Indonesia memiliki komitmen yang tinggi terhadap kebangsaan dan kemanusiaan. Baik dalam persahabatan intensif dan impresif maupun dalam memahami jejak keberadaan NU, saya menangkap betapa kepeduliaan NU terhadap kebangsaan dan kemanusiaan sangat tinggi itu. Menurutku, itulah bagian dari ekspresi atas jiwa nasionalisme NU. Dan lebih dari segalanya, NU berkomitmen untuk menjaga NKRI dalam aspek kebangsaan dan kemanusiaan.

Sampai di sini, saya jadi ingat tulisan Gus Mus yang berkisah tentang dialog beliau dengan Gus Dur. Kepada Gus Dur, Gus Mus berkata, "Mas Dur, dipikir-pikir NU di negeri ini kok seperti satpam saja. Kalau sedang genting baru diperluka; kalau tidak, *nganggur*." Pernyataan Gus Mus terhadap Gus Dur itu dimaksudkan untuk memancing suatu diskusi tentang apakah benar NU memang "dianggap hanya" atau justru NU-nya yang tidak siap dianggap lebih dari itu. Karenanya, dalam tulisan tersebut, Gus Mus mengangkat keluh-kesah bahwa di negeri ini, NU hanya dianggap seperti *slender*, dibutuhkan hanya di saat jalan rusak. Bila jalan sudah mulus, maka *slender* tidak boleh lewat. Atau, Gus Mus juga melukiskan NU ibarat daun pisang di saat hujan, bila hujan sudah reda, daun pun dicampakkan ke comberan. Atau, NU hanya tukang dorong mobil mogok; bila mobil sudah jalan, tukang dorong pun ditinggal. Itulah ungkapan-ungkapan yang diangkat oleh Gus Mus dalam tulisan tersebut. Lalu, Gus Mus pun bilang kepada Gus Dur dengan pernyataan yang saya kutip tadi. Gus Mus menunggu jawaban Gus Dur. Dan ternyata, jawabannya itu mengejutkan. Gus Mus pun menulis, "... jawaban Gus Dur justru membuat saya terkejut dan

blangkemen. Gus Dur menjawab dengan khasnya, "Apa jadi satpam kurang mulia?" Selanjutnya, Gus Mus menulis, "Dari *blangkemen*, saya pun merenung. Gus Dur waktu itu mungkin sedang menjadi sufi yang ingin mejang tentang sikap *qana'ah*, *nrima ing pandum*, atau mengajarkan keikhlasan." Dan dalam permenungannya, Gus Mus menulis: Ya, apa kurang mulia menjadi satpam untuk Negara dan bangsa sendiri?[72]

Dan buah permenungan Gus Mus sangat luar biasa bagiku. Beliau lalu menulis begini. Ketika Hadlratussyeikh Muhammad Hasyim Asy'ari, memfatwakan "jihad melawan dan mengusir penjajah hukumnya *fardhu 'ain*. Itu bukanlah sekadar "pengajian seorang kiai untuk santrinya. Jelas, itu adalah komando seorang patriot pejuang yang mencintai tanah airnya. Komando komandan "satpam" Indonesia. Komandan satpam hanya berpikir menjaga dan mengamankan. Bahkan, ketika mengomando, gaji pun tak terlintas dalam pikiran.[73]

Tulisan Gus Mus tersebut menginspirasi saya dan membantu saya dalam merefleksikan tema peranan NU sebagai penjaga NKRI. Sebagai penjaga NKRI, NU memiliki kewajiban menjaga dan mengamankan bangsa dan umat manusia di negeri ini. Dan itu adalah tugas yang mulia untuk kebangsaan dan kemanusiaan. Dalam arti tertentu, yang ditulis Gus Mus berdasarkan wejangan sufistik Gus Dur benar.

Belakangan ini, saya mengalami heroisme pengungkapan semangat kebangsaan dan kemanusiaan dari kawan-kawan NU melalui musik dan lagu yang berjudul *Syubbanul Wathan*. Lirik lagu tersebut selengkapnya sebagai berikut.

Ya Lal Wathon Ya Lal Wathon Ya Lal Wathon
Hubbul Wathon minal Iman

---

72 Lihat dan bandingkan K.H.A Mustofa Bisri, *ibid*, h. 118-119.
73 *Ibid*, h. 119.

Wala Takun minal Hirman
Inhadlu Alal Wathon
2x

Indonesia Biladi
Anta 'Unwanul Fakhoma
Kullu May Ya'tika Yauma
Thomihay Yalqo Himama

Pusaka Hati Wahai Tanah Airku
Cintaku dalam Imanku
Jangan Halangkan Nasibmu
Bangkitlah Hai Bangsaku
Indonesia Negriku
Engkau Panji Martabatku
Siapa Datang Mengancammu
Kan Binasa di bawah dulimu

Sejujurnya, setiap kali mendengar dan menyaksikan lagu itu dinyanyikan oleh kawan-kawan muda dari kalangan NU, bulu kuduk saya berdiri, merinding. Jiwa dan semangat nasionalisme berkobar membara dalam jiwa mereka untuk membela kehidupan berbangsa dan umat manusia, kebangsaan dan kemanusiaan. Apa pun perangkat yang dipergunakan untuk mengiringi lagu itu, menimbulkan semangat membara jiwa nasionalisme dalam kebangsaan dan kemanusiaan.

Selain lagu itu, ada lagu lain yang diciptakan dan dipopulerkan oleh Habib Luthfi, yakni lagu "Cinta Tanah Air". Setiap kali mendengar lagu itu dinyanyikan di antara puluhan ribu umat yang hadir bersama Habib Luthfi, saya selalu merinding. Selengkapnya, syair lagunya sebagai berikut.

Keindahan bumi pertiwi
Terhias untaian mutiara
Pembangun bangsa yang sejati
Harum namanya di Nusantara
Jejak-jejak para Pendahulu

Sejarah saksi kehidupannya
Tersurat tersirat masa lalu
Jadi bekal untuk penerusnya { 2x}

Merah putih melekat didada
Disinari pancaran imannya
Di manapun ia berada
Tetap cinta Indonesia

Pejuang agama kemerdekaan
Cermin untuk setiap pribadinya
Banyak sudah yang melupakan
Yang sehingga mudah digoyahkan { 2x}

Reff :
Wahai bangsaku yang kubanggakan
Relakah negerimu terpecah belah
Melenturnya kepercayaan
Fitnah melanda bagaikan wabah

Bangsa yang besar akan menghormati
Para Pemuka dan para Leluhurnya
Baginya tiada hidup tanpa arti
Amanah tertumpu masa depan dipundaknya
{Ref 2x}

Coda :
Merah putih melekat di dada
Disinari pancaran imannya
Di manapun Ia berada
Tetap cinta Indonesia

Kesatuan dan Persatuan
Benteng yang kokoh di Nusantara
Jati diri insan yang bertuhan
Menjaga keutuhan Negara
{Coda 3x}

Menurut saya, lagu ini amat dahsyat! Tak hanya jiwa dan semangat nasionalisme yang dikobarkan tetapi juga semangat kebangsaan dan kemanusiaan digemakan. Sekali saya ikut memainkan saksofon dalam lagu tersebut, ketika Habib Luthfi memberi Tausiyah Kebangsaan di Simpang Tugu Muda Semarang, membuat saya benar-benar terbawa oleh semangat nasionalisme yang digemakan oleh warga NU bersama para ulamanya untuk menjaga NKRI, membela kehidupan berbangsa dan menjunjung tinggi kemanusiaan.




Kolaborasi "Cinta Tanah Air" dan Saksofon.
Sumber: arsip pribadi.

Harapan: Saatnya Bangkit dan Bergerak

Mengakhiri tulisan ini, izinkan saya menyampaikan sebuah harapan. Satu saja: mari, inilah saatnya bangkit dan bergerak! Itulah juga yang sudah dilakukan kawan-kawan muda NU baik melalui Ansor maupun Bansernya. Nama Nahdlatul Ulama (NU) berarti kebangkitan ulama. Cita-cita itulah yang melandasi berdirinya NU pada tanggal 31 Januari 1926. Sesudah perjalanan yang panjang, menurut hemat saya, inilah saatnya bangkit dan bergerak lebih maju lagi, dalam menjaga NKRI dengan segala aspek yuridisnya, baik terkait dengan Pancasila, UUD 1945 maupun Bhinneka Tunggal Ika. Saat ini, bangsa kita sedang dilanda penyakit sosial yang berbasis rasa benci dan dendam antarsesama, yang sering kali juga ditandai oleh sentimen keagamaan, baik secara internal maupun secara eksternal. Agama menjadi alat untuk memecah belah demi meraih kekuasaan. Agama dipolitisir oleh segelintir oknum yang haus kekuasaan.

Saya pribadi mengalami perjuangan bersama kawan-kawan NU dalam menjaga NKRI tidaklah gampang. Satu pengalaman berhadapan dengan para saudara yang menolak kegiatan yang kami selenggarakan bersama Ibu Shinta Nuriyah Wahid menjadi contoh kecil yang nyata di depan mata. Sejujurnya, pada awalnya saya merasa heran. Peristiwa-peristiwa yang sama bersama Ibu Shinta selalu berjalan baik. Namun, di tempat tertentu, tiba-tiba saya mengalami tantangan. Rencana itu ditolak dan dimentahkan oleh segelintir orang yang di depan mata saya mengatakan, "Saya juga NU, tapi NU saya berbeda dengan Gus Dur dan Gus Mus!" Itu dikatakan kepada saya di suatu ruangan di Kantor Kabupaten Semarang beberapa saat sebelum saya menerangkan terkait rencana kehadiran Ibu Shinta Nuriyah Wahid dalam rangka safari Ramadan sahur dan buka keliling di berbagai tempat dan daerah dalam bingkai keberagaman. *Walhasil*, segelintir orang yang mengucapkan kalimat tadi menolak rencana itu, apa pun alasannya, pokoknya tidak boleh dilaksanakan! Tak sedikit saksi mata mendengar dan melihat suasana panas saat itu, yang sejujurnya, membuat saya menjadi sangat heran dan tidak mengerti. Kesimpulan sementara saya, ada oknum yang hendak merusak citra NU, dengan menolak kehadiran Ibu Shita Nuriyah Wahid dengan mengatasnamakan "NU".

Ternyata itu tak hanya menjadi pengalaman pertama saya menghadapi penolakan dalam hal rencana program Ibu Shinta Nuriyah Wahid. Setelah rencana itu saya pindahkan ke tempat lain, ternyata saya pun "dikejar" dan lagi, berhadapan dengan kelompok serupa, yang intinya: pokoknya menolak rencana kegiatan tersebut. Saat itu, saya sekali lagi merasa heran, bahwa hal itu terjadi.

Karena prinsip saya adalah kerja sama yang baik dengan Ibu Shinta Nuriyah Wahid serta Puan Amal Hayati, dan itu berarti pula berwarna NU, maka saya tetap mengedepankan semangat menjaga NKRI dan damai-sejahtera ketika menghadapi mereka. Saya tidak mau terjebak dalam upaya memperhadapkan mereka dengan sahabat-sahabat NU. Itulah sebabnya, setelah berkonsultasi

dengan berbagai pihak, saya mengembangkan prinsip damai sebagaimana diajarkan Gereja Katolik melalui Konsili Vatikan II. Apabila segala sesuatu tergantung dari padamu, hendaklah kamu menjadi pembawa damai.

Dalam konteks itu, saya harus mendamaikan panitia yang kecewa sebab ketika segala sesuatunya sudah siap, lalu harus batal, atau tidak berjalan sesuai rencana awal, pasti mereka kecewa. Saya juga harus menjaga kehendak baik yang diwartakan oleh Ibu Shinta Nuriyah Wahid dengan program tahunan kegiatan beliau. Di lain pihak, saya harus menjaga rasa perasaan mereka yang kontra dan melawan rencana itu, dengan sikap yang merasa diri paling benar.

Yang saya alami hanyalah peristiwa kecil. Namun, bila hal itu dibiarkan berlarut-larut, warna intoleran seperti itu akan menjadi besar. Saya merasa, kawan-kawan NU-lah yang memiliki potensi dan kompetensi untuk bangkit dan bergerak dalam melawan setiap bentuk tindakan intoleran seperti itu, apalagi, yang mereka lawan adalah sosok dan figur yang kita hormati dan kasihi bersama di tubuh NU. Kembali ke komitmen untuk bangkit dan bergerak untuk menjaga Pancasila, *Bhinneka Tunggal Ika*, NKRI, dan UUD 1945 menjadi sebentuk tantangan nyata saat ini dan di masa depan.

Dalam bangkit dan bergerak menatap masa depan menjaga NKRI dan segala aspek yuridisnya, kita bisa mengangkat kembali perjuangan humanisme NU yang sejak awal menjadi ciri khas dan keunikannya. Bagi saya, NU merupakan organisasi yang humanis religius dalam menjaga NKRI. Perjuangan humanisme religius menuntut pembaruan terus-menerus dan bekerja sama dengan semua pihak yang berkehendak baik, dan atau bahkan dengan siapa saja. Humanisme religius NU dapat dirintis melalui kerja sama demi memperjuangkan masyarakat kecil, lemah, miskin, tersingkir tertindas dan difabel (KLMTD), tanpa pandang perbedaan agama. Dalam hal ini, program tahunan yang dilakukan oleh Ibu Shinta Nuriyah Wahid bisa menjadi salah satu bentuk nyata yang ditopang oleh segenap warga NU.

Dalam penangkapan saya, sikap bangkit dan bergerak itulah yang saat ini dilakukan oleh Habib Luthfi melalui gerakan kebangsaan dengan media musik, lagu, dan pencerahan (tausiyah kebangsaan). Dari putranya, Habib Bidin, saya menangkap bahwa komitmen Habib Luthfi tentang hal ini sangat tinggi. Beliau bahkan menantang putranya, Habib Bidin, untuk melakukan hal itu setiap hari, berkeliling ke segenap penjuru negeri ini, melalui musik dan lagu, doa dan cinta, pencerahan dan budaya, menjaga NKRI.

Dalam diri Gus Mus dan Habib Luthfi, sekurang-kurangnya saya melihat, betapa dua sosok ulama penting di kalangan NU ini, memiliki kharisma untuk mempertemukan yang muda dan yang tua dengan gelora seni dan budaya. Saya selalu mengatakan, bahwa saat ini, strategi seni dan budaya menjadi media yang efektif dan efesien untuk bangkit dan bergerak membangun kehidupan yang srawung, yang terbuka, yang saling membangun demi terwujudnya peradaban kasih bagi masyarakat Indonesia yang sejahtera, bermartabat dan beriman, apa pun agamanya. Diteguhkan oleh para ulama senior, ditopang oleh para tokoh NU lainnya, dan disemarakkan oleh kalangan muda, maka visi misi NU dalam menjaga Pancasila, *Bhinneka Tunggal Ika*, NKRI dan UUD 1945 akan kian berdaya ubah dan membawa berkah bagi kehidupan bersama.

Demikian yang bisa saya sampaikan, sekali lagi, terima kasih untuk kesempatan ini. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama untuk segala kekurangan yang ada. NU dan Katolik bagi saya laksana sepasang paru-paru yang memberikan sumber pernapasan yang sehat bagi bangsa ini, agar tetap hidup dalam damai sejahtera. Sama-sama menjaga tradisi dan budaya, namun tetap terbuka bagi segala inovasi dan transformasi. Semoga kian menginspirasi kehidupan bersama.***

Antara Ungaran dan Tenjomoyo Semarang, 15 November 2017

Referensi

Muzadi, Abdul Muchtih. 2007. *NU dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran; Refleksi 65 Th. Ikut NU.* Khalista: Surabaya.

Muntaha AM, Ahmad. 2014. *Sejarah, Sikap Kemasyarakatan, dan Pandangan NU tentang Pancasila dan NKRI* dalam *https://aswajamuda.com/pandangan-nu-pancasila-nkri.*

Anam, Choirul. 2010. *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*. PT. Duta Aksara Mulia.

Bisri, A. Mustofa. 2008. *Membuka Pintu Langit*. Penerbit Buku Kompas: Jakarta.

Dhofier, Zamakhsyari. 2011. *Tradisi Pesantren, Studi Pandangan Hidup Kiai dan Visinya. Mengenai Masa Depan Indonesia*. LP3ES: Jakarta.

Misrawi, Zuhairi. 2007. *Alquran Kitab Toleransi, Inklusivisme, Pluralisme dan Multikulturalisme*. Penerbit Fitrah: Jakarta.

NU Setia Menjaga NKRI

Benny Susetyo

Saya mengenal Nahdlatul Ulama (NU) dari kedekatan saya terhadap sosok Gus Dur, tokoh yang sangat menghargai pluralisme dan kesatuan Indonesia. Terakhir sebelum berpulang, Gus Dur memesankan, "Fundamentalisme itu jangan dimusuhi, tetapi harus dicintai". Pesan itu jelas menunjukkan kecintaannya pada kesatuan Indonesia. Saya mengingat saat itu, tiga hari sebelum operasinya yang terakhir, Gus Dur masih telepon saya dan kami bercanda. Itulah kenangan terakhir saya terhadap Gus Dur.

Todung Mulya Lubis, melalui layanan pesan singkat yang beredar saat itu, menuliskan, "Kita kehilangan sosok Negarawan yang memperjuangkan pluralitas bangsa. Seorang yang berjuang untuk moderasi dan toleransi sosial, beragama, dan berbangsa. Gus Dur adalah pilar pluralisme dan benteng bangsa melawan fundamentalisme. Gus Dur adalah seorang demokrat sejati yang menghormati lawan politiknya" (*KOMPAS.com*-31/12/2009). Gus Dur adalah simbol kebersamaan dan toleransi. Kepergian Presiden RI periode 1999-2001 K.H. Abdurrahman Wahid tidak hanya kehilangan besar bagi Nahdlatul Ulama, tetapi juga bagi seluruh umat beragama dan bagi negeri ini.

Generasi yang mengalaminya akan mengakui bahwa sosok Gus Dur ibarat personifikasi dari Nahdlatul Ulama (NU), rahim dari mana eksistensi diri dan pemikirannya berasal dan sekaligus membesarkan gagasannya, tidak saja bagi kebesaran NU namun juga bagi negeri Indonesia, Tanah Air yang sangat dicintainya. Nahdlatul Ulama merupakan aset bangsa yang memiliki kontribusi begitu besar bagi pembangunan peradaban Indonesia dari masa

lampau hingga kini. Bagi kita, tak ada alasan untuk menolak NU sebagai bagian utama dari pilar keindonesiaan yang menggerakkan, mendorong, dan mengontrol Indonesia sebagai bangsa sekaligus menjadikannya sebagai rumah bersama.

Sudah jelas bahwa NU merupakan kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya. Pandangan keagamaannya menjadi pilar yang dapat mengukuhkan berdirinya bangsa ini. Tak melebih-lebihkan pula bila NU dalam sejarahnya yang panjang mampu berperan sebagai kekuatan sosial berbasis agama dengan visi kebangsaan yang kukuh. Salah satu momentumnya, saat tahun 1984 NU menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah final, dan Pancasila adalah Dasar Negara Indonesia. Realitas kesejarahan ini dapat dilihat sebagai suatu perkembangan yang tak ternilai harganya.

NU sebagai organisasi sosial kemasyarakatan berbasis keagamaan yang didirikan dalam kekukuhan tradisi masyarakat Indonesia ini bisa menjadi cermin kebangsaan kita. Cita-cita untuk menjadikan Indonesia sebagai rumah bersama membuat kalangan minoritas merasa nyaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sekaligus bekerja sama. Merawat keberagaman dan toleransi keagamaan merupakan pangkal pokok yang bisa kita lihat dari NU, bahkan kini menjadi sari pati gerakan kaum mudanya di berbagai daerah. Peran dan keterlibatan aktif NU menjadi garda depan gerakan itu hingga kini.

Kita sedang menghadapi kondisi dengan tantangan zaman yang tidak mudah. Atas semua itu, tantangan bangsa Indonesia ini sebagian besar juga merupakan tantangan NU sebagai pilar NKRI. Beragam tantangan harus kita hadapi, mulai dari kemiskinan, pengangguran, mengguritanya korupsi, radikalisme agama, terorisme, melebarnya intoleransi, pelemahan demokratisasi menghadapi propaganda populisme, merupakan isu-isu pokok kebangsaan kita hari ini yang membutuhkan sentuhan khusus

dengan dasar pandangan keberagaman sebagaimana menjadi karakter yang dimiliki NU.

Kondisi masyarakat yang sedang terancam berada dalam kondisi lemah di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan psikologis merupakan sasaran empuk bagi propaganda yang anti demokrasi dan anti keberagaman, sehingga bisa mengancam eksistensi NKRI. Jika begitu, risikonya akan semakin besar kemungkinan negeri ini menjadi arena perebutan antara kekuatan negara dan non-negara yang memiliki jejaring internasional. Ancaman akan lebih serius dan berbahaya apabila jejaring ideologi yang anti-Pancasila ini memiliki hubungan ideologis atau afinitas ideologis dengan kelompok-kelompok radikal yang tampaknya mulai berkembang subur setelah era keterbukaan media sosial.

Diperlukan suatu upaya bersama, dan di sinilah peran NU sebagai salah satu komponen moderat Islam sangat diperlukan untuk di barisan depan menghadapi persoalan ini dari sisi kemampuan menggelar *soft power* dalam rangka membangun wacana tandingan dan dalam kiprah melakukan deradikalisasi. Kiprah NU telah memberikan banyak bentuk penyebaran gagasan dan pemikiran moderat berupa penjelasan-penjelasan dan pelatihan-pelatihan sekitar pemahaman Islam yang menekankan prinsip-prinsip toleransi, keadilan, dan peningkatan kesadaran kebangsaan, dan juga memberikan aksi-aksi advokasi konkret di tengah masyarakat utamanya bagi kelompok minoritas.

Kiprah NU juga terlibat aktif dalam pemberantasan korupsi, pemberantasan kemiskinan, pengembangan ekonomi kerakyatan, peningkatan kualitas SDM dan sebagainya, yang pada hakikatnya dapat mewujudkan gagasan Islam sebagai "Rahmatan lil 'alamin". Gerakan moral yang dilakukan NU turut memberikan kontribusi untuk menciptakan Indonesia yang bersih dari korupsi. Pandangannya bahwa agama adalah kekuatan perdamaian yang utama serta keterlibatannya dalam membendung paham

radikalisme dan terorisme merupakan bagian kecil dari banyak kontribusi yang telah diberikan NU.

Dalam pengalaman bersama NU, Gerakan Moral Nasional perlu dibangkitkan dan perkuat lagi demi pemulihan kembali kesadaran hidup bermoral, beradab, bermartabat, yang pada akhirnya berusaha mengembalikan fungsi akal sehat dan hati nurani secara otonom. Gerakan ini bermaksud agar suara hati nurani bangsa ini kembali menuju jalan yang lurus. Hal ini disebabkan selama ini perjalanan bangsa terjebak pada hal-hal yang mekanis belaka, sehingga menyebabkan rakyat hanya dijadikan alat politik kekuasaan. Sebagai akibatnya, pemekaran kehidupan spiritualitas kurang dikedepankan dalam kehidupan publik. Tak jarang bahkan kehidupan agama dipakai sebagai jalan pintas bahkan alat politik untuk meraih posisi politik dengan mengorbankan kepentingan masyarakat bersama: kenyataan yang teramat ironis. NU mengajak seluruh masyarakat Indonesia perlu kembali memfungsikan akal sehat dan suara hatinya.

Suasana ruang publik yang hanya dipenuhi dengan aspek-aspek serba legal-formal itu pula yang telah menciptakan birokrasi dengan kinerja inefisien dan cenderung korup. Birokrasi menjadi terasing dari realitas kehidupan. Ia hanya "pura-pura" saja melayani rakyat. Masih ada jarak yang cukup jauh antara aparat dan rakyat. Situasi ini membuat kontrol rakyat terhadap birokrasi lemah. Akibatnya, banyak birokrat dan penguasa yang bertindak tanpa berpikir sehingga kian menggerus akal sehat dan nurani publik. Rakyat semakin jauh dari tanda politisi dan penguasa yang memiliki suara hati yang lurus dan tulus, yang tidak setengah-setengah lagi dalam menyelesaikan masalah dan membuat kebijakan publik yang memihak rakyat. Keprihatinan yang mendarah-daging dan seolah sulit untuk dilawan.

Kita tak menginginkan hukum di mata publik semakin rusak akibat hilangnya kewibawaan. Merosotnya norma hukum sebenarnya merupakan cermin dari hilangnya moralitas dalam

kehidupan publik. Orang yang bermoral adalah orang yang menjalankan hukum secara konsisten; orang yang taat pada apa yang digariskan dalam hukum. Inkonsistensi dalam menjalankan hukum menandakan adanya kematian moral. Tantangan-tantangan tersebut menjadi agenda pokok bagi kiprah dan eksistensi NU menjaga NKRI ke depan. Selanjutnya dalam konteks ini bagaimana peran NU tetap bisa menjadi garda depan dan mengajak semua komponen bangsa menjadi agen perubahan yang mampu menjadi pilar-pilar yang menyangga kehidupan bangsa ini, serta tetap menjaga roh pluralisme dan keindonesiaan.

Kita berharap NU mampu memainkan perannya menjadi kekuatan penyeimbang antara poros: agama dan pasar. Peran penyeimbang ini signifikan untuk menghindari semakin meruncingnya kutub fundamentalisme agama dan fundamentalisme pasar, yang mana keduanya merupakan ancaman serius bagi keberlangsungan negara-bangsa NKRI. Sosok kepemimpinan NU diharapkan mampu memperkuat posisi masyarakat *(civil society)* yang mampu membaca tanda-tanda zaman, sehingga masalah kemiskinan dan problematik ketimpangan tidak merugikan ruang publik dan mengancam hajat hidup orang banyak. NU diharapkan tetap bisa melestarikan berbagai fungsinya tersebut secara independen.

Orientasi NU yang menaruh respek tinggi terhadap nasib rakyat kecil yang terabaikan oleh kebijakan negara membutuhkan sentuhan khusus tertentu, dengan tetap menjaga jarak yang seimbang antara berbagai kekuatan politik yang ada. Roh NU sebagai gerakan jamiyah menunjukkan keberpihakannya pada masyarakat kecil di akar rumput. Di sinilah NU bisa menjadi katalisator gerakan perubahan di tingkat akar rumput, untuk menyeimbangkan kemandirian sosial dan ekonomi. Sebagai pilar NKRI, fokus utama untuk menumbuhkan dan menyinergikan beragam potensi kekuatan yang ada merupakan tantangan lain. Dan yang terakhir: tetap berada di garis depan dalam lingkup kerja sama lintas agama, yang diharapkan berdampak nyata bagi perbaikan kehidupan bangsa ini. Seperti pesan kuat dari Pengurus

Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam memperingati hari lahir ke-88 Nahdlatul Ulama (NU) dengan menggelar tasyakuran bertema "Setia Menjaga NKRI".

Konten Itu Kunci Memenangkan Persaingan

Mohamad Syafiq Alielha (Savic Ali)

Secara umum dalam lima tahun terakhir, perkembangan media di lingkungan NU cukup menggembirakan, dibandingkan 10 tahun yang lalu. Saat itu kita hanya punya koran Duta Masyarakat dan Majalah Aula yang oplahnya masih di bawah 20.000 eksemplar. Sampai sekarang pun oplahnya belum naik secara signifikan. Sebelumnya ada tabloid Warta NU yang oplahnya di atas itu. Tetapi masih jauh dari memadai jika melihat jumlah warga NU yang puluhan juta. Saat NU Online *(nu.or.id)* muncul pada 2003, nyaris berjalan sendiri. Namun dalam lima tahun terakhir ini ada perkembangan jumlah media di lingkungan NU dalam *platform* digital. Cukup banyak komunitas dan pesantren NU yang mengelola website.

Kehadiran website seperti Duta Islam, Arrahmah, Alif, yang menjangkau pembaca yang berbeda-beda, ini sangat menggembirakan. Saya sendiri membidik kalangan Muslim urban perkotaan dengan membuat situs islami.co. Bertambahnya web ini tentu saja diikuti kemunculan penulis-penulis muda yang lumayan produktif. Mereka punya kemampuan membaca persoalan dan situasi dengan cukup baik.

Dunia digital di Indonesia akan terus berkembang. Antara 2003-2009 pembaca NU Online perbulan masih kecil, sekitar belasan ribu. Saat ini mencapai 80.000-100.000 per hari. Dalam sebulan tak kurang dari 2 juta pengunjung yang mengakses. Ini perkembangan yang sekalipun berjalan lambat, tapi tetap menggembirakan. Untuk ukuran Ormas Islam, juga Ormas agama

di luar Islam, nu.or.id mempunyai jumlah pengunjung tertinggi. Bahkan jika dibandingkan web partai politik, masih belum terlewati.

NU Online juga berhasil menjadi dinamisator bagi lembaga-banom dan pengurus di lingkungan NU. Jika kegiatan atau pernyataan mereka muncul di NU Online yang dibaca oleh puluhan ribu pembaca, ini menjadi kebanggan tersendiri. NU Online sebagai media resmi PBNU tentu lebih banyak dirujuk oleh kalangan di luar NU dibandingkan website PWNU atau PCNU.

Saya mengikuti tahapan perjalanan NU Online ini sejak didirikan. Sejak dipimpin oleh Mas Abdul Mun'im DZ yang kalau baca email atau upload artikel masih dibantu oleh staf, tapi mempunyai kesadaran bahwa dunia digital ini penting dan harus dikuasai oleh anak-anak muda NU. Senior yang seperti Mas Mun'im ini semakin banyak jumlahnya dan membuka ruang bagi anak-anak muda untuk berkiprah. Grafik pembaca NU Online, sekalipun lambat, terus menaik dan tidak pernah turun. Untuk mencari penulis yang ahli pada kajian tertentu, sudah banyak pilihan, hanya membuat para ahli ini konsisten menulis, itu yang masih jadi tantangan karena menyangkut *reward*.

Berjalan Sendirian

Jika dibandingkan di antara website ormas keagamaan, NU Online memang sudah unggul dari sisi jumlah pembacanya. Dengan rata-rata 20-30 artikel per hari, NU Online memang menjadi media ormas paling aktif. Tetapi dari aspek pengelolaan yang lebih profesional, masih jauh dari ideal. Sebuah portal berita yang jumlah visitornya masih di bawah NU Online misalnya, punya karyawan 50 orang. Sementara NU Online dikelola hanya oleh 11 orang dengan 6 di antaranya sebagai redaktur. Untuk dapat bersaing lebih sehat, mau tidak mau harus ada penambahan SDM pengelola. Dengan tekonologi yang lebih mutakhir dan SDM yang

cukup, akan memudahkan NU Online memperbaiki konten, juga melempar isu atau gagasan tertentu.

Jika jumlah redaktur bisa bertambah, NU Online bisa mengunggah 50-an artikel per hari dengan prosentase 10 berita kegiatan internal dan sisanya tulisan tentang berbagai hal yang dibutuhkan oleh pembaca yang lebih luas. Informasi yang disajikan bersifat positif, dan variatif, bukan provokasi. Dengan komposisi semacam ini, hanya soal waktu NU Online akan mengungguli competitor yang lain.

Sayangnya, ketika sekarang website keislaman dikuasai oleh kelompok-kelompok radikal yang ingin mengganti dasar Negara, praktis NU Online sendirian menghadapi mereka. Kondisi ini tentu tidak sehat. Ketika di kehidupan nyata sering kali Bansernya GP Ansor sendirian menghadapi kelompok intoleran, di dunia maya pun demikian. Harus ada keasadaran dari ormas Islam dan non-Islam untuk bersama-sama bergerak memanfaatkan platform digital ini untuk memberikan keseimbangan dan ketenangan hidup umat/jama'ah.

Kekalahan NU Online dari web seperti Era Muslim, karena mereka memulai lebih dulu dan unggul secara konten, yakni materi kegamaan yang dibutuhkan oleh orang awam, seperti tata cara salat, berwudhu, berdoa segala, dan lain-lain hal yang praktis. Plus mereka juga menjadikan konteks provokatif yang memancing pembaca lebih banyak. Sementara pengelola NU Online membayangkan pengunjung webnya santri semua sehingga hal-hal ibadah praktis itu dianggap sudah khatam. Penyajian tulisan pun lebih "tertib" karena mencitrakan wajah PBNU. Secara umum, dari aspek teknologi, web-web provokatif itu tidaklah istimewa. Katakanlah pada sisi ini NU Online sudah bisa bersaing. Misalnya dalam memanfaatkan teknologi SEO. Pertarungannya ada pada konten.

Di sisi lain karena penjelajahan intelektual anak-anak muda NU yang tengah meluap-luap, membuatnya malas menulis materi-

materi simple semacam itu. Padahal tulisan-tulisan sederhana itu dibutuhkan oleh banyak sekali orang-orang awam dan Muslim perkotaan yang makin religius saat ini. Ada trend di mana banyak kelas menengah Indonesia itu menjadi lebih taat beribadah, dan NU Online terlambat merespon kebutuhan ini. Sementara portal-portal salafi lebih responsif untuk kebutuhan itu sehingga pada indeks *google*, mereka lebih baik untuk kata-kata kunci yang terkait ibadah. Hal lain yang membuat mereka unggul adalah judul atau konten yang bombastis, sesuatu yang tidak dilakukan oleh NU Online.

Belajar dari keunggulan kompetitor itu, NU Online berbenah dan menyajikan hal-hal terkait ibadah praktis. Responnya cukup baik. Peringkat web sedikit demi sedikit naik. Pembenahan juga dibarengi dengan penggarapan media sosial yang lebih intensif. Ada dua staf yang secara khusus menggawanginya. Di media sosial ini juga interaksi dengan pembaca dijalin lebih dekat. Page di Facebook sudah dipilih 1,9 juta penyuka dan sudah terverifikasi, 200 ribuan di twitter dan instagram. Ketiga medsos itu berhasil menjadi booster informasi NU Online. Secara teknis keamanan, web ini juga belum pernah *down* kecuali saat perbaikan internal.

Namun, webnya PBNU ini tidak bisa dibiarkan berjalan sendirian. Harus diikuti oleh ormas lain, juga partai politik, agar ada perimbangan. Pada isu-isu kenegaraan, web partai politik bisa lebih agresif memberikan edukasi pada pembaca. Karena di ruang medsos, admin NU Online tidak hanya melayani persoalan keagamaan, tetapi kerap kali terpaksa melayani pembaca yang menyerang perbedaan pilihan politik dan sistem pemerintahan, misalnya iu khilafah. Kalau admin medsos partai politik dapat lebih aktif, pengelola media keagamaan seperti NU Online bisa lebih fokus pada persoalan di luar politik.

Media yang Beragam

Dalam lima-sepuluh tahun ke depan, saya membayangkan di lingkungan NU akan tersedia cukup banyak media online: web, aplikasi, media sosial. Warga NU terdiri dari beragam umur dan sekarang semakin banyak jamaah *urban yang* selera bacanya berbeda dengan generasi sebelumnya. Jamaah *nahdliyin* sekarang tidak bisa dipandang sebagai masyarakat yang monolitik, melainkan lebih heterogen secara pemikiran dan gaya hidupnya. Tingkat *weltanschauung* antara yang masih tinggal di desa dan yang sudah di kota, begitu juga antara yang sepenuhnya belajar di pesantren salaf dengan santri yang sudah kuliah di luar negeri, ini berbeda. Corak *nahdiyin* yang kian beragam ini tidak bisa hanya diakomodasi oleh satu jenis portal. Kebutuhan informasi atau gagasan berbagai kelompok ini harus dilayani oleh beragam media yang sesuai dengan usia dan latar belakang tadi. Di tengah warga NU harus tumbuh media yang menyasar target pembaca yang lebih spesifik.

Dari sekitar 100 juta pengguna internet di Indonesia, belum diketahui secara pasti berapa persen warga NU di dalamnya. Menyaksikan pertumbuhan jumlah pengguna yang akan terus meningkat ini, jumlah pembaca itu besar sekali, segmentasi itu menjadi sangat penting. Media seperti NU Online tidak akan bisa menjangkau semua umur dan segmen. Misalnya saat ini NU Online dinilai sangat maskulin karena tulisan tentang keperempuanan masih sangat sedikit. Belum ada redaktur perempuan sekalipun NU mempunyai organ Muslimat, Fatayat dan IPPNU. Kelompok perempuan muda yang aktif di dunia online itu banyak sekali tapi belum ada portal perempuan untuk mereka.

Kendala lain, mencari redaktur perempuan itu tidak mudah. NU Online sudah membuka lowongan, mendorong komunitas penulis perempuan, memberikan pelatihan khusus penulis perempuan, dan upaya-upaya lain, tetapi hasilnya belum sesuai harapan. Secara umum memang penulis perempuan dari kalangan NU masih terlihat sedikit. Tetapi kita tidak boleh menyerah sebab

banyak hal seperti soal fikih perempuan, lebih tepat kalau ditulis oleh perempuan sendiri.

Fokus Remaja Milenial

Begitu juga portal untuk remaja generasi milenial belum tersedia. Padahal salah satu tantangan Indonesia ke depan adalah menguatnya gelombang ekstremisme keagamaan, termasuk di kalangan remaja. Sejumlah survei menunjukan kalangan remaja yang religius konservatif menyumbang angka 20% (Alvara Research Center). Mereka ini mendukung perjuangan dengan jihad (perang) dan setuju dengan ide khilafah. Angka ini sangat menghawartirkan karena dalam survei dua tahun lalu oleh Wahid Institute, prosentasinya jauh di bawah itu. Di sinilah tantangan bagi NU untuk bisa memenangi pertarungan media, terus-menerus mengedukasi generasi muda melalui berbagai platform digital yang khusus menyasar kalangan remaja ini.

Sebuah portal berita yang paling dicari di Indonesia saat ini, pembacanya berhenti di angka 3 juta per hari. Ini menunjukkan ada titik jenuh. Pembaca berusia 20 tahun ke bawah atau anak-anak milenial, tidak membuka situs berita ini. Hanya 3% saja dari 100-an juta pengguna internet. Jadi, ada celah yang masih sangat besar untuk digarap. Oleh sebab itu, segmentasi pembaca menjadi kunci, karena tidak akan ada satu situs pun yang bisa mengambil semua segmen pembaca.

Secara struktural, NU Online berada di bawah Lajnah Ta'li wa Nasyr (LTN) PBNU, tetapi membesarkan media ini dan mendistribusikan produksi konten menjadi tanggung jawab semua komponen NU. Salah satu ciri unik dari NU itu, yang membuatnya bertahan dan tetap besar sampai hari ini, tidak semua hal dikerjakan oleh pengurus resmi. Banyak aspek yang justru lebih efektif dikerjakan oleh komponen di luar struktur. Tiangnya NU itu tetap pesantren-pesantren yang non struktural itu. Tugas LTN itu bukan mengambil seluruh tanggung jawab bidang media tetapi

lebih mendorong terciptanya sebuah ekosistem yang membuat tumbuhnya media-media di lingkungan NU. Tugas NU Online bukan semata-mata membesarkan dirinya tetapi mendorong bagaimana komunitas-komunitas di lingkungan NU membuat dan mengembangkan media sendiri.

Contoh yang baik adalah kehadiran TV 9 dan Aswaja TV. Keduanya bukan lembaga di bawah KTN atau PBNU melainkan perusahaan media yang dikelola secara profesional. Tetapi semua pihak percaya bahwa kedua TV itu milik orang NU dan materinya juga selaras dengan visi dan misi NU. Ekosistem ini yang harus trus dibangun. Siapa pun yang bisa menulis dan punya komunitas lalu melahirkan web yang akan melengkapi NU Online. Ke depan sejumlah web ini dapat melakukan sindikasi konten dan tukar-menukar materi untuk meraih jumlah pembaca yang lebih besar lagi.

Alhamdulillah, perhatian dari PBNU sudah semakin baik dengan turunnya dana operasional bulanan. Dengan tambahan iklan dari sana-sini, semua staf NU Online sudah bisa digaji di atas UMR. Semangat pengabdian yang selama ini tertanam di antara kawan-kawan pengelola ini, semakin menguat dengan adanya imbalan yang relatif memadai ini. Target-target bisa diterapkan secara ketat dan menjadi perhatian penuh pengelola. Jika target tak tercapai akan berimbas pada pengurangan gaji bulanan. Ini menjadi suasana kerja baru dan menantang di NU Online.

Belajar dari Media Pro

Secara design teknologi mutakhir, NU Online relatif tertinggal. Berkaca dari media-media profesional. Perbaikan desain, tekonologi pendukung, fitur-fitur penting, merupakan keniscayaan. Kalau dahulu belum ada fitur video, sekarang fitur audio visual ini mutlak harus ada untuk menjangkau generasi sekarang yang lebih menyukai video. NU Online berusaha mengadaptasi berbagai perkembangan teknologi ini dengan memperhitungkan ribuan konten yang sudah

terarsipkan. Saat migrasi dilakukan, seluruh tulisan itu terbawa dan tidak ada yang keselip atau hilang.

Pengelolaan NU Online terus mengikuti perkembangan teknologi terbaru, seperti soal server. Jika sebelumnya mempunyai server sendiri yang biaya perawatan setiap bulannya cukup mahal, kini cukup dengan menyewa pada *cloud*. Selain ruangnya *unlimited* juga kemanan lebih terjamin.

Karena belum ada portal keislaman yang benar-benar kuat sehingga bisa dijadikan acuan secara teknologi dan konten, saya membayangkan NU Online itu bisa seperti *Huffington Post*. Ini media yang dibangun oleh tim kecil tetapi mengandalkan banyak kontributor dan kualifikasi yang bagus sehingga bisa menjadi portal yang terupdate dengan baik dengan konten yang juga berkualitas. Dari sisi kuantitas maupun kualitas itu seimbang sehingga bisa menjadi salah satu portal berpengaruh di Amerika Serikat. Jadi NU Online itu cukup dengan 15 redaktur tapi mempunyai jejaring penulis berbagai bidang kajian atau isu yang tak terbatas.

Gejala *Cyber Army*

Munculnya berbagai *cyber army* termasuk di kalangan NU merupakan gejala yang biasa saja. Selama tradisi menulisnya belum tumbuh sehat, para *cyber army* ini hanya akan menjadi *buzzer* atau *amplifier* saja, karena belum mampu memproduksi konten. Mereka ini ibarat kelompok penembak tapi tidak ada yang memproduksi peluru. Maka produksi *cyber army* ini harus dibarengi dengan menjaring para penulis, produsen konten yang akan dijadikan peluru mereka.

Para pengelola *cyber army* ini harus membangun komunikasi dengan komunitas atau kelompok studi yang ada di lingkungan NU. Mendorong mereka untuk secara rutin menulis. Untuk membuat mereka rutin itu diperlukan *reward* sebagai "modal" mereka mencari referensi atau melakukan riset. Pengalaman NU Online membuktikan produktivitas itu. Setelah ada insentif untuk para

kontributor, jumlah kiriman artikel dan berita meningkat. Ini sama saja dengan meminta orang menulis, kalau ada insentifnya pasti bisa lebih rutin. Kalau terus-menerus hanya meminta sumbangan tulisan, pasti tidak akan efektif.

Walhasil, tradisi menulis di lingkungan NU masih rendah. Fakta ini harus menjadi perhatian semua pihak. Tradisi lisan sambil minum kopi, *njagong*, ceramah, tetap lebih dominan. Untuk unggul di dunia digital ini memang masih butuh waktu, apalagi dunia online sekarang meniscayakan kecepatan dalam merespon segala hal. Dahulu menulis sekali sebulan di koran nasional sudah menjadikan seorang penulis sebagai intelektual yang cukup dikenal. Saat ini, gelombang informasi seperti air bah yang mengalir setiap saat, tak cukup lagi menulis sebulan sekali. Sementara untuk menulis satu artikel bagus setiap hari, tentu sangat melelahkan bagi penulis hebat mana pun. Maka NU harus bisa memanfaatkan jumlah jama'ah intelektualnya dalam tantangan produksi konten ini. Karena sehebat apa pun teknologi digital yang digunakan, persaingan utama tetaplah dalam penyajian konten. Konten adalah kunci memenangkan persaingan.

(Pewawancara: Iip Yahya)

Kata Penutup

Saya menyambut hangat kehadiran "kado" istimewa dari Penerbit PT Kanisius, yaitu buku berjudul "NU Penjaga NKRI" ini. Saya berterima kasih karena ada pihak non-NU dan non-Muslim yang mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh PBNU.

Buku kumpulan tulisan ini akan menjadi bacaan alternatif tentang NU bagi pembaca yang masih penasaran dengan keteguhan NU dalam mempertahankan eksistensi NKRI. Buku ini juga mengisi literatur terbaru tentang NU, karena sudah agak lama buku semacam ini tidak diterbitkan.

Dalam Anggaran Dasar Nahdaltul Ulama dinyatakan bahwa Nahdlatul Ulama itu beraqidah Islam menurut faham Ahlusunnah wal Jama'ah, dalam bidang aqidah mengikuti madzhab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi; dalam bidang fiqh mengikuti salah satu dari Madzhab Empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali); dan dalam bidang tasawuf mengikuti madzhab Imam al-Junaid al-Bagdadi dan Abu Hamid al-Ghazali. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, Nahdlatul Ulama berasas kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Nahdlatul Ulama adalah perkumpulan/*jam'iyyah diniyyah islamiyyah ijtima'iyyah* (organisasi sosial keagamaan Islam) untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, dan ketinggian harkat dan martabat manusia. Tujuan Nahdlatul Ulama adalah berlakunya ajaran Islam yang menganut faham *Ahlusunnah wal Jama'ah* untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan, kesejahteraan umat dan demi terciptanya rahmat bagi semesta.

Anggaran Dasar NU tersebut memuat kata-kata: kemasalatan masyarakat, kemajuan bangsa, ketinggian harkat dan martabat manusia, tatanan masyarakat yang berkeadilan, kemaslahatan dan kesejahteraan umat, serta rahmat bagi semesta. Kesemuanya bersifat universal. Secara prinsip NU memang menaungi semua pihak/golongan sebagaimana disimbolkan oleh bola dunia dalam lambangnya.

Maka ketika Banser tampil ke muka menjaga gereja, mengawal kegiatan yang diikuti oleh berbagai agama dan kepercayaan, menghadang kelompok yang ingin mengganti ideologi negara, membantu korban bencana, atau ikut menjaga ketertiban lalu-lintas, semua itu merupakan implementasi taat pada perintah ulama, yakni melaksanakan Anggaran Dasar NU.

Islam yang diamalkan oleh warga NU itu diwujudkan dalam pola beragama yang *tawassuth* (moderat), *tawazun* (keseimbangan), *i'tidal* (jalan tengah), dan *tasamuh* (toleran). Pola beragama tersebut menjadi landasan bagi terbangunnya tiga persaudaraan, yaitu antar sesama umat Islam *(ukhuwwah Islamiyyah)*, sesama warga bangsa *(ukhuwwan wathaniyyah)*, dan sesama manusia *(ukhuwwah basyariyah)*.

Untuk dapat mengamalkan empat pola beragama dan tiga persaudaraan itu, diperlukan kecerdasan dan kemauan untuk terus belajar menambah ilmu pengetahuan. Tanpa kecerdasan dan sikap rendah hati, maka seseorang akan berhati keras, sulit menerima kebenaran dari pihak lain, dan akhirnya menjadi radikal. Dari sikap radikal inilah muncul terorisme yang menihilkan kemanusiaan. Kurikulum pesantren NU tidak mengajarkan sikap radikal seperti itu. Para kiai membangun militansi santri dengan pendekatan tasawuf, selalu mengharapkan kebaikan untuk mereka dalam doa-doanya sehingga melahirkan santri yang mau terus belajar, rendah hati, dan menjadi berkah bagi masyarakat. Pola pendidikan pesantren semacam inilah yang melahirkan aktivis-aktivis NU yang militan dan siap berjuang dengan segala konsekuensinya.

Keteguhan sikap NU itu memang bukan tanpa resiko. Saya pribadi selaku Ketua Umum PBNU menjadi langganan di-*bully* di media sosial dalam berbagai bentuk dan cara. Ungkapan-ungkapan kasar, kotor, dan jauh dari nilai-nilai akhlak Islam, dilontarkan kepada saya dan kepada kiai-kiai NU yang lain. Termasuk menerima kado berupa buku ini dari Penerbit PT Kanisius, pasti ada resikonya. Tetapi semua itu tidak akan menghentikan laju perjuangan kami untuk ikut mengisi kemerdekaan Indonesia, menjaga keragaman warganya, agar cita-cita menuju tatanan masyarakat yang berkeadilan dapat terwujud.

Sekali lagi, saya sampaikan terima kasih. Teruslah bersuara untuk NKRI yang berdaulat, adil, dan makmur, melalui buku-buku yang mencerahkan umat.

Jakarta, 31 Januari 2018

KH. Prof. Dr. Said Aqil Siraj, MA

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

Profil Editor

Iip D. Yahya



lahir di Tasikmalaya, 17 Juli 1970, Pemimpin Redaksi nujabar.or.id, website PWNU Jawa Barat. Menyelesaikan pendidikan di sejumlah pesantren: Pesantren Krapyak, Yogyakarta 1986, Pesantren Tremas Pacitan, 1990, Pesantren Kauman & Kalibeber, Wonosobo, 1992. Pada 1995 memenangkan sayembara menulis dengan tema Merdeka yang diadakan oleh Radio Nederland Siaran Indonesia (RANESI) dalam rangka HUT RI ke-50. Pada Januari-April 2004, berkesempatan menjadi Visiting Scholar di University of Michigan Ann Arbor, dan selama 2011-2015 menjadi Visiting Researcher di Perpustakaan Universitas Monash, Australia. Karya tulis yang sudah dipublikasikan antara lain: Footsteps of Indonesians in Victoria (Jejak Langkah Orang Indonesia di Victoria), Editor, IKAWIRIA, Victoria, Australia (2015), Eyes for Sumba, Foria.co. Melbourne (2012), Ngalogat di Pesantren Sunda: Menghadirkan yang Dimangkirkan, dalam Sadur, Sejarah Terjemahan di Indonesia dan Malaysia, EFEO Perancis & KPG (2009), Ajengan jeung Santrina, Pasantren Salafiyah di Jawa Barat, Puspawarna, Bandung (2008), Ajengan Cipasung: Biografi KH. Moh. Ilyas Ruhiat, LKiS Yogyakarta (2006), Picture book Asia-Afrika: Masa Lalu, Kini dan Masa Depan, Departemen Luar Negeri RI (2005), Romo Mangun Sahabat Kaum Duafa, Penerbit Kanisius Yogyakarta (2005), Mengadili Menteri Memeriksa Perwira: Jaksa Agung Soeprapto dan Penegakan Hukum di Indonesia 1950-1959, Gramedia Pustaka Utama Jakarta (2004), Gus Dur Berbeda itu Asyik, Kanisius Yogyakarta (2004). Email: *iip.d.yahya@gmail.com*

Profil Para Penulis


Dok. NU Online

K Ng H Agus Sunyoto

Pengasuh Pesantren Global Tarbiyyatul Arifin Malang; Pengajar Tamu pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya Malang; Ketua PP Lesbumi PBNU.

Muhammad Jadul Maula



Pengasuh Pesantren Kaliopak, Yogyakarta. Salah seorang pendiri Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKiS). Alumni jurusan Bahasa dan Sastra Arab IAIN Sunan Kalijaga yang menekuni budaya dan sejarah Jawa. Wakil Ketua Pengurus Pusat Lembaga Seni Budaya Muslim (Lesbumi). Bersama M Imam Aziz menerjemahkan buku Between Modernity and Postmodernity, The Islamic Left and Dr. Hasan Hanafi's Thought: a Critical Reading karya Kazuo Shimogaky (Kiri Islam antara Modernisme dan Posmodernisme: Telaah Kritis Pemikiran Hassan Hanafi). Buku yang diterbitkan oleh LKiS pertama kali pada 1993 itu merupakah salah satu buku terlaris yang hingga 2007 masuk cetakan ketujuh.

Dok. Perwara



Zuly Qodir

Zuly Qodir adalah seorang sosiolog FISIPOL UMY. Direktur Sekolah Politik Ahmad Syafii Maarif Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

K.H. Husein Muhammad



K.H. Husein Muhammad lahir di Cirebon, 9 Mei 1953. Setelah menyelesaikan pendidikan di Pesantren Lirboyo, Kediri (1973) melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi Ilmu al-Quran Jakarta. Kemudian melanjutkan belajar ke Al-Azhar, Kairo, Mesir. Saat ini ia mengasuh pesantren Darut Tauhid di ARajawinangun Cirebon. Ia ikut mendirikan sejumlah lembaga swadaya masyarakat untuk isu-isu Hak-hak Perempuan, antara lain Rahima, Puan Amal Hayati, Fahmina Institute dan Alimat. Mantan Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan ini pada 2008 mendirikan Perguruan Tinggi Institute Studi Islam Fahmina di Cirebon. Ia penulis yang cukup produktif. Salah satu bukunya yang banyak digunakan sebagai referensi aktivis perempuan adalah Fiqh Perempuan, Refleksi Kiyai atas Wacana Agama dan Gender (2001). Karyanya yang lain adalah Islam Agama Ramah Perempuan (2004), Ijtihad Kiyai Husein Upaya Membangun Keadilan Gender (2011), Fiqh Seksualitas: Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas (2011), Mengaji Pluralisme Kepada Maha Guru Pencerahan (2011), Sang Zahid: Mengarungi Sufisme Gus Dur (2012), Gus Dur dalam Obrolan Gus Mus (2016), Menyusuri Jalan Cahaya (2016). Pada 2006 ia Menerima award

dari Pemerintah AS untuk Heroes To End Modern-Day Slavery. Namanya juga tercatat dalam The 500 Most Influential Muslims yang diterbitkan oleh The Royal Islamic Strategic Studies Center, tahun 2010, 2011-2012.



Franz Magnis-Suseno

Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno SJ, rohaniwan, guru besar emeritus Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara di Jakarta, lahir 1936 di Jerman, hidup di Indonesia sejak 1961, sejak 1977 WNI, belajar filsafat, teologi dan teori politik di Pullach, Yogyakarta dan München; ditahbiskan menjadi imam tahun 1967 di Yogyakarta, doktorat dalam filsafat 1973 dari Universitas München. 2002 ia menerima gelar doktor honoris causae dalam bidang teologi dari Universitas Luzern di Swiss. Ia juga pernah mengajar di Universitas Indonesia dan di Universitas Katolik Parahyangan Bandung dan menjadi dosen tamu di beberapa perguruan tinggi di Eropa. Ia aktif dalam berbagai forum antaragama dan terlibat dalam pencarian etika kehidupan bangsa untuk abad ke-21. Pada tahun 2015 ia menerima Bintang Mahaputra Utama dari Presiden R.I. Ia telah menulis 38 buku dan lebih dari 700 karangan populer dan ilmiah, terutama di bidang filsafat ketuhanan, etika, filsafat politik dan alam pikiran Jawa, di antaranya: Etika Jawa. Buku terbarunya berjudul "Katolik Itu Apa?" (Kanisius, 2017).

Amin Mudzakkir



Amin Mudzakkir adalah seorang peneliti di Pusat Penelitian Sumber Daya Regional-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2SDR-LIPI). Ia menyelesaikan S-1 di Jurusan Sejarah FIB UGM dan S-2 di Program Pascasarjana STF Driyarkara. Mudzakkir sekarang sedang menyelesaikan program doktor di STF Driyarkara. Minat kajiannya meliputi isu-isu politik identitas dan Islam. Bisa dihubungi di: *aminlipi@gmail.com*.



Susi Ivvaty

Susi Ivvaty sejak SD hingga SMA mengaji setiap ba'da maghrib di Pesantren Zaidatul Maarif Parakan Temanggung. Sewaktu kuliah di UGM Yogyakarta, sempat mondok di Pesantren Al-Muhsin Krapyak Yogyakarta, meski tidak tamat. Pernah menjadi wartawan Harian Bernas Yogyakarta (setahun) dan Harian Kompas Jakarta (16 tahun). Saat ini tengah membangun webblog alid.id dengan narasi Berkesilaman dalam Kebudayaan.

Luqman Harits Dimyathi



Luqman Harits Dimyathi lahir di Pacitan, 19 April 1969. Tumbuh dan berkembang di lingkungan Pesantren Tremas Pacitan. Selepas menempuh pendidikan menengah di MA Tremas, ia berkeliling dari satu pesantren ke pesantren lain. Aktivitas organisasinya

dimulai dari kepengurusan GP Ansor Pacitan, Wakil Rais Syuriyah PCNU Pacitan, Wakil Ketua PWNU Jawa Timur, dan sekarang Katib Syuriyah PBNU (2015-2020). Gus Luqman, demikian panggilan akrabnya, merupakan salah seorang kiai yang ikut aktif memperjuangkan pengakuan ijazah pesantren agar setara dengan pendidikan umum (muádalah). Lewat aktivitasnya itulah ia didaulat menjadi Sekretaris Forum Komunikasi Pesantren Mu'adalah se-Indonesia. Selain itu ia juga tercatat sebagai anggota Lembaga Pengembangan Pendidikan Diniyah Jatim. Saat ini Gus Luqman menjadi salah seorang pengasuh Pesantren Tremas, Mudir Ma'had Aly Attarmasi, dan Koordinator Nasional Gerakan Ayo Mondok.


Dok. NU Online

Abdul Ghofarrozin

Pengasuh Pesantren Maslakul Huda Kajen, Pati, ini akrab disapa Gus Rozin. Lahir pada 31 Juli 1976, putra (Alm) K.H. MA Sahal Mahfudh ini, menjadi Ketua Pengurus Pusat Rabithah Ma'ahid al-Islamy (RMI, Asosiasi Pesantren NU periode 2015-2020), setelah sebelumnya menjabat sebagai Ketua PW RMI Jawa Tengah. Lulusan Master bidang pendidikan dari Monash University ini tercatat sebagai Komisaris Utama BPR Artha Huda Abadi dan Rektor Institut Pesantren Mathaliul Falah.

M. Nova Burhanuddin, Lc.



M. Nova Burhanuddin lahir di kota Soto Lamongan, 9 November 1987. Setelah menempuh pendidikan dasar dan ngaji di kampung halamannya, ia pergi mondok ke

Pesantren Hidayatul Quran asuhan Kyai Ali Fikri. Beliau seorang alumnus senior Pesantren Ilmu Al-Quran asuhan KH. Bashori Alwi. Ia juga bersekolah formal di SMPI lalu MA Almaarif Singosari Malang. Enam tahun menimba ilmu di Singosari, Nova memutuskan berangkat ke Mesir untuk melanjutkan jenjang pendidikan tinggi di Universitas Al-Azhar Kairo. Kini sampai jenjang program Magister spesialisasi Akidah-Filsafat di universitas yang sama. Selama di Mesir, Nova aktif menulis di berbagai media dan berdiskusi di Lakpesdam dan LBM PCINU Mesir dan sudah menerbitkan dua buku antologi Ushul Fiqih dan Maqashid Syariah. Periode 2016-2018, Nova diberi amanah menjadi A'wan Syuriyah PCINU Mesir. Sambil aktif mengaji ke para Syaikh Al-Azhar, Nova juga terus membimbing kawan-kawan di Lakpesdam, LBM, dan beberapa kelompok belajar. Bisa dihubungi via *nov987@gmail.com*.



Ahmad Khoirul Umam, Ph.D

Ahmad Khoirul Umam, PhD adalah Wakil Ketua Tanfidz Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama Australia-New Zealand (PCI NU ANZ). Umam, sapaan akrabnya, juga tercatat sebagai Staf Pengajar tidak tetap (Casual Teaching Staff) di Indonesian Studies Program di University of Queensland, Australia dan juga Dosen Tetap di Paramadina Post-Graduate School of Diplomacy, Universitas Parmadina, Jakarta. Umam memperoleh gelar Ph.D dari School of Political Science and International Studies, The University of Queensland (2017). Jika gelar Master didapatkan dari Flinders University of South Australia (2010), maka gelar Sarjananya di peroleh dari Jurusan Pidana dan Politik Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang dan juga Flinders University of South Australia (Graduate Diploma program). Artikel terbaru Umam segera dimuat di Journal of

Contemporary Asia (level A) dengan judul "Addressing Corruption in Post-Soeharto Democratic Indonesia: Strength and Weaknesses of the Corruption Eradication Commission (KPK)". Catatan: Sebagian kecil dari materi dalam tulisan ini pernah dimuat di artikel berjudul 'Wajah Damai Minoritas Islam di Australia' yang dimuat di buku yang ditulis Sumanto Al Qurtuby, Berguru ke Kiai Bule: Serba Serbi Kehidupan Santri di Barat, Mizan, Bandung, 2012.

Ali Amin



Pengurus PCINU Jepang 2015-2018. Mahasiswa S3 bidang International Studies Waseda University Tokyo



Zacky Khairul-Umam

Pernah aktif sebagai ketua Tanfidz NU Jerman pada 2014-2017. Kini berkhidmat sebagai wakil katib Syuriah dan kandidat doktor dalam bidang Sejarah dan Pemikiran Islam di Freie Universitaet Berlin, Jerman. Tulisan populernya belakangan ini diterbitkan terutama di Kompas dan The Jakarta Post.

Trisno S. Sutanto



Trisno S. Sutanto, aktivis lintas-iman. Lahir di Purwokerto, 1962, pernah kuliah di STF Driyarkara. Mendirikan MADIA (Masyarakat Dialog Antar-Agama) 1995. Menjadi Koordinator Penelitian PGI (2012 - 2016), fasilitator SPK (Sekolah Pengelolaan Keragaman) CRCS-UGM dan editor opini satuharapan.com. Kini sebagai peneliti dan penulis lepas.



Dr. Neng Dara Afifah

Neng Dara Affifah lahir di Pandeglang, Banten, 10 Desember 1969. Dosen Tetap Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) program sosiologi dan humaniora. Dosen Tidak Tetap Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Konsultan The Asia Foundation (TAF) untuk hak-hak konstitusional perempuan (2017), Dewan Pengarah World Culture Forum (WCF) Kemendikbud-Unesco (2016); Komisioner Komnas Perempuan untuk Sub-Komisi Pendidikan, Partisipasi Masyarakat dan Resource Centre pada periode 2010 – 2014; Komisioner dan Ketua Sub Komisi Pendidikan dan Litbang di lembaga yang sama untuk periode 2007 –2009. Ia turut membidani berdirinya organisasi Alimat, gerakan perempuan untuk perubahan hukum keluarga Indonesia. Pada 2005-2010, ia salah satu Ketua Pucuk Pimpinan Fatayat NU bidang Litbang dan Penerbitan, dan pada 2000 – 2005 sebagai pengurus Bidang Hukum dan Advokasi di organisasi massa yang sama. Ia kini aktif sebagai pengurus di Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama Pusat, PBNU (2015-2020). Ia menulis dan

menyunting sejumlah buku, diantaranya Potret Perempuan Muslim Progresif Indonesia (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Desember 2017); Islam, Kepemimpinan Perempuan, dan Seksualitas (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Desember 2017); Rekam Juang Komnas Perempuan: 16 Tahun Menghapus Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan, 2014); Seksualitas dan Demokrasi: Kasus Perdebatan UU Pornografi di Indonesia (Komnas Perempuan, 2011); Muslimah Feminis: Penjelajahan Multi Identitas (2009); Gerakan Islam Indonesia Pasca Orde Baru: Merambah Dimensi Baru Islam (2006) dan Menapak Jejak Fatayat NU: Sejarah Gerakan, Pengalaman dan Pemikiran (2005).

Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid



Dok. NU Online

Biasa disapa Alissa Wahid. Aktivis sosial dan keagamaan. Selain menjadi Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian, sebuah organisasi yang didirikan untuk memelihara semangat dan pemikiran Gus Dur, ia juga mengelola Pojok Gus Dur di PBNU, dan Abdurrahman Wahid Center for Interfaith Dialogue and Peace di Universitas Indonesia. Alissa menyelesaikan studi psikologi di Universitas Gadjah Mada. Selain sebagai psikolog keluarga, ia juga mengelola Fastrack Funschool, pusat pendidikan anak usia dini di Yogyakarta. Pemikiran aktualnya bisa diikuti melalui akun twitter *@AlissaWahid*.



M. Imam Aziz

Ketua PBNU kelahiran Pati, 1962. Islamic Fair of Indonesia (IFI) menobatkannya sebagai tokoh multikultural pada 18 Desember 2011. Penghargaan tersebut disematkan karena ia mendirikan dan mengembangkan Lembaga Kajian Islam (LKiS) pada 1993 di Yogyakarta, yang mengembangkan wacana keislaman transformatif dan toleran, melalui penerbitan buku. M. Imam Aziz mengembangkan wacana baru dan kritis di kalangan kaum muda dan remaja Islam dan komunitas pesantren hingga ke pelosok-pelosok desa dengan membuat program buku yang harganya terjangkau oleh masyarakat kelas menengah ke bawah. Pada 2003 ia mendapatkan Ashoka Fellowship. Dan pada April 2015, ia diganjar penghargaan bergengsi dari sebuah lembaga di Korea Selatan, The Jeju 4.3 Peace Award Special Prize karena pembelaannya pada kelompok minoritas dan tertindas.

Yaqut Cholil Qoumas



Yaqut Cholil Quomas atau lebih dikenal sebagai Gus Yaqut lahir di Rembang, 4 Januari 1975. Setelah menamatkan sekolah menengah di Rembang, ia melanjutkan studi di jurusan sosiologi Universitas Indonesia. Gus Yaqut tumbuh dan berkembang di lingkungan keluarga pesantren dan NU. Saat kuliah ia merintis Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Depok. Karier politiknya dimulai dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Rembang (2001-2014). Pada tahun 2005-2010, ia terpilih menjadi Wakil Bupati Rembang mendampingi Mochamad Salim. Karier politiknya terus melejit

hingga menduduki kursi DPR RI (2014-2019). Saat ini ia menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Pemuda (PP GP) Ansor periode 2015-2020. Sebelumnya ia menjabat sebagai salah satu Ketua PP GP Ansor (2011-2015).



Hairus Salim HS (Haisa)

Hairus Salim adalah pengurus Yayasan Tikar Seni Budaya Nusantara Bandung, antara lain menerbitkan majalah Gong, Deputi Direktur Yayasan LKiS, dan Direktur Gading Publishing Yogyakarta. Meneliti dan menulis masalah-masalah agama, kebudayaan. Sesekali ia diminta mengajar secara "luar biasa" di Universitas Sanata Dharma, Atma Jaya, dan UGM. Ia juga menulis, menyunting dan menerjemahkan sejumlah buku. Buku-bukunya antara lain: *Demokrasi dalam Pasungan: Politik Perizinan di Indonesia* (Bersama Angger Jati Wijaya, 1996), *Kultur Hibrida: Anak Muda NU di Jalur Kultural* (Editor bersama Muhammad Ridwan, 1999), *Tujuh Mesin Pendulang Suara* (Bersama Uzair Fauzan, 1999), *Kelompok Paramiliter NU* (2004), *Politik Ruang Publik Sekolah: Negosiasi dan Resistensi di Sekolah Menengah Umum Negeri di Yogyakarta* (2011).

Aloys Budi Purnomo



Rm. Aloys Budi Purnomo Pr, M.Hum, Lic. Th, rohaniwan, Pemred Majalah INSPIRASI, Lentera yang Membebaskan (sejak Agustus 2004), Ketua Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Keuskupan Agung Semarang (sejak 1 Mei 2008), Wakil Ketua FKUB

Jateng, Kepala Campus Ministry Unika Soegijapranata Semarang. Ia aktif dalam berbagai gerakan seni, budaya dan forum kerukunan baik lokal maupun nasional. Musim Panas Tahun 2011 mendapat beasiswa dari Boston University mengikuti International Summer School on Religion and Public Life di Sovia and Plovdiv University of Bulgary. Pernah mengajar di Fakultas Teologi Wedabakti Yogyakarta, Universita Atma Jaya Jogyakarta, dan Pertapaan St. Maria Rawaseneng, Temanggung. Pernah bertugas sebagai Staf dan Rektor Seminari Tinggi St. Petrus Pematangsiantar, Sumatra Utara (2000-2004). Aktif menulis, sedikitnya menulis 85 buku di berbagai penerbit (Kanisius, Gramedia, Bina Media, Dioma, INSPIRASI). Bukunya berisi tema teologi, spiritualitas dan sosial-politik (salah satunya: Rakyat (Bukan) Tumbal Kekerasan dan Kekuasaan Gramedia). Buku terbarunya: UntukMu Indonesia - Doa Seorang Imam (INSPIRASI, 2017). Hobi bermain saksofon, menggubah lagu dan album rohani (sudah 7 album).



Benny Susetyo

Romo Antonius Benny Susetyo Pr, atau yang akrab disapa Romo Benny. Ia adalah seorang pastor dan aktivis penggerak kesadaran manusia, dengan berbasiskan pada kemerdekaan dan kesetaraan. Kiprahnya dalam dialog lintas agama dan pembangunan demokrasi membawanya menjadi Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Agama dan Kepercayaan (HAK) Konferensi Waligereja Indonesia, serta mendirikan Setara Institute (Institute for Democracy and Peace). Ia juga dikenal aktif di Forum Kajian Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Indonesia (FKDHI), Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKAUB) serta, bersama Sandyawan, di Forum Kemanusiaan, dan Gerakan Moral Nasional.

Mohamad Syafi' Alielha (Savic Ali)



Mohamad Syafi' Alielha (Savic Ali) lahir di Pati, 21 Nopember 1974. Menempuh pendidikan di Pesantren Mathali'ul Falah Kajen Pati, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan Filsafat Sosial Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta. Hampir seluruh kariernya difokuskan pada dunia jurnalistik. Ia terlibat sebagai reporter atau redaktur sejumlah media di lingkungan NU, antara lain Sekretaris Lembaga Ta'lif wan Nasr NU (Lembaga Pengkajian dan Penerbitan, 2015-2020), Direktur NU Online (Situs Resmi Nahdlatul Ulama, 2015-2020), Pemimpin Redaksi NU Online (2010-2015), dan Founder & Editor *www.islami.co* (2013-2017). Di luar itu ia pernah menjadi Editor-in-Chief VOICE+ Magazine (2012-2014). Sebagai selingan, Savic menyukai buku, musik, *travelling*, dan sepakbola.

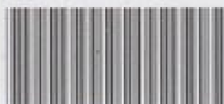
NU
PENJAGA
NKRI

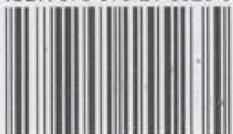
K. Ng. H. Agus Sunyoto,
M. Jadul Maula,
Zuly Qodir,
Franz Magnis-Suseno,
K.H. Husein Muhammad,
K.H. Luqman Harits Dimyathi,
K.H. Abdul Gofharrozin,
Susi Ivvaty,
M. Nova Burhanuddin,
Ahmad Khoirul Umam,
Ali Amin,
Zacky Khairul-Umam,
Trisno S. Sutanto,
Neng Dara Affiah,
Alissa Wahid,
M. Imam Azis,
Amin Mudzzakir,
H. Yaqut Cholil Qoumas,
Hairus Salim H.S.,
Aloys Budi Purnomo,
Benny Susetyo,
Mohamad Syafiq Alielha

Buku ini diniatkan untuk melihat kembali perjalanan NU secara lebih santai, melihat berbagai capaian intelektual para aktivisnya, dan menengok juga perkembangan NU secara global. Buku ini diharapkan menjadi bahan *refreshing* sejenak, menyegarkan kembali pemahaman pembaca tentang NU. Sudah cukup lama rasanya belum terbit lagi kompilasi tulisan tentang NU. Saat muncul pertanyaan dari saudara-saudari non-Muslim, "Mengapa NU begitu spartan mempertahankan NKRI?" belum tersedia bacaan yang dapat menjawabnya secara utuh. Pada dasarnya kumpulan tulisan dalam buku ini hendak menjelaskan bahwa sikap tegas NU dalam mempertahankan NKRI tidaklah muncul tiba-tiba, melainkan sudah sejak dari asal mula kelahirannya. Ajaran Islam yang kemudian melahirkan NU adalah ajaran yang mampu beradaptasi dengan lokalitas.


PENERBIT PT KANISIUS
Jl. Cempaka 9, Deresan, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta 55281

ISBN 978-979-21-5523-5


1018002015


9 789792 155235